

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL

MEMORANDUM NOMOR 18/ITJ.1/TU.210/I/2025

Yth. : Inspektur Jenderal
Dari : Inspektur I
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Inspektorat I Tahun 2024
Lampiran : Satu Berkas
Tanggal : 20 Januari 2025

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2024, Inspektorat I telah melakukan Pengukuran Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan pengawasan terhadap mitra kerja. Adapun capaian kinerja yang diperoleh Inspektorat I berada pada level “Baik” atau nilai capaian organisasi sebesar 107,47%, secara rinci kami sampaikan Laporan Kinerja Inspektorat I Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian yang dapat disampaikan dan mohon arahan lebih lanjut.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Teuku Nilwan

Tembusan:
Sekretaris Inspektorat Jenderal

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024



INSPEKTORAT I
INSPEKTORAT JENDERAL
Kementerian Kelautan dan Perikanan



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 ini disusun sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja Tahun 2024 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat I dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan intern selama Tahun Anggaran 2024. Laporan ini disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan selaku pemberi mandat atas kinerja yang harus dicapai secara tahunan maupun pada akhir periode jangka menengah. Lebih lanjut, informasi kinerja dalam laporan ini berfungsi sebagai pengendalian dalam rangka pencapaian kinerja Inspektorat I dan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja kedepan.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal Inspektorat I, atas kerja samanya selama ini dalam mendukung pelaksanaan program kerja Inspektorat I selama Tahun 2024. Masukan dan kritikan yang membangun sangat diharapkan untuk peningkatan kualitas kinerja pengawasan intern. Akhir kata, semoga laporan ini bermanfaat bagi pengelolaan dan peningkatan kinerja Inspektorat I khususnya, dan Inspektorat Jenderal KKP.

Januari, Januari 2025
Inspektur I



Ditandatangani
Secara Elektronik

Teuku Nilwan

IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana kinerja Inspektorat I difokuskan untuk mendukung kinerja Inspektorat Jenderal KKP dan diimplementasikan kedalam sasaran kinerja pada setiap tahunnya. Sasaran Kinerja Inspektorat I mengacu kepada 3 (tiga) hal, yaitu SK.01 “Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah lingkup Mitra Inspektorat I”, SK.02 “Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Efektif lingkup Inspektorat I” dan SK.03 “Dukungan Manajemen Pengawasan yang Akuntabel lingkup Inspektorat I”.

Dapat disampaikan bahwa pada Triwulan II Tahun 2024 telah dilakukan revisi dokumen Perjanjian Kinerja untuk perubahan Indikator Kinerja “Unit Kerja Mitra Inspektorat I Berpredikat WBK” dikarenakan adanya pergantian mitra kerja berdasarkan Permen KP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP. Selain hal tersebut, terdapat indikator kinerja yaitu “Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mitra Inspektorat I” yang tidak dilakukan pengukuran di Tahun 2024 dikarenakan sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor: 938/SJ.1/RC.610/XI/2023, tanggal 1 November 2023, tentang Hasil Pembahasan Indikator Kinerja (IK) Manajerial, telah disepakati bahwa Indikator Kinerja PMPRB tidak lagi dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja unit kerja. Hal ini dilakukan sehubungan dengan ditetapkannya Revisi *Road Map* Reformasi Birokrasi (RB) KKP Tahun 2020-2024 pada bulan November 2023 yang telah memuat 25 indikator pembentuk RB General sehingga Indikator Kinerja PMPRB tidak perlu lagi untuk dicantumkan.

Capaian kinerja Inspektorat I sampai dengan posisi 31 Desember 2024, sebanyak 3 Sasaran Kinerja (SK) dengan 13 Indikator Kinerja (IK) telah diukur melalui aplikasi pengelolaan kinerja KKP (kinerjaku.kkp.go.id) dengan skor capaian kinerja organisasi Tahun 2024 sebesar **107,47%** atau berada pada level “**Baik**”. Namun nilai capaian kinerja organisasi Tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mengalami penurunan dimana capaian nilai kinerja organisasi Tahun 2023 sebesar 108,31% berada pada level “**Baik**”, meskipun demikian capaian kinerja organisasi Tahun 2024 masih sama dengan Tahun 2023 yaitu berada pada level “**Baik**”. Capaian kinerja organisasi Tahun 2024 didukung dari capaian masing-masing indikator kinerja, dimana dari 13 IK yang ditetapkan sebanyak 10 IK mendapatkan capaian yang melebihi dari target dan sebanyak 3 IK tercapai sesuai target.

Capaian kinerja Inspektorat I selama Tahun 2024 dalam mendukung kinerja Inspektorat Jenderal KKP antara lain : 1) Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I mencapai nilai 0,07% dari target $\leq 0,5\%$; 2) Tingkat Maturitas SPIP Mitra

Inspektorat I pada mencapai nilai 3,683 dari target 3,3; 3) Unit Kerja Mitra Inspektorat I Berpredikat Menuju WBK (kumulatif) tercapai 14 unit dari target 13 unit kerja; 4) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat I mencapai nilai "A" (88,53) dari target A (83); 5) Tingkat Efektivitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup Mitra Inspektorat I mencapai nilai 89,92% dari target 82%; 6) Tingkat Efektivitas Pengawasan terhadap Pengelolaan BMN lingkup Mitra Inspektorat I mencapai nilai 87,75% dari target 82%; 7) Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Mitra Inspektorat I mencapai nilai 90,95% dari target 82%; 8) Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat I mencapai nilai 97,07% dari target 80%; 9) Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat I mencapai 4 rekomendasi dari target 4 rekomendasi kebijakan; 10) Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan lingkup Mitra Inspektorat I mencapai 100% dari target 89%; 11) Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat I mencapai 100% dari target 80%; 12) Tingkat Kepatuhan Terhadap Penganggaran dan Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat I telah mencapai 100% dari target 100% dan; 13) Terkelolanya Anggaran secara Tertib dan Akuntabel lingkup Inspektorat I telah mencapai 100% dari target 100%. Secara keseluruhan capaian kinerja Inspektorat I Tahun 2024 berada pada level baik dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan, namun demikian perlu tetap dilakukan perbaikan-perbaikan di masa datang agar dapat meningkatkan capaian kinerja organisasi.

Dari sisi kinerja anggaran, dapat disampaikan bahwa pagu anggaran Inspektorat I Tahun 2024 adalah sebesar Rp6.292.347.000,00 namun terdapat pagu blokir AA dan penghematan jenis belanja perjalanan dinas, sehingga pagu efektif yang dikelola dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Inspektorat I sebesar Rp5.801.222.000,00. Capaian realisasi anggaran Inspektorat I hingga 31 Desember 2024 sebesar Rp5.801.067.065,00 atau 99,99% dari pagu anggaran efektif. Penggunaan sumber daya anggaran ini dapat dinilai cukup efisien karena dengan input anggaran yang lebih kecil yaitu 99,99% dapat dihasilkan kinerja yang melebihi target atau nilai kinerja organisasi sebesar 107,47% pada level "Baik" sehingga efisiensi anggaran yang dapat dihasilkan mencapai 7,48%. Efisiensi anggaran ini dapat dicapai melalui penerapan pengawasan berbasis risiko sehingga pengawasan Itjen lebih tepat sasaran, penggabungan beberapa pengawasan pada mitra kerja untuk menghindari pelaksanaan pengawasan yang bertubi-tubi dan pemanfaatan teknologi informasi pada pelaksanaan pengawasan. Pencapaian kinerja Inspektorat I juga tidak luput dari dukungan Sumber Daya Manusia Inspektorat I yang cukup memadai sebanyak 25 Auditor dan 6 staf TU dengan latar belakang pendidikan SMA/Diploma III/Sarjana Muda, Diploma IV/S1 dan S2.



Pencapaian kinerja Inspektorat I Tahun 2024 merupakan hasil dari berbagai kegiatan pengawasan dan berbagai upaya peningkatan kualitas pengawasan intern pada mitra Inspektorat I yang difokuskan kepada pengawasan akuntabilitas kinerja dan keuangan, pengelolaan BMN, penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa, kegiatan strategis/ bantuan pemerintah, tindak lanjut rekomendasi atas temuan Itjen dan BPK, pembangunan zona integritas dan sistem pengendalian internal serta kegiatan manajerial. Dalam rangka perbaikan kinerja dimasa yang akan datang diperlukan komitmen Pimpinan dan seluruh pegawai Inspektorat I untuk selalu melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja Tahun 2024 dan melakukan perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yang ditemukan melalui inovasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM.....	2
C. TUGAS DAN FUNGSI.....	2
D. AGENDA INSPEKTORAT JENDERAL.....	3
E. SUMBER DAYA	4
F. DASAR PENGUKURAN KINERJA	5
G. TUJUAN PENGUKURAN KINERJA	5
H. RUANG LINGKUP	5
I. WAKTU PENGUKURAN KINERJA.....	6
J. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA	6
K. SISTEMATIKA LAPORAN	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	7
A. RENCANA STRATEGIS KKP DAN ITJEN KKP TAHUN 2020-2024.....	7
1. Visi KKP dan Itjen KKP	7
2. Misi Itjen KKP	8
3. Tujuan Itjen KKP	8
4. Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja Itjen dan Inspektorat I.....	9
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	9
C. PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT I TAHUN 2024.....	10
D. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN INSPEKTORAT I TAHUN 2024	11
E. RENCANA AKSI PENCAPAIAN IKU	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
A. PENGELOLAAN KINERJA INSPEKTORAT I.....	15
B. CAPAIAN KINERJA	15
1. SK.01 Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah lingkup Mitra Inspektorat I	18
2. SK.02 Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Efektif lingkup Inspektorat I	26



3. SK.03 Dukungan Manajemen Pengawasan yang Akuntabel lingkup Inspektorat I	39
C. ANALISIS PENGELOLAAN SUMBERDAYA ANGGARAN.....	43
1. Realisasi Anggaran Kegiatan	43
2. Realisasi Anggaran Sasaran Kinerja.....	45
3. Analisis Kualitas Pelaksanaan Anggaran.....	46
D. REALISASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN SASARAN KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA	48
BAB IV PENUTUP	49
A. KESIMPULAN	49
B. PERMASALAHAN.....	50
C. LANGKAH PERBAIKAN	50
LAMPIRAN	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi Sumber Daya Manuasia Inspektorat I Tahun 2024.....	4
Tabel 2. Sasaran Kinerja Inspektorat Jenderal dan Inspektorat I Tahun 2024.....	9
Tabel 3. Penetapan Kinerja Inspektrat I Tahun 2024	10
Tabel 4. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Inspektorat I Tahun 2024	13
Tabel 5. Rentang Penilaian Capaian Kinerja	15
Tabel 6. Capaian Kinerja Inspektorat I Tahun 2020 - 2024	16
Tabel 7. Capaian Kinerja Inspektorat I Tahun 2024	17
Tabel 8. Capaian Sasaran Kinerja Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah (SK.01) Tahun 2024.....	18
Tabel 9. Perbandingan Capaian IK-1 Tahun 2023 dan 2024	20
Tabel 10. Perkembangan Capaian IK-1 Tahun 2020 - 2024	20
Tabel 11. Perbandingan Capaian IK-2 Tahun 2023 dengan Tahun 2024	21
Tabel 12. Perkembangan Capaian IK-2 Tahun 2020-2024	22
Tabel 13. Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM lingkup Mitra Inspektorat I	23
Tabel 14. Perbandingan Realisasi IK-3 Tahun 2023 dan 2024	24
Tabel 15. Perkembangan Capaian IK-3 Tahun 2020 - 2024	24
Tabel 16. Perbandingan Capaian IK-4 Tahun 2023 dan 2024	26
Tabel 17. Perkembangan Capaian IK-4 Tahun 2020 - 2024	26
Tabel 18. Capaian Sasaran Kinerja (SK.02) Tahun 2024.....	27
Tabel 19. Target dan Realisasi IK-5 Tahun 2024	28
Tabel 20. Perbandingan Capaian IK-5 Tahun 2023 dan 2024	28
Tabel 21. Perkembangan Capaian IK-5 Tahun 2020 - 2024	29
Tabel 22. Target dan Realisasi IK-6 Tahun 2024	30
Tabel 23. Perbandingan Target dan Realisasi IK-6 Tahun 2023 dan 2024.....	30
Tabel 24. Perkembangan Capaian IK-6 Tahun 2020 - 2024	30
Tabel 25. Target dan Realisais IK-7 Tahun 2024	31
Tabel 26. Perbandingan Target dan Realisasi IK-7 Tahun 2023 dan 2024.....	32
Tabel 27. Perkembangan Capaian IK-7 Tahun 2020 - 2024	32
Tabel 28. Target dan Realisasi IK-8 Tahun 2024	33
Tabel 29. Perbandingan Target dan Realisasi IK-8 Tahun 2023 dan 2024.....	33
Tabel 30. Perkembangan Capaian IK-8 Tahun 2020 - 2024	34
Tabel 31. Target dan Realisais IK-9 Tahun 2024	35
Tabel 32. Perbandingan Target dan Realisasi IK-9 Tahun 2023 dan 2024.....	35
Tabel 33. Perkembangan Capaian IK-9 Tahun 2020 - 2024	36



Tabel 34. Target dan Realisasi IK-10 Tahun 2024	37
Tabel 35. Perbandingan Target dan Realisasi IK-10 Tahun 2023 dan 2024.....	37
Tabel 36. Perkembangan Capaian IK-10 Tahun 2020 -2024	37
Tabel 37. Target dan Realisasi IK-11 Tahun 2024	38
Tabel 38. Perbandingan Target dan Realisasi IK-11 Tahun 2023 dan 2024.....	39
Tabel 39. Perkembangan Capaian IK-11 Tahun 2020 - 2024	39
Tabel 40. Capaian Sasaran Kinerja (SK.03) Tahun 2024.....	40
Tabel 41. Target dan Realisasi IK-12 Tahun 2024	40
Tabel 42. Perbandingan Target dan Realisasi IK-12 Tahun 2023 dan 2024.....	41
Tabel 43. Perkembangan Capaian IK-12 Tahun 2020 – 2024	41
Tabel 44. Target dan Realisasi IK-13 Tahun 2024	42
Tabel 45. Perbandingan Target dan Realisasi IK-13 Tahun 2023 dan 2024.....	43
Tabel 46. Perkembangan Capaian IK-13 Tahun 2020 - 2024	43
Tabel 47. Realsiasi Anggaran Inspektorat I Tahun 2024.....	44
Tabel 48. Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat I TA 2020-2024.....	45
Tabel 49. Pagu dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Kinerja Inspektorat I Tahun 2024	45
Tabel 50. Efisiensi Anggaran Inspektorat I Tahun 2024 per Jenis Capaian Kinerja.....	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat I Tahun 2024	4
Gambar 2. Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Inspektorat I Tahun 2024	16

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kementerian/Lembaga pemerintahan memiliki kewajiban untuk mendukung penuh sistem pemerintahan yang akuntabel, terukur, jelas dan dapat dipercaya untuk mencapai pengelolaan yang bertanggung jawab. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya, meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk memperoleh informasi kinerja penting yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan perbaikan akuntabilitas kinerja.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang mengharuskan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya prinsip akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi, serta Peraturan Menteri KP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Inspektorat I sebagai salah satu unit pelaksana kinerja Itjen KKP telah menyusun program/kegiatan dalam rangka mendukung terlaksananya program Reformasi Birokrasi dan mengawal Program Ekonomi Biru yang merupakan program andalan dengan memberikan

keyakinan atas pencapaian tujuan sekaligus memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap adanya potensi penyimpangan/kecurangan. Untuk mengetahui keberhasilan dari program/kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan Inspektorat I melakukan pengukuran secara periodik sebagai tindakan evaluasi terhadap perkembangan capaian kinerja, selanjutnya akan dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan atau aksi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran kinerja yang telah ditentukan.

B. DASAR HUKUM

Inspektorat I melaksanakan tugas dan fungsi, antara lain berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana program, pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil dan pelaporan hasil pengawasan intern pada Sekretariat Jenderal (Setjen), Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL), Pusat Data Statistik dan Informasi (Pusdatin), Pusat Kebijakan Strategis serta pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PKRL dan Pusdatin. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern pada Setjen, Ditjen PKRL, Pusdatin, Pusat Kebijakan Strategis dan UPT lingkup Ditjen PKRL serta Pusdatin;
2. Penyusunan rencana program pengawasan intern pada Setjen, Ditjen PKRL, Pusdatin, Pusat Kebijakan Strategis dan UPT lingkup Ditjen PKRL serta Pusdatin;
3. Pelaksanaan pengawasan intern pada Setjen, Ditjen PKRL, Pusdatin, Pusat Kebijakan Strategis dan UPT lingkup Ditjen PKRL serta Pusdatin;



4. Terhadap kinerja, keuangan dan non keuangan melalui kegiatan Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
5. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern pada Setjen, Ditjen PKRL, Pusdatin, Pusat Kebijakan Strategis dan UPT lingkup Ditjen PKRL serta Pusdatin;
6. Pelaporan hasil pengawasan intern pada pada Setjen, Ditjen PKRL, Pusdatin, Pusat Kebijakan Strategis dan UPT lingkup Ditjen PKRL serta Pusdatin;
7. Pengawasan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
8. Pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat I.

D. AGENDA INSPEKTORAT JENDERAL

Salah satu agenda pembangunan nasional adalah perbaikan tata kelola pemerintahan. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi isu yang penting dalam konteks nasional dan internasional. Wujud dari perbaikan tata kelola pemerintahan ini antara lain penurunan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan publik, dan pengurangan ekonomi biaya tinggi. Tantangan di masa mendatang, perlu upaya yang lebih keras dan sistematis untuk memperbaiki praktik tata kelola pemerintahan, sehingga diperlukan pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berperan untuk mengawal dan memastikan berjalannya proses Reformasi Birokrasi dan Program Ekonomi Biru dengan memberikan keyakinan terhadap pencapaian tujuan organisasi dan bebas dari penyimpangan melalui pelaksanaan pengawasan dengan pendekatan atas hasil penilaian risiko dan pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu menganalisis perkembangan pelaksanaan kegiatan mitra kerja. Selanjutnya berdasarkan kebijakan tersebut, Inspektorat I menyusun program pengawasan terhadap capaian kinerja, keuangan, non keuangan, manajerial, pengadaan barang/jasa, kegiatan strategis dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal pada Setjen, Ditjen PKRL, Pusdatin, Pusat Kebijakan Strategis dan UPT lingkup Ditjen PKRL serta Pusdatin.



E. SUMBER DAYA

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat I didukung oleh sejumlah sumber daya dengan gambaran sebagai berikut:

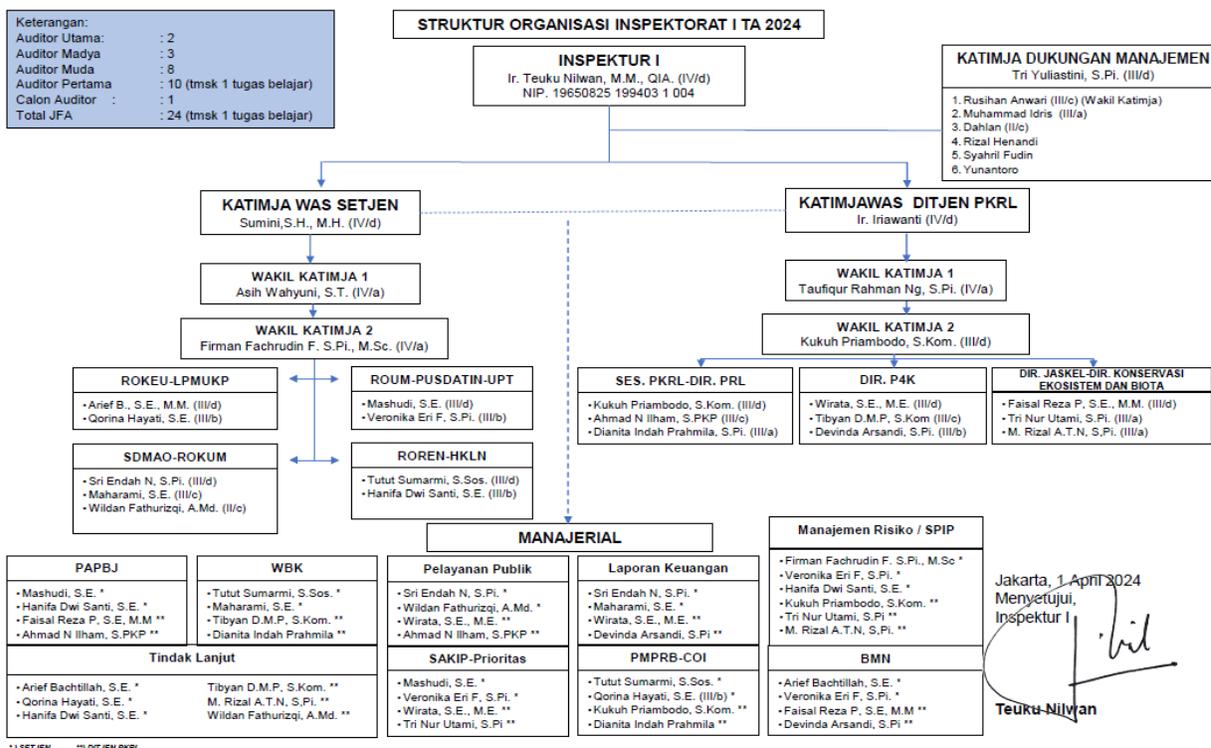
1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Inspektorat I pada Tahun 2024 sebanyak 33 orang, namun terdapat 1 (satu) pegawai yang sedang melaksanakan Tugas Belajar, rincian pegawai Inspektorat I tersaji pada tabel berikut:

Tabel 1. Komposisi Sumber Daya Manusia Inspektorat I Tahun 2024

Jabatan	Jumlah
Inspektur I	1 orang
Auditor Utama	2 orang
Auditor Madya	3 orang
Auditor Muda	9 orang
Auditor Pertama/Auditor Pelaksana	11 orang
Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial	1 orang
Perencana Muda	1 orang
Pengelola Persuratan	1 orang
Pengelola Keuangan	1 orang
Arsiparis Terampil	1 orang
Tenaga kontrak	2 orang
Jumlah	33 orang

Adapun struktur organisasi Inspektorat I Tahun 2024 sebagaimana gambar berikut





2. Anggaran

Dari sisi keuangan Inspektorat I pada Tahun 2024 didukung anggaran sebesar Rp5.801.222.000,00 yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan dan dukungan operasional pengawasan.

F. DASAR PENGUKURAN KINERJA

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.7/ PERMEN-KP /2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi.
5. Peraturan Menteri KP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 Nomor SP DIPA- 032.02.0/2024 tanggal 24 November 2023.

G. TUJUAN PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja bertujuan untuk:

1. Menilai capaian kinerja yang telah dicapai Inspektorat I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 dan capaian atas target jangka menengah sesuai yang tercantum dalam dokumen penetapan kinerja;
2. Menilai capaian upaya untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama sebagai bahan masukan untuk perbaikan kinerja Inspektorat I.

H. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengukuran kinerja mencakup pengukuran terhadap dokumen Penetapan Kinerja Inspektorat I dan Perjanjian Kinerja Level 2 Tahun 2024 yang disepakati Inspektur I dengan Inspektur Jenderal KKP.



I. WAKTU PENGUKURAN KINERJA

1. Periode yang dinilai : Januari s.d. Desember 2024
2. Waktu pelaksanaan penilaian : Desember 2024

J. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan:

1. Pengukuran atas Sasaran Kinerja Inspektorat I berdasarkan Penetapan Kinerja Inspektorat I Tahun 2024.
2. Pengukuran atas Rencana Aksi Pencapaian IKU Inspektorat I Tahun 2024.

K. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyusunan laporan meliputi: 1) Pendahuluan yang mencakup latar belakang, program kerja pengawasan tahunan, tugas dan fungsi, sumber daya, dasar dan tujuan, ruang lingkup, waktu dan metodologi pengukuran kinerja; 2) Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mencakup Renstra Itjen KKP, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Rencana Aksi Pencapaian IKU; 3) Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 yang berisi mengenai pengelolaan kinerja Inspektorat I, Capaian Kinerja Tahun 2024, dan Analisis Sumber Daya Anggaran; dan 4) Penutup yang merupakan kesimpulan dari isi laporan serta saran untuk perbaikan kinerja.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KKP DAN ITJEN KKP TAHUN 2020 - 2024

Rencana Strategis KKP mengalami beberapa perubahan disesuaikan perkembangan dunia global dan dinamika organisasi. Penyusunan Rancangan Renstra KKP 2020-2024 menjadi dasar bagi unit Eselon I dibawahnya untuk melakukan penajaman terkait dengan Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sejalan dengan diterapkannya pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) di lingkungan KKP.

Adapun Visi-Misi KKP berdasarkan Rancangan Renstra 2020-2024 dan turunannya pada Itjen KKP sebagai bagian dari unit Eselon I dibawahnya dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Visi KKP dan Itjen KKP

Visi KKP adalah keadaan yang ingin dicapai oleh KKP selama 5 (lima) tahun yang merupakan perwujudan dari Visi Presiden yang menggambarkan secara menyeluruh mengenai peranan dan fungsi KKP adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”

Dari visi tersebut, kemudian dijabarkan kedalam misi yang dilaksanakan selama periode 2020-2024, KKP menjalankan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional;
- c. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui pengelolaan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya melalui Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas.

Berdasarkan Visi dan Misi KKP tersebut, kemudian diturunkan menjadi Visi Misi Inspektorat Jenderal KKP sebagai berikut:

“Terwujudnya KKP yang Berintegritas dan Akuntabel dalam Mewujudkan Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”

Dari Visi tersebut kemudian dijabarkan kedalam misi yang dilaksanakan di lingkungan KKP untuk mendorong pencapaian kinerja organisasi, peran Itjen yang dituntut bisa memberikan jaminan atas pencapaian tujuan dan peringatan dini terhadap pelaksanaan program/kegiatan KKP perlu menyusun misi yang mengakomodir fungsi Itjen sebagai *quality assurance* dan *advisory service*.

2. Misi Itjen KKP

Misi Itjen KKP dirancang sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Itjen KKP adalah:

- a. ***Memberikan Pengawasan Terbaik untuk Peningkatan Kinerja KKP;***
- b. ***Mendorong Pengendalian Intern yang Efektif terhadap Sistem dan Tata Kelola KKP;***
- c. ***Mendorong Terwujudnya Sumber Daya Aparatur KKP yang Berintegritas dan Berorientasi Pelayanan Prima.***

Dalam misi tersebut, semakin jelas komitmen Itjen dalam mengawal pelaksanaan program-program KKP demi meningkatkan kinerja KKP yang memiliki visi Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan.

3. Tujuan Itjen KKP

Tujuan strategis merupakan penjabaran operasional dari Visi yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Itjen. Adapun tujuan strategis Itjen KKP adalah:

- a. ***Terwujudnya Kinerja KKP yang Efektif dan Efisien;***
- b. ***Terciptanya Suatu Sistem dan Tata Kelola KKP yang Baik;***
- c. ***Terwujudnya Budaya Integritas di lingkungan KKP.***

Tujuan yang ingin diwujudkan melalui peran Itjen melalui pelaksanaan pengawasan internal. Keberhasilan capaian tujuan tersebut diindikasikan dengan capaian Sasaran Strategis dan indikator kinerja yang dibagi atau diturunkan ke masing-masing unit kerja lingkup Itjen sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja Itjen dan Inspektorat I

Sebagai bagian dari unit kerja lingkup KKP, Inspektorat Jenderal harus mendukung sasaran strategis pada tingkat Kementerian. Sasaran Kinerja lingkup Itjen merupakan mendukung capaian kinerja level kementerian (level 0). Selanjutnya, hal tersebut di-*cascading* ke level dibawahnya dan di-*alignment* antar Inspektorat I-V dan Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Secara keseluruhan, Inspektorat Jenderal memiliki 2 (dua) Sasaran Kinerja dan Inspektorat I memiliki 3 (tiga) Sasaran Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Inspektorat I Tahun 2024 seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Sasaran Kinerja Inspektorat Jenderal dan Inspektorat I Tahun 2024

Sasaran Kinerja Inspektorat Jenderal KKP	
1	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah lingkup KKP
2	Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Efektif
Sasaran Kinerja Inspektorat I	
1	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah lingkup Mitra Inspektorat I
2	Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Efektif lingkup Mitra Inspektorat I
3	Dukungan Manajemen Pengawasan yang Akuntabel lingkup Inspektorat I

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai wujud pelaksanaan Program Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP pada Tahun 2024, Inspektorat I melaksanakan kegiatan Pengawasan Intern pada Mitra dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.801.222.000,00 (pagu efektif) dengan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut antara lain:

1. Pengawasan Intern Mitra Inspektorat I dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.631.305.000,00 terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.772.191.000,00;
 - b. Pengawasan Akuntabilitas Non Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp859.114.000,00;
2. Dukungan Operasional Pengawasan pada Mitra Inspektorat I dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.596.393.000,00;
3. Pengawasan Kegiatan Prioritas/Strategis Mitra Inspektorat I dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.573.524.000,00.

C. PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT I TAHUN 2024

Sebagai penjabaran dari sasaran kinerja Itjen, Inspektorat I selaku unit pelaksana pengawasan internal dengan mitra kerja Setjen dan Ditjen PKRL mendapatkan tanggung jawab untuk mewujudkan Sasaran Kinerja sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya dan telah ditetapkan target pada masing-masing Indikator Kinerja, hal ini tertuang dalam Penetapan Kinerja berbentuk Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat I Tahun 2024 sebagaimana disampaikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Penetapan Kinerja Inspektorat I Tahun 2024 (Revisi)

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah lingkup Mitra Inspektorat I	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I (%)	≤ 0,5
		2	Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat I (Nilai)	3,3
		3	Unit Kerja Mitra Inspektorat I Berpredikat Menuju WBK (jumlah akumulasi)	13 Unit
		4	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat I (Nilai)	83 (A)
2	Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Efektif lingkup Inspektorat I	5	Tingkat Efektivitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup Mitra Inspektorat I (%)	82
		6	Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN lingkup Mitra Inspektorat I (%)	82
		7	Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Mitra Inspektorat I (%)	82
		8	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat I (%)	80
		9	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat I (Rekomendasi)	4
		10	Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan lingkup Inspektorat I (%)	89
		11	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat I (%)	80
3	Dukungan Manajemen Pengawasan yang Akuntabel lingkup Inspektorat I	12	Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat I (%)	100
		13	Terkelolanya Anggaran Kegiatan secara Tertib dan Akuntabel lingkup Inspektorat I (%)	100

Dapat disampaikan bahwa pada Tahun 2023 telah dilakukan revisi dokumen Perjanjian Kinerja untuk perubahan Indikator Kinerja PMPRB. Sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor: 938/SJ.1/RC.610/XI/2023, tanggal 1 November 2023, tentang Hasil Pembahasan Indikator Kinerja (IK) Manajerial, telah disepakati bahwa Indikator Kinerja

PMPRB tidak lagi dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja unit kerja. Hal ini dilakukan sehubungan dengan ditetapkannya Revisi *Road Map* Reformasi Birokrasi (RB) KKP Tahun 2020-2024 pada bulan November 2023 yang telah memuat 25 indikator pembentuk RB General, sehingga Indikator Kinerja PMPRB tidak perlu lagi untuk dicantumkan. Selain hal tersebut, pada Triwulan II Tahun 2024 juga terdapat perubahan target pada Perjanjian Kinerja dikarenakan adanya perubahan mitra kerja lingkup Inspektorat I berdasarkan Permen KP Nomor 5 Tahun 2024.

D. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN INSPEKTORAT I TAHUN 2024

Inspektorat I melalui pelaksanaan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP pada Tahun 2024 melaksanakan kegiatan pengawasan antara lain sebagai berikut:

1. Pengawasan kinerja pembangunan kelautan dan Perikanan
 - a. Audit Kinerja terhadap unit kerja/ satuan kerja/unit pelaksana teknis mitra Inspektorat I;
 - b. Evaluasi Pengelolaan PNPB lingkup mitra Inspektorat I;
 - c. Evaluasi Tata Kelola Perizinan Sektor KP lingkup mitra Inspektorat I;
2. Pengawasan kegiatan prioritas KKP;
Probity Audit/Reviu/Evaluasi/Pemantauan atas Kegiatan Prioritas KKP/ *Blue Economy* Tahun 2024 lingkup mitra Inspektorat I;
3. Pengawasan mandatori
 - a. Reviu Laporan Keuangan lingkup mitra Inspektorat I;
 - b. Reviu Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP mitra Inspektorat I;
 - c. Evaluasi Pelayanan Publik mitra Inspektorat I;
 - d. Evaluasi Implementasi SAKIP mitra Inspektorat I;
 - e. Reviu RKA-K/L terhadap Pagu Indikatif dan Definitif Tahun 2025 mitra Inspektorat I;
 - f. Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ mitra Inspektorat I;
 - g. Pemantauan Implementasi Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) mitra Inspektorat I;
 - h. Reviu RKBMN Tahun 2025 mitra Inspektorat I;
 - i. Reviu Laporan Kinerja (Lkj) mitra Inspektorat I;
 - j. Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan mitra Inspektorat I;
 - k. Reviu Pengelolaan Kas dan Barang Persediaan mitra Inspektorat I.



4. Pengawasan dengan tujuan tertentu/tematik
 - a. Evaluasi Kepegawaian;
 - b. Evaluasi Pemanfaatan BMN;
 - c. Evaluasi Implementasi Manajemen Risiko Tahun 2024 dan Asistensi MR Tahun 2025 mitra Inspektorat I;
 - d. Reviu Manajemen Risiko Tahun 2025 mitra Inspektorat I;
 - e. Penilaian Efektivitas Pengelolaan BMN mitra Inspektorat I;
 - f. Penilaian Efektivitas Pelaksanaan PBJ mitra Inspektorat I;
 - g. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mitra Inspektorat I;
 - h. Telaah Sejawat Internal;
 - i. Pengawasan Tematik lainnya;
5. Pengawasan pembangunan budaya integritas
 - a. Asistensi/Pemantauan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM mitra Inspektorat I.

E. RENCANA AKSI PENCAPAIAN IKU

Untuk mencapai sasaran kinerja sesuai target yang ditetapkan, diperlukan perencanaan kinerja yang matang dan terukur. Inspektorat I telah menyusun sebuah Rencana Aksi Kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan untuk memberikan informasi dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian sasaran kinerja. Rencana Aksi Kinerja ini memberi informasi mengenai jenis dan waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan untuk mengetahui sejauhmana hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menuju pencapaian sasaran kinerja. Dengan adanya Rencana Aksi diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat terarah dan terukur, perlu diketahui terdapat perubahan Rencana Aksi Tahun 2024 dikarenakan adanya pergantian mitra kerja lingkup Inspektorat I. Rincian Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Inspektorat I Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Satuan	Target				Jumlah 2024
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I (%)	≤0,5	1 Reviu terhadap laporan keuangan Mitra Inspektorat I	Kegiatan	2		2		4
			2 Reviu PA dan PBJ Mitra Inspektorat I	Kegiatan	2	2	2	2	8
			3 Pelaksanaan Audit Kinerja pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan	1	2	1	2	6
			4 Evaluasi Kinerja pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan	1	1			2
			5 Probitiy Audit Persiapan/Perencanaan/Pelaksanaan pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan	1	2	3	2	8
			6 Pemantauan Kinerja PMO Hibah JICA	Kegiatan		1	1		2
			7 Evaluasi PNBK pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan		3	4		7
			8 Pemantauan Kinerja BLU di LPMUKP	Kegiatan			1		1
			9 Reviu RKA-K/L Tahun Pagu Indikatif 2025 pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan			2		2
			10 Reviu RKA-K/L Pagu Definitif pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan					2
			11 Reviu PIPK Mitra Inspektorat I	Kegiatan					2
2	Tingkat Maturitas Implementasi SPI Mitra Inspektorat I (Nilai)	3,3	12 Reviu Maturitas Penyelenggaraan SPIP 2023 pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan		2			2
			13 Evaluasi Implementasi Manajemen Risiko 2023 pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan		2			2
			14 Reviu MR Mitra Inspektorat I tahun 2025	Kegiatan				2	2
3	Unit kerja Mitra Inspektorat I berpredikat menuju WBK (jumlah akumulasi)	20 Unit	15 Asistensi Pembangunan ZI Menuju WBK pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan		2			2
			16 Pemantauan Pembangunan ZI Menuju WBK pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan	7	2	3		12
4	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat I (Nilai)	82,5 (A)	17 Reviu Laporan Kinerja pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan	2				2
			18 Evaluasi Implementasi SAKIP 2024 pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan			2		2
5	Tingkat efektifitas pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Mitra Inspektorat I (%)	82	19 Pemantauan Kinerja Sistem Informasi Terintegrasi dan Persiapan Implementasi Nano Satelit pada Pusdatin	Kegiatan		1			1
			20 Evaluasi Dukungan Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan			2		2
			21 Evaluasi Pelayanan Publik pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan		3	6		9
			22 Pengawasan Persiapan Kampung Nelayan Modern pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan		1	1		2
			23 Reviu Peta Jalan Ekonomi Biru Perluasan Kawasan Konservasi Laut	Kegiatan		1			1
			24 Reviu Peta Jalan Ekonomi Biru Pengelolaan Sampah Plastik di Laut	Kegiatan		1			1
			25 Reviu Peta Jalan Ekonomi Biru Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kegiatan		1			1
			26 Pemantauan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	Kegiatan		1			1

			27 Pemantauan Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap Penanggulangan Dampak Pencemaran (dalam rangka BCL)	Kegiatan		1			1
			28 Pemantauan Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik di Laut	Kegiatan			1		1
			29 Evaluasi Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem				1		1
			30 Evaluasi Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah KKP Tahun 2023	Kegiatan			1		1
6	Tingkat efektifitas pengawasan pengelolaan BMN lingkup Mitra Inspektorat I	82	31 Evaluasi Pengelolaan BMN pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan			1		1
			32 Pemantauan Implementasi Program P3DN	Kegiatan		2			2
			33 Reviu RKBMN 2026 pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan			2		2
			34 Penilaian Efektivitas Pengawasan Pelaksanaan BMN pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan				2	2
7	Tingkat efektifitas pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Mitra Inspektorat I	82	35 Penilaian Efektivitas Pengawasan Pelaksanaan PBJ pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan				2	2
8	Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Mitra Inspektorat I (%)	80	36 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan	2	2	2	2	8
9	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan lingkup Mitra Inspektorat I (rekomendasi)	4	37 Kajian/Evaluasi/Riviu Kebijakan lingkup mitra	Kegiatan		2		2	4
10	Prosentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standard mutu pengawasan Inspektorat I (%)	89	38 Telaah Sejawat Inspektorat Jenderal KKP (Internal)	Kegiatan		1			1
			39 Evaluasi Pengendalian Mutu Pengawasan	Kegiatan		1		1	2
11	Prosentase tingkat kepatuhan pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat I (%)	80	40 Monitoring Pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat	Kegiatan	1	1	1	1	4
			41 Evaluasi Pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat	Kegiatan		1		1	2
12	Tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan kinerja lingkup Inspektorat I (%)	100	42 Pengisian data capaian kinerja pada aplikasi pengelolaan kinerja KKP	Kegiatan	1	1	1	1	4
			43 Pengukuran Capaian Kinerja	Kegiatan	1	1	1	1	4
			44 Pelaporan Kinerja Interim	Kegiatan	1	1	1	1	4
			45 Pelaporan Kinerja Tahunan	Kegiatan				1	1
			46 Penyusunan Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	Kegiatan		1		1	2
13	Terkelolanya anggaran kegiatan secara tertib dan akuntabel lingkup Inspektorat I (%)	100	47 Pengisian aplikasi e-monev Bappenas	Kegiatan	3	3	3	3	12
			48 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran lingkup Inspektorat	Kegiatan	3	3	3	3	12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGELOLAAN KINERJA INSPEKTORAT I

Pengelolaan kinerja merupakan sebuah sistem manajemen yang dilakukan organisasi dalam mencapai sasaran kinerja yang diharapkan. Pengelolaan data kinerja mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan. Penetapan Kinerja tersebut berisi informasi sasaran kinerja beserta indikator dan target yang akan dicapai pada Tahun 2024.

Pengukuran dilakukan oleh Tim Pengelola Kinerja Inspektorat I dengan tahapan awal yaitu pengumpulan data kinerja, kemudian mengukur, dan mengevaluasi perkembangan capaian kinerja secara berkala setiap Triwulan. Hasil pengukuran tersebut akan memberikan gambaran tingkat keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian seluruh sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Data capaian kinerja diolah dan disajikan dalam aplikasi manajemen kinerja berbasis *website* di *kinerjaku.kkp.go.id* dengan kategorisasi (penentuan posisi) tingkat capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

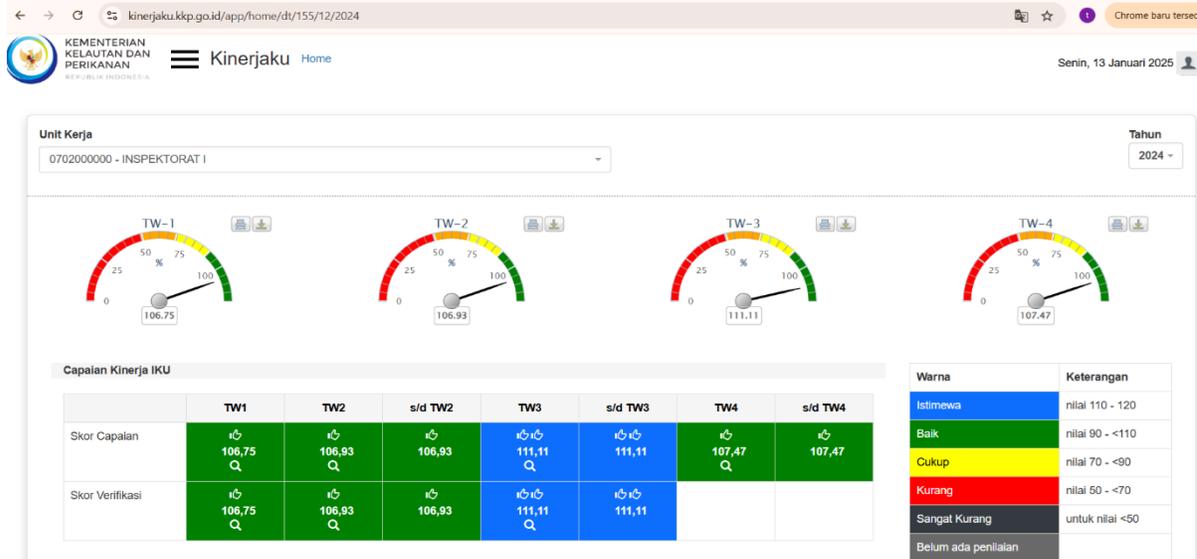
Tabel 5. Rentang Penilaian Capaian Kinerja

No	Kode Warna	Rentang Nilai
1.	Istimewa	110 - 120
2.	Baik	90 - <110
3.	Cukup	70 - < 90
4.	Kurang	50 - < 70
5.	Sangat Kurang	≤ 50
6.	Belum ada Penilaian	-

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Inspektorat I Tahun 2024 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Inspektorat I dari Triwulan I s.d. Triwulan IV Tahun 2024 (Januari s.d. Desember Tahun 2024). Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja dari masing-masing Sasaran Kinerja. Capaian kinerja Inspektorat I yang diukur Tahun 2024 terdiri dari capaian kinerja pada 3 (tiga) Sasaran Kinerja dengan 13 Indikator Kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui aplikasi pengelolaan kinerja, kondisi capaian kinerja Inspektorat I Tahun 2024 dapat disampaikan sebagaimana gambar berikut.



Gambar 2. Nilai Rata-rata Capaian Kinerja Inspektorat I Tahun 2024

Pada Gambar 2 diatas, dapat dilihat bahwa nilai capaian kinerja IK mencapai ≥ 100 yang berada pada zona hijau atau masuk dalam kategori “Baik” (hijau) dengan skor kinerja 107,47.

Adapun perkembangan capaian kinerja Inspektorat I selama 5 tahun dari Tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 6. Capaian Kinerja Inspektorat I Tahun 2020 - 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Capaian Kinerja Inspektorat I	110,76	109,88	109,39	108,34	107,47

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Inspektorat I mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga 2024, penurunan capaian kinerja yang terjadi disebabkan adanya perubahan Indikator Kinerja (IK) terkait “Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mitra Inspektorat I” pada Tahun 2023 tidak lagi menjadi IK yang diperjanjikan pada Level II, hal ini sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2023 bahwa pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi fokus pada tingkat instansi dengan menitikberatkan pada capaian rencana aksi Reformasi Birokrasi general dan capaian output Reformasi Birokrasi tematik, namun pada tingkat unit kerja tetap merencanakan kegiatan pengawasan yang mengawal pelaksanaan rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi KKP sehingga mendukung pencapaian target Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan data capaian kinerja Tahun 2024 yang telah dilakukan pengukuran melalui aplikasi pengelolaan kinerja KKP, terhadap 3 Sasaran Kinerja yang diuraikan kedalam 13 Indikator Kinerja dengan didasarkan pada dokumen pendukung masing-masing capaian Indikator Kinerja, diketahui bahwa capaian kinerja Inspektorat I sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2024 telah memenuhi target yang ditetapkan. Capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja dari masing-masing Sasaran Kinerja dapat disampaikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 7. Capaian Kinerja Inspektorat I Tahun 2024

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TAHUN 2024			% CAPAIAN PADA APLIKASI KINERJAKU	KET.
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN %		
1	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah lingkup Mitra Inspektorat I	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I (%)	≤ 0,5%	0,07%	186%	120%	Capaian diatas target dengan nilai maksimal (120%)
		2	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I (%)	3,3 (Nilai)	3,68	111,52%	111,52%	Capaian diatas target
		3	Unit Kerja Mitra Inspektorat I Berpredikat Menuju WBK (jumlah akumulasi)	13 unit	14 unit	107,69%	107,69%	Capaian diatas target
		4	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat I (Nilai)	83 (A)	88,53 (A)	106,66%	106,66%	Capaian diatas target
2	Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Efektif lingkup Inspektorat I	5	Tingkat Efektivitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup Mitra Inspektorat I (%)	82%	89,92%	109,66%	109,66%	Capaian diatas target
		6	Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN lingkup Mitra Inspektorat I (%)	82%	87,75%	107,01%	107,01%	Capaian diatas target
		7	Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Mitra Inspektorat I (%)	82%	90,95%	110,91%	110,91%	Capaian diatas target
		8	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat I (%)	80%	97,07%	121,34%	120%	Capaian diatas target dengan nilai maksimal (120%)
		9	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat I (Rekomendasi)	4 Rekom	4 Rekom	100%	100%	Capaian sesuai target
		10	Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan lingkup Inspektorat I (%)	89%	100%	112,36%	112,36%	Capaian diatas target
		11	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat I (%)	80%	100%	125%	120%	Capaian diatas target dengan nilai maksimal (120%)
3	Dukungan Manajemen Pengawasan yang Akuntabel lingkup Inspektorat I	12	Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat I	100%	100%	100%	100%	Capaian sesuai target
		13	Terkelolanya Anggaran Secara Tertib dan Akuntabel lingkup Inspektorat I	100%	100%	100%	100%	Capaian sesuai target

*) Target pada aplikasi *kinerjaku.kkp.go.id*

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja Inspektorat I Tahun 2024 terhadap 13 IK yang diperjanjikan, seluruhnya telah tercapai. Terdiri dari capaian 3 IK yang melebihi nilai maksimal yaitu 120%, sebanyak 7 IK capaiannya melebihi dari 100% dan sebanyak 3 IK capaiannya sesuai target yaitu 100%. Perlu diinformasikan bahwa nilai capaian kinerja

maksimal yang ditetapkan didalam aplikasi pengelolaan kinerja KKP (*kinerjaku.kkp.go.id*) sebesar 120%. Dengan kata lain, **persentase capaian pada aplikasi dibatasi pada angka 120% sebagai nilai capaian maksimal.**

Secara lebih rinci, gambaran mengenai capaian kinerja dari Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Inspektorat I Tahun 2024 disampaikan sebagai berikut:

SK.01: Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah lingkup Mitra Inspektorat I

Pencapaian SK.01 yang menjadi ukuran atas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal yang mempunyai nilai tambah pada lingkup mitra Inspektorat I diukur melalui 4 (empat) IK dengan rincian target dan realisasinya pada tabel berikut.

Tabel 8. Capaian Sasaran Kinerja Pengendalian dan Pengawasan Internal Yang Bernilai Tambah (SK.01) Tahun 2024

Indikator Kinerja		Polarisasi	Tahun 2024			
			Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian pada aplikasi kinerjaku
IK-1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I	Minimize	≤ 0,5%	0,07%	186%	120%
IK-2	Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat I (Nilai)	Maximize	3,3 (Nilai)	3,68	111,52%	111,52%
IK-3	Unit Kerja Mitra Inspektorat I Berpredikat Menuju WBK (jumlah akumulasi)	Maximize	13 unit	14 unit	107,69%	107,69%
IK-4	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat I	Maximize	83 (A)	88,53 (A)	106,66%	106,66%

Tabel diatas menunjukkan capaian IK-1 yang merupakan batas toleransi temuan pengawas eksternal (BPK-RI) dibandingkan dengan realisasi anggaran lingkup mitra Inspektorat I Tahun 2024 sebesar 0,07% telah tercapai dari target yang ditetapkan sebesar ≤ 0,5%. Capaian IK-2 “Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat I” berdasarkan hasil evaluasi maturitas SPIP oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, tingkat maturitas SPIP KKP mendapatkan nilai 3,68 melebihi dari target sebesar 3,1. Sedangkan capaian pada IK-3 “Unit Kerja Mitra Inspektorat I Berpredikat Menuju WBK” (jumlah akumulasi) sebanyak 14 unit kerja lingkup mitra Inspektorat I telah melebihi dari target yang ada yaitu sebanyak 13 unit kerja, dan IK-4 “Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat I” telah mencapai nilai 88,53 (nilai A) dari target 83 (nilai A). Secara terperinci, target dan realisasi Sasaran Kinerja Pengendalian dan Pengawasan Internal Yang Bernilai Tambah (SK.01) Tahun 2024 sebagai berikut.

IK-1. Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I

IK-1 merupakan dukungan dalam mewujudkan Laporan Keuangan KKP yang handal dengan target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI. Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I adalah jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi atas hasil pemeriksaan BPK pada LK Tahun 2024 (mitra Inspektorat I) dibandingkan dengan realisasi anggaran mitra Inspektorat I Tahun 2024. Realisasi IK-1 ini menggunakan data hasil pemeriksaan BPK-RI sehingga pengukuran IK-1 dilakukan secara tahunan yaitu pada Triwulan III Tahun 2024 menggunakan polarisasi *Minimize* (semakin kecil lebih baik).

Berdasarkan nilai temuan keuangan pemeriksaan BPK-RI Tahun 2023 pada mitra Inspektorat I yaitu Sekretariat Jenderal KKP sebesar Rp571.218.613,00 dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp175.999.847,00 atau total nilai temuan sebesar Rp747.218.460,00 dibandingkan dengan realisasi anggaran pada Sekretariat Jenderal KKP sebesar Rp631.793.931.033,00 dan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp399.297.824.951,00 atau total nilai realisasi mitra Inspektorat I sebesar Rp1.031.091.755.984,00, sehingga jika dibandingkan antara nilai total temuan dan nilai total realisasi pada mitra Inspektorat I yaitu sebesar 0,07% dari target sebesar $\leq 0,5\%$. Capaian IK-1 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 186% atau capaian maksimal sebesar 120% pada aplikasi kinerjajaku. Capaian IK-1 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terlihat nilai capaian Tahun 2024 lebih rendah dari capaian Tahun 2023 yaitu sebesar 0,01% namun masih diatas target yang ditetapkan. Penurunan capaian IK-1 Tahun 2024 disebabkan adanya peningkatan nilai temuan materialitas keuangan pada Setjen di Tahun 2023 sebesar Rp68.482.499,00 menjadi sebesar Rp Rp571.218.613,00. Selain hal tersebut, dipengaruhi adanya perubahan mitra kerja pada Inspektorat I yang sebelumnya bermitra kerja dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) berubah menjadi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL), hal ini berpengaruh pada peningkatan jumlah anggaran yang dikelola oleh mitra Inspektorat I. Adapun perbandingan target dan realisasi IK-1 Tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9. Perbandingan Capaian IK-1 Tahun 2023 dan 2024

IK-1	2023			2024		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I	≤1%	0,01%	199%	≤0,5%	0,07%	186%

Sedangkan perkembangan capaian nilai batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan mitra Inspektorat I selama periode jangka menengah Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 10. Perkembangan Capaian IK-1 Tahun 2020 - 2024

IK-1	Capaian				2024	
	2020	2021	2022	2023	T	R
Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I	0,07%	0,04%	0,01%	0,01%	≤0,5%	0,07%

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi nilai materialitas temuan Tahun 2020 s.d. 2023 mengalami peningkatan berada diatas dari nilai target yang ditetapkan yaitu sebesar 1%, adapun pada Tahun 2024 terdapat perubahan target menjadi ≤0,5% dengan nilai capaian sebesar 0,07% atau masih diatas dari target yang ditetapkan. Nilai ini jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2021 s.d. 2023 mengalami peningkatan dikarenakan adanya peningkatan temuan material pada Setjen serta adanya perubahan mitra kerja. Nilai temuan materialitas pengawas eksternal berpengaruh pada tercapainya target opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan KKP yang telah mendapatkan opini WTP sejak Tahun 2020.

Keberhasilan capaian IK-1 ini didukung oleh beberapa kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat I selama Tahun 2020 s.d. 2024, antara lain Probitry Audit, Audit Kinerja, Pengawasan Pengelolaan Keuangan, Reviu Penganggaran, Reviu LK, Reviu Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan, Pengawasan Penyerapan Anggaran, Pengawasan Pengelolaan BMN, Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa, PTL hasil pemeriksaan BPK dan Pengawasan Tematik Lainnya (Kegiatan Prioritas, PNBK, dll).

IK-2. Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat I

Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat I adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan Mitra Kerja Inspektorat I. Pengukuran IK-2 dilaksanakan

Triwulan IV Tahun 2024 dengan target nilai tingkat maturitas SPIP mitra Inspektorat I pada Tahun 2024 adalah 3,3. Nilai capaian IK-2 pada Tahun 2024 merupakan adopsi langsung dari nilai maturitas SPIP KKP berdasarkan hasil evaluasi BPKP Tahun 2024 pada tingkat KKP sesuai Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D.

Berdasarkan surat Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nomor. PE.09.03/SP-42/D1/02/2025 tanggal 14 Januari 2025, diketahui nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi KKP Tahun 2024 sebesar 3,683 atau berada pada level 3 dari 5 tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pada level ini penyelenggaraan SPIP KKP berada pada level “Terdefinisi” yang diartikan bahwa penyelenggaraan SPIP telah mengindikasikan bahwa organisasi mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif. Nilai capaian IK-2 pada Tahun 2024 melebihi dari target yang ditetapkan atau persentase capaiannya sebesar 111,52%. Nilai evaluasi maturitas SPIP Tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi KKP Tahun 2023 dengan nilai capaian sebesar 3,56 meskipun masih berada pada level 3. Adapun perbandingan nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi KKP Tahun 2023 dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11. Perbandingan Capaian IK-2 Tahun 2023 dengan Tahun 2024

IK-2				2023			2024		
				T	R	Capaian	T	R	Capaian
Tingkat	Maturitas	SPIP	Mitra	3,1	3,56	114,84%	3,3	3,68	111,52%
Inspektorat I									

Perkembangan nilai capaian maturitas SPIP berdasarkan target jangka menengah Tahun 2020 - 2024 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu pada Level 3 dengan skor nilai bervariasi dari tahun ke tahun, bahkan pada Tahun 2020 diketahui nilai tingkat maturitas SPIP mencapai nilai 4,00 berdasarkan pada hasil penilaian mandiri. Perkembangan capaian nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP KKP Tahun 2020 - 2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 12. Perkembangan Capaian IK-2 Tahun 2020 - 2024

IK-2	Nilai				2024	
	2020	2021	2022	2023	T	R
Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat I	Level 4 (4,00)	Level 3 (3,87)	Level 3 (3,81)	Level 3 (3,56)	Level 3 3,3	Level 3 3,68

Berdasarkan tabel capaian diatas, secara umum nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi KKP berada pada level 3 meskipun secara nilai mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun, hal ini dapat diartikan bahwa penyelenggaraan maturitas SPIP di lingkungan KKP selama periode jangka menengah menunjukkan bahwa karakteristik penyelenggaraan SPI KKP secara umum telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan. Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan maturitas SPIP lingkup mitra kerja, Inspektorat I telah melakukan kegiatan pengawasan melalui kegiatan evaluasi implementasi Manajemen Risiko (MR) Tahun 2024, asistensi/pendampingan dan reviu penyusunan MR Tahun 2024, serta penjaminan kualitas (reviu) atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi pada Unit Eselon I mitra Inspektorat I.

Catatan/rekomendasi yang perlu mendapat perhatian berdasarkan laporan hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada KKP Tahun 2024 Nomor PE.09.03/LHP-232/D102/1/2024 tanggal 31 Desember 2024 oleh BPKP RI, antara lain.

- a. Memperbaiki *cascading* Sasaran Strategis, Program, Sasaran Program, Kegiatan dan Sasaran Kegiatan pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja tahun berikutnya, sehingga dapat saling selaras dan saling mendukung;
- b. Meninjau kembali masing-masing indikator pada Sasaran Strategis yang masih berupa *output*, untuk kemudian dapat dilakukan perbaikan menjadi indikator yang bersifat *outcome*;
- c. Melakukan perbaikan pada indikator-indikator pada Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan yang tidak mendukung dan tidak menggambarkan Sasaran Strategis yang akan dicapai.

Oleh karena itu, untuk mendorong peningkatan kualitas SPI di lingkungan KKP diperlukan peran Itjen yang lebih intens dalam mengawal perbaikan atas rekomendasi tersebut, sehingga penyelenggaraan maturitas SPIP KKP lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

IK-3. Unit Kerja Mitra Inspektorat I Berpredikat Menuju WBK

Unit Kerja berstatus Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Mitra Inspektorat I adalah jumlah unit kerja yang telah memenuhi syarat indikator pada penilaian WBK dan memperoleh hasil penilaian minimal 75 berdasarkan penilaian oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal KKP yang ditetapkan dengan SK Menteri KP maupun berdasarkan penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kementerian PAN dan RB. Berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021, predikat WBK yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang berhasil melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan baik, dan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik prima, tentunya dalam hal mewujudkan kondisi ini perlu adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh jajaran unit kerja untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pengukuran IK-3 dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024 dengan target yang mengalami perubahan dari semula sebanyak 20 unit kerja (jumlah akumulasi) menjadi sebanyak 13 unit kerja yang berpredikat WBK, hal ini disebabkan adanya perubahan mitra kerja lingkup Inspektorat I berdasarkan Permen KP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang awalnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

Capaian jumlah unit kerja berpredikat WBK lingkup mitra Inspektorat I Tahun 2024 sebanyak 14 unit dari target 13 unit kerja atau dengan capaian sebesar 107,69%. Berikut unit kerja berpredikat WBK/WBBM lingkup mitra Inspektorat I.

Tabel 13. Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM lingkup Mitra Inspektorat I

Setjen	Ditjen PKRL
1. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi	1. Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang
2. Biro Perencanaan	2. Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang
3. Biro Umum dan PBJ	3. Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak
4. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	4. Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar
5. Pusat Data, Statistik dan Informasi	5. Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar
6. Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	6. Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Serang

	<p>7. Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru</p> <p>8. Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Sorong</p>
--	--

Capaian unit kerja berpredikat WBK/WBBM lingkup mitra kerja Inspektorat I Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 mengalami peningkatan, meskipun hal ini tidak dapat dijadikan perbandingan dikarenakan adanya perubahan target yang dikarenakan perubahan mitra kerja lingkup Inspektorat I di Tahun 2024. Adapun capaian Tahun 2023 sebesar 105,88% atau sebanyak 18 unit kerja yang telah berpredikat WBK/WBBM dari target 17 unit kerja. Rincian capaian IK-3 Tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14. Perbandingan Realisasi IK-3 Tahun 2023 dan Tahun 2024

IK-3	2023			2024		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK lingkup Mitra Inspektorat I	17	18	105,88%	13	14	107,69%

Capaian unit kerja berpredikat WBK/WBBM lingkup mitra Inspektorat I selama periode jangka menengah Tahun 2020 - 2024 memperoleh nilai yang bervariasi atau mengalami fluktuatif, namun secara umum jumlah unit kerja yang berpredikat WBK/WBBM lingkup mitra Inspektorat I telah melebihi dari yang ditargetkan atau secara akumulasi sebanyak 14 unit kerja dari target 13 unit kerja. Perbandingan capaian unit kerja berpredikat WBK/WBBM lingkup mitra Inspektorat I selama periode jangka menengah Tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 15. Perkembangan Capaian IK-3 Tahun 2020 - 2024

IK-3	2020		2021		2022		2023		2024		
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Capaian
Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK lingkup Mitra Inspektorat I	6	8	12	11	13	15	17	18	13	14	107,69%

Berdasarkan tabel diatas secara umum capaian IK-3 telah melebihi target, namun terdapat capaian di bawah target yaitu pada Tahun 2021 dengan realisasi capaian hanya 11 unit kerja dari target 12 unit kerja yang seharusnya berstatus WBK/WBBM dengan nilai capaian hanya sebesar 91,67%. Hal ini disebabkan adanya pergantian mitra kerja Inspektorat I sesuai Permen KP Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, semula Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) berubah menjadi Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP).

Inspektorat I akan terus mendorong pelaksanaan pembangunan dan mengawal kebijakan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada mitra kerja, sehingga seluruh unit kerja lingkup mitra kerja Inspektorat I dapat meraih predikat WBK/WBBM baik berdasarkan hasil penilaian TPI maupun dari hasil penilaian TPN. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka mendorong unit kerja di lingkungan mitra kerja Inspektorat I memperoleh predikat WBK/WBBM melalui penguatan koordinasi dengan mitra kerja dalam merancang pembangunan Zona Integritas melalui kegiatan asistensi serta melaksanakan program pengawasan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM melalui kegiatan pemantauan/evaluasi pada unit kerja lingkup mitra kerja Inspektorat I.

IK-4. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat I

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP adalah nilai yang mencerminkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada mitra Inspektorat I saat periode evaluasi melalui penilaian terhadap 5 (lima) komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja, yaitu perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja. Pengukuran dilaksanakan melalui penilaian mandiri pada Triwulan III Tahun 2024 dengan target capaian kategori A (83) pada Tahun 2024.

Berdasarkan hasil penilaian mandiri Itjen yang disampaikan kepada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB melalui Surat Inspektur Jenderal Nomor: B.242/ITJ/HP.440/VIII/2024, tanggal 5 Agustus 2024 hal Ikhtisar Hasil Evaluasi Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan KKP, diketahui bahwa capaian nilai evaluasi akuntabilitas kinerja mitra Inspektorat I Tahun 2024 memperoleh predikat penilaian “A” dengan nilai 88,53 dari target “A” dengan nilai 83 atau capaiannya sebesar 106,66%. Nilai capaian tersebut diperoleh dari nilai rata-rata hasil evaluasi AKIP pada Setjen sebesar 87,98 dan Ditjen PKRL sebesar 89,07.

Capaian IK-4 pada Tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2023 yang memperoleh nilai “A” (83,18) dari target yaitu nilai “A” (80,5), Capaian IK-4 antara Tahun 2023 dan 2024 sama-sama berada pada nilai “A”. Perbandingan capaian nilai SAKIP mitra kerja Inspektorat I Tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 16. Perbandingan Capaian IK-4 Tahun 2023 dan 2024

IK-4	2023			2024		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat I	A (80,5)	A (83,18)	103,33%	A (83)	A (88,53)	106,66%

Perkembangan nilai SAKIP mitra Inspektorat I periode jangka menengah Tahun 2020 - 2024 mengalami capaian yang bervariasi/fluktuatif namun telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu “A” pada masing-masing tahun. Adapun perkembangan capaian nilai SAKIP pada mitra Inspektorat I periode jangka menengah Tahun 2020 - 2024 disajikan pada tabel berikut

Tabel 17. Perkembangan Capaian IK-4 Tahun 2020 - 2024

IK-4	2020		2021		2022		2023		2024		
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Capaian
Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat I	A (81)	A (87,32)	A (83)	A (86,32)	A (80,01)	A (80,63)	A (80,5)	A (83,18)	A (83)	A (88,53)	106,66%

Berdasarkan tabel diatas diketahui capaian nilai SAKIP pada mitra kerja Inspektorat I telah melebihi dari target yang ditetapkan, namun terdapat perubahan pada target Tahun 2022 yang menurun dari target tahun sebelumnya menjadi 80,01. Hal ini disebabkan adanya perubahan teknis penilaian AKIP sesuai implementasi Permen PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP.

Upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat I dalam rangka mencapai target nilai SAKIP pada mitra Inspektorat I dengan melakukan kegiatan pengawasan antara lain Reviu Laporan Kinerja, Asistensi SAKIP dan Evaluasi Implementasi SAKIP pada unit kerja Eselon I lingkup mitra Inspektorat I.

SK.02: Tata Kelola Pengawasan Intern Yang Akuntabel dan Efektif lingkup Inspektorat I

Pencapaian SK.02 menjadi ukuran atas pengawasan intern yang handal pada mitra Inspektorat I diukur dengan pencapaian 7 (tujuh) IK. Pada Tahun 2024, pengukuran capaian terhadap seluruh IK dari SK.02 sudah terlaksana dengan rincian target dan realisasinya pada tabel berikut.

Tabel 18. Capaian Sasaran Kinerja (SK.02) Tahun 2024

Indikator Kinerja		Polarisasi	Tahun 2024			
			Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian pada aplikasi kinerjajaku
IK-5	Tingkat Efektivitas Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup Mitra Inspektorat I	Maximize	82%	89,92%	109,66%	109,66%
IK-6	Tingkat Efektivitas Pengawasan terhadap Pengelolaan BMN lingkup Mitra Inspektorat I	Maximize	82%	87,75%	107,01%	107,01%
IK-7	Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Mitra Inspektorat I	Maximize	82%	90,95%	110,91%	110,91%
IK-8	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat I	Maximize	80%	97,02%	121,28%	120%
IK-9	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat I (rekomendasi)	Maximize	4 Rekom	4 Rekom	100%	100%
IK-10	Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Hasil Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan lingkup Mitra Inspektorat I	Maximize	89%	100%	112,36%	112,36%
IK-11	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat I	Maximize	80%	100%	125%	120%

IK-5. Tingkat Efektivitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup Mitra Kerja Inspektorat I

Tingkat efektivitas pengawasan pelaksanaan kegiatan prioritas lingkup mitra kerja Inspektorat I diukur berdasarkan nilai rata-rata dari nilai efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah dengan nilai efektivitas pengawasan PBJ. Nilai efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah diperoleh dari tingkat pemenuhan terhadap 3 aspek yaitu aspek pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi yang ditetapkan dengan bobot tertentu sebagai parameter efektivitas kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya (T-1). Pada Tahun 2024, target tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas lingkup mitra Inspektorat I diukur dari tingkat efektivitas kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Unit Eselon I, dalam hal ini sebagai mitra kerja Inspektorat I yaitu pada Ditjen PKRL dengan target sebesar 82% sedangkan pada Setjen tidak memiliki kegiatan terkait bantuan pemerintah. Pelaksanaan pengawasan kegiatan Bantuan Pemerintah dilaksanakan pada Triwulan IV dengan lokasi uji petik pada lokasi Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Blitar dengan jumlah kelompok penerima bantuan yang dievaluasi sebanyak 71 kelompok dari 102 kelompok penerima bantuan.

Capaian IK-5 ini diukur berdasarkan realisasi bantuan terhadap kelompok hasil pengadaan Tahun 2023 terhadap:

- a. Pencapaian Tujuan (PT) yang diukur berdasarkan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan sesuai Petunjuk Teknis masing-masing jenis bantuan dengan bobot 80%.
- b. Integrasi (IG) yang diukur berdasarkan pemahaman penerima atas hak dan kewajiban, dengan bobot 10%.
- c. Adaptasi (AT) yang diukur berdasarkan kemampuan penerima mengembangkan bantuan, dengan bobot 10%.

Berdasarkan memorandum Inspektur III Nomor 469/ITJ.3/TU.140/XI/2024 tanggal 28 November 2024 diketahui bahwa pelaksanaan evaluasi tingkat efektivitas pengawasan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah pada Ditjen PKRL Tahun 2024 dihitung berdasarkan rata-rata nilai efektivitas jenis bantuan yang dikelola lingkup Ditjen PKRL meliputi 4 (empat) jenis bantuan yaitu bantuan konservasi (Kompak), pengelolaan sampah, vegetasi pantai dan wisata bahari dengan total skor nilai sebesar 93,29, sedangkan hasil evaluasi terhadap efektivitas pengawasan PBJ pada Ditjen PKRL sebesar 86,54 sehingga capaian nilai tingkat efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup mitra kerja Inspektorat I Tahun 2024 sebesar 89,92 atau nilai capaian sebesar 109,66% sebagaimana tabel berikut.

Tabel 19. Target dan Realisasi IK-5 Tahun 2024

IK-5	2024		Capaian	Keterangan
	Target	Realisasi		
Tingkat Efektivitas Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup Mitra Inspektorat I	82%	89,92%	109,66%	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah Ditjen PKRL (93,29) - Nilai efektivitas pengawasan PBJ (86,54)

Jika dilihat dari tabel tersebut, capaian IK-5 Tahun 2024 menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 yaitu sebesar 87,69% dari target 81%. Capaian IK-5 Tahun 2024 dan 2023, keduanya melebihi dari target yang telah ditetapkan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 20. Perbandingan Capaian IK-5 Tahun 2023 dan Tahun 2024

IK-5	2023			2024		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
Tingkat Efektivitas Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis lingkup Mitra Inspektorat I	81	87,69	108,26%	80	89,92	109,66%

Capaian IK-5 tersebut sangat dipengaruhi dari pemenuhan terhadap 3 aspek yang menjadi parameter pengukuran yaitu tujuan, integrasi dan adaptif. Selama periode jangka menengah Tahun 2020 – 2024, target yang ditetapkan pada IK-5 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, selaras dengan realisasi yang telah dicapai juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Perkembangan capaian IK-5 selama periode jangka menengah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 21. Perkembangan Capaian IK-5 Tahun 2020 - 2024

IK-5	2020		2021		2022		2023		2024		
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Capaian
Tingkat Efektivitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup Mitra Inspektorat I	70	80,75	72,5	88,5	80	89,27	81	87,69	82	89,92	109,66%

Berdasarkan tabel tersebut, capaian IK-5 selama periode jangka menengah Tahun 2020 – 2024 selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan. Upaya yang telah dilakukan Inspektorat I untuk mendukung pencapaian IK-5 melalui pelaksanaan kegiatan Probitry Audit/Evaluasi/Pemantauan terhadap Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah dan Evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah terhadap mitra kerja Inspektorat I.

IK-6. Tingkat Efektivitas Pengawasan Terhadap Pengelolaan BMN lingkup Mitra Inspektorat I

Tingkat efektivitas pengawasan pengelolaan BMN lingkup mitra kerja Inspektorat I merupakan suatu ukuran yang menggambarkan efektivitas kualitas kinerja pengawasan intern dalam mengawal dan memastikan pengelolaan BMN lingkup mitra kerja Inspektorat I dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Pengukuran IK-6 tersebut didasarkan atas pemenuhan terhadap 3 (tiga) indikator/variabel, yaitu: 1) kualitas perencanaan pengawasan dengan bobot penilaian sebesar 20%; 2) kualitas pelaksanaan pengawasan dengan bobot penilaian 40%; dan 3) nilai rata-rata tingkat kepatuhan pengelolaan BMN unit Eselon I mitra kerja Inspektorat I dengan bobot penilaian sebesar 40%, target IK-6 yang ditetapkan Tahun 2024 sebesar 82% dengan waktu pengukurannya dilakukan secara tahunan (Triwulan IV Tahun 2024).

Realisasi tingkat efektivitas pengawasan pengelolaan BMN lingkup mitra kerja Inspektorat I Tahun 2024 sebesar 87,75% atau capaiannya sebesar 107,01% terhadap target. Nilai tersebut diperoleh dari rata-rata nilai tingkat efektivitas pengawasan pengelolaan BMN pada Setjen sebesar 87,50% dan Ditjen PKRL sebesar 88%.

Tabel 22. Target dan Realisasi IK-6 Tahun 2024

IK-6	2024		Capaian	Keterangan
	Target	Realisasi		
Tingkat Efektivitas Pengawasan Terhadap Pengelolaan BMN lingkup Mitra Inspektorat I	82%	87,75%	107,01%	- Nilai efektivitas pengawasan pengelolaan BMN pada Setjen sebesar 87,50% - Nilai efektivitas pengawasan pengelolaan BMN pada Ditjen PKRL sebesar 88%

Capaian Tahun 2024 melebihi dari target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pengawasan terkait pengelolaan BMN sudah cukup optimal. Capaian IK-6 Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 mengalami penurunan meskipun masih melebihi dari target yang ditetapkan, penurunan capaian IK-6 Tahun 2024 dikarenakan adanya penurunan capaian tingkat efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan BMN pada Setjen Tahun 2023 yaitu sebesar 90% menjadi 87,50% Tahun 2024, selain hal tersebut juga disebabkan adanya perubahan mitra kerja Inspektorat I dari BPPSDMKP menjadi Ditjen PKRL. Rincian target dan realisasi IK-6 Tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 23. Perbandingan Target dan Realisasi IK-6 Tahun 2023 dan 2024

IK-6	2023			2024		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
Tingkat Efektivitas Pengawasan terhadap Pengelolaan BMN lingkup Mitra Inspektorat I	81%	91,5%	112,96%	82%	87,75%	107,01%

Perkembangan capaian IK-6 selama periode jangka menengah Tahun 2020 – 2024, bahwa target yang telah ditetapkan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama periode jangka menengah, dengan nilai capaian masih bervariasi atau mengalami fluktuatif terhadap target yang ditetapkan masing-masing tahun selama periode jangka menengah. Nilai capaian pada masing-masing tahun telah melebihi target yang ditetapkan. Perkembangan capaian IK-6 selama periode jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 24. Perkembangan Capaian IK-6 Tahun 2020 - 2024

IK-6	2020		2021		2022		2023		2024		
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Capaian
Tingkat Efektivitas Pengawasan terhadap Pengelolaan BMN lingkup Mitra Inspektorat I	70%	84,5%	72,5%	82%	80%	98%	81%	91,5%	82%	87,75%	107,01%

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa capaian tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 98% dari target 80% dan capaian terendah pada Tahun 2021 dengan nilai capaian sebesar

82% dari target 72,5%. Adapun capaian terhadap akhir periode target jangka menengah yaitu sebesar 107,01%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IK-6 antara lain reviu Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN), reviu atas usulan penghapusan BMN, evaluasi pengelolaan BMN dan penilaian efektivitas pengawasan pengelolaan BMN pada mitra kerja Inspektorat I.

IK-7. Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Mitra Inspektorat I

Tingkat efektivitas pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup mitra Inspektorat I merupakan suatu ukuran yang menggambarkan efektivitas kualitas kinerja pengawasan intern dalam mengawal dan memastikan pengadaan barang/jasa lingkup mitra Inspektorat I dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, Pengukuran IK-7 tersebut didasarkan atas pemenuhan terhadap 3 (tiga) indikator/variabel, yaitu: 1) kualitas perencanaan pengawasan dengan bobot penilaian sebesar 20%; 2) kualitas pelaksanaan pengawasan dengan bobot penilaian 40%; dan 3) tingkat kepatuhan PBJ unit Eselon I mitra kerja Inspektorat I dengan bobot penilaian sebesar 40%, target IK-7 yang ditetapkan Tahun 2024 sebesar 82% dengan waktu pengukurannya dilakukan secara tahunan (Triwulan IV Tahun 2024).

Realisasi tingkat efektivitas pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup mitra kerja Inspektorat I Tahun 2024 sebesar 90,95% atau capaiannya sebesar 110,91% terhadap target. Nilai tersebut diperoleh dari rata-rata nilai tingkat efektivitas pengawasan barang/jasa pada Setjen sebesar 91,34% dan Ditjen PKRL sebesar 90,56%. Secara rinci capaian IK-7 mitra kerja Inspektorat I Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 25. Target dan Realisasi IK-7 Tahun 2024

IK-7	2024		Capaian	Keterangan
	Target	Realisasi		
Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Mitra Inspektorat I	82%	90,95%	110,91%	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai efektivitas pengawasan pengadaan barang/jasa pada Setjen sebesar 91,34% - Nilai efektivitas pengawasan pengadaan barang/jasa pada Ditjen PKRL sebesar 90,56%

Capaian Tahun 2024 melebihi dari target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pengawasan terkait pengadaan barang/jasa sudah cukup optimal. Capaian IK-7 Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 mengalami

penurunan meskipun masih melebihi dari target yang ditetapkan, penurunan capaian IK-7 Tahun 2024 dikarenakan adanya penurunan capaian tingkat efektivitas pengawasan terhadap pengadaan barang/jasa pada Setjen Tahun 2023 yaitu sebesar 92,02% menjadi 91,34% Tahun 2024, selain hal tersebut juga disebabkan adanya perubahan mitra kerja Inspektorat I dari BPPSDMKP menjadi Ditjen PKRL. Rincian target dan realisasi IK-7 Tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 26. Perbandingan Target dan Realisasi IK-7 Tahun 2023 dan 2024

IK-7	2023			2024		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Mitra Inspektorat I	81%	91,27%	112,68%	82%	90,95%	110,91%

Perkembangan capaian IK-7 selama periode jangka menengah Tahun 2020 – 2024 diketahui bahwa penetapan target selama jangka menengah terus meningkat, dengan nilai capaian dari tahun ke tahun selama periode jangka menengah masih bervariasi atau mengalami fluktuatif meskipun nilai capaian tersebut telah tercapai/melebihi target. Perkembangan capaian IK-7 selama periode jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 27. Perkembangan Capaian IK-7 Tahun 2020 - 2024

IK-7	2020		2021		2022		2023		2024		
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Capaian
Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Mitra Inspektorat I	70%	91,69%	72,5%	85,76%	80%	88,12%	81%	91,27%	82%	90,95%	110,91%

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa capaian tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 91,69% dari target 70% dan capaian terendah pada Tahun 2021 dengan nilai capaian sebesar 85,76% dari target 72,5%. Adapun capaian terhadap akhir periode target jangka menengah yaitu sebesar 110,91%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IK-7 antara lain Probitas Audit, Reviu, Pendampingan dan Penilaian Efektivitas Pengawasan Pengadaan PBJ pada mitra kerja Inspektorat I.

IK-8. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat I

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Reviu, Evaluasi dan Pemantauan) oleh Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut

adalah **tuntas**) oleh mitra kerja Inspektorat I atas rekomendasi pada Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 dengan target 80% dan pengukurannya bersifat kumulatif selama setahun dengan target setiap Triwulan sebesar 80%.

Hasil pengukuran capaian IK-8 sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2024 dapat disampaikan bahwa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti (berstatus **tuntas**) dan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja oleh mitra kerja Inspektorat I sebesar 97,07% dari target 80%, sehingga capaiannya sebesar 121,34% atau pencapaiannya maksimal terhadap target pada aplikasi kinerja sebesar 120%. Nilai tersebut diperoleh dari rata-rata jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat I yang telah ditindaklanjuti oleh Setjen sebanyak 196 rekomendasi atau 100% dan oleh Ditjen PKRL sebanyak 434 dari 453 rekomendasi atau sebesar 95,81%.

Tabel 28. Target dan Realisasi IK-8 Tahun 2024

IK-8	2024		Capaian	Keterangan
	Target	Realisasi		
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat I	80%	97,07%	121,34%	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti pada Setjen sebesar 100%. - Persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti pada Ditjen PKRL sebesar 95,81%.

Capaian Tahun 2024 melebihi dari target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan hasil pengawasan oleh mitra kerja Inspektorat I dalam rangka perbaikan kinerja sangat tinggi dan jika dibandingkan dengan Tahun 2023 mengalami peningkatan dimana persentase jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti sebesar 89,13% dari target 75%, kenaikan capaian IK-8 jika dibandingkan Tahun 2023 dikarenakan persentase jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti pada Setjen mengalami peningkatan dari 99,12% Tahun 2023 menjadi 100% Tahun 2024. Rincian target dan realisasi IK-8 Tahun 2023 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 29. Perbandingan Target dan Realisasi IK-8 Tahun 2023 dan 2024

IK-8	2023			2024		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat I	75%	89,13%	118,84%	80%	97,07%	121,34%

Perkembangan capaian IK-8 selama periode jangka menengah Tahun 2020 – 2024 diketahui penetapan target terus meningkat dari tahun ke tahun, namun nilai capaian dari tahun ke tahun selama periode jangka menengah masih bervariasi atau mengalami fluktuatif meskipun nilai capaian tersebut melebihi dari target yang ditetapkan. Perkembangan capaian IK-8 selama periode jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 30. Perkembangan Capaian IK-8 Tahun 2020 - 2024

IK-8	2020		2021		2022		2023		2024		Capaian
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	
Persentase Jumlah Rekomendasi Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat I	60%	86,82%	65%	90,72%	70%	87,03%	75%	89,13%	80%	97,07%	121,34%

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa capaian tertinggi atas penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan pada Tahun 2024 merupakan akhir dari periode jangka menengah yaitu sebesar 97,07% dari target 80% serta capaian terendah pada Tahun 2020 dengan nilai capaian sebesar 86,82% dari target 60%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IK-8 antara lain kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan Itjen terhadap mitra kerja secara Triwulanan, pemutakhiran data hasil pengawasan pada mitra kerja dan layanan tindak lanjut secara online melalui aplikasi SIDAK.

IK-9. Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat I

Rekomendasi kebijakan merupakan masukan/saran dari hasil kajian Inspektorat I yang diberikan kepada mitra kerja dalam rangka penyempurnaan proses penyusunan/pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam hal ini, kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar dalam pelaksanaan suatu program/kegiatan pada mitra kerja Inspektorat I. Rekomendasi yang disampaikan dalam bentuk surat dinas Inspektur Jenderal dan/atau atas nama Inspektur Jenderal kepada mitra kerja yang menjadi objek pengawasan dapat berupa kajian yang berisi saran untuk melakukan perubahan/penambahan/penyempurnaan pada penyusunan dan/atau pelaksanaan peraturan, pedoman program/kegiatan, rencana kinerja, rancangan kerja sama aktivitas strategis, dan kebijakan dalam bentuk lainnya. Adapun target penyampaian rekomendasi untuk perbaikan kebijakan lingkup mitra kerja Inspektorat I Tahun 2024 sebanyak 4 rekomendasi.

Hasil pengukuran kinerja terhadap capaian IK-9 tersebut s.d. Triwulan IV Tahun 2024 telah tercapai yaitu sebanyak 4 (empat) rekomendasi kebijakan atau capaian sebesar 100%.

Adapun rekomendasai yang telah disampaikan adalah 1) terkait pemberian masukan terhadap Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri di lingkungan KKP sesuai Nota Dinas Nomor 40/ITJ/RC.240/I/2024 tanggal 17 Januari 2024; 2) rekomendasi perbaikan Kebijakan atas Kepmen KP Nomor 5 Tahun 2024 sesuai memorandum Nomor. 101/ITJ/RC.610/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024; 3) rekomendasi perbaikan Kebijakan Tata Kelola Perijinan pada Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai Nota Dinas No. 127/ITJ/RC.610/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024; dan 4) rekomendasi terkait penyempurnaan Pedoman Teknis Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan KKPRL sesuai Nota Dinas No. 120/ITJ/HP.410/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024. Capaian IK-9 Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 31. Target dan Realisasi IK-9 Tahun 2024

IK-9	2024		Capaian	Keterangan
	Target	Realisasi		
Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat I (rekomendasi)	4	4	100%	Sebanyak 2 (dua) rekomendasi perbaikan kebijakan pada Setjen dan 2 (dua) rekomendasi perbaikan kebijakan pada Ditjen PKRL

Capaian IK-9 Tahun 2024 telah sesuai target yaitu penyampaian rekomendasi sebagai perbaikan kebijakan pada mitra kerja Inspektorat I sebanyak 4 (empat) rekomendasi. Capaian Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 mengalami penurunan, dikarenakan capaian Tahun 2023 melebihi dari target yang ditetapkan yaitu penyampaian rekomendasi perbaikan kebijakan pada mitra kerja Inspektorat I sebanyak 5 dari 4 rekomendasi yang ditargetkan. Perbandingan capaian IK-9 Tahun 2023 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 32. Perbandingan Target dan Realisasi IK-9 Tahun 2023 dan 2024

IK-9	2023			2024		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat I (rekomendasi)	4	5	125%	4	4	100%

Sedangkan perkembangan capaian IK-9 selama periode jangka menengah Tahun 2020 – 2024 diketahui bahwa penetapan target adalah sama (*stabilized*) dari tahun ke tahun yaitu sebanyak 4 (empat) rekomendasi sedangkan capaian atas target yang ditetapkan dari tahun ke tahun selama periode jangka menengah cenderung sama meskipun terdapat capaian yang melebihi target Tahun 2021 yaitu penyampaian 5 rekomendasi dari target 4

rekomendasi. Perkembangan capaian IK-9 selama periode jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 33. Perkembangan Capaian IK-9 Tahun 2020 - 2024

IK-9	2020		2021		2022		2023		2024		Capaian
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	
Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat I (rekomendasi)	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	100%

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa capaian dari IK-9 hingga akhir periode jangka menengah telah sesuai target, hal ini sejalan dengan peran Inspektorat I sebagai konsultan (*Advisory Services*) yang akan memberikan jasa konsultasi serta masukan/saran dalam rangka perbaikan terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan maupun pada tataran kebijakan.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target IK-9 antara lain melalui kegiatan telaah/kajian terhadap peraturan, kebijakan, Juknis, sistem dan prosedur administrasi/operasi lingkup mitra kerja Inspektorat I.

IK-10. Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Hasil Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan lingkup Mitra Inspektorat I

Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan adalah jumlah penugasan dan pelaporan hasil pengawasan (Audit dan Evaluasi) yang memenuhi standar mutu pengawasan pada Inspektorat I dengan target minimal 89% Tahun 2024. Perhitungan persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan didasarkan pada hasil evaluasi Inspektorat V atas **pemenuhan dan kualitas** kendali mutu pada setiap pelaksanaan kegiatan audit dan evaluasi secara semesteran. Adapun hasil penilaian atas kendali mutu selama tahun berjalan merupakan nilai rata-rata dari hasil evaluasi Inspektorat V pada Semester I dan II Tahun 2024.

Hasil pengukuran capaian IK-10 Tahun 2024 sebesar 100% dari target 89% atau capaiannya 112,36%. Capaian tersebut berdasarkan hasil evaluasi kendali mutu pengawasan lingkup Itjen KKP yang dilaksanakan oleh Inspektorat V terhadap 47 Dokumen Kendali Mutu Pengawasan Audit dan Evaluasi pada Inspektorat I selama Tahun 2024, yaitu terdiri dari 19 LHP pada Semester I dan sebanyak 28 LHP periode Semester II Tahun 2024 serta seluruh

LHP yang dilakukan evaluasi oleh Inspektorat V telah dibuat kendali mutunya. Capaian IK-10 Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 34. Target dan Realisasi IK-10 Tahun 2024

IK-10	2024		Capaian	Keterangan
	Target	Realisasi		
Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Hasil Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan lingkup Mitra Inspektorat I	89%	100%	112,36%	Jumlah LHP yang dievaluasi Semester I sebanyak 19 Laporan dan Semester II sebanyak 28 Laporan.

Capaian IK-10 Tahun 2024 melebihi target yang ditetapkan sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan Inspektorat I telah memenuhi standar mutu pengawasan. Capaian Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 mengalami peningkatan, dikarenakan hasil evaluasi oleh Inspektorat V terhadap seluruh LHP yang terbit Tahun 2024 telah memenuhi standar mutu pengawasan. Perbandingan capaian IK-10 Tahun 2023 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 35. Perbandingan Target dan Realisasi IK-10 Tahun 2023 dan 2024

IK-10	2023			2024		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Hasil Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan lingkup Mitra Inspektorat I	88%	96,43%	109,58%	89%	100%	112,36%

Perkembangan capaian IK-10 selama periode jangka menengah Tahun 2020 – 2024, diketahui bahwa target yang ditetapkan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan capaian terhadap target yang ditetapkan masih bervariasi/fluktuatif dan nilai capaian masih melebihi dari target masing-masing tahun. Perkembangan capaian IK-10 selama periode jangka menengah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 36. Perkembangan Capaian IK-10 Tahun 2020 - 2024

IK-10	2020		2021		2022		2023		2024		
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Capaian
Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Hasil Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan lingkup Mitra Inspektorat I	85%	100%	86%	97,09%	87%	100%	88%	96,43%	89%	100%	112,36%

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa capaian dari IK-10 hingga akhir periode jangka menengah, telah sesuai/melebihi dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh LHP dari Inspektorat I yang terbit telah memenuhi standar mutu pengawasan dengan

mengacu pada kaidah-kaidah pelaksanaan dan pelaporan yang telah ditetapkan, baik berdasarkan pada ketentuan internal maupun yang ditetapkan oleh pihak eksternal.

Keberhasilan pencapaian ini didukung oleh beberapa kondisi antara lain Itjen KKP telah menggunakan teknologi informasi pengawasan dalam peningkatan kualitas mutu pengawasan melalui aplikasi AMS (*Audit Manajement System*) mulai Tahun 2024 sebagai pembaharuan dari aplikasi SIMWAS yang digunakan sebelumnya. Selain itu, komitmen auditor untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan serta adanya pengendalian secara berjenjang dalam rangka memastikan bahwa KMP yang telah dikerjakan telah memenuhi syarat, baik dari unsur kelengkapan maupun kualitas.

IK-11. Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat I

Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) adalah persentase kesesuaian pelaksanaan penugasan pengawasan lingkup Inspektorat I dengan PKPT yang telah ditetapkan Tahun 2024, dengan mekanisme pengukuran yaitu dilakukan secara semesteran berdasarkan hasil evaluasi kepatuhan pelaksanaan PKPT yang dilaksanakan oleh Inspektorat V. Adapun target yang ditetapkan pada Tahun 2024 sebesar 80%.

Capaian tingkat kepatuhan PKPT lingkup Inspektorat I Tahun 2024 merupakan nilai rata-rata dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat V terhadap kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT yang ditetapkan pada Semester I dan II Tahun 2024, dengan nilai capaian sebesar 100% dari target 80% atau capaian terhadap target sebesar 125% dan dengan capaian maksimal 120% pada aplikasi kinerjaku. Hasil evaluasi atas kepatuhan PKPT Semester I Tahun 2024 sebesar 100% (sebanyak 48 kegiatan pengawasan telah sesuai PKPT) dan hasil evaluasi kepatuhan PKPT Semester II Tahun 2024 sebesar 100% (sebanyak 56 kegiatan pengawasan telah sesuai PKPT). Secara rinci capaian IK-11 Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 37. Target dan Realisasi IK-11 Tahun 2024

IK-11	2024		Capaian	Keterangan
	Target	Realisasi		
Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat I	80%	100%	125%	Hasil evaluasi kepatuhan PKPT Semester I sebesar 100% dan Semester II sebesar 100%.

Capaian IK-11 Tahun 2024 melebihi dari target yang ditetapkan sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan Inspektorat I telah mengacu pada PKPT yang telah ditetapkan. Capaian Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 mengalami peningkatan, dikarenakan hasil evaluasi oleh Inspektorat V terhadap kepatuhan PKPT, baik Semester I dan II Tahun 2024 meningkat menjadi 100% dari capaian Tahun 2023 yaitu sebesar 99,09%. Perbandingan capaian IK-11 Tahun 2023 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 38. Perbandingan Target dan Realisasi IK-11 Tahun 2023 dan 2024

IK-11	2023			2024		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat I	80%	99,09%	123,86%	80%	100%	125%

Perkembangan capaian IK-11 selama periode jangka menengah Tahun 2020 – 2024 dapat dijelaskan bahwa target yang ditetapkan adalah tetap (*stabilized*) dari tahun ke tahun, adapun capaiannya telah melebihi dari target yang ditetapkan pada masing-masing tahun, meskipun nilai capaian terhadap target yang ditetapkan masih bervariasi/fluktuatif. Perkembangan capaian IK-11 selama periode jangka menengah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 39. Perkembangan Capaian IK-11 Tahun 2020 - 2024

IK-11	2020		2021		2022		2023		2024		
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Capaian
Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat I	80%	94,06%	80%	83,74%	80%	95,2%	80%	99,09%	80%	100%	125%

Dari tabel diatas diketahui bahwa capaian dari IK-11 hingga akhir periode jangka menengah melebihi dari target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan Inspektorat I telah berdasarkan pada PKPT yang ditetapkan. Capaian IK-11 sangat dipengaruhi oleh komitmen dan kebijakan Pimpinan agar pelaksanaan pengawasan tetap berdasarkan PKPT yang ditetapkan serta Auditor Utama secara periodik melakukan monitoring terhadap kepatuhan pelaksanaan pengawasan dengan PKPT.

SK.03: Dukungan Manajemen Pengawasan yang Akuntabel lingkup Inspektorat I

Capaian SK.03 menjadi ukuran pelaksanaan dukungan pengawasan terhadap kegiatan pengawasan Inspektorat I mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban terhadap kegiatan pengawasan yang dijalankan. SK.03 pada Tahun 2024 diukur melalui pendekatan

2 (dua) Indikator Kinerja (IK), adapun rincian target dan realisasi pelaksanaan SK.03 Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 40. Capaian Sasaran Kinerja (SK.03) Tahun 2024

Indikator Kinerja		Polarisasi	Tahun 2024			
			Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian pada aplikasi kinerjaku
IK-12	Tingkat Kepatuhan terhadap Penganggaran dan Pengelolaan Kinerja Lingkup Inspektorat I	Maximize	100%	100%	100%	100%
IK-13	Terkelolanya anggaran kegiatan secara tertib dan akuntabel lingkup Inspektorat I	Maximize	100%)	100%	100%	100%

IK-12. Tingkat Kepatuhan Terhadap Penganggaran dan Pengelolaan Kinerja Lingkup Inspektorat I

Capaian IK-12 berupa tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan anggaran dan kinerja lingkup Inspektorat I dengan waktu pengukuran dilakukan secara Triwulanan melalui pemenuhan terhadap:

- Pengisian data kinerja dan keuangan pada aplikasi e-Monev dengan bobot penilaian 20%;
- Penyampaian dokumen kinerja pada e-Review SAKIP Kementerian PAN dan RB dengan bobot penilaian 20%;
- Penyampaian Laporan Kinerja Interim (Triwulanan) dengan bobot penilaian 20%;
- Penyampaian data capaian kinerja tahunan kepada Sekretaris Itjen (Tahunan) dengan bobot penilaian 20%;
- Penyampaian laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan (Tahunan) dengan bobot penilaian 20%.

Capaian IK-12 Tahun 2024 sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Adapun target dan realisasi IK-12 disampaikan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 41. Target dan Realisasi IK-12 Tahun 2024

IK-12	2024		Capaian	Keterangan
	Target	Realisasi		
Tingkat Kepatuhan terhadap Penganggaran dan Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat I	100%	100%	100%	Atas pemenuhan: a. Pengisian kinerja dan keuangan pada aplikasi E-Monev; b. Penginputan dokumen kinerja pada aplikasi e-

				Reviu Kementerian PAN dan RB; c. Penyampaian LKj Triwulan I-IV; d. Penyampaian capaian kinerja tahunan; dan e. Penyampaian Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan.
--	--	--	--	--

Capaian IK-12 Tahun 2024 sesuai dengan target yang ditetapkan, hal ini berarti Inspektorat I telah memenuhi seluruh parameter yang ditentukan dalam rangka pelaksanaan dukungan pelaksanaan pengawasan yang akuntabel. Capaian dan target pada IK-12 Tahun 2024 sama dengan capaian dan target Tahun 2023. Perbandingan capaian IK-12 Tahun 2023 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 42. Perbandingan Target dan Realisasi IK-12 Tahun 2023 dan 2024

IK-12	2023			2024		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
Tingkat Kepatuhan terhadap Penganggaran dan Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat I	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Perkembangan capaian IK-12 selama periode jangka menengah Tahun 2020 – 2024 dapat dijelaskan bahwa target yang ditetapkan adalah tetap (*stabilized*) dari tahun ke tahun, adapun capaian IK-12 dari tahun ke tahun adalah stabil sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Perkembangan capaian IK-12 selama periode jangka menengah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 43. Perkembangan Capaian IK-12 Tahun 2020 - 2024

IK-12	2020		2021		2022		2023		2024			
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Capaian	
Tingkat Kepatuhan Terhadap Penganggaran dan Pengelolaan Kinerja Lingkup Inspektorat I	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa capaian dari tahun ke tahun selama periode jangka menengah adalah stabil/sama pada angka 100% hingga akhir periode, hal ini menunjukkan komitmen Inspektorat dalam rangka memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan pengawasan yang akuntabel dengan melakukan monitoring terhadap seluruh dokumen pemenuhan parameter yang telah ditetapkan dan memastikan waktu penyampaian tepat waktu.

IK-13. Terkelolanya Anggaran Kegiatan secara Tertib dan Akuntabel lingkup Inspektorat I

Capaian IK-13 dihitung berdasarkan pengelolaan anggaran pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat I yang dilaksanakan secara tertib dan akuntabel dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat I. Pengukuran IK-13 dilakukan secara Triwulan dengan target Tahun 2024 sebesar 100%. Pemenuhan bukti pengelolaan anggaran kegiatan dilakukan secara tertib dan akuntabel melalui pendekatan atas dua parameter yang ditetapkan, yaitu:

- a. Penyampaian rencana kegiatan dan anggaran dari Inspektorat I kepada Sekretaris Itjen tepat waktu dengan bobot penilaian sebesar 50%;
- b. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Inspektorat I kepada Sekretaris Itjen yang tepat waktu, dengan bobot penilaian 50%.

Capaian IK-13 Tahun 2024 sebesar 100% dari target yang ditetapkan, melalui pemenuhan 2 (dua) parameter yang dipersyaratkan dengan tepat waktu. Target dan realisasi IK-13 disampaikan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 44. Target dan Realisasi IK-13 Tahun 2024

IK-13	2024		Capaian	Keterangan
	Target	Realisasi		
Terkelolanya anggaran kegiatan secara tertib dan akuntabel lingkup Inspektorat I	100%	100%	100%	Atas pemenuhan: a. Penyampaian rencana kegiatan dan anggaran dari Inspektur I kepada Sekretaris Itjen secara bulanan; b. Penyampaian LKj kepada Sekretaris Itjen secara bulanan

Capaian IK-13 Tahun 2024 sesuai dengan target yang ditetapkan, hal ini berarti Inspektorat I telah memenuhi seluruh parameter dan menyampaikannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam rangka pengelolaan anggaran yang akuntabel. Capaian dan target pada IK-13 Tahun 2024 sama dengan capaian dan target Tahun 2023. Perbandingan capaian IK-13 Tahun 2023 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 45. Perbandingan Target dan Realisasi IK-13 Tahun 2023 dan 2024

IK-12	2023			2024		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
Terkelolanya anggaran kegiatan secara tertib dan akuntabel lingkup Inspektorat I	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Perkembangan capaian IK-13 selama periode jangka menengah Tahun 2020 – 2024 dapat dijelaskan bahwa target yang ditetapkan adalah tetap (*stabilized*) dari tahun ke tahun, adapun capaian IK-13 dari tahun ke tahun adalah stabil sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Perkembangan capaian IK-13 selama periode jangka menengah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 46. Perkembangan Capaian IK-13 Tahun 2020 - 2024

IK-12	2020		2021		2022		2023		2024			
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Capaian	
Terkelolanya anggaran kegiatan secara tertib dan akuntabel lingkup Inspektorat I	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa capaian dari tahun ke tahun selama periode jangka menengah adalah stabil/sama pada angka 100% hingga akhir periode, hal ini menunjukkan komitmen Inspektorat I melakukan pengelolaan mulai dari perencanaan hingga penggunaan anggaran serta mempertanggungjawabkannya secara akuntabel dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu, selain hal tersebut telah dilakukan monitoring dan validasi atas nilai pertanggungjawaban keuangan yang telah disusun.

C. ANALISIS PENGELOLAAN SUMBERDAYA ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran Kegiatan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Inspektorat I mendapatkan anggaran melalui kegiatan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP yang terdiri dari 2 (dua) komponen penganggaran yaitu “Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat I” dengan pagu anggaran sebesar Rp4.718.823.000,00 dan “Pengawasan Kegiatan Prioritas/Strategis Mitra Inspektorat I” dengan pagu anggaran sebesar Rp1.573.524.000,00 atau total pagu anggaran sebesar Rp6.292.347.000,00. Dari pagu anggaran tersebut terdapat blokir pagu anggaran dikarenakan adanya *Automatic Adjustment* (AA) sebesar Rp265.439.000,00 dan penghematan anggaran belanja

perjalanan dinas (akun 524) berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor 446/PB.2/2024 tanggal 10 November 2024 sebesar Rp225.686.000,00, sehingga total pagu anggaran efektif yang dikelola Inspektorat I setelah dikurangi blokir AA dan penghematan anggaran perjalanan dinas yaitu sebesar Rp5.801.222.000,00. Realisasi anggaran Inspektorat I sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp5.801.067.065,00 atau sebesar 99,99% dari pagu anggaran efektif. Secara rinci realisasi anggaran Inspektorat I Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 47. Realisasi Anggaran Inspektorat I Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Pagu Anggaran Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa (Rp)	%
2335	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP					
2335.EBD.965	Layanan Audit Internal					
051	Pengawasan Intern pada mitra Inspektorat I	4.227.698.000	4.227.575.284	99,997	122.716	0,0078
A	Pengawasan Akuntabilitas Keuangan	1.772.191.000	1.772.190.812	99,999	188	0,00001
B	Pengawasan Akuntabilitas Non Keuangan	859.114.000	859.111.876	99,999	2.124	0,00025
C	Dukungan Operasional Pengawasan	1.596.393.000	1.596.272.596	99,992	120.404	0,00754
052	Pengawasan Kegiatan Strategis/Prioritas mitra Inspektorat I	1.573.524.000	1.573.491.781	99,998	32.219	0,0020
A	Persiapan Pelaksanaan Pengawasan	14.563.000	14.555.000	99,945	8.000	0,055
B	Pelaksanaan Pengawasan	1.554.465.000	1.554.441.781	99,999	23/219	0,001
C	Pelaporan Pengawasan	4.496.000	4.495.000	99,978	1.000	0,022
Total		5.801.222.000	5.801.067.065	99,997	154.935	0,002

Berdasarkan tabel diatas, capaian realisasi anggaran Inspektorat I Tahun 2024 sangat baik dengan realisasi anggaran 99,99% dan capaian output secara keseluruhan mencapai optimal 100%. Realisasi anggaran Tahun 2024 relatif sama jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Tahun 2023 yang mencapai 99,99%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencapaian kinerja anggaran yang ditetapkan cukup efektif dan berjalan sesuai yang direncanakan. Perkembangan pagu dan realisasi anggaran Inspektorat I dari Tahun 2020 – 2024, berdasarkan dokumen anggaran diketahui bahwa pagu anggaran Inspektorat I selama kurun waktu Tahun 2020 hingga 2024 mengalami peningkatan dengan realisasi anggaran cenderung stabil pada angka diatas 99% atau penyerapan anggaran secara optimal. Perkembangan pagu dan realisasi anggaran Inspektorat I dari Tahun 2020 hingga 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 48. Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat I TA 2020-2024

Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2020	3.290.346.000	3.285.399.095	99,85
2021	3.389.472.000	3.388.602.705	99,97
2022	4.272.616.000	4.272.349.100	99,99
2023	4.817.252.000	4.816.843.900	99,99
2024	5.801.222.000	5.801.067.065	99,99

2. Realisasi Anggaran Sasaran Kinerja

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, upaya untuk mewujudkan tujuan Inspektorat I Tahun 2024 dilaksanakan melalui pencapaian 3 (tiga) Sasaran Kinerja yang diukur keberhasilannya dengan 13 Indikator Kinerja. Sebagai implementasi kinerja berbasis anggaran, maka anggaran Inspektorat I disusun untuk mencapai target seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai parameter tercapainya Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja.

Perencanaan anggaran Inspektorat I dalam mencapai target indikator kinerja memiliki karakteristik tersendiri dengan kegiatan utama yang dilaksanakan berupa aktivitas pengawasan terhadap kinerja mitra kerja dengan keluaran (*output*) berupa Laporan Hasil Pengawasan yang memuat permasalahan serta rekomendasi sebagai perbaikan kinerja mitra kerja. Kegiatan pengawasan yang telah ditetapkan selama Tahun 2024 meliputi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, pengawasan manajerial, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, akuntabilitas manajemen kinerja, pembangunan zona integritas, dan tema lainnya (tematik) sehingga kegiatan pengawasan yang dilaksanakan memungkinkan untuk mendukung pencapaian beberapa indikator kinerja yang berbeda pada masing-masing sasaran kinerja. Informasi keuangan terkait dengan pencapaian Sasaran Kinerja Inspektorat I Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 49. Pagu dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Kinerja Inspektorat I Tahun 2024

SASARAN KINERJA	KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	
			Rp	%
SK.01 Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah lingkup Mitra Inspektorat I	Pengawasan intern pada mitra Inspektorat I	4.227.698.000	4.227.575.284	99,99
SK.02 Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Efektif lingkup Inspektorat I	Pengawasan Kegiatan Strategis/Prioritas mitra Inspektorat I	1.573.524.000	1.5738.491.781	99,99
SK.03 Dukungan Manajemen Pengawasan yang Akuntabel lingkup Inspektorat I				
TOTAL		5.801.222.000	5.801.067.065	99,99

3. Analisis Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran pada sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktifitasnya. *Value for money* merupakan salah satu indikator kinerja sebuah organisasi sektor publik yang memberikan informasi apakah anggaran yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Indikator yang dimaksud adalah ekonomis, efisien, dan efektif. Pengukuran kinerja *value for money* dapat membuat keseimbangan antara pengukuran hasil dengan pengukuran proses. Indikator efektivitas dalam *value for money* berorientasi pada hasil dan lebih bersifat kualitatif, sedangkan indikator ekonomis dan efisiensi lebih berorientasi pada proses dan lebih bersifat kuantitatif.

Konsep pokok *value for money* antara lain:

1. Ekonomis: pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomis terkait dengan sejauhmana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input *resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
2. Efektivitas: tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.
3. Efisiensi: pencapaian output yang optimal dengan input tertentu atas penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Dalam hal ini, efisiensi merupakan perbandingan realisasi output dengan input (anggaran) yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Dengan mengacu pada konsep dan kriteria diatas, dapat disampaikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk mendukung tugas dan fungsi Inspektorat I telah dikelola dengan ekonomis, efektif dan efisien dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Ekonomis

Pengelolaan anggaran Inspektorat I Tahun 2024 telah dilaksanakan secara ekonomis mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Penyusunan anggaran dilaksanakan dengan mengacu kepada sasaran kinerja dan target kinerja dan telah melalui proses rewiu yang dilaksanakan oleh auditor internal yang ditugaskan untuk memastikan rancangan anggaran telah sesuai dengan sasaran dan target kinerja, ketentuan yang berlaku, dan ekonomis. Selain itu, dalam penyusunan rencana kegiatan pengawasan Tahun 2024, Inspektorat I menggunakan pendekatan pengawasan berbasis risiko sehingga pelaksanaan

tugas dan fungsi menjadi lebih fokus dan tepat sasaran. Selanjutnya, dalam tahap pelaksanaan, pengelolaan anggaran Inspektorat I diawasi secara berkala oleh auditor internal untuk memastikan organisasi mendapatkan barang, jasa, dan SDM yang berkualitas dengan biaya yang rendah.

2. Efektif

Berdasarkan pengukuran kinerja Tahun 2024, diketahui bahwa dari 13 IK yang ditetapkan, sebanyak 10 IK dapat dicapai melebihi target dan 3 (tiga) IK tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian IK ditunjukkan dengan skor kinerja mencapai **107,47%** atau di atas target yang diharapkan. Capaian kinerja tersebut didukung dengan penganggaran yang dikelola secara efektif serta adanya proses pengendalian dalam rangka pencapaian target kinerja yang dilaksanakan secara sistematis dan periodik oleh pimpinan, auditor beserta tim pengelola kinerja Inspektorat I.

3. Efisien

Tingkat efisiensi atas pelaksanaan anggaran pengawasan lingkup Inspektorat I Tahun 2024 dapat dilihat dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja yang meliputi capaian *output* dan capaian kinerja organisasi. Secara keseluruhan, pengelolaan anggaran lingkup Inspektorat I dalam mendukung pencapaian kinerja Tahun 2024 dapat dinilai efisien karena dengan dengan *input* anggaran yang lebih kecil (99,99%) dapat dihasilkan kinerja yang melebihi/sesuai target (skor kinerja **107,47%**). Rincian efisiensi anggaran per jenis capaian kinerja disampaikan sebagai berikut:

a. Efisiensi Capaian Kinerja *Output*

Berdasarkan perbandingan antara realisasi anggaran dengan output yang dihasilkan, diketahui bahwa realisasi anggaran Tahun 2024 sebesar 99,99% sedangkan capaian output dari masing-masing kegiatan mencapai 100,00% sehingga terdapat efisiensi sebesar 0,01% dalam menghasilkan output yang optimal.

b. Efisiensi Capaian Kinerja Organisasi

Penggunaan sumber daya anggaran sebesar 99,99% dapat menghasilkan kinerja organisasi Inspektorat I Tahun 2024 pada level “baik” dengan nilai kinerja organisasi sebesar 107,47%. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya anggaran Inspektorat I digunakan secara efisien karena dengan *input* anggaran yang lebih kecil (99,99%) dapat menghasilkan kinerja organisasi yang melebihi

target dengan skor kinerja sebesar 107,47%. Dengan demikian, efisiensi anggaran atas pencapaian kinerja organisasi sebesar 7,48%.

Efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian output dan capaian kinerja organisasi Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 50. Efisiensi Anggaran Inspektorat I Tahun 2024
Per Jenis Capaian Kinerja**

Realisasi Anggaran (<i>Input</i>)	Realisasi Hasil		Efisiensi
99,99% Dari pagu anggaran Rp5.801.222.000	<i>Output</i>	100%	0,01%
	Skor Kinerja Organisasi Inspektorat I	107,47%	7,48%

Pencapaian efisiensi anggaran tersebut merupakan penerapan dari perencanaan pengawasan yang berbasis risiko, optimalisasi pelaksanaan pengawasan yaitu dengan menggabungkan beberapa tema pengawasan yang memungkinkan untuk dilakukan dalam satu waktu sehingga meminimalisir pelaksanaan pengawasan yang bertubi-tubi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan (pengawasan secara daring/*online/desk*) sehingga dapat mengurangi biaya pengawasan.

D. REALISASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN SASARAN KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA

Untuk mencapai 3 (tiga) Sasaran Kinerja yang diukur keberhasilannya dengan 13 Indikator Kinerja didalam dokumen perencanaan Tahun 2024, maka ditetapkan Rencana Aksi (Renaksi) yang menguraikan jenis kegiatan dan waktu pelaksanaan. Kegiatan pendukung yang telah ditetapkan didalam dokumen Renaksi Tahun 2024 sebanyak 159 kegiatan dan telah dilaksanakan sebanyak 158 kegiatan atau capaiannya sebesar 99,37%. Lebih rinci capaian Renaksi Tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Inspektorat I selama Tahun 2024 antara lain:

1. Adanya perubahan dokumen Perjanjian Kinerja Inspektur I pada Triwulan II Tahun 2024 terkait penyesuaian target pada IK-3 (Unit Kerja Mitra Inspektorat I Berpredikat Menuju WBK), dikarenakan adanya perubahan mitra kerja sesuai Permen KP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui aplikasi manajemen kinerja KKP (*kinerjaku.kkp.go.id*), dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Inspektorat I Tahun 2024 adalah **“Baik”** dengan capaian skor kinerja organisasi sebesar **107,47%** dan secara umum capaian kinerja Inspektorat I Tahun 2024 diatas target yang ditetapkan, sehingga perlu dipertahankan atau ditingkatkan pada level **“Sangat Baik”**.
3. Nilai kinerja organisasi Inspektorat I sebesar 107,47% merupakan rata-rata capaian terhadap 3 (tiga) Sasaran Kinerja yang diukur keberhasilannya dengan 13 Indikator Kinerja. Uraian capaian terhadap 13 IK tersebut yaitu sebanyak 10 IK dapat dicapai melebihi target dan 3 IK dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan.
4. Beberapa capaian kinerja Inspektorat I Tahun 2024 yang meraih capaian positif dalam mendukung kinerja Itjen KKP, antara lain:
 - a. Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I sebesar 0,07% hingga akhir periode jangka menengah, dari total realisasi anggaran mitra Inspektorat I atau jauh melebihi target yaitu $\leq 0,5\%$;
 - b. Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat I mendapat nilai 3,68 berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPKP. Tingkat maturitas yang berada pada Level 3 atau pada level **“Terdefinisi”** yang diartikan bahwa penyelenggaraan SPIP telah mengindikasikan bahwa organisasi mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.
 - c. Unit Kerja Mitra Inspektorat I Berpredikat Menuju WBK bertambah menjadi 14 Unit kerja secara kumulatif, pembangunan zona integritas merupakan komitmen bersama dalam rangka membangun KKP bebas dari KKN.
 - d. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat I tetap dipertahankan dengan berpredikat A dengan kenaikan nilai AKIP menjadi 88,53.

- e. Tingkat Efektivitas Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup Mitra Inspektorat I mencapai 89,92%;
 - f. Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN lingkup Mitra Inspektorat I mencapai 87,75%;
 - g. Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Mitra Inspektorat I mencapai 90,95%;
 - h. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat I mencapai 97,07%;
 - i. Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat I mencapai 4 (empat) rekomendasi.
5. Dari sisi kinerja keuangan, dapat disampaikan bahwa realisasi anggaran Inspektorat I Tahun 2024 sangat baik, yaitu mencapai Rp5.801.067.065,00 atau 99,99% dari pagu efektif sebesar Rp5.801.222.000,00. Realisasi anggaran tersebut jika dibandingkan dengan capaian output kegiatan sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 107,47% maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya anggaran Inspektorat I Tahun 2024 cukup efisien karena dengan penggunaan anggaran yang lebih kecil dapat menghasilkan capaian kinerja yang lebih tinggi.

B. PERMASALAHAN

Secara umum, tidak terdapat kendala/permasalahan dalam pencapaian target kinerja Inspektorat I Tahun 2024. Hal ini terlihat dari capaian indikator kinerja, yaitu dari 13 IK yang telah ditetapkan, 10 IK diantaranya mendapatkan capaian diatas target dan 3 (tiga) IK capaiannya sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun demikian, tantangan yang akan dihadapi dalam melaksanakan pengawasan kedepan akan semakin kompleks, dengan keterbatasan anggaran dan Auditor yang ada, Inspektorat I dituntut dapat memberikan jaminan bahwa pelaksanaan kegiatan mitra kerja guna mendukung Program Ekonomi Biru telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan kegiatan dan terhindar dari penyimpangan. Untuk itu, perencanaan pengawasan harus disusun dengan pendekatan penilaian risiko sehingga pelaksanaan pengawasan tepat sasaran serta mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi saat pelaksanaan pengawasan kepada mitra kerja.

C. LANGKAH PERBAIKAN

Terhadap kondisi yang ada pada uraian permasalahan maka sebagai bentuk perbaikan kedepan dalam rangka pencapaian target kinerja organisasi Inspektorat I agar tetap optimal, maka langkah perbaikan yang akan dilakukan yaitu:



- a. Menyusun rencana pengawasan Inspektorat I yang akan ditetapkan didalam PKPT melalui pendekatan penilaian risiko terhadap kegiatan mitra kerja;
- b. Mengkomunikasikan rencana pengawasan yang akan dilaksanakan kepada mitra kerja guna mendapatkan masukan terhadap objek maupun waktu pelaksanaan pengawasan;
- c. Melakukan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pengawasan dengan berpedoman pada PKPT yang telah ditetapkan;
- d. Pemanfaatan teknologi informasi melalui penggunaan AMS pada pelaksanaan pengawasan.



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520336
LAMAN www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT I**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Teuku Nilwan
Jabatan : Inspektur I
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Tornanda Syaifullah
Jabatan : Inspektur Jenderal
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 8 Januari 2024

**Pihak Kedua
Inspektur Jenderal**


Tornanda Syaifullah

**Pihak Pertama
Inspektur**


Teuku Nilwan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT I**

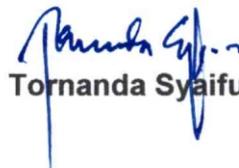
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK. 1	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah lingkup Mitra Inspektorat I	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I (%)	≤ 0,5
		2	Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat I (Nilai)	3,3
		3	Unit Kerja Mitra Inspektorat I Berpredikat Menuju WBK (Jumlah Akumulasi)	20 Unit
		4	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat I (Nilai)	82,5 (A)
SK. 2	Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Efektif lingkup Inspektorat I	5	Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat I (%)	82
		6	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat I	82
		7	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat I	82
		8	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat I (%)	80
		9	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat I (Rekomendasi)	4
		10	Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Inspektorat I (%)	89
		11	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat I (%)	80
SK. 3	Dukungan Manajemen Pengawasan yang Akuntabel lingkup Inspektorat I	12	Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat I (%)	100
		13	Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat I (%)	100

DATA ANGGARAN

No	KEGIATAN/SASARAN KEGITAN	ANGGARAN (Rp)
1	Kegiatan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Pada Unit Kerja Mitra Inspektorat I dan Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan	6.296.347.000
SK.1	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah lingkup KKP Mitra Inspektorat I	
SK.2	Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Efektif lingkup Inspektorat I	
SK.3	Dukungan Manajemen Pengawasan yang Akuntabel lingkup Inspektorat I	
Total Anggaran Inspektorat I Tahun 2024		6.296.347.000

Jakarta, 8 Januari 2024

**Pihak Kedua
Inspektur Jenderal**


Tornanda Syaifullah

**Pihak Pertama
Inspektur I**


Teuku Nilwan



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520336
LAMAN www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT I**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Teuku Nilwan
Jabatan : Inspektur I
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Tornanda Syaifullah
Jabatan : Inspektur Jenderal
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Mei 2024

**Pihak Kedua
Inspektur Jenderal**


Tornanda Syaifullah

**Pihak Pertama
Inspektur I**


Teuku Nilwan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT I**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK. 1	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah lingkup Mitra Inspektorat I	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I (%)	≤ 0,5
		2	Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat I (Nilai)	3,3
		3	Unit Kerja Mitra Inspektorat I Berpredikat Menuju WBK (Jumlah Akumulasi)	13 Unit
		4	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat I (Nilai)	83 (A)
SK. 2	Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Efektif lingkup Inspektorat I	5	Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat I (%)	82
		6	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat I	82
		7	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat I	82
		8	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat I (%)	80
		9	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat I (Rekomendasi)	4
		10	Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Inspektorat I (%)	89
		11	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat I (%)	80
SK. 3	Dukungan Manajemen Pengawasan yang Akuntabel lingkup Inspektorat I	12	Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat I (%)	100
		13	Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat I (%)	100

DATA ANGGARAN

No	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Kegiatan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Pada Unit Kerja Mitra Inspektorat I dan Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan	6.296.347.000
SK.1	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah lingkup KKP Mitra Inspektorat I	
SK.2	Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Efektif lingkup Inspektorat I	
SK.3	Dukungan Manajemen Pengawasan yang Akuntabel lingkup Inspektorat I	
Total Anggaran Inspektorat I Tahun 2024		6.296.347.000

Jakarta, 22 Mei 2024

Pihak Kedua
Inspektur Jenderal


Tornanda Syaifullah

Pihak Pertama
Inspektur I


Teuku Nilwan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR 8/ITJ.1/TU.210/I/2025

Yth. : Sekretaris Itjen
Dari : Inspektur I
Hal : Penyampaian Capaian Rencana Aksi Terhadap Pencapaian Target Kinerja Periode Triwulan IV dan Tahunan 2024
Lampiran : Satu Berkas
Tanggal : 7 Januari 2025

Dalam rangka pencapaian target kinerja periode Triwulan IV Tahun 2024, Inspektorat I telah menetapkan indikator-indikator yang tertuang didalam Rencana Aksi (Renaksi Pencapaian IKU). Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan. Bersama ini kami sampaikan bahwa terdapat 34 kegiatan yang menjadi target renaksi pencapaian IKU pada periode Triwulan IV Tahun 2024, dengan capaian sebesar 105,88% atau realisasi kegiatan sebesar 36 kegiatan. Sedangkan capaian atas renaksi secara tahunan sebesar 99,37% atau sebanyak 158 kegiatan dari target 159 kegiatan untuk mencapai IKU telah dilaksanakan, secara terperinci capaian rencana aksi sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Teuku Nilwan

Tembusan:
Inspektur Jenderal

**CAPAIAN RENCANA AKSI TERHADAP PENCAPAIAN TARGET KINERJA
PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2024**

Unit Kerja : Inspektorat I
Anggaran : Rp6.296.347.000

No	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Satuan	Uraian			Permasalahan	Rencana aksi	Keterangan		
					Target	Realisasi	Prosentase (%)					
1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I (%)	≤0,5	1 Reviu PA dan PBJ Mitra Inspektorat I	Kegiatan	2	2	100					
			2 Pelaksanaan Audit Kinerja pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan	2	0	0				Tidak terlaksana dikarenakan adanya perubahan kebijakan penghematan pada jenis belanja perjalanan dinas	Telah dilakukan revisi PKPT berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 125 Tahun 2025.
			3 Probity Audit Persiapan/Perencanaan/Pelaksanaan pada Mitra Inspektorat	Kegiatan	2	6	300					
			4 Reviu RKA-K/L Pagu Definitif pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan	2	2	100					
			5 Reviu PIPK Mitra Inspektorat I	Kegiatan	2	2	100					

2	Tingkat Maturitas Implementasi SPI Mitra Inspektorat I (Nilai)	3,3	6	Reviu MR Mitra Inspektorat I tahun 2025	Kegiatan	2	2	100			
3	Tingkat efektifitas pengawasan pengelolaan BMN lingkup Mitra Inspektorat I	82	7	Penilaian Efektivitas Pengawasan Pelaksanaan BMN pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan	2	2	100			
4	Tingkat efektifitas pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Mitra Inspektorat I	82	8	Penilaian Efektivitas Pengawasan Pelaksanaan PBJ pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan	2	2	100			
5	Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Mitra Inspektorat I (%)	80	9	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan	2	2	100			
6	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan lingkup Mitra Inspektorat I (rekomendasi)	4	10	Kajian/Evaluasi/Riviu Kebijakan lingkup mitra	Kegiatan	2	2	100			
7	Prosentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standard mutu pengawasan Inspektorat I (%)	89	11	Evaluasi Pengendalian Mutu Pengawasan	Kegiatan	1	1	100			
8	Prosentase tingkat kepatuhan pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat I (%)	80	12	Monitoring Pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat	Kegiatan	1	1	100			
			13	Evaluasi Pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat	Kegiatan	1	1	100			
9	Tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan kinerja lingkup Inspektorat	100	14	Pengisian data capaian kinerja pada aplikasi pengelolaan kinerja KKP	Kegiatan	1	1	100			
			15	Pengukuran Capaian Kinerja	Kegiatan	1	1	100			
			16	Pelaporan Kinerja Interim	Kegiatan	1	1	100			
			17	Pelaporan Kinerja Tahunan	Kegiatan	1	1	100			
			18	Penyusunan Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	Kegiatan	1	1	100			
10	Terkelolanya anggaran kegiatan secara tertib dan akuntabel lingkup Inspektorat I (%)	100	19	Pengisian aplikasi e-monev Bappenas	Kegiatan	3	3	100			
			20	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran lingkup Inspektorat	Kegiatan	3	3	100			

CAPAIAN RENCANA AKSI TERHADAP PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024

Unit Kerja : Inspektorat I
 Anggaran : Rp6.296.347.000

No	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Satuan	Uraian			Permasalahan	Rencana aksi	Keterangan
					Target	Realisasi	Prosesntase (%)			
1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I (%)	≤0,5	1 Reviu terhadap laporan keuangan Mitra Inspektorat I	Kegiatan	4	4	100			
			2 Reviu PA dan PBJ Mitra Inspektorat I	Kegiatan	8	8	100			
			3 Pelaksanaan Audit Kinerja pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan	6	2	33	4 kegiatan audit yang tidak dilaksanakan, dikarenakan adanya perubahan kebijakan pergantian mitra kerja dari sebelumnya BPPSDMKP menjadi Direktorat	telah diusulkan perubahan PKPT melalui memorandum Inspektur I Nomor 62/ITJ.1/TU.210/IV/2024 tanggal 1 April 2024	Adanya perubahan PKPT melalui Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 64 Tahun 2024 tanggal 1 April 2024, yaitu perubahan pelaksanaan kegiatan audit menjadi 2.
			4 Evaluasi Kinerja pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan	2	2	100			
			5 Probitiy Audit Persiapan/Perencanaan/Pelaksanaan pada Mitra Inspektorat	Kegiatan	8	11	138			
			6 Pemantauan Kinerja PMO Hibah JICA	Kegiatan	2	1	50	1 kegiatan Pemantauan Kinerja PMO Hibah JICA yang tidak terlaksana	Diusulkan untuk direvisi sesuai memorandum Nomor 164/ITJ.1/TU.210/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024	Adanya perubahan PKPT melalui Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 125 Tahun 2024 tanggal 27 September 2024, yaitu perubahan pelaksanaan kegiatan Pemantauan Kinerja PMO Hibah JICA menjadi 1 kegiatan.
			7 Evaluasi PNBPN pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan	7	8	114			Berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 125 Tahun 2024 tanggal 27 September 2024, Kegiatan Evaluasi PNBPN pada Mitra Inspektorat I menjadi 8. Saker.
			8 Pemantauan Kinerja BLU di LPMUKP	Kegiatan	1	2	200			Berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 125 Tahun 2024 tanggal 27 September 2024, Kegiatan Pemantauan Kinerja BLU di LPMUKP
			9 Reviu RKA-K/L Tahun Pagu Indikatif 2025 pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan	2	2	100			
			10 Reviu RKA-K/L Pagu Definitif pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan	2	2	100			

2	Tingkat Maturitas Implementasi SPI Mitra Inspektorat I (Nilai)	3,3	11	Reviu PIPK Mitra Inspektorat I	Kegiatan	2	2	100			
			12	Reviu Maturitas Penyelenggaraan SPIP 2023 pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan	2	2	100			
			13	Evaluasi Implementasi Manajemen Risiko 2023 pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan	2	2	100			
			14	Reviu MR Mitra Inspektorat I tahun 2025	Kegiatan	2	2	100			
3	Unit kerja Mitra Inspektorat I berpredikat menuju WBK (jumlah akumulasi)	20 Unit	15	Asistensi Pembangunan ZI Menuju WBK pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan	2	2	100			
			16	Pemantauan Pembangunan ZI Menuju WBK pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan	12	15	125			
4	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat I (Nilai)	82,5 (A)	17	Reviu Laporan Kinerja pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan	2	2	100			
			18	Evaluasi Implementasi SAKIP 2024 pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan	2	2	100			
5	Tingkat efektifitas pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Mitra Inspektorat I (%)	82	19	Pemantauan Kinerja Sistem Informasi Terintegrasi dan Persiapan Implementasi Nano Satelit pada Pusdatin	Kegiatan	1	1	100			
			20	Evaluasi Dukungan Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan	2	2	100			
			21	Evaluasi Pelayanan Publik pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan	9	7	78	2 Evaluasi Pelayanan Publik pada Mitra Inspektorat I yang tidak terlaksana	Diusulkan untuk direvisi sesuai memorandum Nomor 164/ITJ.1/TU.210/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024	Adanya perubahan PKPT melalui Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 125 Tahun 2024 tanggal 27 September 2024, yaitu perubahan pelaksanaan kegiatan Evaluasi Pelayanan Publik pada Mitra Inspektorat I menjadi 7 kegiatan.
			22	Pengawasan Persiapan Kampung Nelayan Modern pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan	2	0	0	Tidak terdapat kegiatan Ditjen PKRL yang mendukung pelaksanaan Kalamo.	Diusulkan untuk direvisi sesuai memorandum Nomor 164/ITJ.1/TU.210/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024	Penghapusan kegiatan pengawasan persiapan kampung nelayan modern pada mitra Inspektorat I pada PKPT berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 125 Tahun 2024 tanggal 27 September 2024.

23	Reviu Peta Jalan Ekonomi Biru Perluasan Kawasan Konservasi	Kegiatan	1	1	100			
24	Reviu Peta Jalan Ekonomi Biru Pengelolaan Sampah Plastik di	Kegiatan	1	1	100			
25	Reviu Peta Jalan Ekonomi Biru Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-	Kegiatan	1	1	100			
26	Pemantauan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	Kegiatan	1	1	100			
27	Pemantauan Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap Penanggulangan Dampak Pencemaran (dalam rangka	Kegiatan	1	1	100			
28	Pemantauan Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik di Laut	Kegiatan	1	1	100			Perubahan kegiatan pengawasan yang lebih komprehensif menjadi kegiatan evaluasi Program Prioritas Ekonomi Biru Pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Pengendalian Sampah Plastik di Laut.
29	Evaluasi Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Kegiatan	1	1	100			
30	Evaluasi Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah KKP Tahun 2023	Kegiatan	1	1	100			

6	Tingkat efektifitas pengawasan pengelolaan BMN lingkup Mitra Inspektorat I	82	31 Evaluasi Pengelolaan BMN pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan	1	1	100			
			32 Pemantauan Implementasi Program P3DN	Kegiatan	2	2	100			
			33 Reviu RKBMN 2026 pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan	2	2	100			
			34 Penilaian Efektivitas Pengawasan Pelaksanaan BMN pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan	2	2	100			
7	Tingkat efektifitas pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Mitra Inspektorat I	82	35 Penilaian Efektivitas Pengawasan Pelaksanaan PBJ pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan	2	2	100			
8	Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Mitra Inspektorat I (%)	80	36 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan	8	8	100			
9	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan lingkup Mitra Inspektorat I (rekomendasi)	4	37 Kajian/Evaluasi/Riviu Kebijakan lingkup mitra	Kegiatan	4	4	100			

10	Prosentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standard mutu pengawasan Inspektorat I (%)	89	38 Telaah Sejawat Inspektorat Jenderal KKP (Internal)	Kegiatan	1	1	100			
			39 Evaluasi Pengendalian Mutu Pengawasan	Kegiatan	2	2	100			
11	Prosentase tingkat kepatuhan pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat I (%)	80	40 Monitoring Pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat	Kegiatan	4	4	100			
			41 Evaluasi Pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat	Kegiatan	2	2	100			
12	Tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan kinerja lingkup Inspektorat	100	42 Pengisian data capaian kinerja pada aplikasi pengelolaan kinerja KKP	Kegiatan	4	4	100			
			43 Pengukuran Capaian Kinerja	Kegiatan	4	4	100			
			44 Pelaporan Kinerja Interim	Kegiatan	4	4	100			
			45 Pelaporan Kinerja Tahunan	Kegiatan	1	1	100			
			46 Penyusunan Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	Kegiatan	2	2	100			
13	Terkelolanya anggaran kegiatan secara tertib dan akuntabel lingkup Inspektorat I (%)	100	47 Pengisian aplikasi e-monev Bappenas	Kegiatan	12	12	100			
			48 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran lingkup Inspektorat	Kegiatan	12	12	100			

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 1608/ITJ.0/TU.210/IX/2024

Yth. : Kepala Biro Perencanaan
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Hal : Capaian Indikator Kinerja Utama Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal (BPK RI) dari Total Realisasi Anggaran KKP
Lampiran : -
Tanggal : 30 September 2024

Bersama ini disampaikan bahwa Itjen KKP telah melaksanakan pengukuran IKU Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal (BPK RI), dengan hasil sebesar 0,09% dengan target kurang dari 1%. Nilai tersebut diperoleh dengan membagi besarnya nilai keuangan terhadap besarnya realisasi anggaran. Adapun rincian capaian tersebut sebagaimana pada tabel berikut :

No	Eselon I	Nilai Keuangan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Setjen	571.218.613,00	631.793.931.033,00	0,09%
2	Ditjen PKRL	175.999.847,00	399.297.824.951,00	0,04%
3	Ditjen PSDKP	1.118.316.959,00	1.119.216.743.475,00	0,10%
4	Ditjen Perikanan Tangkap	568.110.399,00	842.679.861.445,00	0,07%
5	Ditjen Perikanan Budidaya	647.733.195,00	1.087.136.906.277,00	0,06%
6	BPPSDMKP	1.832.712.563,00	1.342.845.268.762,00	0,14%
7	Ditjen PDSPKP	998.491.792,00	339.604.537.406,00	0,29%
8	BPPMHKP	11.350.000,00	497.626.943.467,00	0,00%
9	Itjen	23.878.250,00	75.393.908.501,00	0,03%
	Jumlah	5.947.811.618,00	6.335.595.925.317,00	0,09%

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ivy Silfia Irani

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal
2. Sekretaris Jenderal



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH
BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN**

Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120
Telepon (021) 85910031 (*hunting*), Faksimile (021) 85903713
E-mail deputi1@bpkp.go.id Website www.bpkp.go.id

Nomor : PE.09.03/SP-42/D1/02/2025 14 Januari 2025
Lampiran : Satu Laporan
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian
Mandiri Maturitas Penyelenggaraan
SPIP Terintegrasi pada Kementerian
Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
di Jakarta

Bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 Nomor PE.09.03/LHP-232/D102/1/2024 tanggal 31 Desember 2024, dengan pokok bahasan sebagai berikut:

1. Proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 secara umum telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
2. Hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, diuraikan sebagai berikut:
 - a. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,683 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Level 3;
 - b. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,616 atau telah memenuhi karakteristik MRI pada Level 3; dan
 - c. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 3,526 atau telah memenuhi karakteristik IEPK pada Level 3.

Uraian lebih lanjut hasil evaluasi disajikan pada Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Kepala BPKP,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Aryanto Wibowo

Tembusan Yth.:

1. Plt. Kepala BPKP (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85 TAHUN 2024

TENTANG
UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tentang 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1378);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tentang 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penetapan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan penilaian internal oleh tim penilai internal Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap pemenuhan lembar kerja evaluasi pada komponen pengungkit dan hasil serta pengujian implementasi terhadap pembangunan zona integritas periode 2023 sampai dengan September 2024.

KETIGA : Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan dievaluasi keberlanjutannya oleh tim penilai internal dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2024

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Effin Martiana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85 TAHUN 2024
TENTANG
UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN
2024

UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

NO.	UNIT KERJA
1.	Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang
2.	Biro Perencanaan
3.	Direktorat Pengendalian Operasi Armada
4.	Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang
5.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang
6.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung
7.	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu
8.	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
9.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana
10.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate
11.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung
12.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang
13.	Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Effin Martiana



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3522805, FAKSIMILE (021) 3522805
LAMAM www.kkp.go.id SUREL itjen@kkp.go.id

Nomor : B.242/ITJ/HP.440/VIII/2024 5 Agustus 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Ikhtisar Hasil Evaluasi Mandiri Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Lingkup Kementerian
Kelautan dan Perikanan**

Yth. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur,
dan Pengawasan, Kementerian PANRB
di Jakarta

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 88 Tahun 2023 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagaimana uraian berikut:

1. Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan, Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melaksanakan reviu atas Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di KKP dan Unit Eselon I lingkup KKP.
Evaluasi AKIP dilaksanakan pada tanggal 15 s.d. 25 Juli 2024, bertujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - c. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi; dan
 - d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Dalam evaluasi tersebut, Inspektorat Jenderal KKP telah menyusun Pedoman Evaluasi yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana disesuaikan dengan perubahan organisasi KKP tahun 2024.
3. Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi, selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, dokumen Perjanjian Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya. Hasil evaluasi

merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di KKP dan masing-masing unit Eselon I lingkup KKP.

4. Hasil evaluasi AKIP KKP memperoleh nilai **86,11** dengan predikat penilaian "**A**" (**memuaskan**). Adapun hasil evaluasi untuk unit Eselon I lingkup KKP sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Unit Kerja	Komponen Manajemen Kinerja (%)				Nilai Hasil Evaluasi Tahun 2024	Predikat Penilaian
	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Kinerja		
KKP	26,46	25,62	13,09	20,94	86,11	A
Setjen	27,04	26,55	13,58	20,81	87,98	A
Itjen	28,50	26,66	12,60	20,50	88,26	A
Ditjen PT	26,85	27,23	13,39	20,72	88,18	A
Ditjen PB	26,40	24,60	12,54	20,50	84,04	A
Ditjen PSDKP	27,60	27,41	13,05	20,50	88,56	A
Ditjen PDSPKP	27,41	26,10	13,05	20,13	86,69	A
Ditjen PKRL	26,51	27,41	13,80	21,34	89,07	A
BPPMHKP	26,63	26,10	12,66	20,66	86,04	A
BPPSDMKP	27,15	27,68	13,50	20,47	88,79	A

5. Sehubungan dengan hasil evaluasi sebagaimana uraian pada butir 4 di atas, kami telah merekomendasikan kepada masing-masing Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP beserta seluruh jajarannya agar melakukan langkah perbaikan yang diperlukan, terutama melakukan upaya secara berkelanjutan untuk meningkatkan capaian kinerja yang masih di bawah target yang telah ditetapkan.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Inspektur Jenderal,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Tornanda Syaifullah

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Sekretaris Jenderal
4. Direktur Jenderal/Kepala Badan Lingkup KKP

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR 469/ITJ.3/TU.140/XI/2024

Yth. : Inspektur Jenderal
Dari : Inspektur III
Hal : **Perbaikan Laporan Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah Lingkup KKP TA 2023**
Lampiran : Dua Berkas
Tanggal : 28 November 2024

Dalam rangka penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Efektivitas Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah Tahun 2023, Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi terhadap kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tersebut yang dilakukan secara uji petik dengan melibatkan Penyuluh Perikanan dan Auditor Inspektorat Jenderal, pada tanggal 2 Oktober s.d. 8 November 2024, meliputi kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB), Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDS), dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) TA 2023, sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi terdiri dari:
 - a. Efektivitas Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah Tahun 2023 untuk masing-masing Unit Kerja Eselon I **telah melampaui target sebesar 80,00**, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) **DJPT sebesar 90,80;**
 - 2) **DJPB sebesar 82,56;**
 - 3) **DJPDS sebesar 92,44;** dan
 - 4) **DJKRL sebesar 93,29.**Rincian lengkap diuraikan pada Lampiran 1.
 - b. Efektivitas Pengawasan Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah Tahun 2023 lingkup KKP mencapai **88,61 dari target sebesar 82,00**, sebagaimana uraian pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Pengawasan Kegiatan Prioritas/ Bantuan Pemerintah Lingkup KKP Tahun 2023

Unit Kerja Eselon I	Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Banper	Efektivitas Pengawasan PBJ	Efektivitas Pengawasan Kegiatan Prioritas/ Banper *	Inspektorat	Capaian Itjen
DJPKRL	93,29	86,54	89,92	I	88,61
DJPT	90,80	84,06	87,43	II	
DJPB	82,56	89,22	85,89	III	
DJPDS	92,44	90,00	91,22	IV	

Keterangan:

* Efektivitas Pengawasan Kegiatan Prioritas/Banper merupakan rata-rata dari Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Banper dan Efektivitas Pengawasan PBJ

2. Evaluasi dilakukan secara uji petik dilakukan terhadap 282 kelompok penerima bantuan pada 12 provinsi, yaitu Provinsi: 1) Bali; 2) Jawa Barat; 3) Jawa Tengah; 4) Jawa Timur; 5) Lampung; 6) Maluku; 7) Maluku Utara; 8) Nusa Tenggara Barat; 9) Papua; 10) Sulawesi Selatan; 11) Sulawesi Tenggara; dan 12) Sulawesi Utara. Rincian jenis dan jumlah bantuan serta kabupaten/kota penerima sebagaimana tercantum pada Lampiran 1.
3. Evaluasi dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek, yaitu:
 - a. **Pencapaian Tujuan (PT)** yang diukur berdasarkan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan sesuai Petunjuk Teknis masing-masing jenis bantuan, dengan bobot 80%;
 - b. **Integrasi (IG)** yang diukur berdasarkan pemahaman penerima atas hak dan kewajiban, dengan bobot 10%; dan
 - c. **Adaptasi (AT)** yang diukur berdasarkan kemampuan penerima mengembangkan bantuan, dengan bobot 10%.
- c. Berdasarkan Tabel 1 tersebut di atas, masih terdapat pemanfaatan bantuan yang belum sepenuhnya efektif, sebagai berikut:
 - a. Pencapaian Tujuan memperoleh skor 75,87, disebabkan antara lain adanya 13 kelompok yang belum memanfaatkan bantuan, belum memperoleh manfaat bantuan, atau tidak melanjutkan pemanfaatan bantuan sesuai dengan tujuan penyaluran bantuan.

- b. Integrasi memperoleh skor 8,08, disebabkan antara lain kelompok penerima belum sepenuhnya memahami kewajiban untuk melakukan pelaporan atas pemanfaatan bantuan yang telah diterima.
 - c. Adaptasi memperoleh skor 6,01, disebabkan antara lain kelompok penerima belum berhasil mengembangkan bantuan yang diterimanya, baik untuk pengembangan usaha kelompok maupun menjadi acuan masyarakat lain dalam usaha perikanan dan kelautan.
4. Hasil evaluasi terhadap masing-masing mitra (DJPT, DJPB, DJPDSKP, dan DJPKRL) tersebut, telah dilakukan pembahasan dan pemberian rekomendasi perbaikan oleh Inspektorat terkait guna perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan bantuan pemerintah sesuai tujuan penyalurannya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Wahjudi Poerwanto

Tembusan:

1. Sekretaris Itjen
2. Inspektur I
3. Inspektur II
4. Inspektur IV
5. Inspektur V

Lampiran 1. Memorandum
 Nomor : 469/ITJ.3/TU.140/XI/2024
 Tanggal : 28 November 2024

**Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/
 Bantuan Pemerintah Lingkup KKP Tahun 2023**

JENIS BANTUAN	JUMLAH *		SKOR			
	Bantuan	Dievaluasi	PT	IG	AT	TOTAL
DJPT : Alat Penangkapan Ikan (API)	119	102	78,24	7,45	5,78	91,47
Kapal	3	3	80,00	8,33	3,33	91,67
Mesin Kapal	104	91	75,38	8,38	6,26	90,03
TOTAL DJPT	226	196	76,94**	7,90**	5,97**	90,80**
DJPB : Mesin Pakan Ikan	3	2	57,50	10,00	2,50	70,00
Karamba Jaring Apung (KJA)	19	11	55,91	10,00	1,82	67,73
Kluster	6	6	80,00	10,00	6,67	96,67
Excavator	7	7	71,43	8,57	5,71	85,71
Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP)	4	4	80,00	8,75	7,50	96,25
Kincir	11	9	71,11	7,78	6,67	85,56
TOTAL DJPB	50	39	68,46**	9,10**	5,00**	82,56**
DJPDSKP : Pasar Ikan	2	2	77,50	8,75	10,00	96,25
Chest Freezer	29	27	78,89	7,50	5,93	92,31
Gudang Beku/Portabel	3	3	80,00	8,67	10,00	98,67
Kendaraan Berpendingin	5	5	78,00	9,80	10,00	97,80
Pabrik Es	3	3	65,00	7,50	3,33	75,83
TOTAL DJPDS	42	40	77,75**	7,94**	6,75**	92,44**
DJPRL : Bantuan Konservasi (KOMPAK)	2	1	80,00	10,00	10,00	100,00
Pengelolaan Sampah	1	1	80,00	10,00	10,00	100,00
Vegetasi Pantai	2	2	77,50	6,75	5,00	89,25
Wisata Bahari	3	3	73,33	8,17	10,00	91,50
TOTAL DJPKRL	8	7	76,43**	8,29**	8,57**	93,29**
TOTAL KKP	326	282	75,87**	8,08**	6,01**	89,96**

Keterangan:

* Jumlah dimaksud adalah pada lokasi Uji Petik

** Merupakan skor rata-rata gabungan jenis bantuan

Lampiran 2. Memorandum
 Nomor : 469/ITJ.3/TU.140/XI/2024
 Tanggal : 28 November 2024

**Rincian Jenis, Jumlah, dan Skor
 Kabupaten/Kota Penerima Bantuan yang Dievaluasi**

No	Kabupaten / Kota	Jenis Bantuan	Jumlah Kelompok Penerima	Jumlah Kelompok Penerima yang Dievaluasi	Skor
1	Biak Numfor		35	33	81,86
		Alat Penangkapan Ikan (API)	17	16	80,63
		Kapal	3	3	91,67
		Mesin Kapal	11	10	79,50
		Gudang Beku/Portabel	1	1	100,00
		Kendaraan Berpendingin	1	1	99,00
		Pabrik Es	2	2	71,25
2	Bima		9	9	59,61
		Mesin Kapal	4	4	47,50
		Karamba Jaring Apung (KJA)	2	2	37,50
		Chest Freezer	2	2	97,50
		Wisata Bahari	1	1	76,50
3	Blitar		20	20	96,13
		Alat Penangkapan Ikan (API)	3	3	98,33
		Mesin Kapal	15	15	96,33
		Chest Freezer	1	1	82,50
		Bantuan Konservasi (KOMPAK)	1	1	100,00
4	Cianjur		45	41	90,00
		Alat Penangkapan Ikan (API)	36	32	91,56
		Mesin Kapal	3	3	98,33
		Excavator	2	2	82,50
		Kincir	2	2	60,00
		Chest Freezer	2	2	90,00
5	Jepara		13	12	93,79
		Alat Penangkapan Ikan (API)	8	8	97,19
		Karamba Jaring Apung (KJA)	2	1	65,00
		Kluster	1	1	95,00
		Kincir	1	1	90,00
		Wisata Bahari	1	1	98,00

No	Kabupaten / Kota	Jenis Bantuan	Jumlah Kelompok Penerima	Jumlah Kelompok Penerima yang Dievaluasi	Skor
6	Kepulauan Sula		11	11	94,86
		Mesin Kapal	4	4	99,38
		Karamba Jaring Apung (KJA)	2	2	82,50
		Excavator	1	1	95,00
		Pasar Ikan	1	1	92,50
		Chest Freezer	2	2	98,75
		Gudang Beku/Portabel	1	1	96,00
7	Pulau Taliabu		10	1	85,00
		Alat Penangkapan Ikan (API)	9	-	
		Pabrik Es	1	1	85,00
8	Kota Manado		1	1	100,00
		Kendaraan Berpendingin	1	1	100,00
9	Lampung Timur		32	32	95,55
		Alat Penangkapan Ikan (API)	13	13	98,46
		Mesin Kapal	6	6	95,83
		Mesin Pakan Ikan	1	1	90,00
		Kluster	1	1	95,00
		Excavator	1	1	80,00
		Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP)	2	2	97,50
		Kincir	2	2	92,50
		Chest Freezer	5	5	93,50
		Kendaraan Berpendingin	1	1	90,00
10	Maluku Tengah		57	30	85,58
		Alat Penangkapan Ikan (API)	14	11	87,50
		Mesin Kapal	20	9	87,50
		Mesin Pakan Ikan	1	-	
		Karamba Jaring Apung (KJA)	12	5	77,00
		Excavator	1	1	70,00
		Kincir	2	-	
		Chest Freezer	5	3	87,50
		Kendaraan Berpendingin	1	1	100,00
		Bantuan Konservasi (KOMPAK)	1	-	
11	Maros		5	5	94,00
		Kincir	1	1	90,00

No	Kabupaten / Kota	Jenis Bantuan	Jumlah Kelompok Penerima	Jumlah Kelompok Penerima yang Dievaluasi	Skor
		Chest Freezer	4	4	95,00
12	Minahasa Utara		3	3	83,33
		Mesin Pakan Ikan	1	1	50,00
		Pengelolaan Sampah	1	1	100,00
		Wisata Bahari	1	1	100,00
13	Muna		3	3	96,67
		Kluster	2	2	95,00
		Pasar Ikan	1	1	100,00
14	Purworejo		45	45	97,47
		Alat Penangkapan Ikan (API)	11	11	97,73
		Mesin Kapal	29	29	98,02
		Kincir	2	2	95,00
		Chest Freezer	1	1	100,00
		Vegetasi Pantai	2	2	89,25
15	Sumbawa		32	31	85,32
		Alat Penangkapan Ikan (API)	7	7	88,93
		Mesin Kapal	11	10	76,50
		Karamba Jaring Apung (KJA)	1	1	55,00
		Kluster	2	2	100,00
		Excavator	2	2	95,00
		Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP)	2	2	95,00
		Kincir	1	1	95,00
		Chest Freezer	5	5	85,50
		Gudang Beku/Portabel	1	1	100,00



Ditandatangani
Secara Elektronik

Wahjudi Poerwanto

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR 267/ITJ.1/HP.640/XII/2024

Yth. : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Dari : Inspektur I
Hal : Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Efektifitas Pengawasan BMN Lingkup KKP Tahun 2024
Lampiran : Satu Lembar
Tanggal : 24 Desember 2024

Berkenaan dengan pencapaian Sasaran Program "Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah Lingkup KKP" melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Lingkup KKP, Inspektorat I telah mengkoordinasikan pelaksanaan pengukuran IKU tersebut pada seluruh Inspektorat melalui 3 (tiga) komponen/subkomponen, yaitu: 1) Kualitas Perencanaan Pengawasan; 2) Kualitas Pelaksanaan Pengawasan; dan 3) Nilai Rata-rata Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Unit Eselon I lingkup KKP. Target capaian IKU dimaksud pada Tahun 2024 untuk Level 1 (Itjen/pengawasan lingkup KKP) dan Level 2 (Inspektorat/pengawasan lingkup Unit Eselon I Mitra) masing-masing sebesar 82%.

Berdasarkan hasil pengukuran, dapat disampaikan bahwa capaian IKU tersebut untuk Level 1 sebesar 94,39%, sedangkan untuk Level 2 masing-masing sebesar 87,50% pada Inspektorat I; 99,00% pada Inspektorat II; 91,50% pada Inspektorat III; 98,00% pada Inspektorat IV, dan 97,00% pada Inspektorat V (rincian pada Lampiran 1). Dengan demikian, capaian IKU Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP Tahun 2024 telah melebihi target yang ditetapkan.

Terkait pencapaian tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk peningkatan pencapaian IKU dimaksud pada tahun berikutnya, diantaranya:

1. Menetapkan kegiatan *advisory services (consulting)* atas pengelolaan BMN Unit Eselon I/Mitra pada Pedoman Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2025;
2. Mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan BMN pada Unit Eselon I lingkup KKP;
3. Mendorong pemanfaatan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)

dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) pada Unit Eselon I lingkup KKP;

4. Mendorong penyelesaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN pada Unit Eselon I lingkup KKP;
5. Mendorong penyelesaian penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat pada Unit Eselon I lingkup KKP;
6. Mendorong tertib administrasi penggunaan BMN dengan kelengkapan Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara (BA) Pemakaian pada Unit Eselon I lingkup KKP;
7. Mendorong penyusunan Laporan BMN Tahunan secara tepat waktu pada Unit Eselon I lingkup KKP.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Teuku Nilwan

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal
2. Inspektur II
3. Inspektur III
4. Inspektur IV
5. Inspektur V

Lampiran 1. Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

NO	INSPEKTORAT	UNIT ESELON I MITRA	NILAI (%)					
			INDIKATOR 1 ^{*)}	INDIKATOR 2 ^{**)}	INDIKATOR 3 ^{***)}	TOTAL	IKU LEVEL 2	IKU LEVEL 1
1	I	Sekretariat Jenderal	10,00	40,00	37,50	87,50	87,75	94,39
		Ditjen PKRL	10,00	38,00	40,00	88,00		
2	II	Ditjen Perikanan Tangkap	20,00	40,00	38,00	98,00	99,00	
		Ditjen PSDKP	20,00	40,00	40,00	100,00		
3	III	Ditjen Perikanan Budidaya	20,00	38,00	37,00	95,00	91,50	
		BPPSDMKP	10,00	40,00	38,00	88,00		
4	IV	Ditjen PDSPKP	20,00	40,00	37,00	97,00	98,00	
		BPPMHKP	20,00	40,00	39,00	99,00		
5	V	Inspektorat Jenderal	20,00	38,00	39,00	97,00	97,00	

Keterangan:

* = Kualitas Perencanaan Pengawasan

** = Kualitas Pelaksanaan Pengawasan

*** = Nilai Rata-rata Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Unit Eselon I

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR 309/ITJ.2/TU.130/XII/2024

Yth. : Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP
Dari : Plh. Inspektur II
Hal : Hasil Penilaian/Pengukuran Indikator Kinerja Utama Efektivitas Pengawasan dan Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP Tahun 2024
Lampiran : Satu Berkas
Tanggal : 28 Desember 2024

Berkenaan dengan pencapaian Sasaran Strategis “Pengawasan Intern KKP yang Handal” melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Lingkup KKP, Inspektorat II telah mengkoordinasikan pelaksanaan pengukuran IKU tersebut pada seluruh Inspektorat melalui 3 (tiga) komponen, yaitu: 1) kualitas perencanaan pengawasan; 2) kualitas pelaksanaan pengawasan; dan 3) tingkat kepatuhan PBJ.

Target capaian IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan PBJ Lingkup KKP Tahun 2024 untuk Level 1 (Inspektorat Jenderal) dan Level 2 (Inspektorat I s.d. V) adalah sebesar 82,00%. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian IKU dimaksud pada Level I dan Level II melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu Level I sebesar 90,93% dan Level II berkisar antara 86,70% s.d. 94,51% sebagaimana dirinci pada Tabel 1. dibawah ini.

Tabel 1. Hasil Pengukuran IKU Efektivitas Pengawasan PBJ Lingkup KKP Tahun 2024

No	Unit Kerja	Unit Eselon I Mitra	Nilai (%)					
			Indikator 1 ¹⁾	Indikator 2 ²⁾	Indikator 3 ³⁾	Total	IKU Level 2	IKU Level 1
1	Inspektorat I	Setjen	16,70	40,00	34,64	91,34	90,95	90,93
		DJPKRL	16,70	40,00	33,86	90,56		
2	Inspektorat II	DJPT	20,00	40,00	38,02	98,02	94,51	
		DJPSDKP	18,35	40,00	32,64	90,99		
3	Inspektorat III	DJPB	20,00	40,00	31,14	91,14	90,34	
		BPPSDMKP	18,35	40,00	31,18	89,53		
4	Inspektorat IV	DJPDSPKP	20,00	40,00	32,32	92,32	92,15	
		BPPMHKP	20,00	40,00	31,98	91,98		
5	Inspektorat V	Itjen	16,70	30,00	40,00	86,70	86,70	

Keterangan:

- 1) = Kualitas Perencanaan Pengawasan
- 2) = Kualitas Pelaksanaan Pengawasan
- 3) = Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa

Selain itu, telah dilakukan pula pengukuran IKU Tingkat Kepatuhan PBJ lingkup Eselon I Tahun 2024 dengan capaian seluruh Unit Eselon I lingkup KKP melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 80,00% dengan rincian hasil pengukuran

sebagaimana disajikan pada Tabel 2. dibawah ini.

Tabel 2. Hasil Pengukuran Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP Tahun 2024

No	Unit Eselon I Mitra	Nilai Subindikator (%)						Nilai Kepatuhan PBJ (%)
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4 ⁴⁾	5 ⁵⁾	6 ⁶⁾	
1	Setjen	10,00	11,65	10,00	37,46	5,00	15,00	89,11
2	DJPKRL	8,35	15,00	10,00	35,66	3,75	15,00	87,76
3	DJPT	10,00	15,00	10,00	41,29	5,00	15,00	96,29
4	DJPSDKP	10,00	10,40	10,00	34,65	5,00	15,00	85,05
5	DJPB	6,67	15,00	10,00	31,84	3,75	15,00	82,24
6	BPPSDMKP	10,00	13,35	10,00	30,94	5,00	15,00	84,29
7	DJPDSPKP	10,00	13,35	10,00	31,84	5,00	15,00	85,19
8	BPPMHKP	10,00	13,75	10,00	31,84	3,75	15,00	84,34
9	Itjen	10,00	15,00	10,00	45,00	5,00	0,00	85,00

Keterangan:

- 1) = Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang/Jasa Strategis Unit Eselon I
- 2) = Perencanaan dan Persiapan Pengadaan
- 3) = Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Dilaksanakan Melalui SPSE
- 4) = Kesesuaian Tahap Pelaksanaan
- 5) = Laporan Penyelenggaran PBJ
- 6) = Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Eselon I Tw I s.d. Tw III Tahun 2024

Terkait pencapaian tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk peningkatan IKU dimaksud pada tahun berikutnya, antara lain mendorong Unit Eselon I agar:

1. Mengumumkan seluruh Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP);
2. Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa paling lambat pada Triwulan I tahun berjalan;
3. Menyiapkan dokumen tender (KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak) pengadaan barang dan jasa dengan kontrak/Surat Perjanjian sejak periode akhir tahun anggaran sebelumnya (T-1) sehingga paket pengadaan barang dan jasa dapat segera dikontrakkan pada kesempatan pertama;
4. Menyelesaikan kontrak/surat perjanjian PBJ tepat waktu; dan
5. Menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan PBJ.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Jayeng C. Purewanto

Tembusan:
Inspektur Jenderal KKP

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR 270/ITJ.1/TU.140/XII/2024

Yth. : Inspektur Jenderal
Dari : Inspektur I
Hal : Laporan Perkembangan Status Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen pada Mitra Inspektorat I Tahun 2024 (s.d Triwulan IV)
Lampiran : Satu Berkas
Tanggal : 30 Desember 2024

Menindaklanjuti Peraturan Inspektur Jenderal KKP Nomor : 37 Tahun 2024 Pasal 55 Ayat (4) yang mengatur bahwa Pelaporan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan (TLRHP) Inspektorat Jenderal (Itjen) dilakukan oleh Inspektur dengan menyusun dan menyampaikan laporan status TLRHP sesuai bidang tugas pengawasannya kepada Inspektur Jenderal setiap triwulan dengan tembusan kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal, dengan ini disampaikan Laporan Perkembangan Status Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen pada Mitra Inspektorat I, pada Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) s.d Triwulan IV Tahun 2024.

Berdasarkan data rekapitulasi penyelesaian temuan hasil pengawasan Itjen KKP lingkup Setjen dan Ditjen PKRL, Capaian IKU Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat I s.d. Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 97,07% dari target 80% sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Teuku Nilwan

Tembusan:
Sekretaris Inspektorat Jenderal

Lampiran 1. Perhitungan Capaian IKU: Presentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat I Triwulan IV Tahun 2024

No	Eselon I	LHP	Temuan Awal			Tindak Lanjut			Sisa Temuan		
			Temuan	Rekomendasi	Keuangan (Rp)	Temuan	Rekomendasi	Keuangan (Rp)	Temuan	Rekomendasi	Keuangan (Rp)
1	SETJEN	43	129	196	120,551,753	129	196	120,551,753	-	-	-
2	Ditjen PKRL	72	248	453	1,152,210,330.00	235	434	156,082,355	13	19	996,127,975
	Jumlah	115	377	649	1,272,762,083.00	364	630	276,634,108	13	19	996,127,975

Capaian IKU TW IV 2024 $(630/649 \times 100) = 97,07\%$

Lampiran 2. Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen pada Sekretariat Jenderal TW IV 2024

No	No LHP	Obyek Pemeriksaan	Temuan Awal			Tindak Lanjut			Sisa Temuan		
			Temuan	Rekomen dasi	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Rekomen dasi	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Rekomen das1	Nilai Keuangan (Rp)
1	T.197/ITJ.1/HP.470/X/2023	Hasil Evaluasi Implementasi Manajemen Risiko Tahun 2023 Pada Sekretariat Jenderal	2	4	-	2	4	-	-	-	Rp -
2	T.189/ITJ.1/HP.430/X/2023	Hasil Evaluasi Pelayanan Publik pada Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	7	7	-	7	7	-	-	-	Rp -
3	T.198/ITJ.1/HP.410/X/2023	Evaluasi Kerja sama Internasional Bidang Kelautan dan Perikanan pada Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	3	6	-	3	6	-	-	-	Rp -
4	B.200/ITJ.1/HP.550/X/2023	Laporan Hasil Pemantauan Pinjaman Hibah Luar Negeri TA 2022-2023 pada Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal KKP	5	6	-	5	6	-	-	-	Rp -
5	T.222/ITJ.1/HP.320/X/2023	Hasil Reviu Usulan Revisi Anggaran TA 2023 Lingkup Setjen dalam Rangka Optimalisasi Blokir ABT Setjen TA 2023 ke Ditjen PSDKP	1	3	-	1	3	-	-	-	Rp -
6	T.228/ITJ.1/HP.380/XI/2023	Hasil Reviu Jeda Waktu Sewa Lahan Parkir untuk Bazar PWKP pada BUPBJ Sekretariat Jenderal KKP	1	2	63,855,000.00	1	2	63,855,000.00	-	-	Rp -

No	No LHP	Obyek Pemeriksaan	Temuan Awal			Tindak Lanjut			Sisa Temuan		
			Temuan	Rekomen dasi	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Rekomen dasi	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Rekomen das1	Nilai Keuangan (Rp)
7	T.229/ITJ.1/HP.130/XI/2023	Hasil Probit Audit Tahap Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa TA 2023 pada Pusdatin	2	5	-	2	5	-	-	-	Rp -
8	B.235/ITJ.1/HP.550/XI/2023	Pemantauan PBJ Sarana Gedung Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2023	3	4	8,460,000.00	3	4	8,460,000.00	-	-	Rp -
9	B.247/ITJ.1/HP.550/XII/2023	Hasil Pemantauan Pengadaan Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor Pusat KKP TA 2023 pada BUPBJ, Setjen	2	6	-	2	6	-	-	-	Rp -
10	T.255/ITJ.1/HP.380/XII/2023	Hasil Reviu PIPK Tahun 2023 Lingkup Sekretariat Jenderal	9	9	-	9	9	-	-	-	Rp -
11	T.252/ITJ.1/HP.380/XII/2023	Reviu Manajemen Risiko Lingkup Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2024	3	3	-	3	3	-	-	-	Rp -
12	B.249/ITJ.1/HP.550/XII/2023	Pemantauan Hasil Pekerjaan Renovasi Ruang Asesment Center ada Biro Umum dan PBJ	2	2	-	2	2	-	-	-	Rp -
13	T.266/ITJ.1/HP.380/XII/2023	Hasil Reviu Keringanan Pembayaran Jeda Waktu Sewa Lahan Parkir untuk Bazar PWKP pada BUPBJ Sekretariat Jenderal KKP	1	1	34,248,000.00	1	1	34,248,000.00	-	-	Rp -
14	T.510/ITJ.1/HP.320/XII/2023	Hasil Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ Sekretariat Jenderal TW IV TA 2023	1	3	-	1	3	-	-	-	Rp -
15	T.94/ITJ/HP.310/II/2024	Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Tahunan TA 2023 Satker Lingkup Sekretariat Jenderal KKP	1	5	-	1	5	-	-	-	Rp -

No	No LHP	Obyek Pemeriksaan	Temuan Awal			Tindak Lanjut			Sisa Temuan		
			Temuan	Rekomen dasi	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Rekomen dasi	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Rekomen das1	Nilai Keuangan (Rp)
16	T.29/ITJ.1/HP.310/II/2024	Hasil Reviu Laporan Keuangan LPMUKP (BA BUN 999.03) Tahun 2023	1	1	-	1	1	-	-	-	Rp -
17	B.36/ITJ.1/HP.550/II/2024	Hasil Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK pada BHKLN Tahun 2024	1	1	-	1	1	-	-	-	Rp -
18	B.34/ITJ.1/HP.550/II/2024	Hasil Pemantauan Pembangunan ZI menuju WBK pada Biro SDMAO	1	1	-	1	1	-	-	-	Rp -
19	B.38/ITJ.1/HP.550/II/2024	Hasil Pemantauan Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK pada Biro Perencanaan KKP	1	1	-	1	1	-	-	-	Rp -
20	T.48/ITJ.1/HP.410/III/2024	Evaluasi Kinerja pada BLU-LPMUKP	3	13	-	3	13	-	-	-	Rp -
21	B.138/ITJ/HP.320/III/2024	Hasil Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Setjen Triwulan I TA 2024	3	3	-	3	3	-	-	-	Rp -
22	T.42/ITJ.1/HP.380/III/2024	Hasil Reviu atas Dokumen Perencanaan Pekerjaan Penataan Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkar GMB I dan II	5	5	-	5	5	-	-	-	Rp -
23	T.51/ITJ.1/HP.110/III/2024	Hasil Probit Audit Perencanaan/ Persiapan PBJ Tahun 2024 pada Biro Umum dan PBJ	1	2	-	1	2	-	-	-	Rp -
24	T.78/ITJ.1/HP.380/V/2024	Reviu Pembayaran Termin 7, 8, dan 9 Pekerjaan Jasa Konsultansi Project Management Consultant (PMC) pada Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Hibah Pemerintah Jepang	1	1	-	1	1	-	-	-	Rp -

No	No LHP	Obyek Pemeriksaan	Temuan Awal			Tindak Lanjut			Sisa Temuan		
			Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan (Rp)
25	B.79/ITJ.1/HP.550/V/2024	Pemantauan Kinerja Project Management Office (PMO) Hibah Pemerintah Jepang Tahun 2024 pada Biro Perencanaan	2	2	-	2	2	-	-	-	Rp -
26	T.80/ITJ.1/HP.130/V/2024	Probitas Audit Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2024 pada Pusat Data, Statistik dan Informasi (Pusdatin)	3	6	258,639.00	3	6	258,639.00	-	-	Rp -
27	R.86/ITJ.1/HP.110/VI/2024	Audit Kinerja TA 2023-2024 pada BPISDKP Perancang	8	20	4,555,330.00	8	20	4,555,330.00	-	-	Rp -
28	T.84/ITJ.1/HP.430/VI/2024	Evaluasi Pelayanan Publik pada Biro HKLN Pusat Setjen KKP	5	5	-	5	5	-	-	-	Rp -
29	T.94/ITJ.1/HP.380/VI/2024	Hasil Reviu Jeda Waktu Pemanfaatan Sewa Gedung/ Bangunan pada Biro Umum dan PBJ	1	1	9,174,784.00	1	1	9,174,784.00	-	-	Rp -
30	T.436/MEN-ITJ/HP.320/VI/2024	Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ) Sekretariat Jenderal Triwulan II Tahun 2024	2	2	-	2	2	-	-	-	Rp -
31	B.108/ITJ.1/HP.550/VII/2024	Hasil Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi (SDMAO)	6	6	-	6	6	-	-	-	Rp -
32	B.109/ITJ.1/HP.550/VII/2024	Hasil Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada pada Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	6	6	-	6	6	-	-	-	Rp -

No	No LHP	Obyek Pemeriksaan	Temuan Awal			Tindak Lanjut			Sisa Temuan		
			Temuan	Rekomen dasi	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Rekomen dasi	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Rekomen das1	Nilai Keuangan (Rp)
33	153/ITJ.1/HP.410/VII/2024	Laporan Hasil Evaluasi Kinerja UKPBJ Tahun 2024	3	7	-	3	7	-	-	-	Rp -
34	154/ITJ.1/HP.320/VII/2024	Laporan Hasil Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2025 lingkup Sekretariat Jenderal	9	9	-	9	9	-	-	-	Rp -
35	T.237/ITJ/HP.310/VII/2024	Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Semester I TA 2024 Satuan Kerja Lingkup Sekretariat Jenderal KKP	5	8	-	5	8	-	-	-	Rp -
36	B.123/ITJ.1/HP.550/VII/2024	Hasil Pemantauan Pembangunan ZI Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada Biro Perencanaan	1	1	-	1	1	-	-	-	Rp -
37	B.122/ITJ.1/TU.330/VII/2024	Hasil Reviu Laporan Keuangan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BA BUN 999.03) Semester I Tahun 2024	1	3	-	1	3	-	-	-	Rp -
38	T.134/ITJ.1/HP.410/VIII/2024	Hasil Evaluasi Implementasi Manajemen Risiko TA 2024 pada Sekretariat Jenderal KKP	4	4	-	4	4	-	-	-	Rp -
39	T.254/ITJ/HP.440/VIII/2024	Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 pada Sekretariat Jenderal	1	1	-	1	1	-	-	-	Rp -
40	B.214/ITJ.1/HP.550/IX/2024	Hasil Pemantauan Pekerjaan Renovasi Ruang Kerja Biro Keuangan Tahun 2024 pada Biro Umum dan PBJ	1	2	-	1	2	-	-	-	Rp -

No	No LHP	Obyek Pemeriksaan	Temuan Awal			Tindak Lanjut			Sisa Temuan		
			Temuan	Rekomen dasi	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Rekomen dasi	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Rekomen das1	Nilai Keuangan (Rp)
41	T.233/ITJ.1/HP.410/IX/2024	Hasil Evaluasi Pengelolaan BMN TA 2023-2024 Pada Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	6	14	-	6	14	-	-	-	Rp -
42	T.163/ITJ.1/HP.380/IX/2024	Hasil Reviu Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi 2023-2024 Lingkup Sekretariat Jenderal	3	3	-	3	3	-	-	-	Rp -
43	B.213/ITJ.1/HP.550/IX/2024	Hasil Pemantauan Kinerja Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan Tahun 2024	2	2	-	2	2	-	-	-	Rp -
43	TOTAL		129	196	120,551,753	129	196	120,551,753	-	-	-
							100.00%				

Lampiran 3. Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen pada Ditjen PKRL TW IV 2024

No	No LHP	Obyek Pemeriksaan	Temuan Awal			Tindak Lanjut (Tuntas)			Sisa Temuan		
			Temuan	Saran	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Saran	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Saran	Nilai Keuangan (Rp)
A	PUSAT										
	Sekretariat										
1	T.544 /ITJ.3/HP.320/X/2023	Laporan Hasil Reviu RKA-K/L Pagu Alokasi TA 2024 Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	2	5	-	2	5	-	-	-	-
2	T.343/ITJ/HP.310/X/2023	Hasil Reviu atas Laporan Keuangan dan BMN Triwulan III Tahun 2023	5	6	-	5	6	-	-	-	-
3	T.396/ITJ/HP.470/XI/2023	Hasil Evaluasi Implementasi Manajemen Risiko Tahun 2023 dan Asistensi Penyusunan Manajemen Risiko Tahun 2024	1	6	-	1	6	-	-	-	-
4	T. 484/ITJ/HP.110/XII/2023	Laporan Hasil Audit Kinerja TA 202202023 pada Sekretariat Ditjen PKRL	10	26	56.027.660	9	25	56.027.660	1	1	-

No	No LHP	Obyek Pemeriksaan	Temuan Awal			Tindak Lanjut (Tuntas)			Sisa Temuan		
			Temuan	Saran	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Saran	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Saran	Nilai Keuangan (Rp)
5	T.495 /ITJ/HP.320/XII/2023	Hasil Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen PKRL Triwulan IV TA 2023	2	2	-	2	2	-	-	-	-
6	T.479/ITJ/HP.380/XII/2023	Hasil Reviu Penyusunan Manajemen Risiko (MR) Tahun 2024 Lingkup Ditjen PKRL	1	2	-	1	2	-	-	-	-
7	T.120/ITJ/HP.550/II/2024	Hasil Pemantauan Ketaatan Upload Paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Ditjen PKRL TA 2024	1	2	-	1	2	-	-	-	-
8	T.128/ITJ/HP.330/III/2024	Hasil Reviu Laporan Kinerja Ditjen PKRL Tahun 2023	3	5	-	3	5	-	-	-	-
9	T.132/ITJ/HP.320/III/2024	Hasil Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen PKRL Triwulan I TA 2024	2	3	-	2	3	-	-	-	-
10	T.119/ITJ.3/HP.470/III/2024	Hasil Evaluasi Pengelolaan BMN pada Ditjen PKRL Tahun 2024	5	12	-	4	11	-	1	1	-

No	No LHP	Obyek Pemeriksaan	Temuan Awal			Tindak Lanjut (Tuntas)			Sisa Temuan		
			Temuan	Saran	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Saran	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Saran	Nilai Keuangan (Rp)
11	88/ITJ/HP.550/V/2024	Laporan Hasil Pemantauan Implementasi P3DN Triwulan I Tahun 2024 pada Ditjen PKRL	1	4	-	1	4	-	-	-	-
12	T.82/ITJ.1/HP.320/V/2024	Hasil Reviu atas Usulan Revisi Penambahan Anggaran PHLN Oceans for Prosperity Project – Lautra Tahun 2024	2	2	-	2	2	-	-	-	-
13	T.110/ITJ.1/HP.380/VII/2024	Hasil Reviu Usulan Penetapan PPNTD Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	1	1	-	1	1	-	-	-	-
14	T.217/ITJ/HP.320/VI/2024	Hasil Reviu Penyerapan Anggaran serta Pengadaan Barang/Jasa Periode Triwulan II Tahun 2024 Lingkup Ditjen PKRL	2	2	-	2	2	-	-	-	-
15	T.135/ITJ.1/HP.410/VIII/2024	Laporan Hasil Evaluasi Manajemen Risiko TA 2024 pada Ditjen PKRL	2	3	-	2	3	-	-	-	-

No	No LHP	Obyek Pemeriksaan	Temuan Awal			Tindak Lanjut (Tuntas)			Sisa Temuan		
			Temuan	Saran	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Saran	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Saran	Nilai Keuangan (Rp)
16	T.253/ITJ/HP.440/VIII/2024	Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	4	4	-	3	3	-	1	1	-
17	165/ITJ.1/HP.320/VIII/2024	Hasil Reviu Pagu Indikatif Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) TA 2025 Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	2	2	-	2	2	-	-	-	-
18	T.165/ITJ.1/HP.380/IX/2024	Hasil Reviu Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi/ Penjaminan Kualitas pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Raung Laut	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Direktorat Jasa Kelautan											
1	T.388 /ITJ/HP.550/XI/2023	Hasil Pemantauan Pemanfaatan LBC Pergaraman di Universitas	1	1	-	1	1	-	-	-	-

No	No LHP	Obyek Pemeriksaan	Temuan Awal			Tindak Lanjut (Tuntas)			Sisa Temuan		
			Temuan	Saran	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Saran	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Saran	Nilai Keuangan (Rp)
		Trunojoyo Madura, Kab. Bangkalan									
2	T.571 /ITJ.3/HP.110/XI/2023	Laporan Hasil Probitry Audit Pembangunan Sarana Niaga Pergaraman Tahun 2023 pada Direktorat Jasa Kelaulan	6	11	-	6	11	-	-	-	-
3	T.608/ITJ.3/HP.550/XII/2023	Hasil Pemantauan Kegiatan Sarana Niaga Garam Tahun 2023 di Kab. Jeneponto, Prov. Sulawesi Selatan	3	3	4.151.386	3	3	4.151.386	-	-	-
4	T.41/ITJ/KP.730/XII/2024	Hasil Evaluasi Pembangunan Sarana Produksi Biofarmakologi TA 2023 pada Direktorat Jasa Kelautan	2	3	-	2	3	-	-	-	-
5	T.613/ITJ.3/HP.550/XII/2023	Hasil Pemantauan Kegiatan Sarana Niaga Pergaraman Tahun 2023 di Kab. Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan	2	9	-	2	9	-	-	-	-

No	No LHP	Obyek Pemeriksaan	Temuan Awal			Tindak Lanjut (Tuntas)			Sisa Temuan		
			Temuan	Saran	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Saran	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Saran	Nilai Keuangan (Rp)
6	T.79/ITJ.3/HP.550/II/2024	Hasil Pemantauan Pembangunan Kawasan Tunnel Garam TA 2023 pada Direktorat Jaskel	4	5	-	4	5	-	-	-	-
7	T.80/ITJ.3/HP.550/II/2024	Hasil Pemantauan Pembangunan GGR Tahun 2023 di Kab. Bima, Prov. Nusa Tenggara Barat	3	3	161.969	3	3	161.969	-	-	-
8	B.85/ITJ.1/HP.550/VI/2024	Hasil Pemantauan Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Direktorat Jaskel	6	6	-	3	3	-	3	3	-
9	130/ITJ.1/HP.120/VII/2024	Laporan Hasil Probity Audit Perencanaan Sarana Niaga Garam Rakyat yang Dibangun Tahun 2024	5	7	-	5	7	-	-	-	-
Direktorat P4K											
1	T.308/ITJ/HP.110/X/2023	Laporan Hasil Probity Audit Pembangunan Prasarana Dermaga Apung Tahun 2023	2	8	-	2	8	-	-	-	-

No	No LHP	Obyek Pemeriksaan	Temuan Awal			Tindak Lanjut (Tuntas)			Sisa Temuan		
			Temuan	Saran	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Saran	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Saran	Nilai Keuangan (Rp)
2	T.576/ITJ.3/HP.550/XI/2023	Hasil Pemantauan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh pada Dit.Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4	4	-	4	4	-	-	-	-
3	T.500/ITJ.3/HP.350/XII/2023	Hasil Reviu Peta Jalan Roadmap Ekonomi Biru Pengelolaan Sampah Plastik di Laut	3	3	-	3	3	-	-	-	-
4	T.594 /ITJ.3/HP.550/XII/2023	Hasil Pemantauan Pengadaan Sarana Usaha Ekonomi Produktif TA 2023 di Kabupaten Indramayu	1	2	-	1	2	-	-	-	-
5	T.604/ITJ.3/HP.550/XII/2023	Hasil Pemantauan Pengadaan Sarana Usaha Ekonomi Produksi TA 2023 Satker Direktorat P4K di Kab. Karawang	1	1	-	1	1	-	-	-	-
6	T. 501/ITJ/HP.110/XII/2023	Laporan Hasil Audit Kinerja TA 2023 pada Direktorat P4K, Ditjen PKRL	9	38	17.746.589	9	38	17.746.589	-	-	-

No	No LHP	Obyek Pemeriksaan	Temuan Awal			Tindak Lanjut (Tuntas)			Sisa Temuan		
			Temuan	Saran	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Saran	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Saran	Nilai Keuangan (Rp)
7	T.78/ITJ.3/HP.470/II/2024	Hasil Probitas Audit Tahap Perencanaan Pembangunan Prasarana Dermaga Apung/Tambat Labuh TA 2024 pada Direktorat P4K	6	7	-	6	7	-	-	-	-
8	B.97/ITJ.1/HP.550/VI/2024	Hasil Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1	2	-	1	2	-	-	-	-
9	T.114/ITJ.1/HP.410/VII/2024	Hasil Evaluasi Program Prioritas Ekonomi Biru Pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Pengendalian Sampah Plastik di Laut pada Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4	4	-	3	3	-	1	1	-
10	T.140/ITJ.1/HP.410/VIII/2024	Hasil Evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Tata Kelola Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan pada Direktorat	5	10	-	2	5	-	3	5	-

No	No LHP	Obyek Pemeriksaan	Temuan Awal			Tindak Lanjut (Tuntas)			Sisa Temuan		
			Temuan	Saran	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Saran	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Saran	Nilai Keuangan (Rp)
		Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil TA 2024									
11	T.129/ITJ.1/HP.130/VIII/2024	Hasil Probit Audit Pelaksanaan Pembangunan Dermaga Apung TA 2024 di Kabupaten Sumbawa	3	5	-	3	5	-	-	-	-
12	189/ITJ.1/HP.550/IX/2024	Hasil Pemantauan Rehabilitasi Mangrove (Penyulaman) dan Tracking Mangrove di Kabupaten Kebumen	3	3	-	3	3	-	-	-	-
Direktorat PRL											
1	T.444/ITJ/HP.350/XII/2023	Hasil Reviu Peta Jalan (Roadmap) Ekonomi Biru Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Dit.Perencanaan Ruang Laut	3	6	-	3	6	-	-	-	-

No	No LHP	Obyek Pemeriksaan	Temuan Awal			Tindak Lanjut (Tuntas)			Sisa Temuan		
			Temuan	Saran	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Saran	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Saran	Nilai Keuangan (Rp)
2	B.96/ITJ.1/HP.550/VI/2024	Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Direktorat Penataan Ruang Laut, Ditjen PKRL	1	2	-	1	2	-	-	-	-
3	137/ITJ.1/HP.410/VII/2024	Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut dan Penyelesaian Penataan Ruang Laut	3	7	-	3	7	-	-	-	-
4	T.150/ITJ.1/HP.410/VIII/2024	Hasil Evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Tata Kelola Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan TA 2024 pada Direktorat Penataan Ruang Laut	6	16	996.127.975	4	10	-	2	6	996.127.975
5	T.182/ITJ.1/HP.430/IX/2024	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Direktorat Penataan Ruang Laut	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Direktorat KEBP											

No	No LHP	Obyek Pemeriksaan	Temuan Awal			Tindak Lanjut (Tuntas)			Sisa Temuan		
			Temuan	Saran	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Saran	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Saran	Nilai Keuangan (Rp)
1	T.562 /ITJ.3/HP.350/X/2023	Hasil Reviu Peta Jalan (Roadmap) Ekonomi Biru Perluasan Kawasan Konservasi Laut pada Direktorat KKHL	3	5	-	3	5	-	-	-	-
2	B.95/ITJ.1/HP.550/VI/2024	Hasil Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada pada Direktorat KEBP	1	2	-	-	1	-	1	1	-
3	T.103/ITJ.1/HP.410/VII/2024	Hasil Evaluasi Program Prioritas Ekonomi Biru Perluasan Kawasan Konservasi Laut pada Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	6	9	-	6	9	-	-	-	-
4	T.149/ITJ.1/HP.410/VIII/2024	Hasil Evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Tata Kelola Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan pada Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan TA 2024	5	12	18.079.996	5	12	18.079.996	-	-	-

No	No LHP	Obyek Pemeriksaan	Temuan Awal			Tindak Lanjut (Tuntas)			Sisa Temuan		
			Temuan	Saran	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Saran	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Saran	Nilai Keuangan (Rp)
5	T.195/ITJ.1/HP.430/IX/2024	Hasil Evaluasi Pelayanan Publik pada Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Tahun 2024	3	3	-	3	3	-	-	-	-
Sub Total Pusat			154	287	1.092.295.575	141	268	96.167.600	13	19	996.127.975
B	DEKON/TP										
	Jawa Barat										
1	T.547/ITJ.3/HP.550/X/2023	Hasil Pemantauan Kegiatan Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) Tahun 2023 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Cirebon	2	4	-	2	4	-	-	-	-
2	T.595/ITJ.3/HP.550/XII/2023	Hasil Pemantauan Kegiatan PUGaR Tahun 2023 di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat	2	3	23.865.000,00	2	3	23.865.000,00	-	-	-
3	T.36/ITJ.3/HP.550/I/2024	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan PBJ 2023	5	10	-	5	10	-	-	-	-
	Jawa Timur										

No	No LHP	Obyek Pemeriksaan	Temuan Awal			Tindak Lanjut (Tuntas)			Sisa Temuan		
			Temuan	Saran	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Saran	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Saran	Nilai Keuangan (Rp)
1	T.575 /ITJ.3/HP.410/XI/2023	Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan TP PUGaR TA 2023 pada Satker Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan	4	14	4.967.066,00	4	14	4.967.066,00	-	-	-
2	T.37/ITJ.3/HP.550/I/2024	Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan dan PBJ Tahun 2023 pada Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan	2	7	-	2	7	-	-	-	-
Sulawesi Selatan											
1	T.555/ITJ.3/HP.550/X/2023	Hasil Pemantauan Kegiatan PUGaR Tahun 2023 di Kabupaten Jeneponto	3	5	31.360,00	3	5	31.360,00	-	-	-
2	T.558/ITJ.3/HP.550/XI/2023	Hasil Pemantauan Kegiatan PuGAR Tahun 2023 di Kabupaten Pangkajene Kepulauan	3	6	1.380.000	3	6	1.380.000	-	-	-
3	T.607/ITJ.3/HP.550/XII/2023	Hasil Pemantauan Kegiatan PUGaR Tahun 2023 di Kabupaten Jeneponto,	4	8	-	4	8	-	-	-	-

No	No LHP	Obyek Pemeriksaan	Temuan Awal			Tindak Lanjut (Tuntas)			Sisa Temuan		
			Temuan	Saran	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Saran	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Saran	Nilai Keuangan (Rp)
4	T.612/ITJ.3/HP.550/XII/2023	Hasil Pemantauan TP PUGaR Tahun 2023 di Kab. Pangkajene Kepulauan	4	9	2.354.480	4	9	2.354.480	-	-	-
Nusa Tenggara Barat											
1	T.549 /ITJ.3/HP.550/X/2023	Hasil Pemantauan Kegiatan PUGaR Tahun 2023 di Kabupaten Bima	6	6	954.000	6	6	954.000	-	-	-
Sub Total Dekon/TP			35	72	33.551.906	35	72	33.551.906	-	-	-
C	UPT										
BKKPN Kupang											
1	98/ITJ.1/HP.410/V/2024	Laporan Hasil Evaluasi PNBPN BKKPN Kupang	3	4	0	3	4	0	-	-	-
BPSPL Makassar											
1	T.152/ITJ/HP.110/IV/2024	Hasil Audit Kinerja TA 2023 - 2024 pada BPSPL Makassar	9	15	3.509.541	9	15	3.509.541	-	-	-
2	96/ITJ.1/HP.430/V/2024	Hasil Evaluasi Pelayanan Publik pada BPSPL Makassar	2	2	0	2	2	0	-	-	-
BPSPL Padang											

No	No LHP	Obyek Pemeriksaan	Temuan Awal			Tindak Lanjut (Tuntas)			Sisa Temuan		
			Temuan	Saran	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Saran	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Saran	Nilai Keuangan (Rp)
1	<u>T.44/ITJ.3/HP.550/I/2024</u>	Hasil Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan dan PBJ Tahun 2023 pada BPSPL Padang	6	6	5.273.500	6	6	5.273.500	-	-	-
2	100/ITJ.1/HP.430/V/2024	Evaluasi Pelayanan Publik pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang	1	4	-	1	4	-	-	-	-
LPSPL Sorong											
1	T.62/ITJ.3/HP.550/II/2024	Hasil Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023 pada LPSPL Sorong	3	7	3.218.080	3	7	3.218.080	-	-	-
2	151/ITJ.1/HP.410/VII/2024	Laporan Hasil Evaluasi PNBPN Tahun 2023-2024 LPSPL Sorong	5	5	-	5	5	-	-	-	-
LPSPL Serang											
1	188/ITJ.1/HP.470/IX/2024	Laporan Hasil Evaluasi Penatausahaan BMN pada LPSPL Serang	2	7	-	2	7	-	-	-	-
LKKPN Pekanbaru											

No	No LHP	Obyek Pemeriksaan	Temuan Awal			Tindak Lanjut (Tuntas)			Sisa Temuan		
			Temuan	Saran	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Saran	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Saran	Nilai Keuangan (Rp)
1	T.127/ITJ/HP.110/III/2024	Hasil Audit Kinerja TA 2023 0 2024 LKKPN Pekanbaru	8	11	2.687.628	8	11	2.687.628	-	-	-
2	B.127/ITJ.1/HP.430/VII/2024	Laporan Hasil Evaluasi Pelayanan Publik pada LKKPN Pekanbaru	2	2	-	2	2	-	-	-	-
BPSPL Denpasar											
1	133/ITJ.1/HP.470/VII/2024	Laporan Hasil Evaluasi PNBPN BPSPL Denpasar TA 2023 – 2024	5	12	-	5	12	-	-	-	-
BPSPL Pontianak											
1	T.133/ITJ.3/HP.110/III/2024	Laporan Hasil Audit Kinerja TA 202302024 Pada BPSPL Pontianak	9	13	11.674.100	9	13	11.674.100	-	-	-
2	126/ITJ.1/HP.410/VII/2024	Evaluasi PNBPN TA 2023 - 2024 pada Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak	4	6	-	4	6	-	-	-	-
Sub Total UPT			59	94	26.362.849	59	94	26.362.849	-	-	-
Total			248	453	1.152.210.330	235	434	156.082.355	13	19	996.127.975
Persentase Capaian IKU TW IV 2024			95,81%								

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR 101/ITJ/RC.610/VI/2024

Yth. : Sekretaris Jenderal
Dari : Inspektur Jenderal
Hal : Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Atas Kepmen-KP Nomor 5 Tahun 2024
Tanggal : 3 Juni 2024

Guna mendukung salah satu kegiatan strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah ditetapkan Keputusan Menteri KP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tim Uji Tuntas Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan setelah mencermati secara substansi isi keputusan tersebut sebagaimana terlampir, bahwa keanggotaan Tim Uji Tuntas dimaksud salah satunya adalah Inspektur III. Hal ini dipandang perlu untuk dilakukan peninjauan kembali dengan pertimbangan;

1. Peraturan Menteri KP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP, pasal 140 penyelenggaraan fungsi pengawasan intern Inspektorat I pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) berserta UPT-nya, yang mana sebelumnya fungsi pengawasan tersebut berada pada Inspektorat III;
2. Untuk menjalankan fungsi pengawasan pada Ditjen PKRL berserta UPT-nya sebagaimana dimandatkan dalam Peraturan Menteri KP Nomor 5 Tahun 2024 tersebut diatas, maka sebaiknya keanggotaan Tim Uji Tuntas Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri KP Nomor 5 Tahun 2024 tidak memasukan unsur APIP sebagai pelaksana karena dapat menimbulkan *conflict of interest*;
3. APIP/Itjen tetap melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap kegiatan pengelolaan hasil sedimentasi di laut sesuai dengan fungsinya.

Demikian rekomendasi kebijakan ini disampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya diucapkan terimakasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tornanda Syaifullah

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
2. Kepala Biro Hukum



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
TIM UJI TUNTAS PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tim Uji Tuntas Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6875);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 831);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TIM UJI TUNTAS PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT.

KESATU : Menetapkan Tim Uji Tuntas Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang selanjutnya disebut Tim Uji Tuntas.

- KEDUA : Tim Uji Tuntas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Pelaksana, dan Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Tim Uji Tuntas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- A. Pengarah
memberikan arahan dan bimbingan kepada Penanggung Jawab, Pelaksana, dan Sekretariat dalam pelaksanaan uji tuntas pengelolaan hasil sedimentasi di laut.
 - B. Penanggung Jawab
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan uji tuntas pengelolaan hasil sedimentasi di laut.
 - C. Pelaksana
 - 1. Ketua
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan verifikasi dan evaluasi proposal dan rencana kerja umum yang disampaikan oleh pelaku usaha, serta kriteria pelaku usaha.
 - 2. Anggota
 - a. melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap proposal dan rencana kerja umum yang disampaikan oleh pelaku usaha;
 - b. melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap kriteria pelaku usaha;
 - c. membuat berita acara hasil verifikasi dan evaluasi proposal dan rencana kerja umum yang disampaikan oleh pelaku usaha, serta kriteria pelaku usaha; dan
 - d. menyampaikan laporan hasil verifikasi dan evaluasi proposal dan rencana kerja umum yang disampaikan oleh pelaku usaha, serta kriteria pelaku usaha kepada Ketua.
 - D. Sekretariat
 - 1. melaksanakan tugas kesekretariatan dalam rangka mendukung verifikasi dan evaluasi terhadap proposal dan rencana kerja umum yang disampaikan oleh pelaku usaha, serta kriteria pelaku usaha;
 - 2. melakukan pemeriksaan administrasi terhadap proposal dan rencana kerja umum yang disampaikan oleh pelaku usaha;
 - 3. melakukan pemeriksaan administrasi terhadap dokumen terkait kriteria pelaku usaha; dan
 - 4. menyampaikan proposal dan rencana kerja umum yang telah memenuhi persyaratan administrasi kepada Pelaksana.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Uji Tuntas dapat melibatkan narasumber/instruktur/tenaga ahli yang memiliki kompetensi.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Uji Tuntas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan tertulis setiap 6 (enam) bulan

- kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2024

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Effin Martiana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
TIM UJI TUNTAS PENGELOLAAN HASIL
SEDIMENTASI DI LAUT

SUSUNAN KENGGOTAAN
TIM UJI TUNTAS PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT

- A. Pengarah
Menteri Kelautan dan Perikanan
- B. Penanggung Jawab
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
- C. Pelaksana

No.	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Direktur Jasa Kelautan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ketua
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
3.	Direktur Perencanaan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
4.	Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
5.	Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
6.	Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
7.	Direktur Kepelabuhanan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
8.	Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota

No.	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
9.	Direktur Penanganan Pelanggaran, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
10.	Inspektur III, Inspektorat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
11.	Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
12.	Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
13.	Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota

D. Sekretariat

No.	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Frista Yorhanita, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ketua
2.	Iqbal Suhaemi Gultom, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Sekretaris
3.	Moh. Hosni Mubarak, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
4.	Enggar Sadtopo, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
5.	Tri Danny Anggoro, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
6.	Wendy Fadri Ariansyah, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
7.	Djumadi, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota

No.	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
8.	Untung, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
9.	Khusnul Khotimah, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
10.	Suko Wardono, Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Madya, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
11.	Otto Krisna, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
12.	Zuhriyah Ratnasari, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
13.	Asri Setianingrum Kenyo H, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
14.	Hendra Nurcahyo, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
15.	Bambang Harya Jaka Lelana, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
16.	Nur Hasanah Hidayaningtyas, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda, Direktorat Jasa Kelautan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota

No.	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
17.	Yessysca Sari Debby, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Effin Martiana

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL**

NOTA DINAS
NOMOR 40/ITJ/RC.240/I/2024

Yth : Sekretaris Jenderal
Dari : Inspektur Jenderal
Hal : Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri di Lingkungan KKP
Lampiran : -
Tanggal : 17 Januari 2024

Sehubungan dengan pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) di lingkungan KKP, dengan ini disampaikan:

1. Saat ini Rancangan Permen KP tentang Pengelolaan Hibah Luar Negeri di lingkungan KKP sedang Harmonisasi, namun untuk Pinjaman Luar Negeri belum diatur pengelolanya dalam bentuk Permen KP.
2. Hasil pemantauan Inspektorat Jenderal diketahui terdapat 9 (sembilan) kegiatan/proyek di lingkungan KKP yang pendanaannya bersumber dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) seluruhnya senilai USD1.738.530.000; EUR348.670.000; dan JPY13.940.700.000.
3. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan kegiatan/proyek Pinjaman Luar Negeri (PLN) tersebut yang sudah dimulai Tahun 2023, dipandang perlu adanya Permen KP tentang PLN agar pengelola kegiatannya lebih efektif, efisien dan tertib administratif serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Saudara untuk menyusun pengaturan pengendalian pengelolaan PLN di lingkungan KKP, diantaranya berkaitan dengan Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan sehingga dapat dipedomani bagi unit kerja eselon I yang mengelola kegiatan/proyek PLN. Sedangkan pengaturan hal-hal umum mengenai PHLN yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri PPN/Bappenas dan Peraturan Menteri Keuangan tetap menjadi acuan yang harus dipedomani.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Tornanda Syaifullah

Tembusan:
Menteri Kelautan dan Perikanan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

NOTA DINAS

NOMOR 127/ITJ/RC.610/VIII/2024

Yth. : Direktur Jenderal PKRL
Dari : Inspektur Jenderal
Hal : Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Tata Kelola Perizinan pada
Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Lampiran : -
Tanggal : 22 Agustus 2024

Dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya, tanggal 20 Mei 2024, dan memperhatikan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal mengenai Tata Kelola Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan pada Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dit.P4K), meliputi Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas di bawah 100 km². Pelaksanaan Pelayanan Perijinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya belum sepenuhnya didukung dengan regulasi yang memadai, yaitu:

1. Belum disusun **Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya** sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan, sehingga:
 - a. Terdapat **ketidakseragaman format dokumen persyaratan khusus** pada permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas Dibawah 100 km². berupa dokumen rencana usaha meliputi: 1) penjelasan rencana usaha dan jenis kegiatan, 2) kebutuhan luas pemanfaatan pulau dalam bentuk peta lokasi yang dilengkapi dengan sistem koordinat lintang (*latitude*) dan bujur (*longitude*), 3) rencana pemberian akses publik, 4) rencana pengalihan teknologi, 5) rencana kemitraan dengan Peserta

Indonesia, 6) rencana pengalihan saham secara bertahap kepada peserta Indonesia, 7) pertimbangan aspek ekologi, aspek sosial budaya, aspek ekonomi;

b. Substansi persyaratan khusus hanya berupa surat pernyataan kesanggupan, dan tidak ada rencana kegiatan yang akan dilakukan, seperti:

1) rencana pemberian akses publik, 2) **rencana** pengalihan teknologi, dan 3) rencana kemitraan dengan Peserta Indonesia.

2. Dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan tersebut, telah ditetapkan sebanyak 2 (dua) Standar Operasional Prosedur (SOP), meliputi:

a. SOP Pemberian Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam Rangka Penanaman Modal Asing Nomor B.2015/DJPRL.3/RC.610/IX/2023 tanggal 1 September 2023;

b. SOP Pemberian Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di bawah 100 km² Nomor B.2016/DJPRL.3/RC.610/IX/2023 tanggal 1 September 2023.

Namun SOP yang digunakan, **belum disesuaikan dengan Permen KP Nomor 10 Tahun 2024, masih menggunakan dasar hukum yang lama**, yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53 Tahun 2020, sedangkan Peraturan tersebut telah dicabut.

3. Beberapa kelemahan dalam SOP tersebut antara lain:

a. **SOP belum mengakomodir persyaratan pertimbangan aspek pertahanan dan keamanan dalam pelaksanaan usaha** sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024;

b. Belum terdapat tahapan prosedur atas perbaikan dokumen hasil verifikasi lapangan hingga penyiapan Berita Acara Verifikasi Atas Perbaikan Dokumen sesuai persyaratan.

Sehubungan dengan hal tersebut, direkomendasikan kepada Saudara agar:

1. Menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dan mensosialisasikan Petunjuk Teknis tersebut kepada pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil.

2. Melakukan reviu dan evaluasi terhadap seluruh SOP Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya serta melengkapi SOP tersebut dengan

menambahkan tahapan prosedur atas perbaikan dokumen hasil verifikasi lapangan, dan mensosialisasikan SOP tersebut kepada pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Tornanda Syaifullah

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Sekretaris Jenderal

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

NOTA DINAS

NOMOR 120/ITJ/HP.410/VII/2024

Yth : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Dari : Inspektur Jenderal
Hal : Penyempurnaan Pedoman Teknis Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan KKPRL
Tanggal : 22 Juli 2024

Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal terhadap Pedoman Teknis terkait penilaian pelaksanaan kepatuhan pemanfaatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) pada Direktorat Perencanaan Ruang Laut, ditemukan bahwa rencana penilaian mengacu pada kriteria yang ditetapkan, namun belum ada penjelasan secara rinci atas kriteria yang ditetapkan sebagai pedoman dalam menentukan prioritas untuk rencana penilaian.

Kriteria penilaian ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, yaitu pada BAB IV Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, Bagian B. Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPRL disebutkan bahwa penyelenggaraan pengendalian dilaksanakan berdasarkan prioritas dengan kriteria: 1) memiliki risiko tinggi; 2) berskala besar; 3) bersifat strategis nasional; 4) berdampak luas; 5) mengubah bentang perairan menjadi daratan; 6) berpotensi menimbulkan sengketa dan/atau konflik; 7) menimbulkan adanya laporan atau aduan dari masyarakat dan/atau 8) belum menyampaikan kewajiban laporan tahunan KKPRL. Pengertian atas kriteria dimaksud belum diuraikan/dijelaskan secara konkrit untuk menjadi acuan oleh Tim Penilai Pelaksanaan KKPRL.

Agar penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPRL dapat diimplementasikan secara cermat disarankan agar Saudara melakukan penyempurnaan Peraturan Direktur Jenderal PKRL Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

khususnya terkait penjelasan masing-masing kriteria penilaian secara rinci untuk dapat dipedomani oleh Tim Penilai Pelaksanaan KKPRL lingkup Ditjen PKRL.

Demikian disampaikan. Atas kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Tornanda Syaifullah

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

MEMORANDUM

Nomor: 278/ITJ.5/HP.320/VII/2024

Yth. : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Dari : Plh. Inspektur V
Hal : Evaluasi Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu (Kendali Mutu) Semester I Tahun 2024
Tanggal : 15 Juli 2024

Sehubungan dengan Surat Tugas Itjen KKP Nomor B.3987.1/ITJ.5/KP.440/VI/2024, tanggal 24 Juni 2024, perihal Melaksanakan Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu (Kendali Mutu) Pengawasan Semester I Tahun 2024 pada Inspektorat Jenderal KKP, Tim Evaluasi telah melaksanakan kegiatan dimaksud pada tanggal 01 s.d. 05 Juli 2024. Selanjutnya Tim Evaluasi Inspektorat V beserta Auditi pada Inspektorat I – V dan Sekretariat Itjen telah melaksanakan pembahasan hasil Evaluasi Kendali Mutu Semester I Tahun 2024 pada tanggal 15 Juli 2024 dengan hasil sebagai berikut:

- Pemenuhan Kendali Mutu Pengawasan (KMP) untuk jenis pengawasan audit dan evaluasi selama Semester I 2024 (1 Januari s.d. 30 Juni 2024) diketahui telah mencapai 97,00% dari target sesuai Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024 sebesar 89,00%. Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Rencana Kegiatan Pengawasan dalam PKPT Tahun 2024

No	Inspektorat	Audit (%)	Evaluasi (%)	Nilai Akhir (%)
1	Inspektorat I	100.00	100.00	100.00
2	Inspektorat II	95.13	98.17	96.65
3	Inspektorat III	91.32	100.00	95.66
4	Inspektorat IV	95.50	94.42	94.96
5	Inspektorat V	-	100.00	100.00
	Rata-rata	95.21	96.57	97.00

- Belum seluruh Tim Pengawasan menyusun KMP menggunakan Aplikasi SIMWAS. Berdasarkan hasil evaluasi, persentase penyusunan KMP yang menggunakan aplikasi SIMWAS sebesar 68,91%, seperti tabel 2 berikut:

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR 277/ITJ.5/HP.320/VII/2024

Yth. : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Dari : Plh. Inspektur V
Hal : Capaian Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Semester I Tahun 2024
Tanggal : 15 Juli 2024

Sehubungan dengan Surat Tugas Itjen KKP Nomor B.45991/ITJ.5/KP.440/VI/2024, tanggal 15 Juli 2024, perihal Melaksanakan Evaluasi Kepatuhan Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Semester I Tahun 2024, Tim Evaluasi telah melaksanakan kegiatan dimaksud pada tanggal 24 s.d. 28 Juni 2024. Selanjutnya Tim Evaluasi Inspektorat V beserta Auditi pada Inspektorat I – V dan Sekretariat Itjen telah melaksanakan pembahasan hasil Evaluasi PKPT Semester I Tahun 2024 pada tanggal 15 Juli 2024 dengan hasil sebagai berikut:

1. Inspektorat Jenderal KKP pada Tahun 2024 telah menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 64 Tahun 2024. Jumlah kegiatan pengawasan selama Tahun 2024 sebanyak 803 kegiatan dengan rincian sebagaimana Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Rencana Kegiatan Pengawasan dalam PKPT Tahun 2024

No.	Nama Unit Kerja	Jumlah Kegiatan Pengawasan
1	Inspektorat I	114
2	Inspektorat II	179
3	Inspektorat III	189
4	Inspektorat IV	219
5	Inspektorat V	102
Total		803

2. Tingkat kepatuhan pelaksanaan PKPT Semester I Tahun 2024 sebesar 98,68% dengan rincian sebagaimana Tabel 2 berikut

Tabel 2. Realisasi Kegiatan Pengawasan yang Sesuai PKPT s.d. Semester I Tahun 2024

No	Unit Kerja	Jumlah Pengawasan		Persentase Pelaksanaan
		Rencana	Kesesuaian	
1	Inspektorat I	48	48	100,00
2	Inspektorat II	71	71	100,00
3	Inspektorat III	79	79	100,00
4	Inspektorat IV	59	56	94,92
5	Inspektorat V	46	45	97,83
Total		307	303	98,68

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Yuliadi

Tembusan:
Inspektur Jenderal

Tabel 2. Daftar Formulir KMP yang Disusun dengan Aplikasi SIMWAS

No	Inspektorat	Audit		Evaluasi		Total		Persentase Penginputan dalam SIMWAS (%)
		S	R	S	R	S	R	
1	Inspektorat I	5	1	11	3	16	4	25,00
2	Inspektorat II	8	5	21	13	29	18	62,07
3	Inspektorat III	19	13	6	6	25	19	76,00
4	Inspektorat IV	9	7	18	15	27	22	81,48
5	Inspektorat V	0	0	1	1	1	1	100,00
Rata-rata Kepatuhan Penginputan dalam Aplikasi SIMWAS								68,91

Keterangan:

S: Jumlah Penugasan Pengawasan yang seharusnya dilakukan Penginputan pada aplikasi SIMWAS

R: Jumlah Realisasi Penginputan pada Aplikasi SIMWAS

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Yuliadi

Tembusan:
Inspektur Jenderal

**TEMUAN HASIL EVALUASI
PELAKSANAAN PENUGASAN DAN PELAPORAN PENGAWASAN YANG
MEMENUHI STANDAR MUTU PENGAWASAN DAN PROGRAM KERJA
PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) SEMESTER II TAHUN 2024**

Nama Kegiatan Pengawasan : Evaluasi Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan dan PKPT Semester II Tahun 2024

Nama Satker : Itjen KKP

Periode Evaluasi : 1 Juli s.d. 6 Desember 2024

Nomor Surat Tugas : ST-B.547/ITJ.5/KP.440/XII/2024, tanggal 11 Desember 2024

Tanggal Pertemuan Akhir Pengawasan : Januari 2025

A. Hasil yang Telah Dicapai Periode Semester II Tahun 2024

1. Kepatuhan Pelaporan Pengawasan Yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan

Evaluasi kepatuhan kendali mutu dilaksanakan berdasarkan dua aspek, yaitu kepatuhan penyusunan Kendali Mutu Pengawasan (KMP) serta kualitas KMP yang terdiri dari penilaian kelengkapan pengisian dan kelengkapan reviu berjenjang. Sesuai dengan Peraturan Irjen Nomor 37 Tahun 2024, KMP yang harus dibuat dari kegiatan audit dan evaluasi, yaitu untuk Formulir KMP 09 Program Kerja Pengawasan, Formulir KMP 15 Pengendalian Penyusunan Laporan, Formulir KMP 16 Reviu Konsep Laporan, Formulir KMP 18 Konsep Temuan dan Rencana Tindak Lanjut, dan Formulir KMP 27 Surat Tugas. Berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa selama Semester II 2024 (1 Juli s.d. 6 Desember 2024) pemenuhan Kendali Mutu Pengawasan (KMP) untuk jenis pengawasan audit sebanyak 23 LHA dan evaluasi sebanyak 99 LHE telah mencapai 100,00% dari target sesuai Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024 sebesar 89,00%. Persentase pemenuhan ini secara lengkap disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Kepatuhan Pemenuhan KMP Semester II 2024

No	Unit Kerja	Audit (%)	Evaluasi (%)	Nilai Akhir (%)
1	Inspektorat I	-	100.00	100.00

No	Unit Kerja	Audit (%)	Evaluasi (%)	Nilai Akhir (%)
2	Inspektorat II	100.00	100.00	100.00
3	Inspektorat III	100.00	100.00	100.00
4	Inspektorat IV	100.00	100.00	100.00
5	Inspektorat V	-	100.00	100.00
	Total	100.00	100.00	100.00

2. Kepatuhan PKPT

Berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa Kepatuhan PKPT selama Semester II 2024 (1 Juli s.d. 6 Desember 2024) diketahui telah mencapai 100,00% dari target sesuai Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024 sebesar 80%. Persentase pemenuhan ini secara lengkap disajikan pada Tabel 2 berikut:
Tabel 2. Tingkat Kepatuhan PKPT Semester II 2024

No	Uraian	Inspektorat I	Inspektorat II	Inspektorat III	Inspektorat IV	Inspektorat V
		Auditan	Auditan	Auditan	Auditan	Auditan
1.	Total Rencana Kegiatan berdasarkan PKPT	56	83	81	112	54
2.	Total Kegiatan Terlaksana	56	83	81	112	54
	% Pelaksanaan PKPT	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
3.	Kegiatan yang tidak sesuai PKPT	0	0	0	0	0
4.	Kegiatan yang sesuai PKPT*)	56	83	81	112	54
5.	Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan	0	0	0	0	0
6.	Jumlah Rencana PKPT yang dapat dilaksanakan	56	83	81	112	54
	% Kepatuhan PKPT	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

B. Temuan Hasil Evaluasi

1. Kepatuhan Pelaporan Pengawasan Yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan

Kendali Mutu Pengawasan yang Dibuat Belum Sepenuhnya Memenuhi Kualitas (20302)

Evaluasi terhadap kualitas/substansi penyusunan KMP dinilai melalui pemenuhan pengisian formulir dikombinasikan dengan kelengkapan revidu berjenjang terhadap

KMP tersebut. Berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE), pengujian kualitas/substansi secara keseluruhan mendapatkan nilai akhir 93,60% sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Penilaian Kualitas KMP Semester II 2024 lingkup Itjen KKP

No	Unit Kerja	Hasil Penilaian				Nilai Akhir %
		Audit		Evaluasi		
		Pemenuhan %	Substansi %	Pemenuhan %	Substansi %	
1	Inspektorat I	-	-	100.00	70.09	85.05
2	Inspektorat II	100.00	100.00	93.72	98.50	98.05
3	Inspektorat III	96.67	84.67	96.39	86.64	91.09
4	Inspektorat IV	100.00	100.00	100.00	96.11	99.03
5	Inspektorat V	-	-	100.00	89.50	94.75
	Rata-rata	98.89	94.89	98.02	88.17	93.60

Beberapa formulir KMP yang belum sepenuhnya memenuhi kualitas dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Formulir KMP yang Belum Memenuhi Kualitas

No	Unit Kerja	No ST	Nama Kegiatan Pengawasan	Keterangan
1	Inspektorat I	B.3595.1/ITJ.1/KP.4 40/VI/2024 Tanggal 27 Juni 2024	Melaksanakan evaluasi kinerja UKPBJ pada Biro Umum dan PBJ Tahun 2024 pada Biro Umum dan PBJ, Prov. DKI Jakarta (1 Juli s.d. 5 Juli 2024)	Reviu berjenjang pada KM 15 dan KM 16 belum dilaksanakan
		B.3621.1/ITJ.1/KP.4 40/VII/2024 Tanggal 5 Juli 2024	Melaksanakan evaluasi implementasi SAKIP tahun 2023 lingkup Sekretariat Jenderal KKP, Prov. DKI Jakarta (8 s.d. 12 Juli 2024)	Reviu berjenjang pada KM 15 dan KM 16 belum dilaksanakan
		B.3073.1/ITJ.1/KP.4 40/VII/2024	Melaksanakan evaluasi implementasi SAKIP	Reviu berjenjang pada KM 15 belum

No	Unit Kerja	No ST	Nama Kegiatan Pengawasan	Keterangan
		Tanggal 5 Juli 2024	tahun 2023 lingkup Ditjen PKRL di Prov. DKI Jakarta (8 s.d. 12 Juli 2024)	dilaksanakan secara lengkap
		B.3061.1/ITJ.1/KP.4 40/VII/2024 Tanggal 12 Juli 2024	Melaksanakan kegiatan evaluasi pelayanan publik pada LKKPN Pekanbaru, Prov. Riau (15 s.d. 19 Juli 2024)	Reviu berjenjang pada KM 15 dan KM 16 belum dilaksanakan
		B.3610.1/ITJ.1/KP.4 40/VII/2024, Tanggal 12 Juli 2024	Melaksanakan evaluasi implementasi MR Tahun 2023 pada Sekretariat Jenderal KKP di Prov. DKI Jakarta (15 s.d. 19 Juli 2024)	Reviu berjenjang pada KM 15 dan KM 16 belum dilaksanakan
		B.3072.1/ITJ.1/KP.4 40/VII/2024 12-Juli-2024	Melaksanakan evaluasi implementasi MR Tahun 2023 pada Ditjen PKRL di Prov. DKI Jakarta (15 s.d. 19 Juli 2024)	Reviu berjenjang pada KM 15 dan KM 16 belum dilaksanakan
		B.3062.1/ITJ.1/KP.4 40/VII/2024 19-Juli-2024	Melaksanakan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tata kelola perizinan sektor kelautan dan perikanan TA 2024 pada Direktorat Penataan Ruang Laut di Prov. DKI Jakarta (22 Juli s.d. 2 Agustus 2024)	Reviu berjenjang pada KM 15 belum dilaksanakan secara lengkap
		B.3063.1/ITJ.1/KP.4 40/VII/2024 19-Juli-2024	Melaksanakan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tata kelola perizinan sektor kelautan dan perikanan TA 2024 pada Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Prov. DKI Jakarta (22 Juli s.d. 2 Agustus 2024)	Reviu berjenjang pada KM 15 belum dilaksanakan

No	Unit Kerja	No ST	Nama Kegiatan Pengawasan	Keterangan
		B.3064.1/ITJ.1/KP.4 40/VII/2024 18-Juli-2024	Melaksanakan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tata kelola perizinan sektor kelautan dan perikanan TA 2024 pada Direktorat Jasa Kelautan di Prov. DKI Jakarta (22 Juli s.d. 2 Agustus 2024)	KM 16 belum diisi secara lengkap Reviu berjenjang pada KM 15 dan KM 16 belum dilaksanakan
		B.3065.1/ITJ.1/KP.4 40/VII/2024 19-Juli-2024	Melaksanakan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tata kelola perizinan sektor kelautan dan perikanan TA 2024 pada Direktorat Konservasi dan Keragaman Hayati Laut di Prov. DKI Jakarta (22 Juli s.d. 2 Agustus 2024)	KM 16 belum diisi secara lengkap Reviu berjenjang pada KM 15 dan KM 16 belum dilaksanakan
		B.3626.1/ITJ.1/KP.4 40/VIII/2024 23-Agustus-2024	Melaksanakan Kegiatan Evaluasi Pengelolaan BMN TA 2023 -2024 pada Biro Umum dan PBJ di Prov. DKI Jakarta (26 Agustus s.d. 5 September 2024)	Reviu berjenjang pada KM 15 dan KM 16 belum dilaksanakan secara lengkap
		B.3033.1/ITJ.1/KP.4 40/VIII/2024 23-Agustus-2024	Melaksanakan Kegiatan Evaluasi Pelayanan Publik pada Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan di Prov. DKI Jakarta (26 s.d. 30 Agustus 2024)	Reviu berjenjang pada KM 15 dan KM 16 belum dilaksanakan
		B.3094.1/ITJ.1/KP.4 40/VIII/2024 23-Agustus-2024	Melaksanakan Kegiatan Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2024 pada Direktorat Penataan Ruang Laut di Prov. DKI Jakarta (26 s.d. 30 Agustus 2024)	Reviu berjenjang pada KM 15 dan KM 16 belum dilaksanakan secara lengkap

No	Unit Kerja	No ST	Nama Kegiatan Pengawasan	Keterangan
		B.164/ITJ.1/KP.440/I X/2024 2-September-2024	Melaksanakan evaluasi pengelolaan barang milik negara dan pemantauan pertanggungjawaban keuangan TA 2024 pada LPSPL Serang (3 s.d. 10 September 2024)	Reviu berjenjang pada KM 15 dan KM 16 belum dilaksanakan
		B.201/ITJ.1/KP.440/I X/2024 17-September-2024	Melaksanakan Kegiatan Evaluasi Dukungan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem TA 2023 dan 2024 pada Setjen KKP di Prov. DKI Jakarta (19 s.d. 27 September 2024)	KM 16 belum diisi secara lengkap Reviu berjenjang pada KM 15 dan KM 16 belum dilaksanakan
		B.202/ITJ.1/KP.440/I X/2024 17-September-2024	Melaksanakan Kegiatan Evaluasi Dukungan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem TA 2023 dan 2024 pada Ditjen PKRL KKP di Prov. DKI Jakarta (19 s.d. 27 September 2024)	Reviu berjenjang pada KM 15 dan KM 16 belum dilaksanakan
		B.333/ITJ.1/KP.440/ X/2024 24-Oktober-2024	Melaksanakan kegiatan evaluasi kegiatan prioritas/Bantuan Pemerintah KKP Tahun 2023 Satker lingkup Ditjen PKRL (28 Oktober s.d. 2 November 2024)	KM 15 belum diisi secara lengkap Reviu berjenjang pada KM 15 dan KM 16 belum dilaksanakan
		B.344/ITJ.1/KP.440/ X/2024 31-Oktober-2024	Melaksanakan Lanjutan Evaluasi Kegiatan Perioritas/Bantuan Pemerintah KKP Tahun 2023 pada Satker Lingkup Direktorat Jenderal PKRL di Prov. DKI Jakarta (4 s.d. 8 November 2024)	KM 15 belum diisi secara lengkap Reviu berjenjang pada KM 15 dan KM 16 belum dilaksanakan

No	Unit Kerja	No ST	Nama Kegiatan Pengawasan	Keterangan
		B.331/ITJ.1/KP.440/X/2024 24-Oktober-2024	Melaksanakan kegiatan evaluasi atas efektivitas bantuan pemerintah Tahun 2024: Alat penangkap ikan (13); Kluster Udang (1); Chest Freezer (5); Excavator (1); Kincir (2); Mesin dan Bahan Baku Pakan (1); Mesin Kapal Perikanan (6); Mobil Pendingin (1); PITAP (2) (28 Oktober s.d. 2 November 2024)	KM 16 belum diisi secara lengkap Reviu berjenjang pada KM 15 dan KM 16 belum dilaksanakan
		B.332/ITJ.1/KP.440/X/2024 24-Oktober-2024	Melaksanakan kegiatan evaluasi atas efektivitas bantuan pemerintah Tahun 2024: Alat penangkap ikan (3); Chest Freezer (1); KOMPAK (1); Mesin Kapal Perikanan (15) (28 Oktober s.d. 2 November 2024)	- KM 16 belum diisi secara lengkap - Reviu berjenjang pada KM 15 dan KM 16 belum dilaksanakan
		B.380/ITJ.1/KP.440/XI/2024 14-November-2024	Melaksanakan Kegiatan Evaluasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Lingkup Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2024 (18 s.d. 26 November 2024)	Reviu berjenjang pada KM 15 dan KM 16 belum dilaksanakan
		B.381/ITJ.1/KP.440/XI/2024 14-November-2024	Melaksanakan Kegiatan Evaluasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Lingkup Sekretariat Direktorat PKRL KKP Tahun 2024 (18 s.d. 26 November 2024)	Reviu berjenjang pada KM 15 belum dilaksanakan secara lengkap
2	Inspektorat II	B.3787.1/ITJ.2/KP.440/VII/2024 / Tanggal 03 Juli 2024	Melaksanakan Evaluasi Implementasi SAKIP pada Direktorat Jenderal PSDKP di Pangkalan PSDKP Jakarta, Provinsi DKI Jakarta	KM 16 pada aplikasi AMS : a. tabel A. kolom (2) Tahapan Pengajuan diisi nama Ketua Tim, seharusnya nama

No	Unit Kerja	No ST	Nama Kegiatan Pengawasan	Keterangan
				PT dan PM sesuai dengan Surat Tugas; dan b. tabel B. Pelaksanaan Reviu tidak diisi
		B.3964.1/ITJ.2/KP.4 40/VII/2024 / Tanggal 29 Juli 2024	Melaksanakan Evaluasi Pengelolaan PNPB TA 2023-2024 pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	KM 16 tabel B. Pelaksanaan Reviu pada kolom Reviu oleh/Tanggal diisi nama Ketua Tim, seharusnya nama Pereviu yaitu Pengendali Teknis dan/atau Pengendali Mutu. Namun KM 16 di drive sdh terdapat tanda tangan PM, PT dan Ir.
		B.4743.1/ITJ.2/KP.4 40/VII/2024 / Tanggal 29 Juli 2024	Melaksanakan Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2024 pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	KM 16 tabel B. Pelaksanaan Reviu pada kolom Reviu oleh/Tanggal diisi nama Ketua Tim, seharusnya nama Pereviu yaitu Pengendali Teknis dan/atau Pengendali Mutu. Namun KM 16 di drive sdh terdapat tanda tangan PM, PT dan Ir.
		B.3791.1/ITJ.2/KP.4 40/VIII/2024 / Tanggal 06 Agustus 2024	Evaluasi Pelayanan Publik (Penerbitan SLO dan/atau LVHPI) pada Pangkalan PSDKP Lampulo, Provinsi Aceh	KM 18, yang disajikan sebagai konsep temuan adalah KKE, namun belum ada rencana tindak lanjut
3	Inspektorat III	B.3745.1/ITJ.3/KP.4 40/VIII/2024	Audit Kinerja Politeknik KP Kupang	KM 15 tidak ada koreksi berjenjang
		B.4814.1/ITJ.3/KP.4 40/VIII/2024	Audit Kinerja BPPP Ambon	KM 15 tidak ada koreksi berjenjang

No	Unit Kerja	No ST	Nama Kegiatan Pengawasan	Keterangan
				dan 16 tidak ada tahapan pengajuan
		B.902/ITJ.3/KP.440/X/2024	Audit Kinerja Politeknik AUP	- KM 15 tidak ada koreksi berjenjang - KM 16 tidak ada tahapan pengajuan - KM 27 tidak ada ttd pimpinan
		B.901/ITJ.3/KP.440/X/2024	Audit Kinerja Politeknik KP Bone	KM 15 tidak ada koreksi berjenjang dan 16 tidak ada tahapan pengajuan
		B.922/ITJ.3/KP.440/X/2024	Audit Kinerja Politeknik KP Pangandaran	- KM 15 tidak ada koreksi berjenjang - KM 16 tidak ada tahapan pengajuan - KM 18 tidak ada Temsem
		B.969/ITJ.3/KP.440/X/2024	Audit Kinerja SUPM Tegal	KM 15 tidak ada koreksi berjenjang dan 16 tidak ada tahapan pengajuan
		B.3746.1/ITJ.3/KP.440/VII/2024	Audit Kinerja Politeknik KP Sorong	KM 15 tidak ada koreksi berjenjang dan 16 tidak ada tahapan pengajuan
		B.4772.1/ITJ.3/KP.440/VIII/2024	Audit Kinerja BPPP Banyuwangi	KM 15 tidak ada koreksi berjenjang dan 16 tidak ada tahapan pengajuan
		B.3737.1/ITJ.3/KP.440/VII/2024	Evaluasi Implementasi Manajemen Risiko 2024	- KM 15 tidak ada koreksi berjenjang - KM 16 tidak ada tahapan

No	Unit Kerja	No ST	Nama Kegiatan Pengawasan	Keterangan
				pengajuan - KM 18 tidak ada Temsem
		B.4753/ITJ.3/KP.440/VIII/2024	Evaluasi Pengelolaan BMN	KM 15 tidak ada koreksi berjenjang KM 16 tidak ada tahapan pengajuan
		B.773/ITJ.3/KP.440/VIII/2024	Evaluasi Pelayanan Publik BPPP Ambon	KM 15 tidak ada koreksi berjenjang KM 16 tidak ada tahapan pengajuan KM 18 tidak ada Temsem
		B.776/ITJ.3/KP.440/VIII/2024	Evaluasi Pelayanan Publik BPPP Medan	KM 15 tidak ada koreksi berjenjang KM 16 tidak ada tahapan pengajuan KM 18 tidak ada Temsem
		B.777/ITJ.3/KP.440/VIII/2024	Evaluasi Pelayanan Publik BPPP Banyuwangi	KM 15 tidak ada koreksi berjenjang KM 16 tidak ada tahapan pengajuan KM 18 tidak ada Temsem
		B.780/ITJ.3/KP.440/VIII/2024	Evaluasi Pelayanan Publik BPPP Tegal	KM 15 tidak ada koreksi berjenjang KM 16 tidak ada tahapan pengajuan KM 18 tidak ada Temsem
		B.835/ITJ.3/KP.440/X/2024	Evaluasi Dukungan Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim	KM 15 tidak ada koreksi berjenjang

No	Unit Kerja	No ST	Nama Kegiatan Pengawasan	Keterangan
				KM 16 tidak ada tahapan pengajuan
		B.883/ITJ.3/KP.440/X/2024	Evaluasi Pelayanan Publik Politeknik AUP	KM 15 tidak ada koreksi berjenjang KM 16 tidak ada tahapan pengajuan
		B.3425.1/ITJ.3/KP.440/VII/2024	Evaluasi AKIP pada Seditjen Perikanan Budidaya Tanggal 8 s.d 10 Juli 2024	Tidak ada bukti reviu berjenjang PT dan PM pada KM 16, reviu draft laporan dilakukan KT pada AMS
4	Inspektorat IV	B.3191.1/ITJ.4/KP.440/VII/2024	Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen PDSPKP TA 2024 di Daerah Khusus Jakarta	Pelaksanaan reviu tidak berjenjang, tidak ada bukti reviu oleh PT dan PM
		B.3297.1/ITJ.4/KP.440/VII/2024	Evaluasi Implementasi Manajemen Risiko Tahun 2024 pada Ditjen PDSPKP di Provinsi DKI Jakarta	- KM 15 Alur pemrosesan laporan terbit tidak diisi - Pelaksanaan reviu tidak berjenjang, tidak ada bukti reviu oleh PT dan PM
		B.3180.1/ITJ.4/KP.440/VII/2024	Evaluasi Mandiri Implementasi Pelayanan Publik pada Sekretariat Ditjen PDSPKP di Provinsi DKI Jakarta	Pelaksanaan reviu tidak berjenjang, tidak ada bukti reviu oleh PT dan PM
		B.3181.1/ITJ.4/KP.440/VII/2024	Evaluasi Mandiri Implementasi Pelayanan Publik pada BBP3KP di Provinsi DKI Jakarta	Pelaksanaan reviu tidak berjenjang, tidak ada bukti reviu oleh PT dan PM
		B.4766.1/ITJ.4/KP.440/VIII/2024	Evaluasi Pengelolaan PNBPN dan Tata Kelola Perizinan pada BBP3KP, Provinsi DKI Jakarta	Pelaksanaan reviu tidak berjenjang, tidak ada bukti reviu oleh PT dan PM

No	Unit Kerja	No ST	Nama Kegiatan Pengawasan	Keterangan
5	Inspektorat V	B.3987.1/ITJ.5/KP.4 40/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024	Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu (Kendali Mutu) Pengawasan Semester I Tahun 2024 pada Inspektorat Jenderal KKP, Provinsi DKI Jakarta pelaksanaan tanggal 1 s.d. 5 Juli 2024	Tidak terlihat bukti Reviu Berjenjang KM 16 telah dilaksanakan oleh Pengendali Mutu
		B.4047.1/ITJ.5/KP.4 40/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024	Implementasi PPG lingkup KKP di Provinsi DKI Jakarta pelaksanaan tanggal 30 Juli s.d. 5 Agustus 2024	KM 15 dan 16 belum dilakukan reviu berjenjang

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pengawasan Intern Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan:

- a. Pasal 38 yang menetapkan bahwa supervisi berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g dilakukan dalam Tim Pengawasan mulai dari penanggungjawab sampai dengan anggota tim untuk menjamin mutu hasil pengawasan dan memastikan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.
- b. Pasal 93 ayat (1) huruf a. Ketua Tim Pengawasan mengumpulkan seluruh pemenuhan KMP yang harus dilaksanakan sesuai dengan tahapan sebelum dan sesudah penugasan, dan huruf b. Pengendali Mutu dan/atau Pengendali Teknis memastikan bahwa seluruh kewajiban KMP telah dilaksanakan oleh Tim Pengawasan.

Hal ini disebabkan:

- a. Belum seluruh Ketua Tim dan/Anggota Tim Pengawasan pada Inspektorat I, II, III, IV dan V cermat dalam menyusun kelengkapan formulir KMP sesuai peraturan yang berlaku (0102).
- b. Belum seluruh Pengendali Mutu dan/atau Pengendali Teknis Tim Pengawasan pada Inspektorat I, II, III, IV dan V cermat dalam melakukan reviu berjenjang terhadap KMP yang dibuat Tim Pengawasan (0102)

Sehubungan dengan permasalahan tersebut direkomendasikan kepada Inspektur I, II, III, IV dan V supaya memerintahkan kepada seluruh Tim Pengawasan di lingkungan Inspektorat masing-masing agar:

- a. Ketua Tim dan/Anggota Tim Pengawasan lebih cermat dalam menyusun kelengkapan formulir KMP pada Tahun 2025 sesuai peraturan yang berlaku (06); dan
- b. Pengendali Mutu dan/atau Pengendali Teknis cermat dalam melakukan reviu berjenjang terhadap KMP yang dibuat Tim Pengawasan pada Tahun 2025 (09).

Tanggapan Satker:

- a. Tanggapan Inspektur I

Inspektorat I tidak sepenuhnya sependapat dengan temuan sementara **Hasil Evaluasi: Kepatuhan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan:** Kendali Mutu Pengawasan yang Dibuat Belum Sepenuhnya Memenuhi Kualitas, dalam hal:

- 1) Kriteria yang digunakan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pengawasan Intern Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Pasal 38: supervisi berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g dilakukan dalam Tim Pengawasan mulai dari penanggungjawab sampai dengan anggota tim untuk menjamin mutu hasil pengawasan dan memastikan tercapainya sasaran yang telah

ditetapkan, tidak terkait dengan substansi temuan supervisi penyusunan KMP. Pasal 38 merujuk pada tahapan pengawasan, dimana supervisi berjenjang dilakukan pada seluruh penugasan pengawasan, dimulai sejak penerbitan laporan, penyusunan program kerja, pelaksanaan pengawasan, penyusunan draft laporan oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu. Supervisi berjenjang tersebut dilaksanakan melalui pencatatan pada routing slip dan koreksi Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu dengan persetujuan akhir dengan paraf dan/atau tanda tangan pada Laporan Hasil Pengawasan.

- 2) KMP telah disusun pada seluruh hasil evaluasi dan dilakukan reviu berjenjang sebagaimana tercantum dalam aplikasi AMS, dimana penginputan reviu berjenjang tersebut dilakukan berdasarkan koreksi Pengendali Teknis, Pengendali Mutu dan Penanggung Jawab/Inspektur dari pengajuan rencana penugasan pengawasan meliputi program kerja pengawasan, kertas kerja pengawasan, konsep laporan sampai dengan penerbitan laporan. Dokumen KMP dan kelengkapannya telah diupload pada link google drive yang disediakan oleh Tim Evaluasi PKPT dan KM Semester II Tahun 2024 sesuai batas waktu yang ditentukan (18 Desember 2024) serta dapat diakses langsung pada AMS.
- b. Tanggapan Inspektur II
Rekomendasi diterima dan telah di Tindak Lanjuti dengan Memorandum Inspektur II Nomor: 9/ITJ.2/TU.210/II/2025 tanggal 8 Januari 2025.
 - c. Tanggapan Inspektur III
Rekomendasi kepada Inspektur III untuk mengingatkan tim pengawasan dalam penyusunan KMP dan reviu berjenjang lebih teliti dan lengkap pada tahun 2025 sesuai dengan kewenangan/peran personil dalam tim pengawasan akan ditindaklanjuti paling lambat pada Minggu ke-3 Bulan Januari 2025. Namun terdapat hal yang perlu disampaikan, antara lain:
 - 1) Tahapan kegiatan pengawasan seluruhnya telah dilakukan reviu berjenjang sesuai Routing Slip yang tidak terpisahkan dari Konsep LHP,

namun dalam pengisian formulir KMP 15 (*routing slip*) dan KM 16 (reviu konsep LHP) pada aplikasi AMS belum seluruhnya dilakukan oleh personil yang sesuai dengan perannya dalam tim pengawasan atau dilakukan oleh personil yang sama. Hal ini dikarenakan aplikasi AMS belum memberlakukan penguncian hak akses pada tahapan-tahapan/prosedur pengisian formulir KMP sesuai peran personil dalam tim, sehingga KMP yang disusun memiliki kekurangan dalam kelengkapan data dan informasi yang disajikan;

- 2) Kekurangan data dan informasi pada temuan sementara telah diperbaiki/dilengkapi, antara lain:
 - a) Kekurangan temuan sementara pada KMP 18 telah diperbaiki untuk kegiatan Evaluasi Pelayanan Publik telah mencantumkan temuan sementara berupa: Berita Acara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan hasil penilaian pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang telah ditandatangani bersama antara evaluator dan evaluatan sebagaimana Pedoman Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik KKP Tahun 2024; dan
 - b) Kekurangan temuan sementara pada KM 27 (Surat Tugas) yang belum ditandatangani pimpinan untuk kegiatan Audit Kinerja Politeknik AUP telah dilengkapi;
 - 3) Monitoring kepatuhan penyusunan KMP yang telah dilakukan secara berkala masih terhadap aspek pemenuhan, sedangkan dalam memastikan aspek substansi/kualitas serta tahapan dalam penyusunan KMP belum optimal, kedepannya akan dilakukan peningkatan kualitas dalam pelaksanaan monitoring KMP.
- d. Tanggapan Inspektur IV
- 1) Formulir KMP telah sepenuhnya memenuhi kualitas;
 - 2) Kegiatan pengawasan telah dilakukan reviu berjenjang pada aplikasi AMS dengan rincian sebagai berikut:

No	No ST	Nama Kegiatan Pengawasan	Keterangan
1	B.3191.1/ITJ.4/KP.4 40/VII/2024	Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen PDSPKP TA 2024 di Daerah Khusus Jakarta	- Telah dilakukan reviu oleh PT pada tanggal 4 Agustus 2024 - Telah dilakukan reviu oleh PM pada tanggal 5 Agustus 2024 - Bukti dukung terlampir
2	B.3297.1/ITJ.4/KP.4 40/VII/2024	Evaluasi Implementasi Manajemen Risiko Tahun 2024 pada Ditjen PDSPKP di Provinsi DKI Jakarta	- Telah dilakukan reviu oleh PT pada tanggal 10 dan 20 Agustus 2024 - Telah dilakukan reviu oleh PM pada tanggal 21 Agustus 2024 - Bukti dukung terlampir
3	B.3180.1/ITJ.4/KP.4 40/VII/2024	Evaluasi Mandiri Implementasi Pelayanan Publik pada Sekretariat Ditjen PDSPKP di Provinsi DKI Jakarta	- Telah dilakukan reviu oleh PT pada tanggal 7 Agustus 2024 - Telah dilakukan reviu oleh PM pada tanggal 8 Agustus 2024 - Bukti dukung terlampir
4	B.3181.1/ITJ.4/KP.4 40/VII/2024	Evaluasi Mandiri Implementasi Pelayanan Publik pada BBP3KP di Provinsi DKI Jakarta	- Telah dilakukan reviu oleh PT pada tanggal 9 Agustus 2024 - Telah dilakukan reviu oleh PM pada tanggal 10 Agustus 2024 - Bukti dukung terlampir
5	B.4766.1/ITJ.4/KP.4 40/VIII/2024	Evaluasi Pengelolaan PNPB dan Tata Kelola Perizinan pada BBP3KP, Provinsi DKI Jakarta	- Telah dilakukan reviu oleh PT pada tanggal 1 September 2024 - Telah dilakukan reviu oleh PM pada tanggal 1 September 2024 - Bukti dukung terlampir

3) KM 15 Alur pemrosesan laporan terbit telah dipenuhi/telah diisi via aplikasi AMS (bukti terlampir).

e. Tanggapan Inspektur V

Rekomendasi diterima dan akan segera ditindaklanjuti paling lambat pada Minggu ke-3 Bulan Januari 2025. Telah ditindaklanjuti dengan Memorandum Inspektur V Nomor 11/ITJ.5/TU.210/I/2025 tanggal 9 Januari 2025 perihal Kepatuhan Kendali Mutu Pengawasan.

Tanggapan Tim Evaluasi:

a. Atas tanggapan Inspektur I, Tim Evaluasi menyatakan:

- 1) **Sependapat** dengan tanggapan atas penggunaan kriteria penyusunan KMP dan akan menambahkan kriteria pada pasal 92, dan 93 Peraturan Inspektur Jenderal Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pengawasan Intern Lingkup Inspektorat Jenderal

Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Peningkatan Kualitas Pengawasan.

Selain itu terkait tanggapan bahwa “Supervisi berjenjang tersebut dilaksanakan melalui pencatatan pada routing slip dan koreksi Pengendali Teknis (PT) dan Pengendali Mutu (PM) dengan persetujuan akhir dengan paraf/dan atau tanda tangan pada Laporan Hasil Pengawasan (LHP)”, **Tim Evaluasi sependapat dan sesuai dengan hasil evaluasi** sehingga **bukti** pencatatan pada *routing slip* dan koreksi PT dan PM pada LHP **harus dipenuhi**;

- 2) **Tidak sepenuhnya sependapat** dengan tanggapan terkait pelaksanaan revidi berjenjang, mengingat dari Dokumen KMP yang disampaikan oleh Tim Inspektorat I **belum sepenuhnya menyajikan bukti** terkait pelaksanaan **revidi berjenjang** dalam aplikasi AMS sebagaimana diatur dalam Peraturan Inspektur Jenderal Nomor 37 Tahun 2024 pasal 93 ayat 1 huruf c.
- b. Atas tanggapan Inspektur II, Tim Evaluasi menyatakan bahwa **Tindak Lanjut** dengan Memorandum Inspektur II Nomor: 9/ITJ.2/TU.210/II/2025 tanggal 8 Januari 2025 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan Semester II Tahun 2024 **telah sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi**.
- c. Atas tanggapan Inspektur III, Tim Evaluasi menyatakan:
- 1) **Sependapat** bahwa terdapat kondisi “aplikasi AMS belum memberlakukan penguncian hak akses pada tahapan-tahapan/prosedur pengisian formulir KMP sesuai peran personil dalam tim, **namun demikian** Tim Pengawasan pada masing-masing Inspektorat tetap dapat melaksanakan pengisian formulir KMP secara berjenjang sesuai peran;
 - 2) **Menerima** terhadap kekurangan data KMP 18 dan KMP 27 yang telah dilengkapi.

- d. Atas tanggapan Inspektur IV, Tim Evaluasi menyatakan bahwa dokumen **perbaikan KMP** yang disampaikan pasca periode evaluasi **telah sesuai** dan akan diungkapkan dalam Laporan Hasil Evaluasi final.
- e. Atas tanggapan Inspektur V, Tim Evaluasi menyatakan:
Tindak lanjut dengan Memorandum Inspektur V Nomor 11/ITJ.5/TU.210/I/2025 tanggal 9 Januari 2025 perihal Kepatuhan Kendali Mutu Pengawasan **telah sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi**.

C. Hal-hal Lain yang Perlu Diperhatikan

Berdasarkan evaluasi terhadap 23 LHA dan 99 LHE periode 1 Juli s.d. 6 Desember 2024 pelaksanaan kendali mutu pengawasan yang paling banyak mengalami kendala yaitu KMP 15 Formulir Pengendalian Penyusunan Laporan dan Formulir KMP 16 Formulir Reviu Konsep Laporan dimana pengendalian/reviu berjenjang mulai dari Ketua Tim, Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu belum dapat digunakan dengan baik pada AMS. Selain itu pada KMP 18 Konsep Temuan dan Rencana Tindak Lanjut belum dapat terintegrasi pada AMS, sehingga penyusunan Konsep Temuan masih dilaksanakan secara manual (tidak melalui AMS) dan ketika telah berbentuk Temuan Sementara Final baru diunggah pada AMS.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut direkomendasikan kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk menginstruksikan kepada Ketua Tim Kerja Sistem Informasi Pengawasan untuk memberikan pembatasan wewenang setiap jenjang yaitu Ketua Tim, Pengendali Teknis, dan Pengendali Mutu dalam pada KMP 15 Formulir Pengendalian Penyusunan Laporan dan melaksanakan reviu berjenjang Formulir KMP 16 Formulir Reviu Konsep Laporan serta membuat tampilan KMP 18 terintegrasi dengan Temuan Sementara.

Tanggapan Satker:

1. Kami sependapat bahwa pengendalian mutu dan reviu berjenjang pelaporan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan (AT, KT, PT dan PM serta Inspektur) melalui fitur KM 15 dan KM 16 pada aplikasi AMS belum dapat

dilaksanakan dengan optimal. Hal ini membutuhkan kesadaran dan tanggung jawab personil Tim Pengawasan untuk dapat menggunakan fitur tersebut sesuai dengan hak akses yang telah diberikan kepada masing-masing personil tim pengawasan. Namun kami sependapat bahwa fitur tersebut perlu ditingkatkan untuk dapat mendorong personil Tim Pengawasan melaksanakan koreksi berjenjang pada aplikasi AMS, salah satu upaya ke depan adalah memberikan pembatasan wewenang pada setiap jenjang atau mengembangkan fitur tanda tangan digital pada formulir kendali mutu (digital signature) sebagai bentuk pengakuan bahwa mutu pengawasan telah dikendalikan secara berjenjang dengan baik. Pengembangan fitur dimaksud akan dilaksanakan sampai dengan Minggu ke-4 Bulan Maret 2025;

2. Terkait dengan formulir KM 18 yaitu reviu konsep laporan dan temuan sementara akan diperbaiki dengan menambahkan tampilan temuan sementara pada KM 18 yang akan diperbaiki paling lambat sampai dengan Minggu ke-4 Bulan Maret 2025.

D. Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya

1. Laporan Hasil Evaluasi Kepatuhan Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Semester I Tahun 2024 Nomor: B.207/ITJ.5/HP.380/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 **seluruhnya** telah **tuntas** ditindaklanjuti;
2. Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan yang Memenuhi Standar Mutu (Kendali Mutu) Pengawasan Semester I Tahun 2024 Nomor: B.198/ITJ.5/HP.470/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 **seluruhnya** telah **tuntas** ditindaklanjuti.

Jakarta, Januari 2025

Sekretaris Itjen


Ivy Silfia Irani

Pengendali Mutu


Yulianti

Lampiran
Tanggapan Inspektorat I

No	No ST	Nama Kegiatan Pengawasan	Keterangan	Tanggapan
1	B.3595.1/ITJ.1/KP.440/VI/2024 Tanggal 27 Juni 2024	Melaksanakan evaluasi kinerja UKPBJ pada Biro Umum dan PBJ Tahun 2024 pada Biro Umum dan PBJ, Prov. DKI Jakarta (1 Juli s.d. 5 Juli 2024)	Reviu berjenjang pada KM 15 dan KM 16 belum dilaksanakan	<p>Telah dilakukan reviu berjenjang pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KM 15 telah dilengkapi pencantuman: disusun KT, direviu PT, disetujui PM dan PJ pada kolom informasi umum dan tahapan penyelesaian. 2. KM 16: telah dilakukan reviu berjenjang KT, PT, PM dan PJ dan dicantumkan pada kolom reviu konsep laporan dan Aktivitas Reviu Konsep Laporan. Input pada kolom masalah yang dijumpai dilakukan berdasarkan hasil koreksi LHE yang dilakukan oleh PT dan PM. <p>Terlampir dokumen sebagaimana telah diupload pada google drive sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Tim Evaluasi (18 desember 2024):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KM 15 dan 16 dari AMS 2. Tangkap layar dokumen pada google drive.
2	B.3621.1/ITJ.1/KP.440/VII/2024 Tanggal 5 Juli 2024	Melaksanakan evaluasi implementasi SAKIP tahun 2023 lingkup Sekretariat Jenderal KKP, Prov. DKI Jakarta (8 s.d. 12 Juli 2024)	Reviu berjenjang pada KM 15 dan KM 16 belum dilaksanakan(18 desember 2024):	<p>Telah dilakukan reviu berjenjang pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KM 15 telah dilengkapi pencantuman: disusun KT, direviu PT, disetujui PM dan PJ pada kolom informasi umum dan tahapan penyelesaian 2. KM 16: telah dilakukan reviu berjenjang KT, PT, PM dan PJ dan dicantumkan pada kolom reviu konsep laporan dan Aktivitas Reviu Konsep Laporan. <p>Terlampir dokumen sebagaimana telah diupload pada google drive sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Tim Evaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KM 15 dan 16 dari AMS 2. Tangkap layar dokumen pada google drive
3	B.3073.1/ITJ.1/KP.440/VII/2024 Tanggal 5 Juli 2024	Melaksanakan evaluasi implementasi SAKIP tahun 2023 lingkup Ditjen PKRL di	Reviu berjenjang pada KM 15 dan KM 16 belum dilaksanakan	<p>Telah dilakukan reviu berjenjang pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KM 15 telah dilengkapi pencantuman: disusun KT, direviu PT, disetujui PM dan PJ pada kolom informasi

No	No ST	Nama Kegiatan Pengawasan	Keterangan	Tanggapan
		Prov. DKI Jakarta (8 s.d. 12 Juli 2024)	secara lengkap (PM belum mereviu)	<p>umum dan tahapan penyelesaian</p> <p>2. KM 16: telah dilakukan reviu berjenjang KT, PT, PM dan PJ dan dicantumkan pada kolom reviu konsep laporan dan Aktivitas Reviu Konsep Laporan. Input pada kolom masalah yang dijumpai dilakukan berdasarkan hasil koreksi LHE yang dilakukan oleh PT dan PM.</p> <p>Terlampir dokumen sebagaimana telah diupload pada google drive sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Tim Evaluasi (18 desember 2024):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KM 15 dan 16 dari AMS 2. Tangkap layar dokumen pada google drive
4	B.3061.1/ITJ.1/KP.440/VII /2024 Tanggal 12 Juli 2024	Melaksanakan kegiatan evaluasi pelayanan publik pada LKKPN Pekanbaru, Prov. Riau (15 s.d. 19 Juli 2024)	Reviu berjenjang pada KM 15 dan KM 16 belum dilaksanakan	<p>Telah dilakukan reviu berjenjang pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KM 15 telah dilengkapi pencantuman: disusun KT, direviu PT, disetujui PM dan PJ pada kolom informasi umum dan tahapan penyelesaian 2. KM 16: telah dilakukan reviu berjenjang KT, PT, PM dan PJ dan dicantumkan pada kolom reviu konsep laporan dan Aktivitas Reviu Konsep Laporan. Input pada kolom masalah yang dijumpai dilakukan berdasarkan hasil koreksi LHE yang dilakukan oleh PT dan PM. <p>Terlampir dokumen sebagaimana telah diupload pada google drive sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Tim Evaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KM 15 dan 16 dari AMS 2. Tangkap layar dokumen pada google drive
5	B.3610.1/ITJ.1/KP.440/VII /2024, Tanggal 12 Juli 2024	Melaksanakan evaluasi implementasi MR Tahun 2023 pada Sekretariat Jenderal KKP di Prov. DKI Jakarta	Reviu berjenjang pada KM 15 dan KM 16 belum dilaksanakan	<p>Telah dilakukan reviu berjenjang, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KM 15: Telah dicantumkan reviu berjenjang pada kolom informasi umum (KT, PT, PM, PJ). Sesuai arahan Ketua Tim Evaluasi PKPT dan KM saat entry meeting,

No	No ST	Nama Kegiatan Pengawasan	Keterangan	Tanggapan
		(15 s.d. 19 Juli 2024)		<p>tanda tangan tidak diperlukan dan tidak dapat dilakukan pada aplikasi.</p> <p>Input awal pada KM oleh KT belum dilengkapi pencantuman tanggal pada kolom uraian no 5 s.d. 10. Perbaikan input pada AMS telah dilakukan namun tidak muncul pada saat download dokumen, sehingga bukti dokumen dilengkapi dengan tangkap layar pengisian KM 15.</p> <p>2. KM 16: telah dilakukan reviu berjenjang KT, PT, PM dan PJ dan dicantumkan pada kolom reviu konsep laporan dan Aktivitas Reviu Konsep Laporan. Input pada kolom masalah yang dijumpai dilakukan berdasarkan hasil koreksi LHE yang dilakukan oleh PT dan PM.</p> <p>Terlampir dokumen sebagaimana telah diupload pada google drive sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Tim Evaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KM 15 dan 16 dari AMS 2. Tangkap layar KM 15 dari AMS dan link google drive 3. Tangkap layar dokumen pada google drive
6	B.3072.1/ITJ.1/KP.440/VII/2024 12-Juli-2024	Melaksanakan evaluasi implementasi MR Tahun 2023 pada Ditjen PKRL di Prov. DKI Jakarta (15 s.d. 19 Juli 2024)	Reviu berjenjang pada KM 15 dan KM 16 belum dilaksanakan	<p>Telah dilakukan reviu berjenjang pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KM 15 telah dilengkapi pencantuman: disusun KT, direviu PT, disetujui PM dan PJ pada kolom informasi umum dan tahapan penyelesaian. 2. KM 16: telah dilakukan reviu berjenjang KT, PT, PM dan PJ dan dicantumkan pada kolom reviu konsep laporan dan Aktivitas Reviu Konsep Laporan. Input pada kolom masalah yang dijumpai dilakukan berdasarkan hasil koreksi LHE yang dilakukan oleh PT dan PM. <p>Terlampir dokumen sebagaimana telah diupload pada google drive sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Tim</p>

No	No ST	Nama Kegiatan Pengawasan	Keterangan	Tanggapan
				Evaluasi: 1. KM 15 dan 16 dari AMS 2. Tangkap layar dokumen google drive
7	B.3062.1/ITJ.1/KP.440/VII /2024 19-Juli-2024	Melaksanakan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tata kelola perizinan sektor kelautan dan perikanan TA 2024 pada Direktorat Penataan Ruang Laut di Prov. DKI Jakarta (22 Juli s.d. 2 Agustus 2024)	Reviu berjenjang pada KM 15 dan KM 16 belum dilaksanakan secara lengkap (PM belum mereviu)	Telah dilakukan reviu berjenjang, yaitu: 1. KM 15: Telah dicantumkan reviu berjenjang pada kolom informasi umum (KT, PT, PM, PJ). Sesuai arahan Ketua Tim Evaluasi PKPT dan KM saat entry meeting, tanda tangan tidak diperlukan dan tidak dapat dilakukan pada aplikasi. Input awal pada KM oleh KT belum dilengkapi pencantuman tanggal pada kolom uraian no 5 s.d. 10. Perbaikan input pada AMS telah dilakukan namun tidak muncul pada saat download dokumen, sehingga bukti dokumen dilengkapi dengan tangkap layar pengisian KM 15 yang telah diupload pada google drive sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Tim Evaluasi. 2. KM 16: telah dilakukan reviu berjenjang KT, PT, PM dan PJ dan dicantumkan pada kolom reviu konsep laporan dan Aktivitas Reviu Konsep Laporan. Input pada kolom masalah yang dijumpai dilakukan berdasarkan hasil koreksi LHE yang dilakukan oleh PT dan PM. Terlampir dokumen sebagaimana telah diupload pada google drive sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Tim Evaluasi: 1. KM 15 dan 16 dari AMS 2. Tangkap layar KM 15 dari AMS
8	B.3063.1/ITJ.1/KP.440/VII /2024 19-Juli-2024	Melaksanakan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tata kelola perizinan sektor kelautan dan	Reviu berjenjang pada KM 15 dan KM 16 belum dilaksanakan (PM belum mereviu)	Telah dilakukan reviu berjenjang pada: 1. KM 15 telah dilengkapi pencantuman: disusun KT, direviu PT, disetujui PM dan PJ pada kolom informasi umum dan tahapan penyelesaian.

No	No ST	Nama Kegiatan Pengawasan	Keterangan	Tanggapan
		perikanan TA 2024 pada Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Prov. DKI Jakarta (22 Juli s.d. 2 Agustus 2024)		<p>2. KM 16: telah dilakukan reviu berjenjang KT, PT, PM dan PJ dan dicantumkan pada kolom reviu konsep laporan dan Aktivitas Reviu Konsep Laporan. Input pada kolom masalah yang dijumpai dilakukan berdasarkan hasil koreksi LHE yang dilakukan oleh PT dan PM.</p> <p>Terlampir dokumen sebagaimana telah diupload pada google drive sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Tim Evaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KM 15 dan 16 dari AMS 2. Tangkap layar dokumen google drive
9	B.3064.1/ITJ.1/KP.440/VII /2024 18-Juli-2024	Melaksanakan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tata kelola perizinan sektor kelautan dan perikanan TA 2024 pada Direktorat Jasa Kelautan di Prov. DKI Jakarta (22 Juli s.d. 2 Agustus 2024)	KM 16 belum diisi secara lengkap Reviu berjenjang pada KM 15 dan KM 16 belum dilaksanakan	<p>Telah dilakukan reviu berjenjang pada KM 15 dengan pencantuman: disusun KT, direviu PT, disetujui PM dan PJ pada kolom informasi umum dan tahapan penyelesaian.</p> <p>Terlampir dokumen sebagaimana telah diupload pada google drive sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Tim Evaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KM 15 dan 16 dari AMS 2. Tangkap layar dokumen google drive
10	B.3065.1/ITJ.1/KP.440/VII /2024 19-Juli-2024	Melaksanakan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tata kelola perizinan sektor kelautan dan perikanan TA 2024 pada Direktorat Konservasi dan Keragaman Hayati Laut di Prov. DKI Jakarta (22 Juli s.d. 2 Agustus 2024)	KM 16 belum diisi secara lengkap Reviu berjenjang pada KM 15 dan KM 16 belum dilaksanakan	<p>Telah dilakukan reviu berjenjang pada KM 15 dengan pencantuman: disusun KT, direviu PT, disetujui PM dan PJ pada kolom informasi umum dan tahapan penyelesaian.</p> <p>Terlampir dokumen sebagaimana telah diupload pada google drive sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Tim Evaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KM 15 dan 16 dari AMS 2. Tangkap layar dokumen google drive
11	B.3626.1/ITJ.1/KP.440/VII /2024 23-Agustus-2024	Melaksanakan Kegiatan Evaluasi Pengelolaan BMN	Reviu berjenjang pada KM 15 dan KM 16	<p>Telah dilakukan reviu berjenjang pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KM 15 telah dilengkapi pencantuman: disusun KT,

No	No ST	Nama Kegiatan Pengawasan	Keterangan	Tanggapan
		TA 2023 -2024 pada Biro Umum dan PBJ di Prov. DKI Jakarta (26 Agustus s.d. 5 September 2024)	belum dilaksanakan secara lengkap	<p>direviu PT, disetujui PM dan PJ pada kolom informasi umum dan tahapan penyelesaian.</p> <p>2. KM 16: telah dilakukan reviu berjenjang KT, PT, PM dan PJ dan dicantumkan pada kolom reviu konsep laporan dan Aktivitas Reviu Konsep Laporan. Input pada kolom masalah yang dijumpai dilakukan berdasarkan hasil koreksi LHE yang dilakukan oleh PT dan PM.</p> <p>Terlampir dokumen sebagaimana telah diupload pada google drive sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Tim Evaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KM 15 dan 16 dari AMS 2. Tangkap layar dokumen google drive
12	B.3033.1/ITJ.1/KP.440/VII I/2024 23-Agustus-2024	Melaksanakan Kegiatan Evaluasi Pelayanan Publik pada Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan di Prov. DKI Jakarta (26 s.d. 30 Agustus 2024)	Belum terdapat temuan sementara Reviu berjenjang pada KM 15 dan KM 16 belum dilaksanakan	<p>Telah terdapat Temuan Sementara dengan Format Berita Acara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai Lampiran LHE (terlampir).</p> <p>Telah dilakukan reviu berjenjang pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KM 15 telah dilengkapi pencantuman: disusun KT, direviu PT, disetujui PM dan PJ pada kolom informasi umum dan tahapan penyelesaian (terlampir) 2. KM 16: telah dilakukan reviu berjenjang KT, PT, PM dan PJ dan dicantumkan pada kolom reviu konsep laporan dan Aktivitas Reviu Konsep Laporan. Input pada kolom masalah yang dijumpai dilakukan berdasarkan hasil koreksi LHE yang dilakukan oleh PT dan PM (terlampir).
13	B.3094.1/ITJ.1/KP.440/VII I/2024 23-Agustus-2024	Melaksanakan Kegiatan Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2024 pada Direktorat Penataan Ruang Laut di Prov. DKI Jakarta (26 s.d. 30 Agustus 2024)	Reviu berjenjang pada KM 15 dan KM 16 belum dilaksanakan secara lengkap	<p>Telah dilakukan reviu berjenjang pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KM 15 telah dilengkapi pencantuman: disusun KT, direviu PT, disetujui PM dan PJ pada kolom informasi umum dan tahapan penyelesaian (terlampir) 2. KM 16: telah dilakukan reviu berjenjang KT, PT, PM dan PJ dan dicantumkan pada kolom reviu konsep

No	No ST	Nama Kegiatan Pengawasan	Keterangan	Tanggapan
				laporan dan Aktivitas Reviu Konsep Laporan. Input pada kolom masalah yang dijumpai dilakukan berdasarkan hasil koreksi LHE yang dilakukan oleh PT dan PM (terlampir).
14	B.164/ITJ.1/KP.440/IX/2024 2-September-2024	Melaksanakan evaluasi pengelolaan barang milik negara dan pemantauan pertanggungjawaban keuangan TA 2024 pada LPSPL Serang (3 s.d. 10 September 2024)	Reviu berjenjang pada KM 15 dan KM 16 belum dilaksanakan	<p>Telah dilakukan reviu berjenjang pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KM 15 telah dilengkapi pencantuman: disusun KT, direviu PT, disetujui PM dan PJ pada kolom informasi umum dan tahapan penyelesaian. 2. KM 16: telah dilakukan reviu berjenjang KT, PT, PM dan PJ dan dicantumkan pada kolom reviu konsep laporan dan Aktivitas Reviu Konsep Laporan. Input pada kolom masalah yang dijumpai dilakukan berdasarkan hasil koreksi LHE yang dilakukan oleh PT dan PM. <p>Terlampir dokumen sebagaimana telah diupload pada google drive sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Tim Evaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KM 15 dan 16 dari AMS 2. Tangkap layar dokumen google drive
15	B.201/ITJ.1/KP.440/IX/2024 17-September-2024	Melaksanakan Kegiatan Evaluasi Dukungan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem TA 2023 dan 2024 pada Setjen KKP di Prov. DKI Jakarta (19 s.d. 27 September 2024)	KM 16 belum diisi secara lengkap Reviu berjenjang pada KM 15 dan KM 16 belum dilaksanakan	Telah dilakukan reviu berjenjang pada KM 15 telah dilengkapi pencantuman: disusun KT, direviu PT, disetujui PM dan PJ pada kolom informasi umum dan tahapan penyelesaian (terlampir)
16	B.202/ITJ.1/KP.440/IX/2024 17-September-2024	Melaksanakan Kegiatan Evaluasi Dukungan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem TA 2023 dan 2024 pada Ditjen PKRL KKP di Prov. DKI Jakarta	Reviu berjenjang pada KM 15 dan KM 16 belum dilaksanakan	<p>Telah dilakukan reviu berjenjang pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KM 15 telah dilengkapi pencantuman: disusun KT, direviu PT, disetujui PM dan PJ pada kolom informasi umum dan tahapan penyelesaian. 2. KM 16: telah dilakukan reviu berjenjang KT, PT, PM dan PJ dan dicantumkan pada kolom reviu konsep

No	No ST	Nama Kegiatan Pengawasan	Keterangan	Tanggapan
		(19 s.d. 27 September 2024)		<p>laporan dan Aktivitas Reviu Konsep Laporan. Input pada kolom masalah yang dijumpai dilakukan berdasarkan hasil koreksi LHE yang dilakukan oleh PT dan PM.</p> <p>Terlampir dokumen sebagaimana telah diupload pada google drive sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Tim Evaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KM 15 dan 16 dari AMS 2. Tangkap layar dokumen google drive
17	B.333/ITJ.1/KP.440/X/2024 24-Oktober-2024	Melaksanakan kegiatan evaluasi kegiatan prioritas/Bantuan Pemerintah KKP Tahun 2023 Satker lingkup Ditjen PKRL (28 Oktober s.d. 2 November 2024)	Belum terdapat temuan sementara KM 15 belum diisi secara lengkap Reviu berjenjang pada KM 15 dan KM 16 belum dilaksanakan	<p>Temuan Sementara telah dilengkapi sebagai Lampiran KM 18</p> <p>Telah dilakukan reviu berjenjang pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KM 15 telah dilengkapi pencantuman: disusun KT, direviu PT, disetujui PM dan PJ pada kolom informasi umum dan tahapan penyelesaian. 2. KM 16: telah dilakukan reviu berjenjang KT, PT, PM dan PJ dan dicantumkan pada kolom reviu konsep laporan dan Aktivitas Reviu Konsep Laporan. Input pada kolom masalah yang dijumpai dilakukan berdasarkan hasil koreksi LHE yang dilakukan oleh PT dan PM. <p>Terlampir dokumen sebagaimana telah diupload pada google drive sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Tim Evaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KM 15 dan 16 dari AMS 2. TS Banper Ditjen PKRL 3. Tangkap layar dokumen google drive
18	B.344/ITJ.1/KP.440/X/2024 31-Oktober-2024	Melaksanakan Lanjutan Evaluasi Kegiatan Perioritas/Bantuan Pemerintah KKP Tahun 2023 pada Satker Lingkup	Belum terdapat temuan sementara KM 15 belum diisi secara lengkap Reviu berjenjang	<p>Temuan Sementara telah dilengkapi sebagai Lampiran KM 18</p> <p>Telah dilakukan reviu berjenjang pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KM 15 telah dilengkapi pencantuman: disusun KT, direviu PT, disetujui PM dan PJ pada kolom informasi

No	No ST	Nama Kegiatan Pengawasan	Keterangan	Tanggapan
		Direktorat Jenderal PKRL di Prov. DKI Jakarta (4 s.d. 8 November 2024)	pada KM 15 dan KM 16 belum dilaksanakan	<p>umum dan tahapan penyelesaian.</p> <p>2. KM 16: telah dilakukan revidu berjenjang KT, PT, PM dan PJ dan dicantumkan pada kolom revidu konsep laporan dan Aktivitas Revidu Konsep Laporan. Input pada kolom masalah yang dijumpai dilakukan berdasarkan hasil koreksi LHE yang dilakukan oleh PT dan PM.</p> <p>Terlampir dokumen sebagaimana telah diupload pada google drive sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Tim Evaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KM 15 dan 16 dari AMS 2. TS Banper Ditjen PKRL 3. Tangkap layar dokumen google drive
19	B.331/ITJ.1/KP.440/X/2024 24-Oktober-2024	Melaksanakan kegiatan evaluasi atas efektivitas bantuan pemerintah Tahun 2024: Alat penangkap ikan (13); Kluster Udang (1); Chest Freezer (5); Excavator (1); Kincir (2); Mesin dan Bahan Baku Pakan (1); Mesin Kapal Perikanan (6); Mobil Pendingin (1); PITAP (2) (28 Oktober s.d. 2 November 2024)	KM 16 belum diisi secara lengkap Revidu berjenjang pada KM 15 dan KM 16 belum dilaksanakan	<p>Telah dilakukan revidu berjenjang pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KM 15 telah dilengkapi pencantuman: disusun KT, direvidu PT, disetujui PM dan PJ pada kolom informasi umum dan tahapan penyelesaian. 2. KM 16: telah dilakukan revidu berjenjang KT, PT, PM dan PJ dan dicantumkan pada kolom revidu konsep laporan dan Aktivitas Revidu Konsep Laporan. Input pada kolom masalah yang dijumpai dilakukan berdasarkan hasil koreksi LHE yang dilakukan oleh PT dan PM. <p>Terlampir dokumen sebagaimana telah diupload pada google drive sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Tim Evaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KM 15 dan 16 dari AMS 2. Tangkap layar dokumen google drive
20	B.332/ITJ.1/KP.440/X/2024 24-Oktober-2024	Melaksanakan kegiatan evaluasi atas efektivitas bantuan pemerintah Tahun 2024: Alat penangkap ikan	KM 16 belum diisi secara lengkap Revidu berjenjang pada KM 15 dan KM 16	<p>Telah dilakukan revidu berjenjang pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KM 15 telah dilengkapi pencantuman: disusun KT, direvidu PT, disetujui PM dan PJ pada kolom informasi umum dan tahapan penyelesaian.

No	No ST	Nama Kegiatan Pengawasan	Keterangan	Tanggapan
		(3); Chest Freezer (1); KOMPAK (1); Mesin Kapal Perikanan (15) (28 Oktober s.d. 2 November 2024)	belum dilaksanakan	<p>2. KM 16: telah dilakukan reviu berjenjang KT, PT, PM dan PJ dan dicantumkan pada kolom reviu konsep laporan dan Aktivitas Reviu Konsep Laporan. Input pada kolom masalah yang dijumpai dilakukan berdasarkan hasil koreksi LHE yang dilakukan oleh PT dan PM.</p> <p>Terlampir dokumen sebagaimana telah diupload pada google drive sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Tim Evaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KM 15 dan 16 dari AMS 2. Tangkap layar dokumen google drive
21	B.380/ITJ.1/KP.440/XI/2024 14-November-2024	Melaksanakan Kegiatan Evaluasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Lingkup Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2024 (18 s.d. 26 November 2024)	Reviu berjenjang pada KM 15 dan KM 16 belum dilaksanakan	<p>Telah dilakukan reviu berjenjang pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KM 15 telah dilengkapi pencantuman: disusun KT, direviu PT, disetujui PM dan PJ pada kolom informasi umum dan tahapan penyelesaian (terlampir) 2. KM 16: telah dilakukan reviu berjenjang KT, PT, PM dan PJ dan dicantumkan pada kolom reviu konsep laporan dan Aktivitas Reviu Konsep Laporan. Input pada kolom masalah yang dijumpai dilakukan berdasarkan hasil koreksi LHE yang dilakukan oleh PT dan PM (terlampir).
22	B.381/ITJ.1/KP.440/XI/2024 14-November-2024	Melaksanakan Kegiatan Evaluasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Lingkup Sekretariat Direktorat PKRL KKP Tahun 2024 (18 s.d. 26 November 2024)	Reviu berjenjang pada KM 15 dan KM 16 belum dilaksanakan secara lengkap (PM belum mereviu)	<p>Telah dilakukan reviu berjenjang pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KM 15 telah dilengkapi pencantuman: disusun KT, direviu PT, disetujui PM dan PJ pada kolom informasi umum dan tahapan penyelesaian. 2. KM 16: telah dilakukan reviu berjenjang KT, PT, PM dan PJ dan dicantumkan pada kolom reviu konsep laporan dan Aktivitas Reviu Konsep Laporan. Input pada kolom masalah yang dijumpai dilakukan berdasarkan hasil koreksi LHE yang dilakukan oleh PT dan PM. <p>Terlampir dokumen sebagaimana telah diupload pada</p>

No	No ST	Nama Kegiatan Pengawasan	Keterangan	Tanggapan
				google drive sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Tim Evaluasi: 1.KM 15 dan 16 dari AMS 2.Tangkap layar dokumen google drive

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR 68/ITJ.1/TU.210/IV/2024

Yth : Inspektur Jenderal KKP
Dari : Inspektur I
Hal : Hasil Monitoring Pelaksanaan Kegiatan dan Perkembangan Capaian Kinerja Inspektorat I s.d Triwulan I Tahun 2024
Tanggal : 16 April 2024

Dalam rangka pengendalian pencapaian target kinerja Tahun 2024 serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengawasan pada mitra kerja Inspektorat I, bersama ini kami sampaikan hasil monitoring pelaksanaan kegiatan dan perkembangan capaian kinerja periode Triwulan I Tahun 2024 sebagai berikut.

1. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Inspektorat I bertanggung jawab untuk mewujudkan 3 Sasaran Kegiatan (SK) dengan 13 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Perkembangan hingga Triwulan I Tahun 2024, jumlah IKK yang dapat dilakukan pengukuran sebanyak 3 (tiga) indikator, dengan capaian 106,75;
2. Adapun rincian capaian 3 (tiga) IKK terhadap target Triwulan I Tahun 2024 tersebut yaitu:
 - a. IK-8 "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat I dengan realisasi 90,80% dari target 80% atau capaian sebesar 113,5%.
 - b. IK-12 "Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat I" dengan realisasi 100% dari target 100% atau capaian sebesar 100%.
 - c. IK-13 "Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat I" dengan realisasi 100% dari target 100% atau capaian sebesar 100%.

Secara terperinci, capaian kinerja Inspektorat I pada periode Triwulan I Tahun 2024 disampaikan pada **Lampiran 1**.

3. Dengan capaian IKU tersebut, nilai kinerja organisasi Inspektorat I pada periode Triwulan I Tahun 2024 mendapat nilai "Baik" yang ditunjukkan dengan Skor Kinerja pada aplikasi manajemen kinerja (*kinerjaku.kkp.go.id*) sebesar 106,75%. Nilai tersebut terdiri dari capaian IKU-8 "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat

I” dengan capaian 90,80%, IKU-12 “Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat I” dengan capaian 100%, dan IKU 13 “Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat I” dengan capaian 100%.

4. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan terhadap mitra Inspektorat I untuk mencapai target kinerja pada Triwulan I Tahun 2024 antara lain:
 - a. Audit Kinerja Tahun 2023-2024 pada Politeknik KP Jembrana;
 - b. Probitas Audit Perencanaan/Persiapan PBJ pada Biro Umum dan PBJ;
 - c. Evaluasi Kinerja pada Badan Layanan Umum Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP);
 - d. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan I Tahun 2024 pada Sekjen;
 - e. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan I Tahun 2024 pada BPPSDMKP;
 - f. Reviu Hasil Perencanaan Pekerjaan Penataan Jalan Lingkungan dan Drainase lingkaran GMB I dan II pada Biro Umum dan PBJ;
 - g. Reviu Laporan Keuangan dan BMN Tahunan TA 2023 pada Satker Lingkup Sekretariat Jenderal (Sekjen);
 - h. Reviu Laporan Keuangan dan BMN Tahunan TA 2023 Satker Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP);
 - i. Reviu Laporan Kinerja Tahun 2023 pada Sekjen;
 - j. Reviu Laporan Kinerja Tahun 2023 pada BPPSDMKP;
 - k. Pemantauan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada:
 - 1) Biro Perencanaan;
 - 2) Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi;
 - 3) Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri;
 - 4) Politeknik KP Karawang;
 - 5) Politeknik KP Bitung;
 - 6) Politeknik KP Jembrana;
 - 7) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung;
 - l. Pemantauan Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2024 pada Sekjen;
 - m. Pemantauan Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2024 pada BPPSDMKP;

- n. Focus Group Discussion (FGD) Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- o. Menyusun Matrik Pelaksanaan Monitoring Implementasi SPIP Triwulan I Tahun 2024.

Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PKPT Inspektorat I s.d Triwulan I Tahun 2024, dapat disampaikan bahwa dari 24 rencana kegiatan pengawasan telah terealisasi sebanyak 18 kegiatan pengawasan atau capaian sebesar 75%. Terdapat kegiatan yang belum terlaksana sesuai PKPT, yaitu:

- a. Probit Audit Perencanaan/Persiapan PBJ pada Pusdatin;
- b. Evaluasi Kinerja UKPBJ pada Biro Umum dan PBJ;
- c. Evaluasi Pengelolaan BMN pada Pusat Riset Perikanan;
- d. Evaluasi Pengelolaan BMN pada BBRPPBKP Slipi;
- e. Evaluasi Pengelolaan BMN pada LRMPHP Bantul;
- f. Pemantauan Kinerja PMO Hibah JICA.

Selain hal tersebut, Inspektorat I telah melaksanakan pengawasan terhadap mitra kerja melalui kegiatan non PKPT dan Non Pengawasan, antara lain:

- a. Reviu terhadap Usulan Revisi Anggaran dalam rangka Automatic Adjustment Belanja Kementerian Tahun 2024 pada Sekjen;
- b. Reviu terhadap Usulan Revisi Anggaran dalam rangka Automatic Adjustment Belanja Kementerian Tahun 2024 pada BPPSDMKP;
- c. Reviu Rencana Revisi Anggaran TA 2024 atas Penyelesaian Tunggakan Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri TA 2023 pada Biro Umum dan PBJ;
- d. Reviu Laporan Keuangan BA 99 Semester II Tahun 2023 pada LPMUKP;
- e. Pemantauan Pelaporan Keuangan pada Politeknik KP Sorong dan SUPM Sorong;
- f. Pemantauan Pelaporan Keuangan pada BLU BPPP Tegal;
- g. Pemantauan Pelaporan Keuangan BLU pada Politeknik KP Sidoarjo;
- h. Pemantauan Pelaksanaan Sosialisasi dan Mutual Check Nol (MC-0) kegiatan Pembangunan Prasarana Dermaga Apung/Tambat Labuh di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Sumbawa, Prov. Nusa Tenggara Barat;
- i. Pemantauan terhadap Mutual Check Nol (MC-0) Kegiatan Pembangunan Prasarana Dermaga Apung/Tambat Labuh di Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku;
- j. Melaksanakan Kegiatan Focus Group Discussion Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem pada Kemterian Kelautan dan Perikanan.

5. Dalam rangka mencapai target IKU, Inspektorat I telah menetapkan Rencana Aksi pencapaian IKU dari 3 Sasaran Kegiatan (SK) dengan 13 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Adapun hasil monev terhadap Rencana Aksi pencapaian target IKU Tahun 2024 disampaikan pada **Lampiran 2**.
6. Dalam pelaksanaannya, kegiatan/aksi pencapaian target kinerja tahun 2024 juga meliputi kegiatan pengawasan terhadap kegiatan prioritas mitra Tahun 2024. Ikhtisar hasil pengawasan kegiatan prioritas mitra yang dilaksanakan pada Triwulan I disampaikan pada **Lampiran 3**.
7. Dari sisi kinerja keuangan, dapat disampaikan bahwa realisasi anggaran Inspektorat I sampai dengan 31 Maret 2023 sebesar Rp996.335.100,00 atau 15,82% dari pagu Rp6.296.347.000,00, dengan demikian masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp5.300.011.900,00 atau 84,18%.
8. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja Triwulan I Tahun 2024 tidak ditemukan kendala/masalah dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja Inspektorat I, namun hal-hal yang perlu mendapat perhatian:
 - a. Capaian IK-9 “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat I” dengan target 80% per Triwulan perlu mendapat perhatian agar tetap tercapai pada periode pengukuran berikutnya, sehingga komitmen dan dukungan yang kuat dari mitra dan Inspektorat I dalam percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan untuk status tuntas.
 - b. Terdapat kegiatan yang telah ditetapkan dalam PKPT Tahun 2024, belum terlaksana yaitu Evaluasi Kinerja UKPBJ pada Biro Umum dan PBJ, Probitiy Audit Perencanaan/Persiapan PBJ pada Pusdatin, Pemantauan Kinerja PMO Hibah JICA, Evaluasi Pengelolaan BMN pada Pusat Riset Perikanan, Evaluasi Pengelolaan BMN pada BBRPPBKP Slipi dan Evaluasi Pengelolaan BMN pada LRMPHP Bantul.
 - c. Tidak terlaksananya kegiatan pengawasan yang telah ditetapkan dalam PKPT dikarenakan keterbatasan Auditor Ahli Muda pada Inspektorat I yang mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan ke Auditor Ahli Madya sejak tanggal 4 s.d. 29 Maret 2024. Selain itu tidak terlaksananya kegiatan Probitiy Audit Perencanaan/Persiapan PBJ pada Pusdatin karena masih dalam proses buka blokir, sedangkan terkait Pemantauan Kinerja PMO Hibah JICA belum dilaksanakan dikarenakan masih menunggu proses perpanjangan kerjasama antara pihak KKP dengan JICA.

9. Sehubungan dengan kendala/masalah yang ditemukan, Inspektorat I akan melaksanakan beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Itjen agar dapat ditindaklanjuti secara tuntas untuk mendukung pencapaian IKU.
- b. Merencanakan kembali pelaksanaan pengawasan yang belum terlaksana pada Triwulan I pada Triwulan berikutnya sesuai usulan perubahan PKPT.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Teuku Nilwan

Tembusan:
Sekretaris Inspektorat Jenderal.

Lampiran 1. Tabel Capaian Kinerja Inspektorat I Periode Triwulan I Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	KINERJA TW I			Keterangan
				Target	Realisasi	Satuan	
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Mitra Inspektorat I	-	-	-	-	-	-
2	Pengawasan Intern yang Handal pada Mitra Inspektorat I	IK.8 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat I (%)	80%	80%	90,80%	113,5%	Tercapai
3	Dukungan Manajemen Pengawasan yang Handal lingkup Inspektorat I	IK.12 Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat I (%)	100%	100%	100%	100%	Tercapai
		IK.13 Terkelolanya Anggaran Kegiatan secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat I	100%	100%	100%	100%	Tercapai

Lampiran 2. Realisasi Rencana Aksi Pencapaian IKU Inspektorat I Periode Triwulan I Tahun 2024

CAPAIAN RENCANA AKSI TERHADAP PENCAPAIAN TARGET KINERJA PERIODE TRIWULAN I Tahun 2024										
Unit Kerja : Inspektorat I										
Anggaran : Rp6.296.347.000										
No	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Satuan	Uraian			Permasalahan	Rekomendasi	
					Target	Realisasi	Prosentase (%)			
1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I (%)	≤0,5	1	Reviu terhadap laporan keuangan Mitra Inspektorat I	Kegiatan	2	2	100	-	-
			2	Reviu PA dan PBJ Mitra Inspektorat I	Kegiatan	2	2	100	-	-
			3	Pelaksanaan Audit Kinerja pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan	1	1	100	-	-
			4	Evaluasi Kinerja pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan	2	1	50	Kegiatan pengawasan direncanakan pada 2 unit kerja yaitu UKPBJ Biro Umum dan PBJ serta BLU LPMUKP Setjen, namun Evaluasi Kinerja pada UKPBJ tidak dapat dilaksanakan disebabkan terbatasnya Auditor Inspektorat I dikarenakan mengikuti Diklat penjenjangan untuk menjadi Auditor Madya, sesuai Surat Kepala Pusdiklatwas BPKP Nomor: DL.03.01/S-478/DL/4/2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang Permohonan Penyelenggaraan Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Madya.	Pelaksanaan Evaluasi Kinerja pada UKPBJ Biro Umum dan PBJ akan dilaksanakan pada Mei 2024
			5	Probity Audit Persiapan/Perencanaan/Pelaksanaan pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan	2	1	50	Kegiatan pengawasan direncanakan pada 2 unit kerja yaitu Biro Umum dan PBJ serta Pusdatin, namun Probity pada Pusdatin tidak dapat dilaksanakan disebabkan terbatasnya Auditor Inspektorat I dikarenakan mengikuti Diklat penjenjangan untuk menjadi Auditor Madya, sesuai Surat Kepala Pusdiklatwas BPKP Nomor: DL.03.01/S-478/DL/4/2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang Permohonan Penyelenggaraan Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Madya.	Pelaksanaan probity perencanaan pada Pusdatin akan dilaksanakan pada April 2024
			6	Pemantauan Kinerja PMO Hibah JICA	Kegiatan	1	0	0	kegiatan dimaksud belum dilaksanakan dikarenakan masih dalam tahap proses perpanjangan kerjasama antar pihak KKP dan JICA	Pemantauan Kinerja PMO Hibah JICA akan dilaksanakan pada Agustus 2024
2	Unit kerja Mitra Inspektorat I berpredikat menuju WBK (jumlah akumulasi)	20 Unit	16	Pemantauan Pembangunan ZI Menuju WBK pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan	7	8	114	Melebihi target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya penambahan Unit Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK yaitu Biro Keuangan	-

Lanjutan Lampiran 2. Realisasi Rencana Aksi Pencapaian IKU Inspektorat I Periode Triwulan I Tahun 2024

3	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat I (Nilai)	82,5 (A)	17	Reviu Laporan Kinerja pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan	2	2	100	-	-
4	Tingkat efektifitas pengawasan pengelolaan BMN lingkup Mitra Inspektorat I	82	30	Evaluasi Pengelolaan BMN pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan	3	0	0	Kegiatan pengawasan direncanakan pada 3 unit kerja yaitu Pusat Riset Perikanan, BBRPPBKP Slipt, dan LRMPHP Bantul. Namun tidak dapat dilaksanakan disebabkan terbatasnya Auditor Inspektorat I dikarenakan mengikuti Diklat penjurangan untuk menjadi Auditor Madya, sesuai Surat Kepala Pusdiklatwas BPKP Nomor: DL.03.01/S-478/DL/4/2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang Permohonan Penyelenggaraan Pelatihan Penjurangan Auditor Ahli Madya.	Sehubungan perubahan Organisasi dan Tata Kerja KKP (PermenK P Nomor 5 Tahun 2024), akan dilaksanakan oleh Inspektorat III
5	Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Mitra Inspektorat I (%)	80	35	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan	2	2	100	-	-
			38	Monitoring Implementasi Kendali Mutu Pengawasan	Kegiatan	1	0	0	Tim Pengawasan belum menyusun Kendali Mutu pada Triwulan I Tahun 2024	Tim Pengawasan agar segera menyusun Kendali Mutu pada Triwulan I Tahun 2024
6	Prosentase tingkat kepatuhan pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat I (%)	80	40	Monitoring Pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat	Kegiatan	1	1	100	-	-
7	Tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan kinerja lingkup Inspektorat I (%)	100	42	Pengisian data capaian kinerja pada aplikasi pengelolaan kinerja KKP	Kegiatan	1	1	100	-	-
			43	Pengukuran Capaian Kinerja	Kegiatan	1	1	100	-	-
			44	Pelaporan Kinerja Interim	Kegiatan	1	1	100	-	-
8	Terkelolanya anggaran kegiatan secara tertib dan akuntabel lingkup Inspektorat I (%)	100	47	Pengisian aplikasi e-monev Bappenas	Kegiatan	3	3	100	-	-
			48	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran lingkup Inspektorat	Kegiatan	3	3	100	-	-

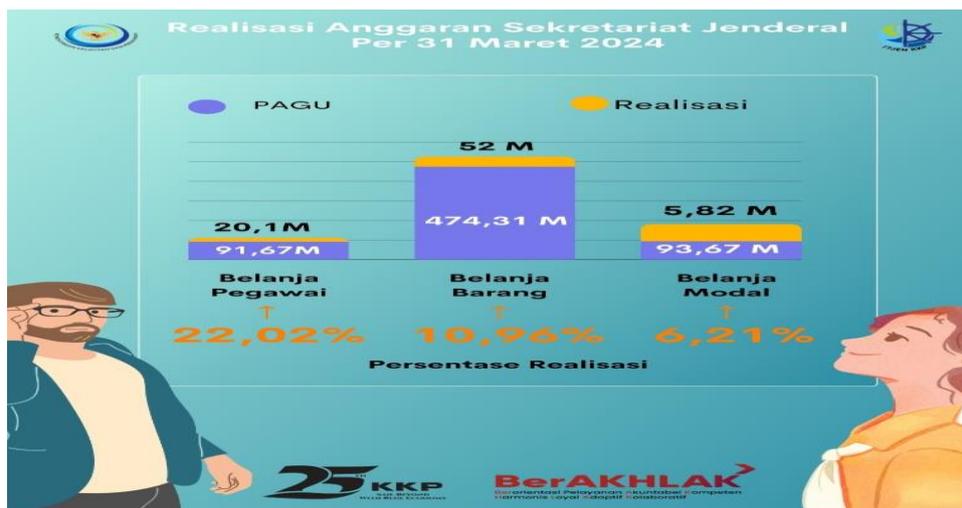
Lampiran 3. Ikhtisar Hasil Pengawasan Kegiatan Inspektorat I Periode Triwulan I Tahun 2024

LAPORAN IKHTISAR HASIL PENGAWASAN TRIWULAN I TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT JENDERAL

Pokok-pokok Hasil Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat I Triwulan I Tahun 2024 pada Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan selama Triwulan I Tahun 2024
 Pada triwulan I Tahun 2024 telah diterbitkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) untuk Sekretariat Jenderal sebanyak 12 LHP *Quality Assurance* terdiri dari 17 temuan dan 32 rekomendasi dengan nilai keuangan Rp0,00, dengan klasifikasi kategori temuan berupa kelemahan SPI sebanyak 9 (sembilan) temuan dan ketidakefektifan, ketidakefisienan, dan ketidakekonomisan (3E) sebanyak 8 (delapan) temuan.
 Selain pelaksanaan *Quality Assurance* tersebut, Inspektorat I melaksanakan pengawasan lainnya sebanyak 8 (delapan) kegiatan berupa pendampingan/asistensi.
2. Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal
 - a. Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal berdasarkan data pada aplikasi OMSPAN per 31 Maret 2024 adalah senilai Rp78.014.434.254,00 dari pagu Rp659.661.999.000,00 atau sebesar 11,83% dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp/%)	Sisa (Rp/%)
1	Belanja Pegawai	91.672.785.000	20.190.792.024 (22,02%)	71.481.992.976 (77,98%)
2	Belanja Barang	474.318.802.000	52.002.651.586 (10,96%)	422.316.150.414 (89,04%)
3	Belanja Modal	93.670.412.000	5.820.990.644 (6,21%)	87.849.421.356 (93,79%)
	Total	659.661.999.000	78.014.434.254 (11,83%)	581.647.564.746 (88,17%)

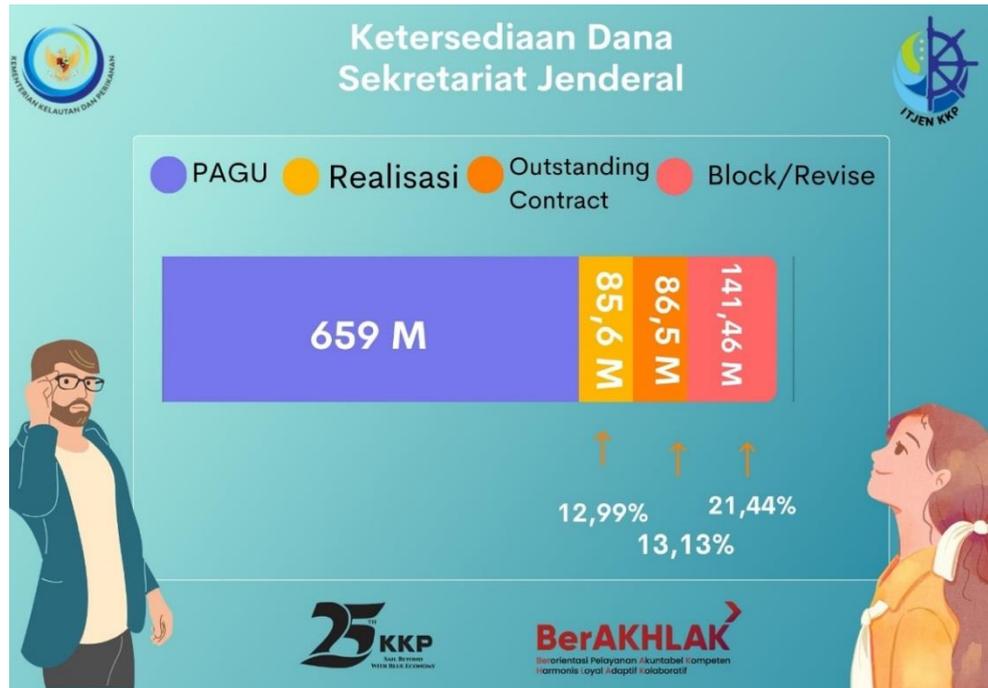


Realisasi anggaran tersebut dibawah target Rencana Penyerapan Dana senilai Rp81.038.883.000,00 atau terjadi deviasi negatif senilai Rp3.024.448.746,00 atau -0,46%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	RPD (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Realisasi-RPD) (Rp)
1	Belanja Pegawai	91.672.785.000	13.312.511.000 (14,52%)	20.190.792.024 (22,02%)	68.78.281.024 (7,50%)
2	Belanja Barang	474.318.802.000	62.396.372.000 (13,15%)	52.002.651.586 (10,96%)	- 10.393.720.414 (-2,19%)
3	Belanja Modal	93.670.412.000	5.330.000.000 (5,69%)	5.820.990.644 (6,21%)	490.990.644 (0,52%)
Total		659.661.999.000	81.038.883.000 (12,28%)	78.014.434.254 (11,83%)	3.024.448.746 (-0,46%)

- b. Ketersediaan dana lingkup Sekretariat Jenderal KKP per 2 April 2024 adalah senilai Rp345.919.189.094,00 dengan *outstanding contract* senilai Rp86.588.380.782,00 dan realisasi senilai Rp85.692.834.124,00 atau sebesar 12,99% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp/%)
1	Pagu	659.661.999.000
2	Realisasi	85.692.834.124 (12,99%)
3	<i>Outstanding Contract</i>	86.588.380.782 (13,13%)
4	<i>Block/Revise Amount</i>	141.461.595.000 (21,44%)
Total Ketersediaan Dana		345.919.189.094 (52,44%)



3. Hasil Pengawasan PBJ

- a. Berdasarkan data aplikasi SiRUP pada Sekretariat Jenderal, Rencana Umum Pengadaan (RUP) telah diumumkan 100%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Satker	Nama Program	Pagu (Rp)		
			Program	Pengadaan	Terumumkan
1	Biro Umum dan PBJ	Program Dukungan Manajemen	488.798.300.000	488.798.300.000	488.798.300.000
		Program Dukungan Manajemen Satker Tugas Pembantuan Sekretariat Jenderal	12.300.000.000	12.300.000.000	12.300.000.000
2	Balai Pengelolaan Informasi Sumberdaya Kelautan dan	Program Dukungan Manajemen	25.151.820.000	25.151.820.000	25.151.820.000

No	Satker	Nama Program	Pagu (Rp)		
			Program	Pengadaan	Terumumkan
	Perikanan (BPISDKP)				

b. Hasil reвью Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan I Tahun 2024, dengan *cut off* data per tanggal 5 Maret 2024 disampaikan sebagai berikut:

1) Rencana dan Realisasi Kontrak PBJ

Pengadaan Barang dan Jasa melalui tender yang sudah tanda tangan kontrak sampai dengan TW I Tahun 2024 sebanyak 376 paket senilai Rp323.679.772.880,00 atau 99,73% dari target 377 paket senilai Rp335.619.817.000,00.

2) Rencana dan Realisasi Progress Fisik Pekerjaan

Tidak terdapat kontrak yang mengalami keterlambatan realisasi fisik dibandingkan dengan rencana capaian fisik.

3) Rencana dan Realisasi Penggunaan Produk UMK-Koperasi dan Dalam Negeri (PDN)

Realisasi Penggunaan Produk UMK-Koperasi dan PDN Triwulan I Tahun 2024 sebanyak 50 paket senilai Rp1.308.323.928,00 atau 100% dari rencana Triwulan I, penggunaan PDN pada Triwulan I Tahun 2024 mencapai 76 paket senilai Rp32.893.366.828,00 atau 68,47% dari rencana Triwulan I, dan penggunaan produk impor pada TW I Tahun 2024 mencapai 1 paket senilai Rp3.299.999.988,00 atau 2,50% dari rencana Triwulan I.

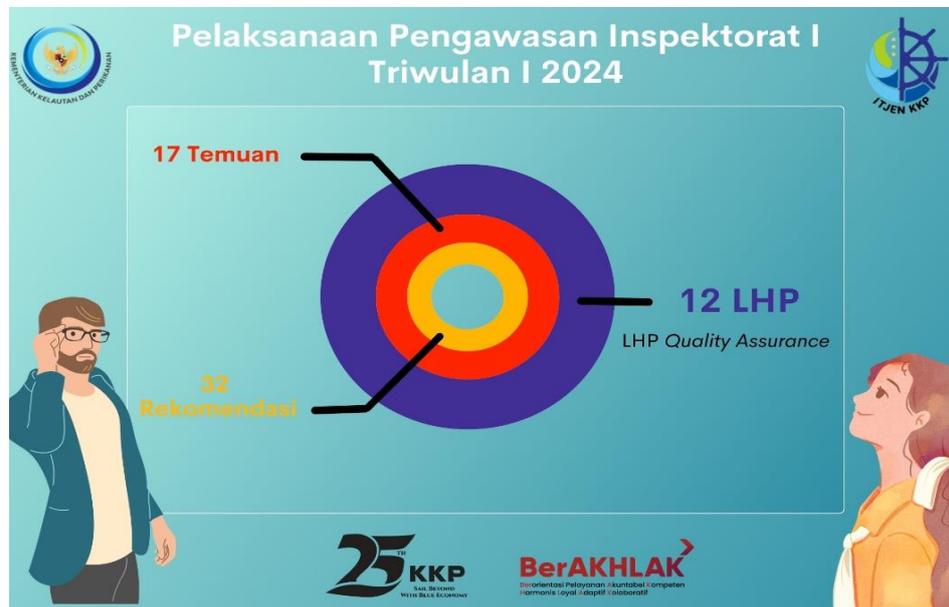
4) Rencana PBJ dan Tender/Seleksi Pra DIPA Tahun 2024

Rencana Tender/Seleksi Pra DIPA Tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) paket pengadaan seluruhnya senilai Rp51.558.941.000,00 terealisasi 100%.

4. Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (s.d. 31 Maret 2024)

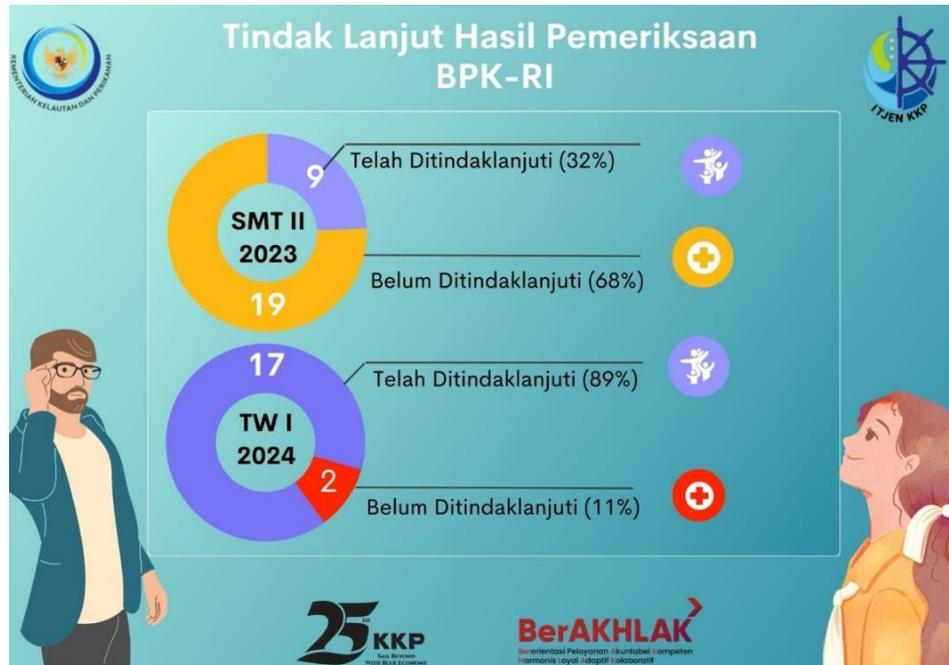
a. Hasil pengawasan pada Sekretariat Jenderal selama TW I Tahun 2024 sebanyak 12 LHP terdiri dari 17 temuan dan 32 rekomendasi/saran dengan nilai

keuangan Rp0,00 telah ditindaklanjuti sebanyak 2 (dua) temuan dan 5 (lima) rekomendasi atau 15,63% dari 2 (dua) LHP.



- b. Sisa rekomendasi hasil pengawasan Itjen pada Sekretariat Jenderal s.d. 31 Desember 2023 sebanyak 24 rekomendasi, dan sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti sebanyak 20 rekomendasi atau sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 4 (empat) rekomendasi.
- c. Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada Sekretariat Jenderal s.d. semester II Tahun 2023 sebanyak 9 (sembilan) rekomendasi atau mencapai 32% dari jumlah temuan BPK RI sebanyak 28 rekomendasi.

Terhadap sisa rekomendasi semester II Tahun 2023 sebanyak 19 rekomendasi, Sekretariat Jenderal telah melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan selama TW I Tahun 2024 sebanyak 17 rekomendasi, namun validasi akan dilakukan oleh BPK RI pada bulan Juli 2024.



5. Isu aktual terkait hasil pengawasan

Program *Blue Economy* KKP

a. Evaluasi BLU-LPMUKP

1) Capaian Positif

Tahun 2023 tercatat realisasi penyaluran dana bergulir senilai Rp328.512.512.900,00 merupakan realisasi penyaluran tertinggi sejak tahun 2017.

2) Permasalahan

a) Penyaluran Dana Bergulir Belum Efektif

- (1) Terdapat kekurangan dana Kelola pada awal Tahun 2024 minimal senilai Rp59.314.872.352,00 atau maksimal senilai Rp194.554.049.935,00.
- (2) Dalam rangka mendukung pelaksanaan penyaluran dana bergulir yang transparan dan terdigitalisasi pada Tahun 2023 BLU-LPMUKP telah memanfaatkan aplikasi *Loan Origination System* (LOS), dimana aplikasi tersebut dapat mengakomodir dan

memonitor proses penyaluran dana bergulir sejak pengusulan proposal dari masyarakat melalui tenaga pendamping BLU-LPMUKP sampai dengan persetujuan pencairan dana bergulir. Namun dalam aplikasinya belum dapat memperbaiki kualitas waktu layanan penyaluran pinjaman dana bergulir.

b) Pengelolaan Piutang dan Jaminan Belum Efektif

- (1) Non-Performing Loan (NPL) menjadi 7,37% per 31 Desember 2023, menurun dari sebelumnya 8,35% per 31 Desember 2022. Namun Rasio NPL Tahun 2022 dan 2023 melebihi batas rasio maksimal 3% yang ditetapkan sebagai target kinerja BLU-LPMUKP.
- (2) Belum optimalnya upaya penagihan dan penyelamatan atas pinjaman dana bergulir, yaitu berdasarkan Laporan Pengelolaan Piutang BLU-LPMUKP Tahun 2023 pengembalian atas tunggakan dana pokok hanya dapat dilakukan penyelamatan senilai Rp80.819.450.713,81 atau 18,33% dari total tunggakan dana pokok senilai Rp440.818.489.192,00, terdiri dari; 1) piutang macet senilai Rp235.353.483.578; 2) diragukan senilai Rp80.567.063.304,00 dan 3) kurang lancar senilai Rp124.897.942.310,00.
- (3) Terdapat sejumlah jaminan yang belum disimpan pada brankas BLU-LPMUKP dan *Safe Deposit Box* dengan alasan dokumen jaminan masih diproses oleh Notaris seperti sedang dalam proses peningkatkan status Hak Guna Bagunan (HGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Notaris, sehingga diganti dengan *Cover Note* yang diterbitkan oleh Notaris tanpa ada batasan jangka waktu minimal.
- (4) Terdapat Debitur yang mendukung Program Prioritas KKP yang nilai jaminannya di bawah nilai pencairan, namun tanpa ada perikatan untuk melengkapi kekurangan nilai jaminan. Tanggapan pihak BLU LPUMKP bahwa hal ini diperbolehkan berdasarkan Peraturan Direktur BLU-LPMUKP Nomor 1/PER-LPMUKP/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Jaminan Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir pada Pasal 14, menyebutkan bahwa persyaratan nilai agunan senilai > (lebih), atau = (sama dengan)

125% dari total persetujuan pinjaman, dikecualikan bagi usaha pada bidang-bidang program prioritas KKP.

- b. Probity Probity Audit Perencanaan/Persiapan PBJ Tahun 2024 pada Biro Umum dan PBJ

Permasalahan :

- 1) Ketidaksesuaian Volume Pekerjaan dan AHSP dengan Kebutuhan dan/atau DED ;
- 2) Dokumen Pendukung Pekerjaan Perencanaan Renovasi Belum Sepenuhnya Memadai.

- c. Reviu atas Dokumen Perencanaan Pekerjaan Penataan Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkar GMB I dan II.

Permasalahan:

- 1) Terdapat volume pekerjaan pada RAB yang tidak sesuai dengan gambar rencana dan/atau kebutuhan;
- 2) Terdapat koefisien dan/atau satuan pada AHSP yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 73/SE/Dk/2023 tentang Tata Cara Penyusunan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 3) Terdapat perhitungan ganda atas harga satuan pekerjaan per m³ pada pekerjaan pengecoran beton jalan menggunakan ready mix, sehingga harga satuan pekerjaan terkoreksi dari semula Rp3.122.656,84/m³ menjadi Rp1.561.327,92/m³.

- d. Pemantauan Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK

Pemantauan terhadap 3 (tiga) Satker yang akan diusulkan untuk dilakukan penilaian pada Tahun 2024 oleh Tim Penilai Internal, yaitu Biro Sumberdaya Manusia Aparatur dan Organisasi, Biro Perencanaan, serta Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri. Namun hasil pemantauan seluruh satker tersebut belum memenuhi syarat memperoleh predikat menuju WBK.

Nilai sementara Biro Sumberdaya Manusia Aparatur dan Organisasi sebesar 63,92 dan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri sebesar 55,04 belum mencapai ambang batas minimal 75. Sedangkan nilai sementara Biro Perencanaan telah mencapai ambang batas yaitu sebesar 77,52, namun

masih terdapat nilai indikator pada komponen pengungkit belum mencapai 60%.

e. Reviu Laporan Kinerja (LKj)

Catatan hasil reviu, yaitu

- 1) LKj Setjen Tahun 2023 belum menyajikan informasi tentang penjelasan terkait perubahan IKU Setjen Tahun 2023, penjelasan/kebijakan penetapan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) sebagai unit kerja pendukung IKU Setjen dan struktur organisasi Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (HKLN).
- 2) Informasi yang disampaikan dalam LKj belum seluruhnya dilengkapi dengan data dukung yang memadai.
- 3) Terdapat ketidakselarasan antara Surat Keputusan IKU dengan Perjanjian Kinerja (PK) dan Manual IKU terkait narasi/penjelasan dan formulasi perhitungan capaian.
- 4) Tujuan/sasaran dalam LKj belum seluruhnya selaras dengan Rencana Strategis dan belum diungkapkan dalam LKj.
- 5) Dokumen LKj Triwulanan untuk Unit Eselon II lingkup Setjen belum seluruhnya disajikan.

f. Hasil Reviu atas Usulan Revisi Anggaran dalam Rangka Automatic Adjustment Belanja Kementerian Tahun 2024:

Usulan revisi anggaran terkait *Automatic Adjustment* belanja lingkup Sekretariat Jenderal senilai Rp74.183.696.000,00 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

g. Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Tahunan TA 2023 Satker Lingkup Sekretariat Jenderal KKP:

Catatan hasil reviu sebagai berikut:

- 1) Pada Satker LPMUKP terdapat Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan senilai Rp144.463.282,00, dan Aset Tetap Lainnya senilai Rp1.982.110.376 berupa Aset Tetap Renovasi (ATR) dan Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro yang belum diungkapkan di penjelasan hal-hal penting pada CaLK.
- 2) Terdapat Pengelolaan Dana Penerimaan Hibah Luar Negeri (PHLN) senilai Rp480.157.103.421,00, namun belum menyampaikan Laporan Keuangan

PHLN ke KPPN dan UAPPA-W/UAPPA-E1/UAPA meliputi Laporan Realisasi PHLN, Ikhtisar PHLN dan Calk PHLN.

6. Rekomendasi Inspektorat Jenderal

a. Dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan penyaluran Dana Bergulir pada BLU-LPMUKP telah direkomendasikan kepada Direktur BLU-LPMUKP agar:

- 1) Melakukan persetujuan penyaluran dana bantuan bergulir Tahun 2024 secara selektif dengan memperhatikan ketersediaan dana Kelola, demikian pula dengan persetujuan terhadap akad Kredit Baru.
- 2) Membuat rancangan untuk pengembangan sistem aplikasi monitoring perkembangan dana pinjaman sejak pengajuan pinjaman sampai dengan pelunasan dana pinjaman.
- 3) Melakukan seleksi secara selektif terhadap Notaris dalam melakukan akad kredit, menambah jumlah minimal kebutuhan anggota Komite Kredit dan Analisis Risiko.
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan penyaluran dana bergulir, dan pengelolaan kinerja pelayanan BLU-LPMUKP.
- 5) Memastikan sisa dana kelola yang belum tersalurkan senilai Rp475.451.437.165,00 dapat terdistribusi kepada Debitur eksisting dengan kategori kolektibilitas lancar.

b. Kepada Sekretaris Jenderal telah direkomendasikan:

- 1) Menginstruksikan Kepala Satker Pusat dan Satker Dekonsentrasi untuk mempercepat realisasi penyerapan anggaran sesuai ketentuan berlaku dalam rangka peningkatan realisasi penyerapan anggaran.
- 2) Memastikan ketersediaan alokasi anggaran pekerjaan renovasi ruang kerja Biro SDMAO, Biro Keuangan dan Biro Hukum pada RKA-KL Tahun 2024 dan melakukan perbaikan pada dokumen RKS dan DED.
- 3) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi Pekerjaan Penataan Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkar GMB I dan II:
 - a) Melakukan penyesuaian antara Gambar, RAB, RKS, dan kebutuhan.
 - b) Memperbaiki AHSP.
- 4) Menginstruksikan Kepala Biro Sumberdaya Manusia Aparatur dan Organisasi, Biro Perencanaan, serta Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri untuk mempercepat implementasi Pembangunan zona

integritas menuju WBK serta memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen.

- 5) Menyajikan informasi tentang penjelasan terkait perubahan IKU Setjen KKP Tahun 2023 dan penjelasan/kebijakan penetapan BLU LPMUKP sebagai unit kerja pendukung IKU Setjen serta struktur organisasi Biro HKLN, Memperbaiki informasi capaian kinerja yang disajikan pada LKj Tahun 2023 sesuai Manual IKU, dilengkapi dengan data dukung yang handal pada IKU 1,3,4,5,6,7,8, dan 11, Mengungkapkan penjelasan adanya perbedaan antara IKU pada Renstra, RKT dan PK, serta perubahan narasi IKU 11 terkait narasi/penjelasan dan formulasi perhitungan capaian serta dasar penetapan perubahannya pada Manual IKU.

Seluruh rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti saat reuiu.

- 6) Mengungkapkan penjelasan hal-hal penting pada CaLK terkait Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan senilai Rp144.463.282,00, dan Aset Tetap Lainnya senilai Rp1.982.110.376 berupa Aset Tetap Renovasi (ATR) dan Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro serta menyelesaikan Laporan Keuangan PHLN meliputi Laporan Realisasi PHLN, Ikhktisar PHLN dan CaLK PHLN.

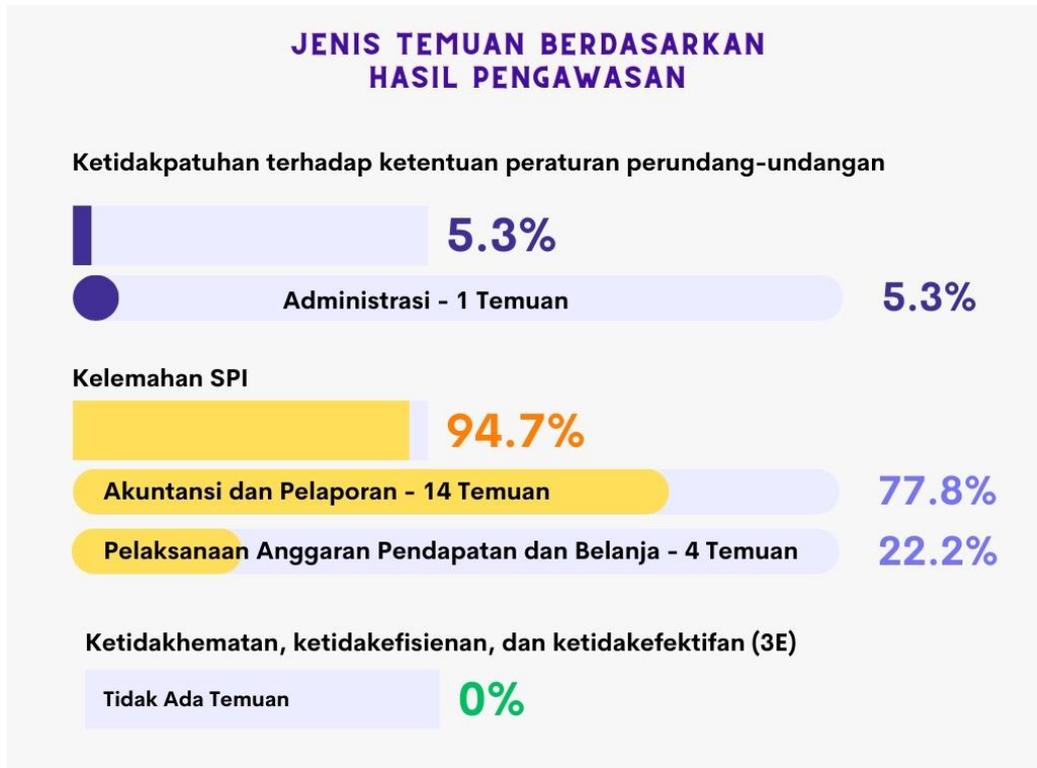
**LAPORAN IKHTISAR HASIL PENGAWASAN TRIWULAN I TAHUN 2024
PADA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPPSDMKP)**

1. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan selama Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I Tahun 2024 telah diterbitkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) untuk BPPSDMKP sebanyak 13 LHP *Quality Assurance* terdiri dari 19 temuan dan 25 rekomendasi/saran dengan nilai keuangan Rp0,00, dengan klasifikasi kategori temuan berupa kepatuhan sebanyak 1 (satu)



temuan dan kelemahan SPI sebanyak 18 temuan.



Selain pelaksanaan *Quality Assurance* tersebut, Inspektorat Jenderal melaksanakan pengawasan lainnya sebanyak 2 (dua) kegiatan berupa pendampingan/asistensi.

2. Realisasi anggaran

- a. Realisasi Anggaran BPPSDMKP berdasarkan data pada aplikasi OMSPAN per 31 Maret 2024 senilai Rp300.554.439.487,00 atau sebesar 20,37% dari pagu Rp1.475.379.111.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp/%)	Sisa (Rp/%)
1	Belanja Pegawai	809.489.272.000	192.184.788.555 (23,74%)	617.304.483.445 (76,26%)
2	Belanja Barang	612.288.806.000	106.767.885.112 (17,44%)	505.520.920.888 (82,56%)
3	Belanja Modal	53.601.033.000	1.601.765.820 (2,99%)	51.999.267.180 (97,01%)
	Total	1.475.379.111.000	300.554.439.487 (20,37%)	1.174.824.671.513 (79,63%)

Realisasi tersebut melampaui target Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan I Tahun 2024 senilai Rp 244.452.557.181,00, sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)
1	Belanja Pegawai	141.814.381.955
2	Belanja Barang	99.206.156.576
3	Belanja Modal	3.432.018.650
	Total	244.452.557.181

- b. Ketersediaan dana lingkup BPPSDMKP per 3 April 2024 senilai Rp1.475.379.111,00 dengan *outstanding contract* senilai Rp52.535.396.879,00 dan realisasi senilai Rp347.666.178.332,00 atau sebesar 23,56% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp/%)
1	Pagu	1.475.379.111.000
2	Realisasi	347.666.178.332 (23,56%)
3	<i>Outstanding Contract</i>	52.535.396.879
4	<i>Block/Revise Amount</i>	83.966.548.000
	Total Ketersediaan Dana	991.210.987.789

3. Hasil pengawasan PBJ

- a. Berdasarkan data aplikasi SiRUP pada BPPSDMKP, Rencana Umum Pengadaan (RUP) telah diumumkan 100% senilai Rp2.535.659.925,00 dari pagu pengadaan senilai Rp2.535.659.925,00, sebagaimana disajikan pada Lampiran.

b. Hasil reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan I Tahun 2024, sebagai berikut:

1) Rencana dan Realisasi SiRUP PBJ

Realisasi pengadaan yang direncanakan melalui tender penyedia barang/jasa sudah diinput 100% di aplikasi SiRUP Triwulan I Tahun 2024 sebanyak 15 paket senilai Rp35.777.605.635,00.

2) Rencana dan Realisasi Kontrak PBJ

Pengadaan Barang dan Jasa melalui tender yang sudah tanda tangan kontrak sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 sebanyak 3 paket senilai Rp2.516.090.850,00 atau 7,03% dari total PBJ tender sebanyak 8 paket senilai Rp15.129.769.635,00 yang sudah diinput di SiRUP, rencana PBJ melalui tender yang belum dilakukan pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya serta belum tanda tangan kontrak sebanyak 12 paket senilai Rp33.261.514.785,00. Hal ini disebabkan antara lain blokir anggaran terhadap 6 (enam) paket pengadaan barang/jasa melalui tender senilai Rp10.495.672.000,00 sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan dan ketidakpatuhan satker terhadap rencana umum pengadaan barang dan jasa yang sudah ditetapkan.

3) Rencana dan Realisasi Progress Fisik Pekerjaan

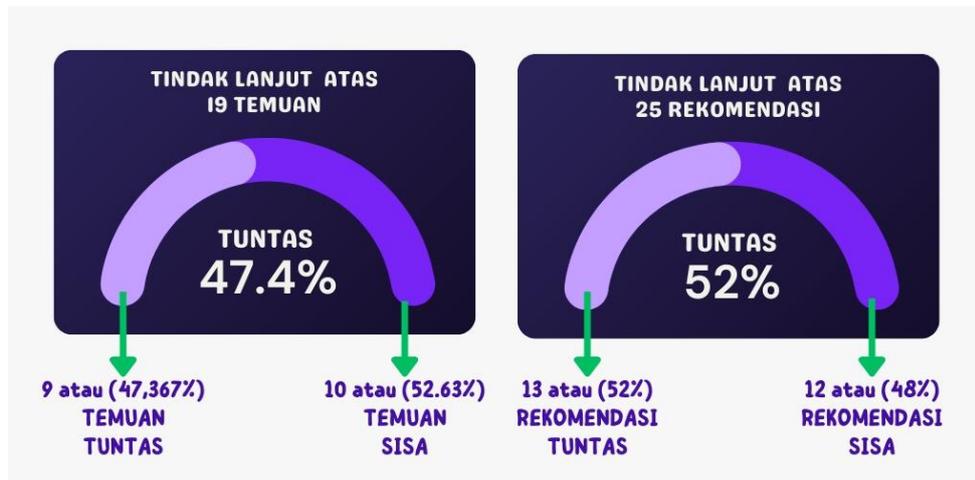
Tidak terdapat kontrak yang mengalami keterlambatan realisasi fisik dibandingkan dengan rencana capaian fisik terhadap 3 (tiga) paket yang telah tanda tangan kontrak senilai Rp2.516.090.850,00.

4) Rencana dan Relisasi Penggunaan Produk UMK-Koperasi dan Produk Dalam Negeri (PDN)

Dalam rangka mendukung industri dalam negeri melalui pengadaan barang/jasa di BPPSDMKP, sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 realisasi terhadap alokasi UMK-Koperasi masih rendah, yaitu 31,57% atau sebanyak 161 paket senilai Rp64.842.271.471,00 (68,93%) dari rencana Triwulan I Tahun 2024 sebanyak 510 paket senilai Rp94.069.310.556,00.

4. Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (s.d. 31 Maret 2024)

a. Hasil pengawasan pada BPPSDMKP selama Triwulan I tahun 2024 sebanyak 13 LHP terdiri dari 19 temuan dan 25 rekomendasi dengan nilai keuangan Rp0,00 sebagaimana uraian pada nomor 1 di atas telah ditindaklanjuti sebanyak 9 (sembilan) temuan dan 13 rekomendasi atau 52,00% dari 7 LHP.



- b. Sisa rekomendasi hasil pengawasan Itjen pada BPPSDMKP s.d. 31 Desember 2023 sebanyak 105 rekomendasi sampai dengan Triwulan I telah ditindaklanjuti sebanyak 41 rekomendasi atau masih terdapat sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti 64 rekomendasi.
 - c. Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada BPPSDMKP s.d. Semester II 2023 sebanyak 27 rekomendasi dengan nilai keuangan Rp9.013.906.867,12. Tindak lanjut hasil pemeriksaan selama Triwulan I Tahun 2024 sebanyak 4 (empat) rekomendasi dengan nilai keuangan Rp4.336.634.250,00. Adapun sisa rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI s.d Triwulan I Tahun 2024 sebanyak 23 rekomendasi dengan nilai keuangan Rp4.677.272.617,12. Atas dokumen tindak lanjut tersebut akan dilakukan validasi oleh BPK RI pada bulan Juli 2024.
5. Isu aktual terkait hasil pengawasan
- a. Reviu Laporan Keuangan

Pada penyusunan Laporan Keuangan TA 2023, hanya satu dari 42 satker lingkup BPPSDMKP yang telah melampirkan BA *Stock Opname* untuk Persediaan Barang Konsumsi yaitu BRPI.Sukamandi.
 - b. Reviu atas Usulan Perubahan RKBMN Tahun 2024 Lingkup BPPSDMKP

Permasalahan:

 - 1) Usulan penambahan rencana pengadaan AADB kendaraan dinas operasional melalui mekanisme sewa disetujui sebagian sebanyak 2 (dua) unit yaitu masing-masing 1 (satu) unit pada Politeknik KP Karawang dan Politeknik KP Kupang. Sedangkan usulan pada BBRBLPP Gondol Tidak Dapat Disetujui, mengingat jumlah kendaraan dinas operasional telah melebihi Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) sebanyak 3 (tiga) unit dan dalam kondisi baik;

- 2) Usulan perubahan RKBMN TA 2024 belum dilengkapi data dukung dokumen berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Satker BRPPUPP Palembang dan KIB Tanah dan/atau Bangunan pada Satker LRBRL Gorontalo.
 - 3) Terdapat usulan perubahan RKBMN Pemeliharaan, namun belum dilengkapi Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebanyak 15 NUP dengan nilai total perolehan Rp1.821.829.329,00.
- c. Pemantauan Pelaporan Keuangan pada BLU BPPP Tegal di Prov. Jawa Tengah
- Permasalahan:
- 1) Terdapat penjelasan pos-pos pada Neraca, tidak sesuai data dukung berupa:
 - a) Aset Lancar BLU BPPP Tegal senilai Rp4.313.979.677,00 terdiri dari:
 - (1) Kas Lainnya dan Setara Kas senilai Rp24.399.000,00 berupa pendapatan yang diterima di muka untuk pelatihan yang akan diselenggarakan pada Tahun 2024, sedangkan pada saldo rekening Dana Kelola senilai Rp24.400.403,00. Selisih senilai Rp1.403,00 berupa bunga rekening dana kelola yang telah disahkan dan dicatat pada kas pada layanan umum;
 - (2) Kas pada Layanan Umum senilai Rp963.979.677,00 yang masih tersimpan di rekening Penerimaan, sedangkan di rekening koran saldo senilai Rp963.969.296,00. Selisih senilai Rp10.381,00 yang terdiri dari bunga rekening dana kelola senilai Rp1.403,00; bunga rekening bahari residen senilai Rp1.309,14 (pembulatan Rp1.310); bunga rekening pengeluaran senilai Rp6.684,05 (pembulatan Rp6.685); dan bunga rekening kas senilai Rp983,70 (pembulatan Rp984);
 - 2) Terdapat Penjelasan LO untuk pendapatan usaha lainnya, diantaranya:
 - a) Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin BLU (Akun 424933) pada LO dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) senilai Rp(33.000.000,00) merupakan pendapatan hasil penjualan mesin pakan dan dalam laporan operasional masuk pendapatan non operasional dari pelepasan aset non lancar.
 - b) Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah (Akun 424921) pada LO dengan LRA senilai Rp13.637.334,00 merupakan penyisihan dari pendapatan diterima dimuka untuk sewa tanah ATM BRI dan BTN periode Januari s.d Desember 2023;
 - c) Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU (Akun 424911) pada LO dengan LRA senilai Rp10.021.917,00 merupakan bunga deposito yang akan diterima di Januari 2024.

d. Pemantauan Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK

Sebanyak 4 (empat) Satker telah dilakukan pemantauan pada Triwulan I Tahun 2024, yaitu Politeknik Kelautan dan Perikanan (KP) Karawang, Politeknik KP Bitung, Politeknik KP Jembrana, dan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung. Hasil pemantauan seluruh satker tersebut *belum memenuhi syarat untuk memperoleh predikat menuju WBK*.

Nilai sementara Politeknik KP Karawang sebesar 69,89; Politeknik KP Bitung sebesar 73,28; dan Politeknik KP Jembrana sebesar 68,52 belum mencapai ambang batas minimal 75. Sedangkan nilai sementara BPPP Bitung telah mencapai ambang batas yaitu sebesar 83,35 namun terdapat nilai indikator pada komponen pengungkit belum mencapai 60% dan komponen hasil terkait survei persepsi korupsi belum memenuhi syarat minimal nilai 15,75.

6. Rekomendasi Inspektorat Jenderal

Kepala BPPSDMKP direkomendasikan agar menginstruksikan jajarannya, yaitu:

- a. Seluruh satker lingkup BPPSDMKP supaya melengkapi *Berita Acara Stock Opname* (BASO) pada akhir tahun anggaran berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penatausahaan Persediaan di Lingkungan KKP;
- b. Meningkatkan alokasi penggunaan UMK-Koperasi sesuai dengan rencana penggunaan produk dalam negeri untuk mendukung industri dalam negeri;
- c. Kepala BRPPUPP Palembang dan LRBBRL Gorontalo supaya melengkapi data dukung setiap usulan perubahan RKBMN seperti SPTJM (BRPPUPP Palembang) dan KIB Tanah dan/atau Bangunan (LRBRL Gorontalo);
- d. Mempercepat proses penyelesaian PSP atas 15 NUP BMN AADB, selain tanah/bangunan dan selain AADB dengan nilai total perolehan Rp1.821.829.329,00, sehingga RKBMN TA 2024 (perubahan) untuk pemeliharaan BMN dimaksud dapat dialokasikan dalam RKAKL Tahun bersangkutan, pada Satker:
 - 1) Sekretariat BPPSDMKP sebanyak 8 (delapan) NUP dengan nilai total perolehan Rp55.500.000,00, berupa Meja Kerja Besi/Metal (NUP 38 s.d. 45);
 - 2) BPPP Ambon sebanyak 4 (empat) NUP dengan nilai total perolehan Rp520.056.600,00, berupa 1 (satu) unit minibus dan 3 (tiga) unit mesin pemotong rumput;

- 3) Politeknik KP Sidoarjo sebanyak 3 (tiga) NUP dengan nilai total perolehan Rp1.246.272.729,00, berupa 1 (satu) unit Sumur Gali (SGL) dan 2 (dua) unit Jaringan Distribusi Tegangan di Atas 20 KVA.
- e. Menginstruksikan Kepala Satker dan Tim Pembangunan Zona Integritas Lingkup BPPSDMKP sebagai unit kerja untuk mendapatkan predikat WBK supaya melengkapi persyaratan data dukung yang relevan dan memadai dengan mempedomani Petunjuk Teknis Pembangunan Zona Integritas dalam rangka peningkatan nilai menuju WBK.

Lampiran Iktisar Hasil Pengawasan pada BPPSDMKP

1. Rekap Laporan Hasil Pengawasan

No	Unit Kerja	Unit Es. 1 Mitra	Jumlah				TL Tuntas		Sisa	
			LHP	Temuan	Rp	Rekom	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Inspektorat I	BPPSDMKP	15	19	0	25	13	52	12	48

2. Rekap Tindak Lanjut per Jenis Pengawasan

No	Unit Kerja	Unit Es. 1 Mitra	Audit		Reviu		Evaluasi		Pemantauan		Pengawasan Lainnya	
			Rekom	Tuntas (%)	Rekom	Tuntas (%)	Rekom	Tuntas (%)	Rekom	Tuntas (%)	Rekom	Tuntas (%)
1	Inspektorat I	BPPSDMKP	0	100	14	57.14	0	100	11	45.45	0	100

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

MEMORANDUM NOMOR 146/ITJ.1/TU.210/VII/2024

Yth. : Inspektur Jenderal
Dari : Inspektur I
Hal : Hasil Monitoring Pelaksanaan Kegiatan dan Perkembangan
Capaian Kinerja Inspektorat I s.d Triwulan II Tahun 2024
Lampiran : Satu berkas
Tanggal : 17 Juli 2024

Dalam rangka pengendalian pencapaian target kinerja Tahun 2024 serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengawasan pada mitra kerja Inspektorat I, bersama ini kami sampaikan hasil monitoring pelaksanaan kegiatan dan perkembangan capaian kinerja periode Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Inspektorat I bertanggung jawab untuk mewujudkan 3 Sasaran Kegiatan (SK) dengan 13 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Perkembangan hingga Triwulan II, jumlah IKK yang dapat dilakukan pengukuran sebanyak 6 (enam) indikator, dengan capaian 106,93;
2. Adapun rincian capaian 6 (enam) IKK terhadap target Triwulan II Tahun 2024, yaitu:
 - a. IK-8 "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat I" dengan realisasi 96,25% dari target 80% atau capaian sebesar 120%.
 - b. IK-9 "Jumlah rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat I", dengan realisasi 2 (dua) kebijakan dari target 2 kebijakan yang harus dipenuhi pada periode Triwulan II Tahun 2024 atau capaian sebesar 100%.
 - c. IK-10 "Persentase Pelaksanaan Penugasan Pengawasan dan Pelaporan Hasil Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan Lingkup Mitra Inspektorat I", Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh pengawas internal dalam hal ini Inspektorat V, diketahui realisasi terhadap indikator ini adalah sebesar 100% dari 89% atau capaian sebesar 112,36%.

- d. IK-11 “Persentase Tingkat Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Lingkup Inspektorat I”, Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh pengawas internal dalam hal ini Inspektorat V, diketahui realisasi terhadap indikator ini adalah sebesar 100% dari 80% atau capaian sebesar 120%.
- e. IK-12 “Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat I” dengan realisasi 100% dari target 100% atau capaian sebesar 100%.
- f. IK-13 “Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat I” dengan realisasi 100% dari target 100% atau capaian sebesar 100%.

Capaian kinerja Inspektorat I pada periode Triwulan I Tahun 2024 secara rinci disampaikan pada **Lampiran 1**.

- 3. Dengan capaian IKU tersebut, nilai kinerja organisasi Inspektorat I pada periode Triwulan II Tahun 2024 mendapat nilai “Baik” yang ditunjukkan dengan Skor Kinerja pada aplikasi manajemen kinerja (*kinerjaku.kkp.go.id*) sebesar 106,93%. Nilai tersebut mengalami kenaikan dari capaian kinerja pada periode sebelumnya/Triwulan I Tahun 2024 yaitu 106,75%, dengan indikator penilaian pada IK-8 “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat I” dengan capaian 113,35%, IK-12 “Tingkat Kepatuhan terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat I” dengan capaian 100%, dan IK-13 “Terkelolanya Anggaran Kegiatan secara Tertib dan Akuntabel lingkup Inspektorat I” dengan capaian 100%.
- 4. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan terhadap mitra Inspektorat I untuk mencapai target kinerja pada Triwulan II Tahun 2024 antara lain:
 - a. Pemantauan Implementasi Program Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN) Triwulan I TA 2024 pada Setjen dan DJPKRL;
 - b. Pemantauan Dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) Lingkup Ditjen PKRL;
 - c. Pemantauan Kinerja PMO Hibah JICA pada Setjen;
 - d. Telaah Sejawat Inspektorat Jenderal KKP;
 - e. Probit Audit Perencanaan/Persiapan PBJ Pusdatin;

- f. Evaluasi Pelayanan Publik pada Biro HKLN, BPSPL Padang dan BPSPL Makassar;
- g. Pemantauan Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK pada Dit. KKHL, PRL, P4K dan Jaskel;
- h. Audit Kinerja pada BPISDKP Perancak;
- i. Pengawasan Persiapan Kampung Nelayan Modern pada Ditjen PKRL;
- j. Evaluasi PNBK pada Satker BPSPL Denpasar. BKKPN Kupang dan LPSPL Sorong;
- k. Pemantauan Kinerja Sistem Informasi Terintegrasi dan Persiapan Implementasi Nano Satelit pada Pusdatin;
- l. Evaluasi Kinerja UKPBJ pada Biro Umum dan PBJ;
- m. Probit Audit Perencanaan Sarana Niaga Garam Rakyat yang Dibangun Tahun 2024;
- n. Asistensi Pembangunan ZI Menuju WBK pada Biro Keuangan dan BMN serta Biro Hukum;
- o. Reviu Peta Jalan Ekonomi Biru Perluasan Kawasan Konservasi Laut pada Dit. KKHL, PRL dan P4K;
- p. Pemantauan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut pada Dit. PRL;
- q. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan II lingkup Setjen dan DJPKRL;
- r. Reviu Maturitas Penyelenggaraan SPIP 2023 pada Setjen dan DJPKRL;
- s. Pemantauan Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap Penanggulangan Dampak Pencemaran (dalam rangka BCL) pada Dit. P4K;
- t. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen Triwulan II pada Setjen dan DJPRL;
- u. Evaluasi Implementasi Manajemen Risiko 2023 pada Setjen dan DJPKRL.

Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PKPT Inspektorat I s.d Triwulan II Tahun 2024, dapat disampaikan bahwa dari 36 rencana kegiatan pengawasan telah terealisasi sebanyak 30 kegiatan pengawasan atau capaian sebesar 83,33%. Beberapa kegiatan yang belum terlaksana sesuai PKPT adalah:

- a. Pengawasan Persiapan Kampung Nelayan Modern pada Ditjen PKRL;

- b. Pemantauan Kinerja Sistem Informasi Terintegrasi dan Persiapan Implementasi Nano Satelit pada Pusdatin;
- c. Reviu Maturitas Penyelenggaraan SPIP 2023 pada Sekretariat Jenderal dan Ditjen PKRL;
- d. Evaluasi Implementasi Manajemen Risiko 2023 pada Sekretariat Jenderal dan Ditjen PKRL.

Selain hal tersebut, Inspektorat I juga melaksanakan pengawasan terhadap mitra kerja melalui kegiatan non PKPT dan Non Pengawasan, antara lain:

- a. Pembahasan Usulan Evaluasi Rencana Kegiatan untuk Rehabilitasi Pesisir di Kab. Demak terkait Pengelolaan Sedimentasi Berkelanjutan;
- b. Pemantauan Pengangkatan PPPK di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Formasi Tahun 2023;
- c. Pembahasan Usulan Jurnal Koreksi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri serta Satuan Kerja Badan Layanan Umum TA 2023;
- d. Pembahasan Usulan Jurnal Koreksi Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Audited pada Biro Keuangan;
- e. Reviu Pembayaran Termin 7,8 dan 9 Pekerjaan Jasa Konsultasi *Project Management Consultan* (PMC) pada Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Hibah Pemerintah Jepang dan Pemantauan Kinerja *Project Management Office* (PMO) Hibah Pemerintah Jepang;
- f. Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Digitalisasi Perizinan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024;
- g. Ekspose Kegiatan Satuan Kerja Pusat dan Unit Pelayanan Teknis lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2024;
- h. Sinergitas Pengawasan Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Sektor Kelautan dan Perikanan;
- i. Pendampingan *Mutual Check Nol* (MC-0) Kegiatan Pembangunan Prasarana Dermaga Apung/Tambat Labuh di Kabupaten Banggai Laut;
- j. Reviu Dokumen Penambahan Anggaran PHLN *Oceans for Prosperity Project* - Lautra lingkup Ditjen PKRL Tahun 2024;
- k. Koordinasi Wakil Pemerintah dalam rangka Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;

- I. Reviu Jeda Waktu Pemanfaatan Sewa Gedung/Bangunan pada Biro Umum dan PBJ;
 - m. *On The Spot Probity Audit* dalam rangka kegiatan Pembangunan Bangunan dan Mesin Washing Plant, Gudang Garam Rakyat (GGR) serta Rehabilitas Gudang Garam Nasional (GGN) dalam rangka *on the spot Probity Audit* Perencanaan Sarana Niaga Garam TA 2024 di 7 Lokasi.
5. Hasil pelaksanaan pengawasan terhadap mitra yang telah dilaksanakan selama periode Triwulan II telah disampaikan kepada Sekretaris Itjen melalui Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Triwulan II sesuai memorandum Inspektur I dengan Nomor 127/ITJ.1/TU.140/VII/2024 perihal Ikhtisar Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2024 lingkup Sekretariat Jenderal dan memorandum Nomor 124/ITJ.1/TU.140/VII/2024 perihal Ikhtisar Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2024 lingkup Ditjen PKRL.
6. Dalam rangka mencapai target IKU, Inspektorat I telah menetapkan rencana aksi pencapaian IKU dari 3 Sasaran Kegiatan (SK) dengan 13 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Adapun hasil monev terhadap rencana aksi pencapaian target IKU Tahun 2024 telah disampaikan melalui memorandum Inspektur I Nomor 136/ITJ.1/TU.210/VII/2024 perihal Penyampaian Capaian Rencana Aksi Terhadap Pencapaian Target Kinerja Periode Triwulan II Tahun 2024.
7. Dari sisi kinerja keuangan, dapat disampaikan bahwa realisasi anggaran Inspektorat I sampai dengan 31 Juni 2024 sebesar Rp2.277.871.203 atau 36,18% dari pagu Rp6.296.347.000,00, dengan demikian masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.018.475.797 atau 63,82%.
8. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja Triwulan II Tahun 2024 tidak ditemukan kendala/masalah dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja Inspektorat I, hal ini dapat terlihat dari capaian kinerja pada 6 (enam) indikator yang dilakukan pengukuran, yaitu 3 (tiga) indikator telah sesuai target dan 3 (tiga) indikator lainnya melebihi dari target yang telah ditetapkan.
9. Tindak lanjut atas saran/rekomendasi pelaporan sebelumnya, yaitu:
 - a. Inspektorat I telah melakukan pemantauan secara berkala dalam rangka melakukan pemantauan terhadap percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan terhadap mitra kerja. Berdasarkan Laporan Hasil

Pemantauan Tindak Lanjut pada Sekretariat Jenderal KKP Nomor 102/ITJ.1/HP.510/VII/2024 diketahui sebanyak 90 dari 93 rekomendasi pada Sekretariat Jenderal KKP telah berstatus tuntas atau sebesar 96,77%, sedangkan berdasarkan LHP Tindak Lanjut Ditjen PKRL Nomor 104/ITJ.1/HP.510/VII/2024 yaitu sebanyak 269 dari 280 rekomendasi pada Ditjen PKRL telah berstatus tuntas atau sebesar 96,07%.

- b. Mengusulkan perubahan PKPT dari Inspektur I melalui memorandum Nomor 62/ITJ.1/TU.210/IV/2024 tanggal 1 April 2024, dengan memperhatikan kegiatan yang belum terealisasi pada periode Triwulan I.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Teuku Nilwan

Tembusan:
Sekretaris Inspektorat Jenderal.

Lampiran 1. Tabel Capaian Kinerja Inspektorat I Periode Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja TW II			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Pengendalian dan Pengawasan Internal Yang Bernilai Tambah Lingkup Mitra Inspektorat I					
2.	Tata Kelola Pengawasan Intern Yang Akuntabel dan Efektif Lingkup Inspektorat I	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat	80%	96,25%	120%	tercapai
		Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat I	2	2	100%	tercapai
		Persentase Pelaksanaan Penugasan Pengawasan dan Pelaporan Hasil Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Mitra Inspektorat I	89%	100%	112,36%	tercapai
		Persentase Tingkat Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat I	80%	100%	120%	tercapai
3.	Dukungan Manajemen Pengawasan yang Handal lingkup Inspektorat I	Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat	100%	100%	100%	tercapai
		Terkelolanya anggaran kegiatan secara tertib dan akuntabel lingkup Inspektorat	100%	100%	100%	tercapai

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL**

MEMORANDUM

NOMOR 62/ITJ.1/TU.210/IV/2024

Yth. : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Dari : Inspektur I
Hal : Usulan Revisi PKPT Inspektorat I Tahun 2024
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Tanggal : 1 April 2024

Sehubungan dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang baru sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024, bersama ini disampaikan usulan revisi PKPT Inspektorat I Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Teuku Nilwan

Tembusan:
Inspektur Jenderal

NO.	AREA PENGAWASAN	OBJEK PENGAWASAN			LOKASI (Provinsi)	JENIS PENGAWASAN	SUBSTANSI PENGAWASAN	TEKNIS PENGAWASAN	TAHUN PENGAWASAN	SETELAH REVISI		JUMLAH HARI	TIM	PERAN
		Unit Eselon I	Unit Eselon II/ Satker	KP/KD/DK/TP						TMP	TSP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17
JANUARI														
1	Pengawasan Mandatori	Setjen	Biro Keuangan	KP	Jawa Barat	Reviu	Reviu Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal TA 2023	Mandiri	2023	22 January 2024	27 January 2024	6	Sumini	PM
										22 January 2024	27 January 2024	6	Firman Fachrudin Firmansyah	PT
										22 January 2024	27 January 2024	6	Sri Endah Nawadiati	KT
										22 January 2024	27 January 2024	6	Maharami	AT
										22 January 2024	27 January 2024	6	Ahmad Nur Ilham	AT
										22 January 2024	27 January 2024	6	Qorina Hayati	AT
2	Pengawasan Mandatori	BPPSDMKP	Sekretariat BRSDM	KP	Jawa Tengah	Reviu	Reviu Laporan Keuangan BPPSDMKP TA 2023	Mandiri	2023	22 January 2024	26 January 2024	5	Iriawanti	PM
										22 January 2024	26 January 2024	5	Taufiqur Rahman NG	PT
										22 January 2024	26 January 2024	5	Wirata	KT
										22 January 2024	26 January 2024	5	Mashudi	AT
										22 January 2024	26 January 2024	5	Tibyan Dimas Marham Putra	AT
										22 January 2024	26 January 2024	5	Devinda Arsandi	AT
3	Pengawasan Mandatori	Setjen	Biro Perencanaan	KP	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal TA 2023	Mandiri	2023	29 January 2024	7 February 2024	8	Sumini	PM
										29 January 2024	7 February 2024	8	Asih Wahyuni	PT
										29 January 2024	7 February 2024	8	Sri Endah Nawadiati	KT
										29 January 2024	7 February 2024	8	Tutut Sumarmi	AT
										29 January 2024	7 February 2024	8	Ahmad Nur Ilham	AT
4	Pengawasan Mandatori	BPPSDMKP	Sekretariat BRSDM	KP	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Laporan Kinerja BPPSDMKP TA 2023	Mandiri	2023	29 January 2024	7 February 2024	8	Iriawanti	PM
										29 January 2024	7 February 2024	8	Taufiqur Rahman NG	PT
										29 January 2024	7 February 2024	8	Wirata	KT
										29 January 2024	7 February 2024	8	Mashudi	AT
										29 January 2024	7 February 2024	8	Qorina Hayati	AT
5	Pengawasan Tematik	Setjen	LPMUKP	KP	DKI Jakarta	Evaluasi	Evaluasi Kinerja BLU LPMUKP	Mandiri	2023	15 January 2024	24 January 2024	10	Iriawanti	PM
										15 January 2024	24 January 2024	10	Firman Fachrudin Firmansyah	PT
										15 January 2024	24 January 2024	10	Kukuh Priambodo	KT
										15 January 2024	24 January 2024	10	Faisal Reza Pahlevi	AT
										15 January 2024	24 January 2024	10	Arief Bachtillah	AT
										15 January 2024	24 January 2024	10	Muchammad Rizal Adha Taruna N	AT
										15 January 2024	24 January 2024	10	Tri Nur Utami	AT
										15 January 2024	24 January 2024	10	Wildan Fathurizqi	AT
FEBRUARI														
6	Pengawasan Tematik	Setjen	Biro Perencanaan	KP	DKI Jakarta	Pemantauan	Pemantauan Pembangunan ZI Menuju WBK	Mandiri	2023-2024	12 February 2024	16 February 2024	5	Iriawanti	PM
										12 February 2024	16 February 2024	5	Taufiqur Rahman NG	PT
										12 February 2024	16 February 2024	5	Tutut Sumarmi	KT
										12 February 2024	16 February 2024	5	Tibyan Dimas Marham Putra	AT
										12 February 2024	16 February 2024	5	Tri Nur Utami	AT

7	Pengawasan Tematik	Setjen	Biro SDMAO	KP	DKI Jakarta	Pemantauan	Pemantauan Pembangunan ZI Menuju WBK	Mandiri	2023-2024	12 February 2024	16 February 2024	5	Sumini	PM
										12 February 2024	16 February 2024	5	Asih Wahyuni	PT
										12 February 2024	16 February 2024	5	Sri Endah Nawadiati	KT
										12 February 2024	16 February 2024	5	Maharami	AT
										12 February 2024	16 February 2024	5	Qorina Hayati	AT
8	Pengawasan Tematik	Setjen	Biro KHLN	KP	DKI Jakarta	Pemantauan	Pemantauan Pembangunan ZI Menuju WBK	Mandiri	2023-2024	12 February 2024	16 February 2024	5	Tutut Sumarmi	PM
										12 February 2024	16 February 2024	5	Asih Wahyuni	PT
										12 February 2024	16 February 2024	5	Kukuh Priambodo	KT
										12 February 2024	16 February 2024	5	Wirata	AT
										12 February 2024	16 February 2024	5	Hanifa Dwi Santi	AT
9	Pengawasan Tematik	BPPSDMKP	Politeknik KP Karawang	KD	Jawa Barat	Pemantauan	Pemantauan Pembangunan ZI Menuju WBK	Mandiri	2023-2024	20 February 2024	23 February 2024	4	Sumini	PM
										20 February 2024	23 February 2024	4	Asih Wahyuni	PT
										20 February 2024	23 February 2024	4	Arief Bachtillah	KT
										20 February 2024	23 February 2024	4	Kukuh Priambodo	AT
										20 February 2024	23 February 2024	4	Sri Endah Nawadiati	AT
10	Pengawasan Tematik	BPPSDMKP	Politeknik KP Bitung	KD	Sulawesi Utara	Pemantauan	Pemantauan Pembangunan ZI Menuju WBK	Mandiri	2023-2024	19 February 2024	23 February 2024	5	Iriawanti	PM
										19 February 2024	23 February 2024	5	Asih Wahyuni	PT
										19 February 2024	23 February 2024	5	Wirata	KT
										19 February 2024	23 February 2024	5	Tutut Sumarmi	AT
										19 February 2024	23 February 2024	5	Dianita Indah Prahmila	AT
11	Pengawasan Mandatori	Setjen	Biro Umum dan PBJ	KP	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ Triwulan I Tahun 2024	Mandiri	2024	28 February 2024	6 March 2024	6	Sumini	PM
										28 February 2024	6 March 2024	6	Asih Wahyuni	PT
										28 February 2024	6 March 2024	6	Tutut Sumarmi	KT
										28 February 2024	6 March 2024	6	Ahmad Nur Ilham	AT
										28 February 2024	6 March 2024	6	Maharami	AT
										28 February 2024	6 March 2024	6	Dianita Indah Prahmila	AT
12	Pengawasan Mandatori	BPPSDMKP	Sekretariat BRSDM	KP	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ Triwulan I Tahun 2024	Mandiri	2024	28 February 2024	6 March 2024	6	Sumini	PM
										28 February 2024	6 March 2024	6	Taufiqur Rahman NG	PT
										28 February 2024	6 March 2024	6	Mashudi	KT
										28 February 2024	6 March 2024	6	Devinda Arsandi	AT
										28 February 2024	6 March 2024	6	Tri Nur Utami	AT
MARET														
13	Pengawasan Tematik	BPPSDMKP	BPPP Bitung	KD	Sulawesi Utara	Pemantauan	Pemantauan Pembangunan ZI Menuju WBK	Mandiri	2023-2024	4 March 2024	8 March 2024	5	Iriawanti	PM
										4 March 2024	8 March 2024	5	Taufiqur Rahman NG	PT
										4 March 2024	8 March 2024	5	Tibyan Dimas Marham Putra	KT
										4 March 2024	8 March 2024	5	Muchammad Rizal Adha Taruna N	AT
										4 March 2024	8 March 2024	5	Wildan Fathurizqi	AT
14	Pengawasan Tematik	BPPSDMKP	Politeknik KP Jembrana	KD	Bali	Audit	Audit Kinerja TA 2023 - 2024	Mandiri	2023-2024	13 March 2024	15 March 2024	-	Iriawanti	PM
										23 March 2024	26 March 2024	4	Taufiqur Rahman NG	PT
										13 March 2024	26 March 2024	14	Mashudi	KT
										13 March 2024	26 March 2024	14	Ahmad Nur Ilham	AT
										13 March 2024	26 March 2024	14	Devinda Arsandi	AT
										13 March 2024	26 March 2024	14	Dianita Indah Prahmila	AT
15	Pengawasan Tematik	BPPSDMKP	Politeknik KP Jembrana	KD	Bali	Pemantauan	Pemantauan Pembangunan ZI Menuju WBK	Mandiri	2023-2024	13 March 2024	15 March 2024	-	Iriawanti	PM
										23 March 2024	26 March 2024	4	Taufiqur Rahman NG	PT
										13 March 2024	26 March 2024	14	Mashudi	KT
										13 March 2024	26 March 2024	14	Ahmad Nur Ilham	AT

										13 March 2024	26 March 2024	14	Devinda Arsandi	AT
										13 March 2024	26 March 2024	14	Dianita Indah Prahmila	AT
16	Pengawasan Tematik	Setjen	Biro Umum dan PBJ	KP	DKI Jakarta	Audit	Probitas Audit Perencanaan/Persiapan PBJ Biro Umum dan PBJ	Mandiri	2024	13 March 2024	22 March 2024	10	Sumini	PM
										13 March 2024	22 March 2024	10	Firman Fachrudin Firmansyah	PT
										13 March 2024	22 March 2024	10	Tibyan Dimas Marham Putra	KT
										13 March 2024	22 March 2024	10	Hanifa Dwi Santi	AT
										13 March 2024	22 March 2024	10	Muchammad Rizal Adha Taruna N	AT
										13 March 2024	22 March 2024	10	Wildan Fathurizqi	AT
17	Pengawasan Tematik	Setjen	Biro Keuangan	KP	DKI Jakarta	Pemantauan	Pemantauan Hasil Pengawasan Itjen Triwulan I	Mandiri	2024	25 March 2024	28 March 2024	4	Sumini	PM
										25 March 2024	28 March 2024	4	Asih Wahyuni	PT
										25 March 2024	28 March 2024	4	Tutut Sumarmi	KT
										25 March 2024	28 March 2024	4	Qorina Hayati	AT
										25 March 2024	28 March 2024	4	Hanifa Dwi Santi	AT
18	Pengawasan Tematik	BPPSDMKP	Sekretariat BRSDM	KP	DKI Jakarta	Pemantauan	Pemantauan Hasil Pengawasan Itjen Triwulan I	Mandiri	2024	25 March 2024	28 March 2024	4	Iriawanti	PM
										25 March 2024	28 March 2024	4	Asih Wahyuni	PT
										25 March 2024	28 March 2024	4	Tibyan Dimas Marham Putra	KT
										25 March 2024	28 March 2024	4	Maharami	AT
										25 March 2024	28 March 2024	4	Tri Yuliastini	AT
										25 March 2024	28 March 2024	4	Muchammad Rizal Adha Taruna N	AT
										25 March 2024	28 March 2024	4	Wildan Fathurizqi	AT
APRIL														
19	Pengawasan Mandatori	Ditjen PKRL	Sekretariat Ditjen PKRL	KP	DKI Jakarta	Pemantauan	Pemantauan Implementasi Program Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN) Triwulan I TA 2024 pada DJPKRL	Mandiri	2024	22 April 2024	23 April 2024	2	Iriawanti	PM
										24 April 2024	26 April 2024	3	Taufiqur Rahman NG	PT
										22 April 2024	26 April 2024	5	Tutut Sumarmi	KT
										22 April 2024	26 April 2024	5	Ahmad Nur Ilham	AT
										22 April 2024	26 April 2024	5	Muchammad Rizal Adha Taruna N	AT
20	Pengawasan Mandatori	Setjen	Biro Umum dan PBJ	KP	DKI Jakarta	Pemantauan	Pemantauan Implementasi Program P3DN pada Setjen	Mandiri	2024	22 April 2024	23 April 2024	5	Sumini	PM
										24 April 2024	26 April 2024	3	Asih Wahyuni	PT
										22 April 2024	26 April 2024	5	Kukuh Priambodo	KT
										22 April 2024	26 April 2024	5	Arief Bachtillah	AT
										22 April 2024	26 April 2024	5	Wildan Fathurizqi	AT
21	Pengawasan Tematik	Ditjen PKRL	Sekretariat Ditjen PKRL	KP	DKI Jakarta	Pemantauan	Pemantauan Dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) Lingkup Ditjen PKRL	Mandiri	2024	22 April 2024	23 April 2024	2	Iriawanti	PM
										24 April 2024	26 April 2024	3	Taufiqur Rahman NG	PT
										22 April 2024	26 April 2024	5	Faisal Reza Pahlevi	KT
										22 April 2024	26 April 2024	5	Maharami	AT
										22 April 2024	26 April 2024	5	Dianita Indah Prahmila	AT
22	Pengawasan Tematik	Setjen	Biro Perencanaan	KP	DKI Jakarta	Pemantauan	Pemantauan Kinerja PMO Hibah JICA	Mandiri	2024	22 April 2024	23 April 2024	5	Sumini	
										24 April 2024	26 April 2024	3	Firman Fachrudin Firmansyah	PT
										22 April 2024	26 April 2024	5	Wirata	KT
										22 April 2024	26 April 2024	5	Hanifa Dwi Santi	AT
										22 April 2024	26 April 2024	5	Tri Nur Utami	AT
23	Pengawasan Tematik	Itjen	Inspektorat	KP	DKI Jakarta	Pengawasan Lainnya	Telaah Sejawat Inspektorat Jenderal KKP	Terpadu	2024	25 April 2024	26 April 2024	5	Iriawanti	PM
										22 April 2024	24 April 2024	5	Asih Wahyuni	PT
										22 April 2024	26 April 2024	5	Sri Endah Nawadiati	KT

										22 April 2024	26 April 2024	5	Qorina Hayati	AT
										22 April 2024	26 April 2024	5	Veronika Eri Febriani	AT
24	Pengawasan Tematik	Setjen	Pusdatin	KP	DKI Jakarta	Audit	Probitas Audit Perencanaan/Persiapan PBJ Pusdatin	Mandiri	2024	29 April 2024	30 April 2024	2	Sumini	PM
										22 April 2024	27 April 2024	6	Firman Fachrudin Firmansyah	PT
										22 April 2024	30 April 2024	9	Kukuh Priambodo	KT
										22 April 2024	30 April 2024	9	Maharami	AT
										22 April 2024	30 April 2024	9	Hanifa Dwi Santi	AT
										22 April 2024	30 April 2024	9	Veronika Eri Febriani	AT
25	Pengawasan Mandatori	Setjen	Biro HKLN	KP	DKI Jakarta	Evaluasi	Evaluasi Pelayanan Publik	Mandiri	2024	29 April 2024	1 May 2024	3	Sumini	PM
										2 May 2024	4 May 2024	3	Asih Wahyuni	PT
										29 April 2024	4 May 2024	6	Sri Endah Nawadiati	KT
										29 April 2024	4 May 2024	6	Veronika Eri Febriani	AT
										29 April 2024	4 May 2024	6	Wildan Fathurizqi	AT
26	Pengawasan Mandatori	Ditjen PKRL	BPSPL Padang	KD	Sumatera Barat	Evaluasi	Evaluasi Pelayanan Publik pada	Mandiri	2024	29 April 2024	1 May 2024	3	Iriawanti	PM
										2 May 2024	4 May 2024	3	Taufiqur Rahman NG	PT
										29 April 2024	4 May 2024	6	Wirata	KT
										29 April 2024	4 May 2024	6	Ahmad Nur Ilham	AT
										29 April 2024	4 May 2024	6	Dianita Indah Prahmila	AT
27	Pengawasan Tematik	Ditjen PKRL	BPSPL Makassar	KD	Sulawesi Selatan	Evaluasi	Evaluasi Pelayanan Publik pada	Mandiri	2024	2 May 2024	4 May 2024	3	Sumini	PM
										29 April 2024	1 May 2024	3	Firman Fachrudin Firmansyah	PT
										29 April 2024	4 May 2024	6	Tutut Sumarmi	KT
										29 April 2024	4 May 2024	6	Hanifa Dwi Santi	AT
										29 April 2024	4 May 2024	6	Tri Nur Utami	AT
28	Pengawasan Tematik	Ditjen PKRL	Direktorat KKHL	KP	DKI Jakarta	Pemantauan	Pemantauan Pembangunan Unit	Mandiri	2024	29 April 2024	30 April 2024	2	Sumini	PM
										2 May 2024	3 May 2024	2	Asih Wahyuni	PT
										29 April 2024	3 May 2024	5	Faisal Reza Pahlevi	KT
										29 April 2024	3 May 2024	5	Arief Bachtillah	AT
										29 April 2024	3 May 2024	5	Devinda Arsandi	AT
29	Pengawasan Tematik	Ditjen PKRL	Direktorat PRL	KP	DKI Jakarta	Pemantauan	Pemantauan Pembangunan Unit	Mandiri	2024	29 April 2024	30 April 2024	2	Iriawanti	PM
										2 May 2024	3 May 2024	2	Taufiqur Rahman NG	PT
										29 April 2024	3 May 2024	5	Mashudi	KT
										29 April 2024	3 May 2024	5	Qorina Hayati	AT
										29 April 2024	3 May 2024	5	Rusihan Anwari	AT
	MEI													
30	Pengawasan Tematik	Setjen	BPISDKP Perancak	KD	Bali	Audit	Audit Kinerja	Mandiri	2023-2024	1 May 2024	3 May 2024	3	Sumini	PM
										8 May 2024	11 May 2024	4	Firman Fachrudin Firmansyah	PT
										1 May 2024	11 May 2024	11	Kukuh Priambodo	KT
										1 May 2024	11 May 2024	11	Tibyan Dimas Marham Putra	AT
										1 May 2024	11 May 2024	11	Maharami	AT
										1 May 2024	11 May 2024	11	Muchammad Rizal Adha Taruna	AT
31	Pengawasan Tematik	Ditjen PKRL	Direktorat P4K	KP	DKI Jakarta	Pemantauan	Pemantauan Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK	Mandiri	2024	6 May 2024	6 May 2024	1	Sumini	PM
										8 May 2024	8 May 2024	1	Asih Wahyuni	PT
										6 May 2024	8 May 2024	3	Tutut Sumarmi	KT
										6 May 2024	8 May 2024	3	Hanifa Dwi Santi	AT
										6 May 2024	8 May 2024	3	Veronika Eri Febriani	AT
32	Pengawasan Tematik	Ditjen PKRL	Direktorat Jasa Kelautan	KP	DKI Jakarta	Pemantauan	Pemantauan Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK	Mandiri	2024	6 May 2024	6 May 2024	1	Iriawanti	PM
										8 May 2024	8 May 2024	1	Taufiqur Rahman NG	PT
										6 May 2024	8 May 2024	3	Sri Endah Nawadiati	KT

										6 May 2024	8 May 2024	3	Qorina Hayati	AT
										6 May 2024	8 May 2024	3	Dianita Indah Prahmila	AT
33	Pengawasan Kegiatan Prioritas KKP	Ditjen PKRL	Ditjen PKRL	KP	DKI Jakarta	Pemantauan	Pengawasan Persiapan Kampung Nelayan Modern pada Ditjen PKRL	Mandiri	2024	6 May 2024	8 May 2024	5	Iriawanti	PM
										6 May 2024	8 May 2024	5	Taufiqur Rahman NG	PT
										6 May 2024	8 May 2024	5	Faisal Reza Pahlevi	KT
										6 May 2024	8 May 2024	5	Tibyan Dimas Marham Putra	AT
										6 May 2024	8 May 2024	5	Devinda Arsandi	AT
34	Pengawasan Tematik	Ditjen PKRL	BPSPL Denpasar	KD	Bali	Evaluasi	Evaluasi PNBPN pada Satker BPSPL Denpasar	Mandiri	2024	13 May 2024	15 May 2024	3	Iriawanti	PM
										16 May 2024	18 May 2024	3	Taufiqur Rahman NG	PT
										13 May 2024	18 May 2024	6	Wirata	KT
										13 May 2024	18 May 2024	6	Veronika Eri Febriani	AT
										13 May 2024	18 May 2024	6	Tri Nur Utami	AT
35	Pengawasan Tematik	Ditjen PKRL	BKKPN Kupang	KD	NTT	Evaluasi	Evaluasi PNBPN pada Satker BKKPN Kupang	Mandiri	2024	13 May 2024	15 May 2024	3	Sumini	PM
										16 May 2024	18 May 2024	3	Asih Wahyuni	PT
										13 May 2024	18 May 2024	6	Faisal Reza Pahlevi	KT
										13 May 2024	18 May 2024	6	Qorina Hayati	AT
										13 May 2024	18 May 2024	6	Muchammad Rizal Adha Taruna N	AT
36	Pengawasan Tematik	Ditjen PKRL	LPSPL Sorong	KD	Papua Barat Daya	Evaluasi	Evaluasi PNBPN pada Satker LPSPL Sorong	Mandiri	2024	13 May 2024	15 May 2024	3	Iriawanti	PM
										16 May 2024	18 May 2024	3	Firman Fachrudin Firmansyah	PT
										13 May 2024	18 May 2024	6	Tutut Sumarmi	KT
										13 May 2024	18 May 2024	6	Dianita Indah Prahmila	AT
										13 May 2024	18 May 2024	6	Wildan Fathurizqi	AT
37	Pengawasan Program Prioritas	Setjen	Pusdatin	KP	DKI Jakarta	Pemantauan	Pemantauan Kinerja Sistem Informasi Terintegrasi dan Persiapan Implementasi Nano Satelit pada Pusdatin	Mandiri	2024	20 May 2024	24 May 2024	5	Sumini	PM
										20 May 2024	24 May 2024	5	Firman Fachrudin Firmansyah	PT
										20 May 2024	24 May 2024	5	Tibyan Dimas Marham Putra	KT
										20 May 2024	24 May 2024	5	Devinda Arsandi	AT
										20 May 2024	24 May 2024	5	Dianita Indah Prahmila	AT
38	Pengawasan Tematik	Setjen	Biro Umum dan PBJ	KP	DKI Jakarta	Evaluasi	Evaluasi Kinerja UKPBJ pada Biro Umum dan PBJ	Mandiri	2023-2024	20 May 2024	24 May 2024	5	Sumini	PM
										20 May 2024	24 May 2024	5	Firman Fachrudin Firmansyah	PT
										20 May 2024	24 May 2024	5	Mashudi	KT
										20 May 2024	24 May 2024	5	Tibyan Dimas Marham Putra	AT
										20 May 2024	24 May 2024	5	Devinda Arsandi	AT
39	Pengawasan Tematik	Ditjen PKRL	Direktorat Jasa Kelautan	KP	DKI Jakarta	Audit	Probitas Audit Perencanaan Sarana Niaga Garam Rakyat yang Dibangun Tahun 2024	Mandiri	2024	20 May 2024	24 May 2024	5	Iriawanti	PM
										20 May 2024	24 May 2024	5	Asih Wahyuni	PT
										20 May 2024	24 May 2024	5	Faisal Reza Pahlevi	KT
										20 May 2024	24 May 2024	5	Sri Endah Nawadiati	AT
										20 May 2024	24 May 2024	5	Muchammad Rizal Adha Taruna N	AT
										20 May 2024	24 May 2024	5	Wildan Fathurizqi	AT
40	Pengawasan Tematik	Setjen	Biro Keuangan	KP	DKI Jakarta	Asistensi	Asistensi Pembangunan ZI Menuju WBK	Mandiri	2024	27 May 2024	29 May 2024	3	Sumini	PM
										27 May 2024	29 May 2024	3	Taufiqur Rahman NG	PT
										27 May 2024	29 May 2024	3	Arief Bachtillah	KT
										27 May 2024	29 May 2024	3	Muchammad Rizal Adha Taruna N	AT

										27 May 2024	29 May 2024	3	Danita Indah Prahmila	AT
41	Pengawasan Tematik	Setjen	Biro Hukum	KP	DKI Jakarta	Asistensi	Asistensi Pembangunan ZI Menuju WBK	Mandiri	2024	27 May 2024	29 May 2024	3	Iriawanti	PM
										27 May 2024	29 May 2024	3	Asih Wahyuni	PT
										27 May 2024	29 May 2024	3	Mashudi	KT
										27 May 2024	29 May 2024	3	Devinda Arsandi	AT
										27 May 2024	29 May 2024	3	Veronika Eri Febriani	AT
JUNI														
42	Pengawasan Program Prioritas	Ditjen PKRL	Direktorat KKHL	KP	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Peta Jalan Ekonomi Biru Perluasan Kawasan Konservasi Laut pada Direktorat KKHL	Mandiri	2024	3 June 2024	7 June 2024	5	Iriawanti	PM
										3 June 2024	7 June 2024	5	Asih Wahyuni	PT
										3 June 2024	7 June 2024	5	Faisal Reza Pahlevi	KT
										3 June 2024	7 June 2024	5	Ahmad Nur Ilham	AT
										3 June 2024	7 June 2024	5	Tibyan Dimas Marham Putra	AT
43	Pengawasan Program Prioritas	Ditjen PKRL	Direktorat P4K	KP	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Peta Jalan Ekonomi Biru Pengelolaan Sampah Plastik di Laut	Mandiri	2024	3 June 2024	7 June 2024	5	Sumini	PM
										3 June 2024	7 June 2024	5	Asih Wahyuni	PT
										3 June 2024	7 June 2024	5	Kukuh Priambodo	KT
										3 June 2024	7 June 2024	5	Arief Bachtillah	AT
										3 June 2024	7 June 2024	5	Hanifa Dwi Santi	AT
44	Pengawasan Program Prioritas	Ditjen PKRL	Direktorat PRL	KP	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Peta Jalan Ekonomi Biru Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Mandiri	2024	3 June 2024	7 June 2024	5	Iriawanti	PM
										3 June 2024	7 June 2024	5	Firman Fachrudin Firmansyah	PT
										3 June 2024	7 June 2024	5	Sri Endah Nawadiati	KT
										3 June 2024	7 June 2024	5	Arief Bachtillah	AT
										3 June 2024	7 June 2024	5	Wildan Fathurizqi	AT
45	Pengawasan Program Prioritas	Ditjen PKRL	Direktorat PRL	KP	DKI Jakarta	Pemantauan	Pemantauan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	Mandiri	2024	3 June 2024	7 June 2024	5	Iriawanti	PM
										3 June 2024	7 June 2024	5	Firman Fachrudin Firmansyah	PT
										3 June 2024	7 June 2024	5	Wirata	KT
										3 June 2024	7 June 2024	5	Maharami	AT
										3 June 2024	7 June 2024	5	Veronika Eri Febriani	AT
46	Pengawasan Mandatori	Setjen	Biro Umum dan PBJ	KP	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan II lingkup Setjen	Mandiri	2024	10 June 2024	14 June 2024	5	Sumini	PM
										10 June 2024	14 June 2024	5	Asih Wahyuni	PT
										10 June 2024	14 June 2024	5	Tutut Sumarmi	KT
										10 June 2024	14 June 2024	5	Ahmad Nur Ilham	AT
										10 June 2024	14 June 2024	5	Danita Indah Prahmila	AT
47	Pengawasan Mandatori	Ditjen PKRL	Sekretariat Ditjen PKRL	KP	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Penyerapan Anggaran dan Realisasi PBJ Triwulan II lingkup DJPKRL TA 2024	Mandiri	2024	10 June 2024	14 June 2024	5	Iriawanti	PM
										10 June 2024	14 June 2024	5	Firman Fachrudin Firmansyah	PT
										10 June 2024	14 June 2024	5	Mashudi	KT
										10 June 2024	14 June 2024	5	Devinda Arsandi	AT
										10 June 2024	14 June 2024	5	Qorina Hayati	AT
48	Pengawasan Mandatori	Setjen	Biro Keuangan	KP	DKI	Reviu	Reviu Maturitas Penyelenggaraan SPIP 2023	Mandiri	2023	18 June 2024	21 June 2024	4	Sumini	PM
										18 June 2024	21 June 2024	4	Firman Fachrudin Firmansyah	PT
										18 June 2024	21 June 2024	4	Sri Endah Nawadiati	KT
										18 June 2024	21 June 2024	4	Mashudi	AT
										18 June 2024	21 June 2024	4	Hanifa Dwi Santi	AT

										18 June 2024	21 June 2024	4	Veronika Eri Febriani	
49	Pengawasan Mandatori	Ditjen PKRL	Sekretariat Ditjen PKRL	KP	DKI	Reviu	Reviu Maturitas Penyelenggaraan SPIP 2023	Mandiri	2023	18 June 2024	21 June 2024	4	Iriawanti	PM
										18 June 2024	21 June 2024	4	Taufiqur Rahman NG	PT
										18 June 2024	21 June 2024	4	Kukuh Priambodo	KT
										18 June 2024	21 June 2024	4	Tibyan Dimas Marham Putra	AT
										18 June 2024	21 June 2024	4	Tri Nur Utami	AT
										18 June 2024	21 June 2024	4	Muchammad Rizal Adha Taruna Negara	
50	Pengawasan Program Prioritas	Ditjen PKRL	Direktorat P4K	KP	DKI Jakarta	Reviu	Pemantauan Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap Penanggulangan Dampak Pencemaran (dalam rangka BCL)	Mandiri	2024	18 June 2024	21 June 2024	4	Iriawanti	PM
										18 June 2024	21 June 2024	4	Asih Wahyuni	PT
										18 June 2024	21 June 2024	4	Tutut Sumarmi	KT
										18 June 2024	21 June 2024	4	Maharami	AT
										18 June 2024	21 June 2024	4	Devinda Arsandi	AT
51	Pengawasan Tematik	Setjen	Biro Keuangan	KP	DKI Jakarta	Pemantauan	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen Triwulan II	Mandiri	2024	24 June 2024	28 June 2024	5	Sumini	PM
										24 June 2024	28 June 2024	5	Asih Wahyuni	PT
										24 June 2024	28 June 2024	5	Arief Bachtillah	KT
										24 June 2024	28 June 2024	5	Qorina Hayati	AT
										24 June 2024	28 June 2024	5	Dianita Indah Prahmila	AT
52	Pengawasan Tematik	Ditjen PKRL	Sekretariat Ditjen PKRL	KP	DKI Jakarta	Pemantauan	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Lingkup Itjen Triwulan II Tahun 2024	Mandiri	2024	24 June 2024	28 June 2024	5	Iriawanti	PM
										24 June 2024	28 June 2024	5	Taufiqur Rahman NG	PT
										24 June 2024	28 June 2024	5	Tibyan Dimas Marham Putra	KT
										24 June 2024	28 June 2024	5	Muchammad Rizal Adha Taruna N	AT
										24 June 2024	28 June 2024	5	Wildan Fathurizqi	AT
53	Pengawasan Tematik	Setjen	Biro Keuangan	KP	DKI	Evaluasi	Evaluasi Implementasi Manajemen Risiko 2023	Mandiri	2023	25 June 2024	5 July 2024	11	Sumini	PM
										25 June 2024	5 July 2024	11	Firman Fachrudin Firmansyah	PT
										25 June 2024	5 July 2024	11	Sri Endah Nawadiati	KT
										25 June 2024	5 July 2024	11	Mashudi	AT
										25 June 2024	5 July 2024	11	Hanifa Dwi Santi	AT
										25 June 2024	5 July 2024	11	Veronika Eri Febriani	
54	Pengawasan Tematik	Ditjen PKRL	Sekretariat Ditjen PKRL	KP	DKI	Evaluasi	Evaluasi Implementasi Manajemen Risiko 2023	Mandiri	2023	25 June 2024	5 July 2024	11	Iriawanti	PM
										25 June 2024	5 July 2024	11	Taufiqur Rahman NG	PT
										25 June 2024	5 July 2024	11	Kukuh Priambodo	KT
										25 June 2024	5 July 2024	11	Tibyan Dimas Marham Putra	AT
										25 June 2024	5 July 2024	11	Tri Nur Utami	AT
										25 June 2024	5 July 2024	11	Muchammad Rizal Adha Taruna Negara	
JULI														
55	Pengawasan Mandatori	Setjen	Biro Perencanaan	KP	DKI Jakarta	Reviu	Reviu RKA-K/L Pagu Indikatif Tahun 2025	Mandiri	2025	1 July 2024	5 July 2024	5	Sumini	PM
										1 July 2024	5 July 2024	5	Firman Fachrudin Firmansyah	PT
										1 July 2024	5 July 2024	5	Sri Endah Nawadiati	KT
										1 July 2024	5 July 2024	5	Maharami	AT
										1 July 2024	5 July 2024	5	Hanifa Dwi Santi	AT
										1 July 2024	5 July 2024	5	Qorina Hayati	AT
56	Pengawasan Mandatori	Ditjen PKRL	Sekretariat Ditjen PKRL	KP	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Pagu Indikatif RKA-K/L lingkup DJPKRL Tahun 2025	Mandiri	2025	1 July 2024	5 July 2024	5	Iriawanti	PM

										1 July 2024	5 July 2024	5	Taufiqur Rahman NG	PT
										1 July 2024	5 July 2024	5	Kukuh Priambodo	KT
										1 July 2024	5 July 2024	5	Faisal Reza Pahlevi	AT
										1 July 2024	5 July 2024	5	Muchammad Rizal Adha Taruna Negara	
										1 July 2024	5 July 2024	5	Tri Nur Utami	AT
57	Pengawasan Tematik	Ditjen PKRL	Direktorat PRL	KP	DKI Jakarta	Evaluasi	Evaluasi PNBPN dan Tata Kelola Perizinan Sektor KP	Mandiri	2024	1 July 2024	5 July 2024	5	Iriawanti	PM
										1 July 2024	5 July 2024	5	Firman Fachrudin Firmansyah	PT
										1 July 2024	5 July 2024	5	Wirata	KT
										1 July 2024	5 July 2024	5	Arief Bachtillah	AT
										1 July 2024	5 July 2024	5	Maharami	
										1 July 2024	5 July 2024	5	Wildan Fathurizqi	AT
58	Pengawasan Tematik	Ditjen PKRL	Direktorat P4K	KP	DKI Jakarta	Evaluasi	Evaluasi PNBPN dan Tata Kelola Perizinan Sektor KP	Mandiri	2024	1 July 2024	5 July 2024	5	Iriawanti	PM
										1 July 2024	5 July 2024	5	Taufiqur Rahman NG	PT
										1 July 2024	5 July 2024	5	Faisal Reza Pahlevi	KT
										1 July 2024	5 July 2024	5	Tibyan Dimas Marham Putra	AT
										1 July 2024	5 July 2024	5	Devinda Arsandi	AT
59	Pengawasan Mandatori	Setjen	Biro Perencanaan	KP	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Implementasi SAKIP 2023	Mandiri	2023	8 July 2024	12 July 2024	5	Sumini	PM
										8 July 2024	12 July 2024	5	Asih Wahyuni	PT
										8 July 2024	12 July 2024	5	Arief Bachtillah	KT
										8 July 2024	12 July 2024	5	Mashudi	AT
										8 July 2024	12 July 2024	5	Veronika Eri Febriani	AT
60	Pengawasan Mandatori	Ditjen PKRL	Sekretariat Ditjen PKRL	KP	DKI Jakarta	Evaluasi	Reviu Implementasi SAKIP 2023	Mandiri	2023	8 July 2024	12 July 2024	5	Iriawanti	PM
										8 July 2024	12 July 2024	5	Taufiqur Rahman NG	PT
										8 July 2024	12 July 2024	5	Wirata	KT
										8 July 2024	12 July 2024	5	Ahmad Nur Ilham	AT
										8 July 2024	12 July 2024	5	Tri Nur Utami	AT
61	Pengawasan Tematik	Setjen	Biro SDMAO	KP	DKI Jakarta	Pemantauan	Pemantauan Pembangunan ZI Menuju WBK	Mandiri	2023-2024	8 July 2024	12 July 2024	5	Sumini	PM
										8 July 2024	12 July 2024	5	Asih Wahyuni	PT
										8 July 2024	12 July 2024	5	Sri Endah Nawadiati	KT
										8 July 2024	12 July 2024	5	Maharami	AT
										8 July 2024	12 July 2024	5	Qorina Hayati	AT
62	Pengawasan Tematik	Setjen	Biro Perencanaan	KP	DKI Jakarta	Pemantauan	Pemantauan Pembangunan ZI Menuju WBK	Mandiri	2023-2024	8 July 2024	12 July 2024	5	Sumini	PM
										8 July 2024	12 July 2024	5	Firman Fachrudin Firmansyah	PT
										8 July 2024	12 July 2024	5	Tutut Sumarmi	KT
										8 July 2024	12 July 2024	5	Tibyan Dimas Marham Putra	AT
										8 July 2024	12 July 2024	5	Tri Nur Utami	AT
63	Pengawasan Tematik	Setjen	Biro HKLN	KP	DKI Jakarta	Pemantauan	Pemantauan Pembangunan ZI Menuju WBK	Mandiri	2023-2024	8 July 2024	12 July 2024	5	Sumini	PM
										8 July 2024	12 July 2024	5	Asih Wahyuni	PT
										8 July 2024	12 July 2024	5	Kukuh Priambodo	KT
										8 July 2024	12 July 2024	5	Hanifa Dwi Santi	AT
										8 July 2024	12 July 2024	5	Veronika Eri Febriani	AT
64	Pengawasan Mandatori	Setjen	Biro Keuangan	KP	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Laporan Keuangan Semester I 2024	Mandiri	2024	15 July 2024	19 July 2024	5	Sumini	PM
										15 July 2024	19 July 2024	5	Firman Fachrudin Firmansyah	PT
										15 July 2024	19 July 2024	5	Sri Endah Nawadiati	KT
										15 July 2024	19 July 2024	5	Ahmad Nur Ilham	AT
										15 July 2024	19 July 2024	5	Maharami	AT
										15 July 2024	19 July 2024	5	Qorina Hayati	AT
65	Pengawasan Mandatori	Ditjen PKRL	Sekretariat Ditjen PKRL	KP	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Laporan Keuangan Semester I 2024	Mandiri	2025	15 July 2024	19 July 2024	5	Iriawanti	PM
										15 July 2024	19 July 2024	5	Taufiqur Rahman NG	PT
										15 July 2024	19 July 2024	5	Wirata	KT
										15 July 2024	19 July 2024	5	Mashudi	AT

										15 July 2024	19 July 2024	5	Tibyan Dimas Marham Putra	AT
										15 July 2024	19 July 2024	5	Devinda Arsandi	
66	Pengawasan Tematik	Ditjen PKRL	Direktorat Jasa Kelautan	KP	DKI Jakarta	Evaluasi	Evaluasi PNBP dan Tata Kelola Perizinan Sektor KP	Mandiri	2024	15 July 2024	19 July 2024	5	Iriawanti	PM
										15 July 2024	19 July 2024	5	Taufiqur Rahman NG	PT
										15 July 2024	19 July 2024	5	Kukuh Priambodo	KT
										15 July 2024	19 July 2024	5	Hanifa Dwi Santi	AT
										15 July 2024	19 July 2024	5	Tri Nur Utami	AT
67	Pengawasan Tematik	Ditjen PKRL	Direktorat KKHL	KP	DKI Jakarta	Evaluasi	Evaluasi PNBP dan Tata Kelola Perizinan Sektor KP	Mandiri	2024	15 July 2024	19 July 2024	5	Iriawanti	PM
										15 July 2024	19 July 2024	5	Asih Wahyuni	PT
										15 July 2024	19 July 2024	5	Arief Bachtillah	KT
										15 July 2024	19 July 2024	5	Veronika Eri Febriani	AT
										15 July 2024	19 July 2024	5	Danita Indah Prahmila	AT
68	Pengawasan Tematik	Ditjen PKRL	Direktorat P4K	KP	DKI Jakarta	Audit	Probity Audit Pelaksanaan Pembangunan Dermaga Apung Kab. Sumbawa	Mandiri	2024	15 July 2024	21 July 2024	7	Iriawanti	PM
										15 July 2024	21 July 2024	7	Firman Fachrudin Firmansyah	PT
										15 July 2024	21 July 2024	7	Mashudi	AT
										15 July 2024	21 July 2024	7	Ahmad Nur Ilham	AT
										15 July 2024	21 July 2024	7	Wildan Fathurizqi	AT
69	Pengawasan Mandatori	Ditjen PKRL	BPSPL Pontianak	KD	DKI Jakarta	Evaluasi	Evaluasi Pelayanan Publik pada BPSPL Pontianak	Mandiri	2024	22 July 2024	24 July 2024	3	Sumini	PM
										25 July 2024	27 July 2024	3	Asih Wahyuni	PT
										22 July 2024	27 July 2024	6	Tutut Sumarmi	KT
										22 July 2024	27 July 2024	6	Ahmad Nur Ilham	AT
										22 July 2024	27 July 2024	6	Wildan Fathurizqi	AT
70	Pengawasan Mandatori	Ditjen PKRL	LKKPN Pekanbaru	KD	DKI Jakarta	Evaluasi	Evaluasi Pelayanan Publik pada LKKPN Pekanbaru	Mandiri	2024	25 July 2024	27 July 2024	3	Iriawanti	PM
										22 July 2024	24 July 2024	3	Taufiqur Rahman NG	PT
										22 July 2024	27 July 2024	6	Wirata	KT
										22 July 2024	27 July 2024	6	Tri Nur Utami	AT
										22 July 2024	27 July 2024	6	Muchammad Rizal Adha Taruna N	AT
AGUSTUS														
71	Pengawasan Mandatori	Ditjen PKRL	Direktorat P4K	KP	DKI Jakarta	Evaluasi	Evaluasi Pelayanan Publik pada Direktorat P4K	Mandiri	2024	5 August 2024	9 August 2024	5	Iriawanti	PM
										5 August 2024	9 August 2024	5	Taufiqur Rahman NG	PT
										5 August 2024	9 August 2024	5	Arief Bachtillah	KT
										5 August 2024	9 August 2024	5	Tibyan Dimas Marham Putra	AT
										5 August 2024	9 August 2024	5	Wildan Fathurizqi	AT
72	Pengawasan Mandatori	Ditjen PKRL	Direktorat KKHL	KP	DKI Jakarta	Evaluasi	Evaluasi Pelayanan Publik pada Direktorat KKHL	Mandiri	2024	5 August 2024	9 August 2024	5	Sumini	PM
										5 August 2024	9 August 2024	5	Firman Fachrudin Firmansyah	PT
										5 August 2024	9 August 2024	5	Kukuh Priambodo	KT
										5 August 2024	9 August 2024	5	Tutut Sumarmi	AT
										5 August 2024	9 August 2024	5	Tri Nur Utami	AT
73	Pengawasan Mandatori	Ditjen PKRL	Direktorat Jasa Kelautan	KP	DKI Jakarta	Evaluasi	Evaluasi Pelayanan Publik pada Direktorat Jasa Kelautan	Mandiri	2024	5 August 2024	9 August 2024	5	Iriawanti	PM
										5 August 2024	9 August 2024	5	Taufiqur Rahman NG	PT
										5 August 2024	9 August 2024	5	Wirata	KT
										5 August 2024	9 August 2024	5	Maharami	AT
										5 August 2024	9 August 2024	5	Hanifa Dwi Santi	AT
74	Pengawasan Mandatori	Ditjen PKRL	Direktorat PRL	KP	DKI Jakarta	Evaluasi	Evaluasi Pelayanan Publik pada Direktorat Perencanaan Ruang Laut	Mandiri	2024	5 August 2024	9 August 2024	5	Sumini	PM
										5 August 2024	9 August 2024	5	Asih Wahyuni	PT

										5 August 2024	9 August 2024	5	Sri Endah Nawadiati	KT
										5 August 2024	9 August 2024	5	Ahmad Nur Ilham	AT
										5 August 2024	9 August 2024	5	Veronika Eri Febriani	AT
75	Pengawasan Program Prioritas	Ditjen PKRL	Ditjen PKRL	KP	DKI Jakarta	Pemantauan	Pemantauan Pelaksanaan Kampung Nelayan Modern pada Ditjen PKRL	Mandiri	2024	12 August 2024	16 August 2024	5	Iriawanti	PM
										12 August 2024	16 August 2024	5	Firman Fachrudin Firmansyah	PT
										12 August 2024	16 August 2024	5	Mashudi	KT
										12 August 2024	16 August 2024	5	Hanifa Dwi Santi	AT
										12 August 2024	16 August 2024	5	Muchammad Rizal Adha Taruna N	AT
76	Pengawasan Program Prioritas	Ditjen PKRL	Direktorat P4K	KP	DKI Jakarta	Pemantauan	Pemantauan Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik di Laut	Mandiri	2024	12 August 2024	16 August 2024	5	Sumini	PM
										12 August 2024	16 August 2024	5	Asih Wahyuni	PT
										12 August 2024	16 August 2024	5	Tutut Sumarmi	KT
										12 August 2024	16 August 2024	5	Tibyan Dimas Marham Putra	AT
										12 August 2024	16 August 2024	5	Tri Nur Utami	AT
77	Pengawasan Tematik	Ditjen PKRL	Direktorat PRL	KP	DKI Jakarta	Pemantauan	Pemantauan Pengelolaan Barang Muatan Kapal Tenggelam	Mandiri	2024	12 August 2024	16 August 2024	5	Iriawanti	PM
										12 August 2024	16 August 2024	5	Taufiqur Rahman NG	PT
										12 August 2024	16 August 2024	5	Wirata	KT
										12 August 2024	16 August 2024	5	Ahmad Nur Ilham	AT
										12 August 2024	16 August 2024	5	Qorina Hayati	AT
78	Pengawasan Tematik	Setjen	Biro Perencanaan	KP	DKI Jakarta	Pemantauan	Pemantauan Kinerja PMO Hibah JICA	Mandiri	2024	19 August 2024	23 August 2024	5	Sumini	PM
										19 August 2024	23 August 2024	5	Firman Fachrudin Firmansyah	PT
										19 August 2024	23 August 2024	5	Kukuh Priambodo	KT
										19 August 2024	23 August 2024	5	Sri Endah Nawadiati	AT
										19 August 2024	23 August 2024	5	Dianita Indah Prahmila	AT
79	Pengawasan Tematik	Setjen	Biro Umum dan PBJ	KP	DKI Jakarta	Evaluasi	Evaluasi Pengelolaan BMN	Mandiri	2023-2024	19 August 2024	23 August 2024	5	Sumini	PM
										19 August 2024	23 August 2024	5	Asih Wahyuni	PT
										19 August 2024	23 August 2024	5	Arief Bachtillah	KT
										19 August 2024	23 August 2024	5	Maharami	AT
										19 August 2024	23 August 2024	5	Devinda Arsandi	AT
										19 August 2024	23 August 2024	5	Wildan Fathurizqi	AT
80	Pengawasan Tematik	Ditjen PKRL	Direktorat P4K	KP	DKI Jakarta	Audit	Probitas Audit Pelaksanaan Pembangunan Dermaga Apung Kab. Kep. Aru	Mandiri	2024	19 August 2024	26 August 2024	7	Iriawanti	PM
										19 August 2024	26 August 2024	7	Taufiqur Rahman NG	PT
										19 August 2024	26 August 2024	7	Faisal Reza Pahlevi	AT
										19 August 2024	26 August 2024	7	Muchammad Rizal Adha Taruna N	AT
										19 August 2024	26 August 2024	7	Wildan Fathurizqi	AT
	SEPTEMBER													
81	Pengawasan Tematik	Setjen	LPMUKP	KD	DKI Jakarta	Pemantauan	Pemantauan Kinerja BLU	Mandiri	2024	2 September 2024	6 September 2024	5	Iriawanti	PM
										2 September 2024	6 September 2024	5	Firman Fachrudin Firmansyah	PT
										2 September 2024	6 September 2024	5	Kukuh Priambodo	KT
										2 September 2024	6 September 2024	5	Faisal Reza Pahlevi	AT
										2 September 2024	6 September 2024	5	Arief Bachtillah	AT
										2 September 2024	6 September 2024	5	Tri Nur Utami	AT
										2 September 2024	6 September 2024	5	Muchammad Rizal Adha Taruna N	AT
82	Pengawasan Mandatori	Setjen	Biro Umum dan PBJ	KP	DKI Jakarta	Reviu	Reviu PA PBJ Triwulan III	Mandiri	2024	9 September 2024	14 September 2024	6	Sumini	PM
										9 September 2024	14 September 2024	6	Asih Wahyuni	PT
										9 September 2024	14 September 2024	6	Sri Endah Nawadiati	KT
										9 September 2024	14 September 2024	6	Ahmad Nur Ilham	AT
										9 September 2024	14 September 2024	6	Dianita Indah Prahmila	AT
83	Pengawasan Mandatori	Ditjen PKRL	Sekretariat Ditjen PKRL	KP	DKI Jakarta	Reviu	Reviu PA PBJ Triwulan III	Mandiri	2024	9 September 2024	14 September 2024	6	Iriawanti	PM
										9 September 2024	14 September 2024	6	Taufiqur Rahman NG	PT
										9 September 2024	14 September 2024	6	Mashudi	KT

										9 September 2024	14 September 2024	6	Devinda Arsandi	AT
										9 September 2024	14 September 2024	6	Tri Nur Utami	AT
84	Pengawasan Mandatori	Ditjen PKRL	Biro Umum dan PBJ	KP	DKI Jakarta	Reviu	Reviu RKBMN 2026	Mandiri	2026	16 September 2024	20 September 2024	5	Sumini	PM
										16 September 2024	20 September 2024	5	Firman Fachrudin Firmansyah	PT
										16 September 2024	20 September 2024	5	Sri Endah Nawadiati	KT
										16 September 2024	20 September 2024	5	Maharami	AT
										16 September 2024	20 September 2024	5	Qorina Hayati	AT
										16 September 2024	20 September 2024	5	Tri Nur Utami	AT
85	Pengawasan Mandatori	Ditjen PKRL	Sekretariat Ditjen PKRL	KP	DKI Jakarta	Reviu	Reviu RK BMN Tahun 2026	Mandiri	2024	16 September 2024	20 September 2024	5	Iriawanti	PM
										16 September 2024	20 September 2024	5	Taufiqur Rahman NG	PT
										16 September 2024	20 September 2024	5	Wirata	KT
										16 September 2024	20 September 2024	5	Tibyan Dimas Marham Putra	AT
										16 September 2024	20 September 2024	5	Devinda Arsandi	AT
										16 September 2024	20 September 2024	5	Veronika Eri Febriani	AT
86	Pengawasan Tematik	Setjen	Biro Perencanaan	KP	DKI Jakarta	Evaluasi	Evaluasi Dukungan Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim	Mandiri	2024	16 September 2024	20 September 2024	5	Sumini	PM
										16 September 2024	20 September 2024	5	Firman Fachrudin Firmansyah	PT
										16 September 2024	20 September 2024	5	Arief Bachtillah	KT
										16 September 2024	20 September 2024	5	Mashudi	AT
										16 September 2024	20 September 2024	5	Ahmad Nur Ilham	AT
										16 September 2024	20 September 2024	5	Wildan Fathurizqi	AT
87	Pengawasan Program Prioritas	Ditjen PKRL	Sekretariat Ditjen PKRL	KP	DKI Jakarta	Evaluasi	Evaluasi Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Mandiri	2024	16 September 2024	20 September 2024	5	Iriawanti	PM
										16 September 2024	20 September 2024	5	Taufiqur Rahman NG	PT
										16 September 2024	20 September 2024	5	Kukuh Priambodo	KT
										16 September 2024	20 September 2024	5	Tutut Sumarni	AT
										16 September 2024	20 September 2024	5	Ahmad Nur Ilham	AT
										16 September 2024	20 September 2024	5	Devinda Arsandi	AT
										16 September 2024	20 September 2024	5	Muchammad Rizal Adha Taruna N	AT
88	Pengawasan Tematik	Ditjen PKRL	Sekretariat Ditjen PKRL	KP	DKI Jakarta	Pemantauan	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Lingkup Ditjen PKRL Triwulan III Tahun 2024	Mandiri	2024	23 September 2024	27 September 2024	5	Iriawanti	PM
										23 September 2024	27 September 2024	5	Taufiqur Rahman NG	PT
										23 September 2024	27 September 2024	5	Tibyan Dimas Marham Putra	KT
										23 September 2024	27 September 2024	5	Muchammad Rizal Adha Taruna N	AT
										23 September 2024	27 September 2024	5	Wildan Fathurizqi	AT
89	Pengawasan Mandatori	Setjen	Biro Keuangan	KP	DKI Jakarta	Pemantauan	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen Triwulan III	Mandiri	2024	23 September 2024	27 September 2024	5	Sumini	PM
										23 September 2024	27 September 2024	5	Asih Wahyuni	PT
										23 September 2024	27 September 2024	5	Arief Bachtillah	KT
										23 September 2024	27 September 2024	5	Qorina Hayati	AT
										23 September 2024	27 September 2024	5	Hanifa Dwi Santi	AT
90	Pengawasan Tematik	Ditjen PKRL	Direktorat Jasa Kelautan	KP	DKI Jakarta	Audit	Probitas Audit Pelaksanaan Sarana Niaga Garam Rakyat yang Dibangun Tahun 2024 pada Direktorat Jasa Kelautan	Mandiri	2024	23 September 2024	4 October 2024	12	Iriawanti	PM
										23 September 2024	4 October 2024	12	Taufiqur Rahman NG	PT
										23 September 2024	4 October 2024	12	Kukuh Priambodo	KT
										23 September 2024	4 October 2024	12	Ahmad Nur Ilham	AT
										23 September 2024	4 October 2024	12	Veronika Eri Febriani	AT
91	Pengawasan Program Prioritas	Ditjen PKRL	Sekretariat Ditjen PKRL	KP	DKI Jakarta	Evaluasi	Evaluasi Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah KKP Tahun 2023	Mandiri	2024	30 September 2024	4 October 2024	5	Sumini	PM
										30 September 2024	4 October 2024	5	Asih Wahyuni	PT
										30 September 2024	4 October 2024	5	Mashudi	KT
										30 September 2024	4 October 2024	5	Muchammad Rizal Adha Taruna N	AT

										30 September 2024	4 October 2024	5	Dianita Indah Prahmila	AT
	OKTOBER													
92	Pengawasan Tematik	Ditjen PKRL	Direktorat P4K	KP	DKI Jakarta	Pemantauan	Pemantauan Kegiatan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) Tahun 2024 pada Direktorat P4K	Mandiri	2023	7 October 2024	15 October 2024	9	Iriawanti	PM
										7 October 2024	15 October 2024	9	Taufiqur Rahman NG	PT
										7 October 2024	15 October 2024	9	Tutut Sumarmi	KT
										7 October 2024	15 October 2024	9	Arief Bachtillah	AT
										7 October 2024	15 October 2024	9	Veronika Eri Febriani	AT
										7 October 2024	15 October 2024	9	Muchammad Rizal Adha Taruna N	AT
93	Pengawasan Mandatori	Ditjen PKRL	Sekretariat Ditjen PKRL	KP	DKI Jakarta	Pemantauan	Pemantauan Implementasi Program P3DN	Mandiri	2024	14 October 2024	18 October 2024	5	Iriawanti	PM
										14 October 2024	18 October 2024	5	Taufiqur Rahman NG	PT
										14 October 2024	18 October 2024	5	Wirata	KT
										14 October 2024	18 October 2024	5	Ahmad Nur Ilham	AT
										14 October 2024	18 October 2024	5	Qorina Hayati	AT
94	Pengawasan Mandatori	Setjen	Biro Umum dan PBJ	KP	DKI Jakarta	Pemantauan	Pemantauan Implementasi Program P3DN	Mandiri	2024	14 October 2024	18 October 2024	5	Sumini	PM
										14 October 2024	18 October 2024	5	Firman Fachrudin Firmansyah	PT
										14 October 2024	18 October 2024	5	Wirata	KT
										14 October 2024	18 October 2024	5	Veronika Eri Febriani	AT
										14 October 2024	18 October 2024	5	Dianita Indah Prahmila	AT
95	Pengawasan Mandatori	Ditjen PKRL	Sekretariat Ditjen PKRL	KP	DKI Jakarta	Reviu	Reviu RKA-K/L Pagu Definitif	Mandiri	2025	14 October 2024	18 October 2024	5	Iriawanti	PM
										14 October 2024	18 October 2024	5	Taufiqur Rahman NG	PT
										14 October 2024	18 October 2024	5	Kukuh Priambodo	KT
										14 October 2024	18 October 2024	5	Hanifa Dwi Santi	AT
										14 October 2024	18 October 2024	5	Devinda Arsandi	AT
										14 October 2024	18 October 2024	5	Tri Nur Utami	AT
96	Pengawasan Mandatori	Setjen	Biro Perencanaan	KP	DKI Jakarta	Reviu	Reviu RKA-K/L Pagu Definitif	Mandiri	2025	14 October 2024	18 October 2024	5	Sumini	PM
										14 October 2024	18 October 2024	5	Firman Fachrudin Firmansyah	PT
										14 October 2024	18 October 2024	5	Sri Endah Nawadiati	KT
										14 October 2024	18 October 2024	5	Maharami	AT
										14 October 2024	18 October 2024	5	Hanifa Dwi Santi	AT
										14 October 2024	18 October 2024	5	Qorina Hayati	AT
97	Pengawasan Tematik	Setjen	Biro Umum dan PBJ	KP	DKI Jakarta	Audit	Probity Audit Pelaksanaan PBJ	Mandiri	2024	21 October 2024	30 October 2024	10	Sumini	PM
										21 October 2024	30 October 2024	10	Firman Fachrudin Firmansyah	PT
										21 October 2024	30 October 2024	10	Wirata	KT
										21 October 2024	30 October 2024	10	Ahmad Nur Ilham	AT
										21 October 2024	30 October 2024	10	Maharami	AT
										21 October 2024	30 October 2024	10	Veronika Eri Febriani	AT
98	Pengawasan Tematik	Setjen	Pusdatin	KP	DKI Jakarta	Audit	Probity Audit Pelaksanaan PBJ	Mandiri	2024	21 October 2024	30 October 2024	10	Sumini	PM
										21 October 2024	30 October 2024	10	Asih Wahyuni	PT
										21 October 2024	30 October 2024	10	Kukuh Priambodo	KT
										21 October 2024	30 October 2024	10	Tibyan Dimas Marham Putra	AT
										21 October 2024	30 October 2024	10	Muchammad Rizal Adha Taruna N	AT
										21 October 2024	30 October 2024	10	Wildan Fathurizqi	AT
	NOVEMBER													
99	Pengawasan Program Prioritas	Ditjen PKRL	Direktorat KKHL	KP	DKI Jakarta	Pemantauan	Pemantauan Ocean Account pada Direktorat KKHL	Mandiri	2024	4 November 2024	8 November 2024	5	Iriawanti	PM
										4 November 2024	8 November 2024	5	Asih Wahyuni	PT
										4 November 2024	8 November 2024	5	Wirata	KT
										4 November 2024	8 November 2024	5	Maharami	AT
										4 November 2024	8 November 2024	5	Devinda Arsandi	AT
100	Pengawasan Tematik	Ditjen PKRL	Sekretariat Ditjen PKRL	KP	DKI Jakarta	Reviu	Reviu MR Tahun 2025	Mandiri	2025	18 November 2024	22 November 2024	5	Iriawanti	PM
										18 November 2024	22 November 2024	5	Taufiqur Rahman NG	PT
										18 November 2024	22 November 2024	5	Kukuh Priambodo	KT
										18 November 2024	22 November 2024	5	Mashudi	AT

										18 November 2024	22 November 2024	5	Qorina Hayati	AT
101	Pengawasan Tematik	Setjen	Biro Keuangan	KP	DKI Jakarta	Reviu	Reviu MR 2025	Mandiri	2024	18 November 2024	22 November 2024	5	Sumini	PM
										18 November 2024	22 November 2024	5	Firman Fachrudin Firmansyah	PT
										18 November 2024	22 November 2024	5	Faisal Reza Pahlevi	KT
										18 November 2024	22 November 2024	5	Hanifa Dwi Santi	AT
										18 November 2024	22 November 2024	5	Veronika Eri Febriani	AT
										18 November 2024	22 November 2024	5	Danita Indah Prahmila	AT
DESEMBER														
102	Pengawasan Mandatori	Setjen	Biro Umum dan PBJ	KP	DKI Jakarta	Penilaian	Penilaian Efektivitas Pengawasan Pelaksanaan PBJ	Mandiri	2024	2 December 2024	6 December 2024	5	Sumini	PM
										2 December 2024	6 December 2024	5	Firman Fachrudin Firmansyah	PT
										2 December 2024	6 December 2024	5	Kukuh Priambodo	KT
										2 December 2024	6 December 2024	5	Arief Bachtillah	AT
										2 December 2024	6 December 2024	5	Hanifa Dwi Santi	AT
										2 December 2024	6 December 2024	5	Veronika Eri Febriani	AT
103	Pengawasan Mandatori	Ditjen PKRL	Sekretariat Ditjen PKRL	KP	DKI Jakarta	Penilaian	Penilaian Efektivitas Pengawasan Pelaksanaan PBJ	Mandiri	2024	2 December 2024	6 December 2024	5	Iriawanti	PM
										2 December 2024	6 December 2024	5	Taufiqur Rahman NG	PT
										2 December 2024	6 December 2024	5	Faisal Reza Pahlevi	KT
										2 December 2024	6 December 2024	5	Maharami	AT
										2 December 2024	6 December 2024	5	Tri Nur Utami	AT
										2 December 2024	6 December 2024	5	Wildan Fathurizqi	AT
104	Pengawasan Mandatori	Setjen	Biro Umum dan PBJ	KP	DKI Jakarta	Penilaian	Penilaian Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN	Mandiri	2024	2 December 2024	6 December 2024	5	Sumini	PM
										2 December 2024	6 December 2024	5	Firman Fachrudin Firmansyah	PT
										2 December 2024	6 December 2024	5	Kukuh Priambodo	KT
										2 December 2024	6 December 2024	5	Arief Bachtillah	AT
										2 December 2024	6 December 2024	5	Hanifa Dwi Santi	AT
										2 December 2024	6 December 2024	5	Veronika Eri Febriani	AT
105	Pengawasan Mandatori	Ditjen PKRL	Sekretariat Ditjen PKRL	KP	DKI Jakarta	Penilaian	Penilaian Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN	Mandiri	2024	2 December 2024	6 December 2024	5	Iriawanti	PM
										2 December 2024	6 December 2024	5	Taufiqur Rahman NG	PT
										2 December 2024	6 December 2024	5	Faisal Reza Pahlevi	KT
										2 December 2024	6 December 2024	5	Maharami	AT
										2 December 2024	6 December 2024	5	Tri Nur Utami	AT
										2 December 2024	6 December 2024	5	Wildan Fathurizqi	AT
106	Pengawasan Mandatori	Setjen	Biro Umum dan PBJ	KP	DKI Jakarta	Reviu	Reviu PA PBJ Triwulan IV TA 2024	Mandiri	2024	9 December 2024	13 December 2024	5	Sumini	PM
										9 December 2024	13 December 2024	5	Asih Wahyuni	PT
										9 December 2024	13 December 2024	5	Mashudi	KT
										9 December 2024	13 December 2024	5	Hanifa Dwi Santi	AT
										9 December 2024	13 December 2024	5	Qorina Hayati	AT
107	Pengawasan Mandatori	Ditjen PKRL	Sekretariat Ditjen PKRL	KP	DKI Jakarta	Reviu	Reviu PA PBJ Triwulan IV TA	Mandiri	2024	9 December 2024	13 December 2024	5	Iriawanti	PM
										9 December 2024	13 December 2024	5	Taufiqur Rahman NG	PT
										9 December 2024	13 December 2024	5	Faisal Reza Pahlevi	KT
										9 December 2024	13 December 2024	5	Devinda Arsandi	AT
										9 December 2024	13 December 2024	5	Tri Nur Utami	AT
108	Pengawasan Mandatori	Setjen	Biro Keuangan	KP	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) TA 2024	Mandiri	2024	9 December 2024	13 December 2024	5	Sumini	PM
										9 December 2024	13 December 2024	5	Asih Wahyuni	PT
										9 December 2024	13 December 2024	5	Sri Endah Nawadiati	KT
										9 December 2024	13 December 2024	5	Arief Bachtillah	AT
										9 December 2024	13 December 2024	5	Maharami	AT
										9 December 2024	13 December 2024	5	Veronika Eri Febriani	AT

109	Pengawasan Mandatori	Ditjen PKRL	Sekretariat Ditjen PKRL	KP	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) TA 2024	Mandiri	2024	9 December 2024	13 December 2024	5	Iriawanti	PM
										9 December 2024	13 December 2024	5	Taufiqur Rahman NG	PT
										9 December 2024	13 December 2024	5	Faisal Reza Pahlevi	KT
										9 December 2024	13 December 2024	5	Qorina Hayati	AT
										9 December 2024	13 December 2024	5	Devinda Arsandi	AT
										9 December 2024	13 December 2024	5	Dianita Indah Prahmila	AT
110	Pengawasan Tematik	Setjen	Biro Keuangan	KP	DKI Jakarta	Pemantauan	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen Triwulan IV	Mandiri	2024	23 December 2024	27 December 2024	5	Sumini	PM
										23 December 2024	27 December 2024	5	Firman Fachrudin Firmansyah	PT
										23 December 2024	27 December 2024	5	Arief Bachtillah	KT
										23 December 2024	27 December 2024	5	Qorina Hayati	AT
										23 December 2024	27 December 2024	5	Hanifa Dwi Santi	AT
111	Pengawasan Tematik	Ditjen PKRL	Sekretariat Ditjen PKRL	KP	DKI Jakarta	Pemantauan	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen Triwulan IV	Mandiri	2024	23 December 2024	27 December 2024	5	Iriawanti	PM
										23 December 2024	27 December 2024	5	Taufiqur Rahman NG	PT
										23 December 2024	27 December 2024	5	Tibyan Dimas Marham Putra	KT
										23 December 2024	27 December 2024	5	Muchammad Rizal Adha Taruna N	AT
										23 December 2024	27 December 2024	5	Wildan Fathurizqi	AT
112	Pengawasan Tematik	Setjen	Biro Umum dan PBJ serta TP	KP	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Pengelolaan Kas	Mandiri	2024	23 December 2024	31 December 2024	9	Sumini	PM
										23 December 2024	31 December 2024	9	Asih Wahyuni	PT
										23 December 2024	31 December 2024	9	Sri Endah Nawadiati	KT
										23 December 2024	31 December 2024	9	Maharami	AT
										23 December 2024	31 December 2024	9	Veronika Eri Febriani	AT
113	Pengawasan Tematik	Setjen	LPMUKP, BPISDKP dan TP	KP/TP	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Pengelolaan Kas	Mandiri	2024	23 December 2024	31 December 2024	9	Sumini	PM
										23 December 2024	31 December 2024	9	Firman Fachrudin Firmansyah	PT
										23 December 2024	31 December 2024	9	Mashudi	KT
										23 December 2024	31 December 2024	9	Tutut Sumarmi	AT
										23 December 2024	31 December 2024	9	Devinda Arsandi	AT
114	Pengawasan Tematik	Ditjen PKRL	Sekretariat Ditjen PKRL dan UPT	KP	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Pengelolaan Kas	Mandiri	2024	23 December 2024	31 December 2024	9	Iriawanti	PM
										23 December 2024	31 December 2024	9	Taufiqur Rahman NG	PT
										23 December 2024	31 December 2024	9	Faisal Reza Pahlevi	KT
										23 December 2024	31 December 2024	9	Wirata	AT
										23 December 2024	31 December 2024	9	Ahmad Nur Ilham	AT
										23 December 2024	31 December 2024	9	Tri Nur Utami	AT
										23 December 2024	31 December 2024	9	Dianita Indah Prahmila	AT



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3522805
LAMAN www.kkp.go.id SUREL itjen@kkp.go.id

Nomor : B.102/ITJ.1/HP.510/VII/2024
Sifat : Segera
Hal : Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Periode Triwulan II Tahun 2024 Lingkup Sekretariat Jenderal KKP

2 Juli 2024

Yth. Kepala Biro Keuangan
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat

Sesuai dengan Surat Tugas Inspektorat Jenderal Nomor B.3615.1/ITJ.1/KP.440/VI/2024, tanggal 20 Juni 2024, Inspektorat I telah melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Periode Triwulan II Tahun 2024 lingkup Sekretariat Jenderal KKP pada 24 s.d. 28 Juni 2024. Adapun hasil pemantauan tindak lanjut tersebut, yaitu :

1. Berdasarkan data sisa temuan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal per 31 Mei 2024, diketahui terdapat 10 LHP dengan rincian sisa temuan sebanyak 13 temuan dan 18 rekomendasi dengan nilai keuangan Rp258.639,00. Adapun Progress penyelesaian tindak lanjut s.d 28 Juni 2024 terhadap 8 (delapan) LHP dimaksud yang dilakukan melalui aplikasi SIDAK disajikan sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi sisa temuan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal pada Sekretariat Jenderal KKP per 28 Juni 2024

Keterangan	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Nilai Keuangan (Rp)
Sisa temuan per 31 Mei 2024	10	13	18	258.639,00
Hasil pemantauan s.d. 28 Juni 2024 status Tuntas	6	9	14	258.639,00
Sisa Temuan Per 28 Juni 2024 Status proses	4	4	4	0,00

Berdasarkan Tabel diatas, diketahui :

- a. Terdapat 6 (enam) LHP dinyatakan **Tuntas** dengan rincian sebanyak 9 (sembilan) temuan dan 14 rekomendasi senilai Rp258,639.00 (100%); dan

Lampiran 1. LHP Itjen yang Telah Ditindaklanjuti s.d. 28 Juni 2024 melalui Aplikasi SIDAK

No	No LHP	LHP	Sisa Per 24 Juni 2024				Tindak Lanjut			Sisa Per 28 Juni 2024			
			Temuan	Rekomen dasi		Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Rekomen dasi	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Rekomen dasi		Nilai Keuangan (Rp)
				Proses	Pending						Proses	Pending	
Biro Perencanaan													
1	B.38/ITJ.1/HP.550/II/2024	Laporan Hasil Pemantauan Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK pada Biro Perencanaan KKP	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
2	T.78/ITJ.1/HP.380/V/2024	Reviu Pembayaran Termin 7, 8, dan 9 Pekerjaan Jasa Konsultansi Project Management Consultant (PMC) pada Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Hibah Pemerintah Jepang	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
3	B.79/ITJ.1/HP.550/V/2024	Pemantauan Kinerja Project Management Office (PMO) Hibah Pemerintah Jepang Tahun 2024 pada Biro Perencanaan	2	-	2	-	2	2	-	-	-	-	-
Biro SDMAO													
1	B.34/ITJ.1/HP.550/II/2024	Lampiran Hasil Pemantauan Pembangunan ZI menuju WBK pada Biro SDMAO	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Biro Hukum													
Biro Humas dan KLN													
1	B.36/ITJ.1/HP.550/II/2024	Hasil Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK pada BHKLN Tahun 2024	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Biro Keuangan													
Biro Umum dan PBJ													
3	T.42/ITJ.1/HP.380/III/2024	Hasil Reviu atas Dokumen Perencanaan Pekerjaan Penataan Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkar GMB I dan II	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
4	T.51/ITJ.1/HP.110/III/2024	Hasil Probiy Audit Perencanaan/Persiapan PBJ Tahun 2024 pada Biro Umum dan PBJ	1	2	-	-	-	1	-	1	1	-	-
PUSDATIN													
1	T.80/ITJ.1/HP.130/V/2024	Probiy Audit Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2024 pada Pusat Data, Statistik dan Informasi (Pusdatin)	3	-	6	258.639	3	6	258.639	-	-	-	-
LPMUKP													
1	R.144/ITJ.1/HP.110/VIII/2023	Audit Kinerja TA 2022-2023 pada Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU-LPMUKP)	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
2	T.48/ITJ.1/HP.410/III/2024	Evaluasi Kinerja pada BLU-LPMUKP	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-
BPISDKP													
Total			13	9	9	258.639	9	14	258.639	4	4	-	-

No LHP	Obyek Pemeriksaan	Temuan Awal			Tindak Lanjut			Sisa Temuan			Status
		Temuan	Saran	Nilai	Temuan	Saran	Nilai	Temuan	Saran	Nilai	
		(Kejadian)		Keuangan	(Kejadian)		Keuangan	(Kejadian)		Keuangan	
T.228/ITJ.1/HP.380/XI/2023	Hasil Reviu Jeda Waktu Sewa Lahan Parkir untuk Bazar PWKP pada BUPBJ Sekretariat Jenderal KKP	1	2	Rp63.855.000,00	1	2	Rp63.855.000,00	-	-	Rp-	TUNTAS TL Desember 2023
T.229/ITJ.1/HP.130/XI/2023	Hasil Probiy Audit Tahap Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa TA 2023 pada Pusdatin	2	5	Rp-	2	5	Rp-	-	-	Rp-	TUNTAS TL Desember 2023
B.235/ITJ.1/HP.550/XI/2023	Pemantauan PBJ Sarana Gedung Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2023	3	4	Rp8.460.000,00	3	4	Rp8.460.000,00	-	-	Rp-	TUNTAS TL Maret 2024
B.239/ITJ.1/HP.550/XI/2023	Hasil Pemantauan Pengadaan Obat di Poliklinik Pratama KKP TA 2023 pada Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa										Sudah TUNTAS ditindaklanjuti saat Pemantauan
B.247/ITJ.1/HP.550/XII/2023	Hasil Pemantauan Pengadaan Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor Pusat KKP TA 2023 pada BUPBJ, Setjen	2	6	Rp-	2	6	Rp-	-	-	Rp-	TUNTAS TL Maret 2024
T.255/ITJ.1/HP.380/XII/2023	Hasil Reviu PIPK Tahun 2023 Lingkup Sekretariat Jenderal	9	9	Rp-	9	9	Rp-	-	-	Rp-	TUNTAS TL Januari 2024
T.252/ITJ.1/HP.380/XII/2023	Reviu Manajemen Risiko Lingkup Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2024	3	3	Rp-	3	3	Rp-	-	-	Rp-	TUNTAS TL Maret 2024
B.249/ITJ.1/HP.550/XII/2023	Pemantauan Hasil Pekerjaan Renovasi Ruang Asesment Center ada Biro Umum dan PBJ	2	2	Rp-	2	2	Rp-	-	-	Rp-	TUNTAS TL Maret 2024
B.265/ITJ.1/HP.660/XII/2023	Hasil Penilaian Tingkat Efektivitas Pengawasan BMN Tahun 2023 pada Sekretariat Jenderal										Tidak dimasukkan SIDAK karena Was Lainnya

No LHP	Obyek Pemeriksaan	Temuan Awal			Tindak Lanjut			Sisa Temuan			Status
		Temuan	Saran	Nilai	Temuan	Saran	Nilai	Temuan	Saran	Nilai	
		(Kejadian)		Keuangan	(Kejadian)		Keuangan	(Kejadian)		Keuangan	
T.266/ITJ.1/HP.380/XII/2023	Hasil Reviu Keringanan Pembayaran Jeda Waktu Sewa Lahan Parkir untuk Bazar PWKP pada BUPBJ Sekretariat Jenderal KKP	1	1	Rp34.248.000,00	1	1	34.248.000	-	-	Rp-	TUNTAS TL Mei 2024
T.510/ITJ.1/HP.320/XII/2023	Hasil Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ Sekretariat Jenderal TW IV TA 2023	1	3	Rp-	1	3	Rp-	-	-	Rp-	TUNTAS TL Januari 2024
T.13/ITJ.1/HP.320/I/2024	Hasil Reviu atas Usulan Revisi Anggaran dalam Rangka Automatic Adjustment Belanja Kementerian Tahun 2024 pada Setjen										Tidak ada temuan
T.14/ITJ.1/HP.320/II/2024	Hasil Reviu atas Usulan Revisi Anggaran dalam Rangka Tunggakan Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri TA 2023 pada BUPBJ										Tidak ada temuan
T.94/ITJ/HP.310/II/2024	Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Tahunan TA 2023 Satker Lingkup Sekretariat Jenderal KKP	1	5	Rp-	1	5	Rp-	-	-	Rp-	TUNTAS TL MEI 2024
T.29/ITJ.1/HP.310/II/2024	Hasil Reviu Laporan Keuangan LPMUKP (BA BUN 999.03) Tahun 2023	1	1	Rp-	1	1	Rp-	-	-	Rp-	Tuntas TL Maret 2024
T.114/ITJ/HP.330/II/2024	Hasil Reviu Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2023										Sudah TUNTAS ditindaklanjuti saat Reviu
B.36/ITJ.1/HP.550/II/2024	Hasil Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK pada BHKLN Tahun 2024	1	1	Rp-	-	-	Rp-	1	1	Rp-	PROSES TL JUNI 2024

No LHP	Obyek Pemeriksaan	Temuan Awal			Tindak Lanjut			Sisa Temuan			Status
		Temuan	Saran	Nilai	Temuan	Saran	Nilai	Temuan	Saran	Nilai	
		(Kejadian)		Keuangan	(Kejadian)		Keuangan	(Kejadian)		Keuangan	
B.34/ITJ.1/HP.550/II/2024	Hasil Pemantauan Pembangunan ZI menuju WBK pada Biro SDMAO	1	1	Rp-	-	-	Rp-	1	1	Rp-	PROSES TL JUNI 2024
B.38/ITJ.1/HP.550/II/2024	Hasil Pemantauan Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK pada Biro Perencanaan KKP	1	1	Rp-	1	1	Rp-	-	-	Rp-	TUNTAS TL JUNI 2024
T.48/ITJ.1/HP.410/III/2024	Evaluasi Kinerja pada BLU-LPMUKP	3	13	Rp-	3	13	Rp-	-	-	Rp-	TUNTAS TL JUNI 2024
B.138/ITJ/HP.320/III/2024	Hasil Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Setjen Triwulan I TA 2024	3	3	Rp-	3	3	Rp-	-	-	Rp-	TUNTAS TL MEI 2024
T.42/ITJ.1/HP.380/III/2024	Hasil Reviu atas Dokumen Perencanaan Pekerjaan Penataan Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkar GMB I dan II	5	5	Rp-	5	5	Rp-	-	-	Rp-	TUNTAS TL JUNI 2024
T.51/ITJ.1/HP.110/III/2024	Hasil Proby Audit Perencanaan/ Persiapan PBJ Tahun 2024 pada Biro Umum dan PBJ	1	2	Rp-	-	1	Rp-	1	1	Rp-	PROSES TL JUNI 2024
TOTAL		59	93	106.563.000	56	90	106.563.000	3	3	-	
Perhitungan Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024						96,77%	100,00%				



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3522805
LAMAN www.kkp.go.id SUREL itjen@kkp.go.id

Nomor : B.104/ITJ.1/HP.510/VII/2024 5 Juli 2024
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Inspektorat Jenderal Triwulan II Tahun 2024
pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
dan Ruang Laut

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal PKRL
di Jakarta

Berdasarkan tugas dan fungsi yang ditetapkan, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen KKP Periode Triwulan II Tahun 2024 pada Ditjen PKRL sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: B.3106.1/ITJ.1/KP.440/VI/2024, tanggal 20 Juni 2024 yang dilaksanakan tanggal 24 s.d 28 Juni 2024.

Hasil pemantauan adalah sebagai berikut:

1. Sebanyak 7 (tujuh) satker telah menyampaikan dokumen tindak lanjut atas 9 (sembilan) Laporan Hasil Pengawasan (LHP) melalui aplikasi SIDAK dengan sisa temuan per 24 Juni 2024 sebanyak 20 temuan dan 39 rekomendasi dengan nilai keuangan senilai Rp49.504.000,00. Berdasarkan tindak lanjut tersebut, telah dinyatakan Tuntas sebanyak 15 temuan (75%) dan 28 rekomendasi senilai Rp29.504.000,00 (59,6%), sedangkan sebanyak 5 (lima) temuan dan 11 rekomendasi masih status poses senilai Rp20.000.000,00, dengan rincian pada Lampiran I.
2. Hasil pengawasan pada Triwulan I Tahun 2023 s.d Triwulan I Tahun 2024 sebanyak 40 LHP, terdiri dari 143 temuan dan 280 rekomendasi senilai Rp134.492.818,38 telah ditindaklanjuti dengan Tuntas sebanyak 138 temuan (96,5%), dan 269 rekomendasi senilai Rp114.492.818,00 (85,12%) sedangkan sebanyak 5 (lima) temuan dan 11 rekomendasi senilai Rp20.000.000,00 masih status proses. Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Triwulan II Tahun 2024 melampaui target atau sebesar 96,07% dari target 80%, dengan

rincian capaian IKU pada Lampiran II.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memastikan seluruh rekomendasi hasil pengawasan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen PKRL, diharapkan Saudara dapat melakukan upaya percepatan penyelesaian tindak lanjut dimaksud yang masih status proses kepada Satker terkait sebagaimana Lampiran III, hingga tuntas dengan bukti dukung yang relevan dan memadai melalui aplikasi sidak.kkp.go.id.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih

a.n. Inspektur Jenderal
Inspektur I,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Teuku Nilwan

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Lampiran I. Tindak lanjut hasil pengawasan pada Juni 2024

No	No. LHP	Sisa Temuan per 24 Juni 2024			Tindak Lanjut			Sisa Per 28 Juni 2024		
		Temuan	Rekom	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Rekom	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Rekom	Nilai Keuangan (Rp)
1	T. 484/ITJ./HP.110/XII/2023 Hasil Audit Kinerja TA 2022-2023 pada Sekretariat Ditjen PKRL	2	2	25.639.000	-	-	5.639.000	2	2	20.000.000
2	T.119/ITJ.3/HP.470/III/2024 Hasil Evaluasi Pengelolaan BMN pada Ditjen PKRL Tahun 2024	5	12	-	2	3	-	3	9	-
3	T.36/ITJ.3/HP.550/I/2024 Hasil Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat	1	1	-	1	1	-	-	-	-
4	96/ITJ.1/HP.430/V/2024 Hasil Evaluasi Pelayanan Publik pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar	2	2	-	2	2	-	-	-	-
5	98/IJT.1/HP.410/V/2024 Hasil Evaluasi PNBK BKKPN Kupang	3	4	-	3	4	-	-	-	-
6.	100/ITJ.1/HP.430/V/2024 Hasil Evaluasi Pelayanan Publik pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang	1	4	-	1	4	-	-	-	-
7.	T.595/ITJ.3/HP.550/XII/2023 Hasil Pemantauan Kegiatan PUGAR Tahun 2023 di Kabupaten Cirebon	2	3	23.865.000	2	3	23.865.000	-	-	-
8	T.613/ITJ.3/HP.550/XII/2023 Hasil Pemantauan Kegiatan Sarana Niaga Pergaraman Tahun 2023 di Kab. Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan	2	9	-	2	9	-	-	-	-
9	T.82/ITJ.1/HP.320/V/2024 Hasil Reviu atas Usulan Revisi Penambahan Anggaran PHLN Oceans for Prosperity Project – Lautra Tahun 2024	2	2	-	2	2	-	-	-	-
	Jumlah	20	39	49.504.000	15	28	29.504.000	5	11	20.000.000

Lampiran II. Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PKRL Triwulan II 2024

No	No. LHP	Temuan Awal			Tindak Lanjut			Sisa Temuan		
		Temuan	Rekom	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Rekom	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Rekom	Nilai Keuangan (Rp)
A	Pusat									
	Sekretariat									
1	T.343/ITJ/HP.310/XI/2023 Hasil Evaluasi Implementasi Manajemen Risiko Tahun 2023 dan Asistensi Penyusunan Manajemen Risiko Tahun 2024 Lingkup Ditjen PKRL	5	6	-	5	6	-	-	-	-
2	T.396/ITJ/HP.470/XI/2023 Hasil Evaluasi Implementasi Manajemen Risiko Tahun 2023 dan Asistensi Penyusunan Manajemen Risiko Tahun 2024 Lingkup Ditjen PKRL	1	6	-	1	6	-	-	-	-
3	T.484/ITJ/HP.110/XII/2023 Hasil Audit Kinerja TA 2022-2023 pada Sekretariat Ditjen PKRL	2	2	25.639.000	-	-	5.639.000	2	2	20.000.000
4	T.495/ITJ/HP.320/XII/2023 Hasil Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen PKRL Triwulan IV TA 2023	2	2	-	2	2	-	-	-	-
5	T.479/ITJ/HP.380/XII/2023 Hasil Reviu Penyusunan Manajemen Risiko (MR) Tahun 2024 Lingkup Ditjen PKRL	1	2	-	1	2	-	-	-	-
6	T.120/ITJ/HP.550/II/2024 Hasil Pemantauan Ketaatan Upload Paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Ditjen PKRL TA 2024	1	2	-	1	2	-	-	-	-
7	T.128/ITJ/HP.330/III/2024 Hasil Reviu Laporan Kinerja Ditjen PKRL Tahun 2023	3	5	-	3	5	-	-	-	-
8	T.132/ITJ/HP.320/	2	3	-	2	3	-	-	-	-

	III/2024 Hasil Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen PKRL Triwulan I TA 2024									
9	T.119/ITJ.3/HP.470/III/2024 Hasil Evaluasi Pengelolaan BMN pada Ditjen PKRL Tahun 2024	5	12	-	2	3	-	3	9	-
Direktorat Jasa Kelautan										
1	T.388 /ITJ/HP.550 /XI/2023 Hasil Pemantauan Pemanfaatan LBC Pergaraman di Universitas Trunojoyo Madura, Kab. Bangkalan	1	1	-	1	1	-	-	-	
2	T.571/ITJ.3/HP.110/XI/2023 Hasil Probit Audit Pembangunan Sarana Niaga Pergaraman Tahun 2023 pada Direktorat Jasa Kelautan	6	11	-	6	11	-	-	-	
3	T.608/ITJ.3/HP.550/XII/2023 Hasil Pemantauan Kegiatan Sarana Niaga Garam Tahun 2023 di Kab. Jeneponto, Prov. Sulawesi Selatan	3	3	4.151.386,38	3	3	4.151.386,38	-	-	
4	T.79/ITJ.3/HP.550/II/2024 Hasil Pemantauan Pembangunan Kawasan Tunnel Garam TA 2023 pada Direktorat Jasa Kelautan	4	5	-	4	5		-	-	
5	T.80/ITJ.3/HP.550/II/2024 Pemantauan Pembangunan GGR Tahun 2023 di Kab. Bima, Prov. Nusa Tenggara Barat	3	3	161.969,00	3	3	161.969,00	-	-	
6	T.41/ITJ/KP.730/XII/2024 Hasil Evaluasi Pembangunan Sarana Produksi Biofarmakologi TA 2023 pada Direktorat Jasa Kelautan	2	3		2	3		-	-	
7	T.613/ITJ.3/HP.550/XII/2023 Hasil Pemantauan Kegiatan Sarana Niaga Pergaraman Tahun 2023 di Kab. Pangkajene	2	9	-	3	9	-	-	-	

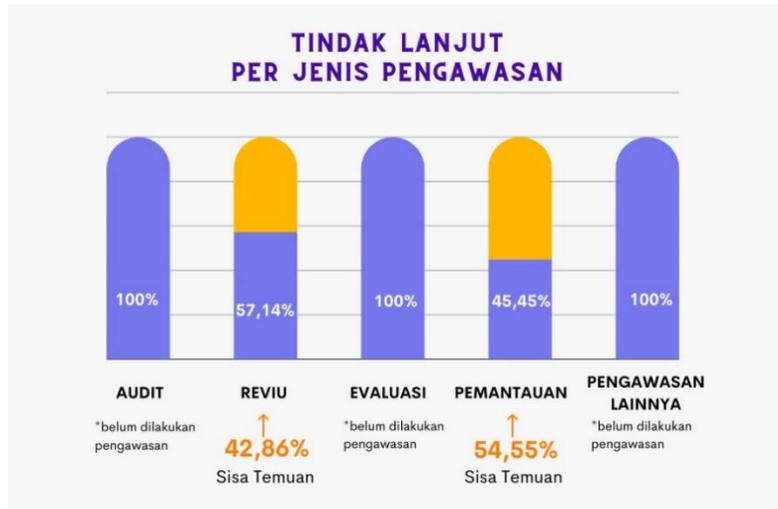
	Kepulauan, Sulawesi Selatan									
Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil										
1	T.466/ITJ.3/HP.430/IX/2023 Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan	4	10	-	4	10	-	-	-	-
2	T.489/ITJ.3/HP.350/IX/2023 Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2023 pada Dit. P4K	1	3	-	1	3	-	-	-	-
3	T.500/ITJ.3/HP.350/XII/2023 Hasil Reviu Addendum Kedua Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Pulau Nipa, Kota Batam	3	3	-	3	3	-	-	-	-
4	T.576/ITJ.3/HP.550/XI/2023 Hasil Reviu Peta Jalan Ekonomi Biru Pengelolaan Sampah Plastik di Laut	4	4	-	4	4	-	-	-	-
5	T.594/ITJ.3/HP.550/XII/2023 Hasil Pemantauan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh pada Dit.Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1	2	-	1	2	-	-	-	-
6	T.604/ITJ.3/HP.550/XII/2023 Hasil Pemantauan Pengadaan Sarana Usaha Ekonomi Produktif TA 2023 di Kabupaten Indramayu	1	1	-	1	1	-	-	-	-
7	T.501/ITJ/HP.110/XII/2023 Hasil Pemantauan Pengadaan Sarana Usaha Ekonomi Produksi TA 2023 Satker Direktorat P4K di Kab.	9	38	17.746.589,00	9	38	17.746.589,00	-	-	-
8	T.78/ITJ.3/HP.470/II/2024 Hasil Audit Kinerja TA 2023	6	7	-	6	7	-	-	-	-
Direktorat Perencanaan Ruang Laut										
1	T.444/ITJ/HP.350/XII/2023 Hasil Reviu Peta Jalan Ekonomi Biru Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Dit. Perencanaan Ruang Laut	3	6	-	3	6	-	-	-	-
Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan										
1	T.562/ITJ.3/HP.350/X/2023 Hasil Reviu Peta Jalan Ekonomi Biru Perluasan Kawasan Konservasi Laut pada Direktorat KKHL	3	5	-	3	5	-	-	-	-
B	DEKON / TP									
Jawa Barat										
1	T.547/ITJ.3/HP.550/X/2023 Hasil Pemantauan Kegiatan Pengembangan	2	4	-	2	4	-	-	-	-

	Usaha Garam Rakyat (PUGaR) Tahun 2023 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Cirebon									
2	T.595/ITJ.3/HP.550/XII/2023 Hasil Pemantauan Kegiatan PUGaR Tahun 2023 di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat	2	3	23.865.000,00	2	3	23.865.000,00	-	-	-
3	T.36/ITJ.3/HP.550/I/2024 Hasil Audit Kinerja TA 2022-2023 pada Sekretariat Ditjen PKRL	5	10		5	10		-	-	-
Jawa Timur										
1	T.575 /ITJ.3/ HP.410/XI/2023 Hasil Evaluasi Kegiatan TP PUGaR TA 2023 pada Satker Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan	4	14	4.967.066,00	4	14	4.4967.066,00			
Jawa Tengah										
1	T.37/ITJ.3/HP.550/I/2024 Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023 pada Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan	2	7	-	2	7	-	-	-	-
Sulawesi Selatan										
1	T.555/ITJ.3/HP.550/XI/2023 Hasil Pemantauan Kegiatan PUGaR Tahun 2023 di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulsel	3	5	31.360,00	3	5	31.360,00	-	-	-
2	T.558/ITJ.3/HP.550/XI/2023 Hasil Pemantauan Kegiatan PuGAR Tahun 2023 di Kabupaten Pangkajene Kepulauan	3	6	1.380.000	3	6	1.380.000,00	-	-	-
3	T.607/ITJ.3/HP.550/XII/2023 Hasil Pemantauan Kegiatan PUGaR Tahun 2023 di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan	4	8	-	4	8	-	-	-	-
4	T.612/ITJ.3/HP.550/XII/2023 Hasil Pemantauan TP PUGaR Tahun 2023 di Kab. Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan	4	9	2.354.480,00	4	9	2.354.480,00	-	-	-
Nusa Tenggara Barat										
1	T.549 /ITJ.3/HP.550 /X/2023 Hasil Pemantauan Kegiatan PUGaR Tahun 2023 di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat	6	6	954.000,00	6	6	954.000,00	-	-	-
C										
UPT										
BPSPL Padang										

1	T.44/ITJ.3/HP.550/II/2024 Hasil Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023 pada BPSPL Padang	6	6	5.273.500,00	6	6	5.273.500,00	-	-	-
LPSPL Sorong										
1	T.62/ITJ.3/HP.550/II/2024 Hasil Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023 pada LPSPL Sorong	3	7	3.218.080,00	3	7	3.218.080	-	-	-
LKKPN Pekanbaru										
1	T.127/ITJ/HP.110/ III/2024 Hasil Audit Kinerja TA 2023 - 2024 LKKPN Pekanbaru	8	11	2.687.628,00	8	11	2.687.628,00	-	-	-
BPSPL Pontianak										
1	T.133/ITJ.3/HP.110/III/ 2024 Hasil Audit Kinerja TA 2023-2024 Pada BPSPL Pontianak	5	6	11.674.100,00	5	6	11.674.100,00	-	-	-
Jumlah		143	280	134.492.818,38	138	269	114.492.818,38	5	11	20.000.000,00

Lampiran III. Daftar LHP yang Masih Status Proses Tindak Lanjut

No	No. LHP	Sisa Temuan per 24 Juni 2024			Tindak Lanjut			Sisa Per 28 Juni 2024		
		Temuan	Rekom	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Rekom	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Rekom	Nilai Keuangan (Rp)
1	T. 484/ITJ /HP.110/XII/2023 Hasil Audit Kinerja TA 2022-2023 pada Sekretariat Ditjen PKRL	2	2	25.639.000	-	-	5.639.000	2	2	20.000.000
2	T.119/ITJ.3/HP.470/III/2024 Hasil Evaluasi Pengelolaan BMN pada Ditjen PKRL Tahun 2024	5	12	-	2	3	-	3	9	-
	Jumlah	7	14	25.639.000	2	3	5.639.000	5	11	20.000.000



3. Rekap Jenis Temuan berdasarkan Hasil Pengawasan

No	Unit Kerja Inspektorat	Unit Es. 1 Mitra	Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan									Kelemahan SPI				Ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E)					Jumlah
			Jml Temuan	Kerugian Negara	Potensi kerugian Negara	Kekurangan penerimaan negara	Administrasi	Indikasi Tindak Pidana	Lainnya	Jml Temuan	Akuntansi dan Pelaporan	Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	Struktur SPI	Jml Temuan	Ketidakhematan	Ketidakefisienan	Ketidakefektifan	Ketidakekonomisan			
1	Inspektorat I	BPPSDMK P	1	-	-	-	-	-	1	0			18	14	4						19

4. Rekap Data SiRUP

Satker	Kode	Nama Program	Pagu Program	Pagu Pengadaan	Pagu Terumumkan	Selisih	Persentase
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	13,394,430,000	13,394,430,000	13,394,430,000	0	100%
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	WA	Program Dukungan Manajemen	4,820,944,000	4,820,944,000	4,820,944,000	0	100%
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2,603,336,000	2,603,336,000	2,603,336,000	0	100%
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	WA	Program Dukungan Manajemen	3,803,567,000	3,803,567,000	3,803,567,000	0	100%
BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN BRPBATPP	DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	11,938,945,000	11,938,945,000	11,938,945,000	0	100%
BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN BRPBATPP	WA	Program Dukungan Manajemen	8,230,004,000	8,230,004,000	8,230,004,000	0	100%

BALAI RISET PERIKANAN LAUT BRPL	WA	Program Dukungan Manajemen	2,461,913,000	2,461,913,000	2,461,913,000	0	100%
BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN BBRSEKP	HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	100%
BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN BBRSEKP	WA	Program Dukungan Manajemen	3,300,000,000	3,300,000,000	3,300,000,000	0	100%
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA	DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	6,809,350,000	6,809,350,000	6,809,350,000	0	100%
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA	WA	Program Dukungan Manajemen	2,646,104,000	2,646,104,000	2,646,104,000	0	100%
BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN BRPBAP3	DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	14,370,060,000	14,370,060,000	14,370,060,000	0	100%
BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN BRPBAP3	WA	Program Dukungan Manajemen	11,406,041,000	11,406,041,000	11,406,041,000	0	100%

POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	5,494,796,000	5,494,796,000	5,494,796,000	0	100%
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	WA	Program Dukungan Manajemen	4,350,516,000	4,350,516,000	4,350,516,000	0	100%
BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN BRPSDI	WA	Program Dukungan Manajemen	4,017,900,000	4,017,900,000	4,017,900,000	0	100%
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	9,981,206,000	9,981,206,000	9,981,206,000	0	100%
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	WA	Program Dukungan Manajemen	4,737,181,000	4,737,181,000	4,737,181,000	0	100%
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	15,316,480,000	15,316,480,000	15,316,480,000	0	100%
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	WA	Program Dukungan Manajemen	6,610,311,000	6,610,311,000	6,610,311,000	0	100%
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	17,058,481,000	17,058,481,000	17,058,481,000	0	100%

POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	WA	Program Dukungan Manajemen	5,861,551,000	5,861,551,000	5,861,551,000	0	100%
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	13,782,460,000	13,782,460,000	13,782,460,000	0	100%
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	WA	Program Dukungan Manajemen	3,936,336,000	3,936,336,000	3,936,336,000	0	100%
BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN BBRP2BKP	WA	Program Dukungan Manajemen	11,200,000,000	11,200,000,000	11,200,000,000	0	100%
BALAI RISET PEMULIAAN IKAN BRPI	WA	Program Dukungan Manajemen	6,497,522,000	6,497,522,000	6,497,522,000	0	100%
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI	DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	5,338,987,000	5,338,987,000	5,338,987,000	0	100%
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI	WA	Program Dukungan Manajemen	2,707,853,000	2,707,853,000	2,707,853,000	0	100%
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN	DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	5,068,217,000	5,068,217,000	5,068,217,000	0	100%

POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN	WA	Program Dukungan Manajemen	2,814,701,000	2,814,701,000	2,814,701,000	0	100%
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	19,278,896,000	19,278,896,000	19,278,896,000	0	100%
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	WA	Program Dukungan Manajemen	5,954,633,000	5,954,633,000	5,954,633,000	0	100%
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG	DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2,793,124,000	2,793,124,000	2,793,124,000	0	100%
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG	WA	Program Dukungan Manajemen	1,963,582,000	1,963,582,000	1,963,582,000	0	100%
BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN BBRBLPP	DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	13,607,540,000	13,607,540,000	13,607,540,000	0	100%
BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN BBRBLPP	WA	Program Dukungan Manajemen	10,006,135,000	10,006,135,000	10,006,135,000	0	100%
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN	DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	10,380,600,000	10,380,600,000	10,380,600,000	0	100%

PENYULUHAN PERIKANAN BRPPUPP							
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN BRPPUPP	WA	Program Dukungan Manajemen	8,836,065,000	8,836,065,000	8,836,065,000	0	100%
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	22,155,372,000	22,155,372,000	22,155,372,000	0	100%
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	WA	Program Dukungan Manajemen	4,014,309,000	4,014,309,000	4,014,309,000	0	100%
SEKRETARIAT BADAN RISET PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	7,612,000,000	7,612,000,000	7,612,000,000	0	100%
SEKRETARIAT BADAN RISET PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	WA	Program Dukungan Manajemen	72,697,079,000	72,697,079,000	72,697,079,000	0	100%

POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN	DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	72,294,837,000	72,294,837,000	72,294,837,000	0	100%
POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN	WA	Program Dukungan Manajemen	13,302,423,000	13,302,423,000	13,302,423,000	0	100%
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	8,616,286,000	8,616,286,000	8,616,286,000	0	100%
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	WA	Program Dukungan Manajemen	6,048,244,000	6,048,244,000	6,048,244,000	0	100%
AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2,631,019,000	2,631,019,000	2,631,019,000	0	100%
AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	WA	Program Dukungan Manajemen	2,175,754,000	2,175,754,000	2,175,754,000	0	100%
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	25,716,496,000	25,716,496,000	25,716,496,000	0	100%
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	WA	Program Dukungan Manajemen	5,575,466,000	5,575,466,000	5,575,466,000	0	100%
BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS BRBIH	WA	Program Dukungan Manajemen	7,169,997,000	7,169,997,000	7,169,997,000	0	100%

BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	45,521,886,000	45,521,886,000	45,521,886,000	0	100%
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	WA	Program Dukungan Manajemen	6,479,356,000	6,479,356,000	6,479,356,000	0	100%
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	14,008,126,000	14,008,126,000	14,008,126,000	0	100%
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	WA	Program Dukungan Manajemen	5,714,772,000	5,714,772,000	5,714,772,000	0	100%
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAEHERU	DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	5,039,981,000	5,039,981,000	5,039,981,000	0	100%
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAEHERU	WA	Program Dukungan Manajemen	2,966,399,000	2,966,399,000	2,966,399,000	0	100%
PUSAT RISET PERIKANAN PUSRISKAN	WA	Program Dukungan Manajemen	18,028,525,000	18,028,525,000	18,028,525,000	0	100%
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	5,276,928,000	5,276,928,000	5,276,928,000	0	100%

SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	WA	Program Dukungan Manajemen	2,788,116,000	2,788,116,000	2,788,116,000	0	100%
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI	WA	Program Dukungan Manajemen	8,996,000,000	8,996,000,000	8,996,000,000	0	100%
			2,561,653,308,000	2,535,659,925,000	2,535,659,925,000		

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR 212/ITJ.1/TU.210/X/2024

Yth : Inspektur Jenderal
Dari : Inspektur I
Hal : Hasil Monitoring Pelaksanaan Kegiatan dan Perkembangan
Capaian Kinerja Inspektorat I s.d. Triwulan III Tahun 2024
Lampiran : Satu berkas
Tanggal : 14 Oktober 2024

Dalam rangka pengendalian pencapaian target kinerja Tahun 2024 serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengawasan pada mitra kerja Inspektorat I, bersama ini kami sampaikan hasil monitoring pelaksanaan kegiatan dan perkembangan capaian kinerja periode Triwulan III Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Inspektorat I bertanggung jawab untuk mewujudkan 3 Sasaran Kegiatan (SK) dengan 13 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Perkembangan hingga Triwulan III, jumlah IKK yang dilakukan pengukuran sebanyak 5 (lima) indikator, dengan nilai rata-rata capaian mencapai 111,11 berdasarkan aplikasi manajemen kinerja (*kinerjaku.kkp.go.id*);
2. Adapun rincian capaian 5 (lima) IKK terhadap target Triwulan III Tahun 2024, yaitu:
 - a. IK-1 "Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I" dengan realisasi sebesar 0,07% dari target $\leq 0,5\%$ atau capaian sebesar 186%. Perhitungan capaian dengan membandingkan antara nilai temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan TA 2023 dengan realisasi anggaran TA 2023 pada Mitra Inspektorat I, pencapaian target pada IK-1 dilakukan melalui pelaksanaan pengawasan pada Mitra Inspektorat I berdasarkan penilaian resiko.
 - b. IK-4 "Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat I", dengan realisasi sebesar 88,53 dari target 83 atau capaian sebesar 106,66%. Nilai capaian yaitu nilai rata-rata dari hasil evaluasi mandiri pada Mitra Inspektorat I.

tercapainya target IK-4 yaitu melalui pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Mitra Inspektorat I.

- c. IK-8 “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat I”, realisasi IK-8 sebesar 97,07% dari target 80% atau capaian sebesar 121,34%. Tercapainya target pada IK-8 dilakukan melalui pelaksanaan pemantauan terhadap perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan secara periodik terhadap Mitra Inspektorat I.
- d. IK-12 “Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat I” dengan realisasi 100% dari target 100% atau capaian sebesar 100%. Dalam mencapai target tersebut sebagaimana ditetapkan didalam manual IKU level 2, Inspektorat I telah melakukan beberapa kegiatan, antara lain:
 - 1) Penyampaian data kinerja pada aplikasi pengelolaan kinerja KKP s.d. TW II 2024.
 - 2) Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan II 2024.
 - 3) Pengisian data kinerja anggaran pada aplikasi e-monev BAPPENAS s.d. TW III 2024.
- e. IK-13 “Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat I” dengan realisasi 100% dari target 100% atau capaian sebesar 100%. Adapun hal yang telah dilakukan dalam pencapaian target tersebut adalah:
 - 1) Penyampaian rencana kegiatan dan anggaran Triwulan II Tahun 2024, dan
 - 2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan Triwulan II Tahun 2024.

Capaian kinerja Inspektorat I pada periode Triwulan III Tahun 2024 secara rinci disampaikan pada **Lampiran 2**.

3. Dengan capaian IKU tersebut, nilai kinerja organisasi Inspektorat I pada periode Triwulan III Tahun 2024 mendapat nilai “Istimewa” yang ditunjukkan dengan Skor Kinerja pada aplikasi manajemen kinerja (kinerjaku) sebesar 111,11%. Nilai tersebut mengalami kenaikan dari capaian kinerja pada periode

sebelumnya/Triwulan II Tahun 2024 yaitu 106,93%. Adapun perbandingan capaian kinerja terhadap Triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Perbandingan Capaian Kinerja

No	Indikator Kinerja	Capaian TW II	Capaian TW III
1.	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I	-	186%
2.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat I	-	106,66%
3.	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat I	120,31%	121,34%
4.	Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat I	100%	100%
5.	Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat I	100%	100%

4. Kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan terhadap mitra Inspektorat I untuk mencapai target kinerja pada Triwulan III Tahun 2024 antara lain:
- a. Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada Biro Perencanaan, Biro Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri dan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - b. Evaluasi kinerja UKPBJ pada Biro Umum dan PBJ Tahun 2024.
 - c. Reviu Laporan Keuangan (LK) dan Barang Milik Negara (BMN) Semester I Tahun 2024 pada Setjen dan Ditjen PKRL.
 - d. Evaluasi implementasi SAKIP tahun 2023 lingkup Setjen dan Ditjen PKRL.
 - e. Evaluasi pelayanan publik pada LKKPN Pekanbaru.
 - f. Reviu pagu indikatif Tahun 2025 lingkup Setjen dan Ditjen PKRL.

- g. Evaluasi implementasi MR Tahun 2023 pada Setjen dan Ditjen PKRL.
- h. Evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tata kelola perijinan sektor kelautan dan perikanan TA 2024 pada Direktorat Penataan Ruang Laut, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jasa Kelautan dan Direktorat Konservasi dan Keragaman Hayati Laut.
- i. Probit audit pelaksanaan pembangunan Dermaga Apung Tahun 2024 di Kabupaten Sumbawa.
- j. Reviu Maturitas Penyelenggaraan SPIP 2023-2024 Lingkup Setjen dan Ditjen PKRL.
- k. Evaluasi Pengelolaan BMN TA 2023 -2024 Pada Biro Umum dan PBJ.
- l. Evaluasi Pelayanan Publik pada Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan dan Direktorat Penataan Ruang Laut.
- m. Reviu Kegiatan Penyusunan dan Penelaahan RKBMN Tahun 2026 Lingkup Ditjen PKRL.
- n. Reviu penyerapan anggaran dan realisasi PBJ Triwulan III Tahun 2024 pada Setjen dan Ditjen PKRL.
- o. Pemantauan Pembangunan Gedung Garam Rakyat (GGR) TA 2024.
- p. Evaluasi Dukungan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem TA 2023 dan 2024.
- q. Pemantauan tindak lanjut pengawasan Itjen Triwulan III TA 2024 pada Setjen dan Ditjen PKRL.

Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PKPT Inspektorat I pada Triwulan III Tahun 2024, dapat disampaikan bahwa dari 31 rencana kegiatan pengawasan yang telah ditetapkan didalam PKPT, telah terealisasi sebanyak 25 kegiatan pengawasan atau capaian sebesar 80,65%. Beberapa kegiatan yang belum terlaksana sesuai PKPT adalah:

- a. Evaluasi Pelayanan Publik pada Direktorat P4K.
- b. Evaluasi Pelayanan Publik pada Direktorat Jasa Kelautan.
- c. Pemantauan Pelaksanaan Kampung Nelayan Modern pada Ditjen PKRL.
- d. Pemantauan Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik di Laut.
- e. Pemantauan Kinerja PMO Hibah JICA.
- f. Evaluasi Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah KKP Tahun 2023.

Tidak terlaksananya kegiatan pengawasan tersebut dikarenakan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Adanya perubahan kebijakan pelaksanaan pengawasan dari sebelumnya kegiatan evaluasi pelayanan publik pada Direktorat P4K dan Jasa Kelautan berubah menjadi evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tata kelola perijinan sektor kelautan dan perikanan TA 2024, sehingga tujuan pengawasan lebih luas dan lebih kompleks.
- b. Hasil koordinasi dengan Timja Restorasi pada Direktorat P4K diketahui tidak terdapat kegiatan Ditjen PKRL yang mendukung pelaksanaan Kampung Nelayan Modern (Kalamo).
- c. Adanya perubahan kebijakan pengawasan semula kegiatan pemantauan rencana aksi pengelolaan sampah plastik di laut, berubah menjadi kegiatan evaluasi program prioritas ekonomi biru pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan pengendalian sampah plastik di laut pada Direktorat P4K.
- d. Kegiatan pemantauan kinerja PMO Hibah JICA telah tuntas dilaksanakan pada Triwulan II.
- e. Pelaksanaan evaluasi kegiatan prioritas/Bantuan Pemerintah KKP Tahun 2023 masih dalam proses pembahasan secara teknis yang dikoordinasikan oleh Inspektorat III selaku penanggungjawab kegiatan.

Terhadap perubahan pelaksanaan pengawasan Inspektur I telah mengusulkan perubahan PKPT melalui memorandum Nomor 164/ITJ.1/TU.210/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang usulan revisi PKPT Inspektorat I Tahun 2024.

Selain hal tersebut, Inspektorat I juga melaksanakan pengawasan terhadap mitra kerja melalui kegiatan kegiatan non PKPT dan non pengawasan yaitu antara lain:

- a. Reviu Tabel A Identifikasi Risiko Serta Kecukupan Rancangan Pengendaliannya pada Satuan Kerja Lingkup Setjen.
- b. Reviu Laporan Keuangan (BUN 9903) BLU LPMUKP Semester I TA 2024.
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP Tahun 2024.
- d. Reviu revisi anggaran percepatan PHLN Oceans for Prosperity Project - LAUTRA lingkup Ditjen PKRL TA 2024.

- e. Reviu Usulan Penghapusan BMN Berupa Gedung dan Bangunan Pada Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
 - f. Reviu Usulan Penghapusan BMN Karena Sebab Lain Pada Biro Umum dan PBJ.
 - g. Pendampingan Pengelolaan Barang Muatan Kapal Tenggelam Serta Pembangunan dan Pengelolaan Gedung BMKT.
 - h. Rekonsiliasi penjaminan kualitas maturitas SPIP terintegrasi tahun 2024 di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - i. Evaluasi pengelolaan Barang Milik Negara dan pemantauan pertanggungjawaban keuangan TA 2024 pada LPSPL Serang.
 - j. Pemantauan rehabilitasi mangrove (penyulaman) dan tracking mangrove di Kab. Kebumen.
 - k. Pemantauan pekerjaan renovasi ruang kerja Biro Keuangan Tahun 2024 pada Biro Umum dan PBJ.
 - l. Reviu repeat order ke-2 paket pekerjaan jasa konsultasi project management consultan tahun 2024 pada Biro Perencanaan.
5. Hasil pelaksanaan pengawasan terhadap mitra Inspektorat I selama periode Triwulan III telah disampaikan kepada Sekretaris Itjen melalui memorandum Nomor 205/ITJ.1/TU.140/VII/2024 perihal Ihtisar Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2024 lingkup Sekretariat Jenderal dan memorandum Nomor B.299/ITJ.1/TU.140/X/2024 perihal Ihtisar Hasil Pengawasan Inspektorat I Triwulan III Tahun 2024 lingkup Ditjen PKRL, sebagaimana terlampir.
6. Dalam rangka mencapai target IKU, Inspektorat I telah menetapkan rencana aksi pencapaian IKU dari 3 Sasaran Kegiatan (SK) dengan 13 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan capaian sebesar 82,98% sesuai memorandum Inspektur I Nomor 202/ITJ.1/TU.210/X/2024 perihal Penyampaian Capaian Rencana Aksi Terhadap Pencapaian Target Kinerja Periode Triwulan III Tahun 2024.
7. Dari sisi kinerja keuangan, dapat disampaikan bahwa realisasi anggaran pada Triwulan III sebesar Rp1.351.882.662 atau sebesar 21,47% dari pagu Rp6.296.347.000,00, jika dibandingkan dengan target Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan III sebesar Rp1.970.410.450 maka terdapat deviasi negatif sebesar 31,39%, hal ini melebihi dari yang dipersyaratkan yaitu sebesar $\pm 5\%$. Adapun realisasi keuangan sampai dengan September 2024

sebesar Rp3.895.807.415 atau sebesar 61,87% dari pagu anggaran, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.400.539.585 atau 38,13%.

8. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 tidak terdapat kendala dalam pencapaian target kinerja, hal ini terlihat dari realisasi dan capaian kinerja yang melebihi target. Namun demikian untuk menjaga kualitas pencapaian target kinerja ke depan, khususnya periode Triwulan IV sebagai periode akhir tahun 2024 diperlukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dan optimalisasi penyerapan anggaran.
9. Laporan hasil monitoring pelaksanaan kegiatan dan perkembangan capaian kinerja Inspektorat I s.d. Triwulan II Tahun 2024 diketahui bahwa seluruh target kinerja telah tercapai dan tidak ditemukan kendala, sehingga tidak terdapat tindak lanjut/rencana aksi perbaikan terhadap capaian kinerja Triwulan II. Adapun langkah yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target kinerja Triwulan II Tahun 2024 melalui rapat persiapan pengelolaan kinerja Triwulan II dan penilaian mandiri SAKIP lingkup Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2024 sesuai memorandum Nomor 1086/ITJ.0/TU.140/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Teuku Nilwan

Tembusan:
Sekretaris Inspektorat Jenderal

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Inspektorat I

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT I**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK. 1	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah lingkup Mitra Inspektorat I	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I (%)	≤ 0,5
		2	Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat I (Nilai)	3,3
		3	Unit Kerja Mitra Inspektorat I Berpredikat Menuju WBK (Jumlah Akumulasi)	13 Unit
		4	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat I (Nilai)	83 (A)
SK. 2	Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Efektif lingkup Inspektorat I	5	Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat I (%)	82
		6	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat I	82
		7	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat I	82
		8	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat I (%)	80
		9	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat I (Rekomendasi)	4
		10	Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Inspektorat I (%)	89
		11	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat I (%)	80
SK. 3	Dukungan Manajemen Pengawasan yang Akuntabel lingkup Inspektorat I	12	Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat I (%)	100
		13	Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat I (%)	100

Lampiran 2. Tabel Capaian Kinerja Inspektorat I Periode Triwulan III Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja TW III			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Pengendalian dan Pengawasan Internal Yang Bernilai Tambah Lingkup Mitra Inspektorat I	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I	≤ 0,5%	0,07%	186%	tercapai
		Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat I	82,50	88,53	106,66%	tercapai
2.	Tata Kelola Pengawasan Intern Yang Akuntabel dan Efektif Lingkup Inspektorat I	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat	80%	97,07%	121,34%	tercapai
3.	Dukungan Manajemen Pengawasan yang Handal lingkup Inspektorat I	Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat Terkelolanya anggaran kegiatan secara tertib dan akuntabel lingkup Inspektorat	100%	100%	100%	tercapai
			100%	100%	100%	tercapai

Lampiran 3. Tabel Perhitungan Indikator Kinerja Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I

Eselon I	Nilai Temuan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase (%)
Setjen	571.218.613	631.793.931.033	0,09
Ditjen PKRL	175.999.847	399.297.824.951	0,04
Jumlah	747.218.460	1.031.091.755.984	0,07

Lampiran 4. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat I

Eselon I	Hasil Evaluasi Mandiri AKIP
Setjen	87,98
Ditjen PKRL	89,07
Nilai Rata-rata	88,53

Lampiran 5. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat I

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR 203/ITJ.1/TU.140/X/2024

Yth. : Inspektur Jenderal
Dari : Inspektur I
Hal : Laporan Perkembangan Status Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen pada Mitra Inspektorat I Tahun 2024 (s.d Triwulan III)
Lampiran : Satu Berkas
Tanggal : 8 Oktober 2024

Menindaklanjuti Peraturan Inspektur Jenderal KKP Nomor 37 Tahun 2024 Pasal 55 Ayat (4) yang mengatur bahwa Pelaporan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan (TLRHP) Itjen dilakukan oleh Inspektur dengan menyusun dan menyampaikan laporan status TLRHP sesuai bidang tugas pengawasannya kepada Inspektur Jenderal setiap triwulan dengan tembusan kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal, dengan ini disampaikan Laporan Perkembangan Status Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen pada Mitra Inspektorat I, yaitu Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Direktorat Pengelolaan Kelautan dan Perikanan (Ditjen PKRL) s.d Triwulan III Tahun 2024.

Berdasarkan data rekapitulasi penyelesaian temuan hasil pengawasan Itjen KKP lingkup Setjen dan Ditjen PKRL, Capaian IKU Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat I s.d. Triwulan III Tahun 2024 sebesar 97,07% dari target 80% sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Teuku Nilwan

Tembusan:
Sekretaris Inspektorat Jenderal

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN

Lampiran 1. Perhitungan Capaian IKU: Presentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat I Triwulan III Tahun 2024

No	Eselon I	LHP	Temuan Awal			Tindak Lanjut			Sisa Temuan		
			Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan	Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan (Rp)
1	Setjen	30	81	130	120.551.753,00	81	130	120.551.753,00	-	-	-
2	Ditjen PKRL	47	163	313	134.492.818,38	152	300	134.492.818,38	11	13	-
	Jumlah	77	240	443	255.044.571,38	233	430	255.044.571,38	11	13	-
Capaian IKU = (430/443) x 100% = 97,07%											

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL**

MEMORANDUM
NOMOR 202/ITJ.1/TU.210/X/2024

Yth. : Sekretaris Itjen
Dari : Inspektur I
Hal : Penyampaian Capaian Rencana Aksi Terhadap Pencapaian Target
Kinerja Periode Triwulan III Tahun 2024
Lampiran : Satu Berkas
Tanggal : 8 Oktober 2024

Dalam rangka pencapaian target kinerja periode Triwulan III Tahun 2024, Inspektorat I telah menetapkan indikator-indikator yang tertuang didalam Rencana Aksi. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan, bersama ini kami sampaikan bahwa terdapat 47 kegiatan yang menjadi target rencana aksi pada periode Triwulan III Tahun 2024, dan telah terealisasi sebesar 82,98% atau sebesar 39 kegiatan telah dilaksanakan, secara terperinci kami sampaikan matrik capaian rencana aksi sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Teuku Nilwan

**CAPAIAN RENCANA AKSI TERHADAP PENCAPAIAN TARGET KINERJA
PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2024**

Unit Kerja : Inspektoral I
Anggaran : Rp6.296.347.000

No	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Satuan	Uraian		Permasalahan	Rencana Aksi	Keterangan
					Target Realisasi	Prosentase (%)			
1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektoral I (%)	≤0,5	<ol style="list-style-type: none"> 1 Reviu terhadap laporan keuangan Mitra Inspektoral I 2 Reviu PA dan PBJ Mitra Inspektoral I 3 Pelaksanaan Audit Kinerja pada Mitra Inspektoral I 4 Proby Audit Persiapan/Pencanaan/Pelaksanaan pada Mitra Inspektoral I 5 Pemantauan Kinerja PMO Hibah JICA 6 Evaluasi PNBP pada Mitra Inspektoral I 7 Pemantauan Kinerja BLU di LPMUKP 8 Reviu RKA-K/L Tahun Pagu Indikatif 2025 pada Mitra Inspektoral I 	Kegiatan	2	2	100		<p>Kegiatan reviu laporan keuangan telah dilaksanakan, sesuai Surat Tugas Nomor: 1. B.3071.1/ITJ.1/KP.440/VIII/2024 pada Dijen PKRL;</p> <p>2. B.3625.1/ITJ.1/KP.440/VIII/2024 pada Kegiatan reviu PA dan PBJ telah dilaksanakan, sesuai Surat Tugas Nomor: 1. B.173/ITJ.1/KP.440/IX/2024 pada Setjen; 2. B.174/ITJ.1/KP.440/IX/2024 pada Setjen.</p>
				Kegiatan	2	2	100		
				Kegiatan	1			Diusulkan untuk direvisi sesuai memorandum Nomor 164/ITJ.1/ITJ.210/VIII/2024	
				Kegiatan	3	2	67		Kegiatan proby audit telah dilaksanakan melalui sesuai Surat Tugas Nomor: 1. B.3227.1/ITJ.1/KP.440/VIII/2024 pada pelaksanaan Pembangunan Dermaga Apung TA 2024 di Kabupaten Sumbawa; 2. B.246/ITJ.1/KP.440/IX/2024 pada Proby Audit Pelaksanaan Pembangunan Gedung Layanan LKKN Pekanbaru di Bungus TA 2024. Prn. Sumatera Barat;
				Kegiatan	1			Diusulkan untuk direvisi sesuai memorandum Nomor 164/ITJ.1/ITJ.210/VIII/2024	
				Kegiatan	4	4	100		Kegiatan evaluasi PNBP telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Nomor: 1. B.3062.1/ITJ.1/KP.440/VIII/2024 pada Dit. PRL; 2. B.3063.1/ITJ.1/KP.440/VIII/2024 pada Dit. P3K; 3. B.3064.1/ITJ.1/KP.440/VIII/2024 pada Dit. Jaskel; 4. B.3065.1/ITJ.1/KP.440/VIII/2024 pada Dit. KKH
				Kegiatan	1	1	100		Pemantauan Kinerja BLU di LPMUKP telah dilaksanakan sesuai surat tugas B.160/ITJ.1/KP.440/IX/2024
				Kegiatan	2	2	100		Kegiatan reviu pagu indikatif pada mitra telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Nomor: 1. B.3620.1/ITJ.1/KP.440/VIII/2024 pada Setjen 2. B.3074.1/ITJ.1/KP.440/VIII/2024 pada

2	Unit kerja Mitra Inspektorat I berpredikat menuju WBK (jumlah akumulasi)	20 Unit	9	Pemantauan Pembangunan ZI Menuju WBK pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan	3	3	100	Kegiatan pemantauan Pembangunan ZI telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Nomor: 1. B.3499.1/ITJ.1/KP.440/VI/2024 pada Biro Perencanaan 2. B.3624.1/ITJ.1/KP.440/VI/2024 pada Biro HKLN 3. B.3503.1/ITJ.1/KP.440/VI/2024 pada Biro SDMAO
3	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat I (Nilai)	82,5 (A)	10	Evaluasi Implementasi SAKIP 2024 pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan	2	2	100	Kegiatan evaluasi implementasi AKIP telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Nomor: 1. B.3621.1/ITJ.1/KP.440/VI/2024 pada Sejen 2. B.3073.1/ITJ.1/KP.440/VI/2024 pada
4	Tingkat efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Mitra Inspektorat I (%)	82	11	Evaluasi Dukungan Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan	1	1	100	Kegiatan Evaluasi Dukungan Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Nomor B.201/ITJ.1/KP.440/IX/2024 pada Sejen
			12	Evaluasi Pelayanan Publik pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan	6	4	66,67	Kegiatan Evaluasi Pelayanan Publik pada Mitra Inspektorat I telah dilaksanakan sesuai surat tugas: 1. B.3061.1/ITJ.1/KP.440/VI/2024 pada LKKPN Pekanbaru; 2. B.3033.1/ITJ.1/KP.440/VI/2024 pada Dit. KKEB; 3. B.3094.1/ITJ.1/KP.440/VI/2024 pada Dit. PRL; 4. B.3857.2/ITJ.1/KP.440/VI/2024 pada Ditjen PKRL;
			13	Pengawasan Persiapan Kampung Nelayan Modern pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan	1			Diusulkan untuk direvisi sesuai memorandum Nomor 164/ITJ.1/TU.210/III/2024 tanggal 12 Agustus 2024
			14	Pemantauan Rencana Aksi Pengelabuan Sampah Plastik di Laut	Kegiatan	1			Diusulkan untuk direvisi sesuai memorandum Nomor 164/ITJ.1/TU.210/III/2024 tanggal 12 Agustus 2024
			15	Evaluasi Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Kegiatan	1	1	100	Diusulkan untuk direvisi sesuai memorandum Nomor 164/ITJ.1/TU.210/III/2024 tanggal 12 Agustus 2024
			16	Evaluasi Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah KKP Tahun 2023	Kegiatan	1			Kegiatan Evaluasi Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem telah dilaksanakan sesuai surat tugas B.201/ITJ.1/KP.440/IX/2024 pada Ditjen

5	Tingkat efektivitas pengawasan pengelolaan BMN lingkup Mitra Inspektorat I	82	17 Evaluasi Pengelolaan BMN pada Mitra Inspektorat I 18 Reviu RKBMN 2026 pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan Kegiatan	1 2	1 2	100 100	Kegiatan Evaluasi Pengelolaan BMN telah dilaksanakan sesuai surat tugas nomor B.3626.1/IT.J.1/KP.440/III/2024 pada Setjen Melaksanakan Reviu RKBMN 2026 telah dilaksanakan sesuai surat tugas nomor: 1. B.205/IT.J.1/KP.440/IX/2024 pada Setjen; 2. B.4835.1/IT.J.1/KP.440/III/2024 pada Ditjen PKRRL
6	Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Mitra Inspektorat I (%)	80	19 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Ijten pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan	2	2	100	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Ijten pada Mitra Inspektorat I telah dilaksanakan sesuai surat tugas nomor: 1. B.203/IT.J.1/KP.440/IX/2024 pada Setjen; 2. B.204/IT.J.1/KP.440/IX/2024 pada Ditjen PKRRL
7	Prosentase tingkat kepatuhan pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat I (%)	80	20 Monitoring Pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat	Kegiatan	1	1	100	Telah dilaksanakan oleh Inspektorat V sebagai pengawas internal
8	Tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan kinerja lingkup Inspektorat	100	21 Pengisian data capaian kinerja pada aplikasi pengelolaan kinerja KKP 22 Pengukuran Capaian Kinerja 23 Pelaporan Kinerja Interim 24 Pengisian aplikasi e-monev Bappenas	Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan	1 1 1 3	1 1 1 3	100 100 100 100	
9	Terkelolanya anggaran kegiatan secara tertib dan akuntabel lingkup Inspektorat I (%)	100	25 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran lingkup Inspektorat	Kegiatan	3	3	100	

8 Oktober 2024
Inspektur I



Ditandatangani
Secara Elektronik

Teuku Nilwan

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL**

MEMORANDUM
NOMOR 203/ITJ.1/TU.140/X/2024

Yth. : Inspektur Jenderal
Dari : Inspektur I
Hal : Laporan Perkembangan Status Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen pada Mitra Inspektorat I Tahun 2024 (s.d Triwulan III)
Lampiran : Satu Berkas
Tanggal : 8 Oktober 2024

Menindaklanjuti Peraturan Inspektur Jenderal KKP Nomor 37 Tahun 2024 Pasal 55 Ayat (4) yang mengatur bahwa Pelaporan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan (TLRHP) Itjen dilakukan oleh Inspektur dengan menyusun dan menyampaikan laporan status TLRHP sesuai bidang tugas pengawasannya kepada Inspektur Jenderal setiap triwulan dengan tembusan kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal, dengan ini disampaikan Laporan Perkembangan Status Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen pada Mitra Inspektorat I, yaitu Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Direktorat Pengelolaan Kelautan dan Perikanan (Ditjen PKRL) s.d Triwulan III Tahun 2024.

Berdasarkan data rekapitulasi penyelesaian temuan hasil pengawasan Itjen KKP lingkup Setjen dan Ditjen PKRL, Capaian IKU Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat I s.d. Triwulan III Tahun 2024 sebesar 97,07% dari target 80% sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Teuku Nilwan

Tembusan:
Sekretaris Inspektorat Jenderal

Lampiran 1. Perhitungan Capaian IKU: Presentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat I Triwulan III Tahun 2024

No	Eselon I	LHP	Temuan Awal			Tindak Lanjut			Sisa Temuan		Nilai Keuangan (Rp)
			Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan	Temuan	Rekomendasi	
1	Setjen	30	81	130	120.551.753,00	81	130	120.551.753,00	-	-	-
2	Ditjen PKRL	47	163	313	134.492.818,38	152	300	134.492.818,38	11	13	-
	Jumlah	77	240	443	255.044.571,38	233	430	255.044.571,38	11	13	-
Capaian IKU = (430/443) x 100% = 97,07%											

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR 1086/ITJ.0/TU.140/VI/2024

Yth. : Para Inspektur lingkup Inspektorat Jenderal
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Hal : Hasil Rapat Persiapan Pengukuran Kinerja Triwulan II dan Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Inspektorat Jenderal Tahun 2024
Lampiran : -
Tanggal : 24 Juni 2024

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya rapat persiapan pengukuran kinerja Triwulan II dan Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Inspektorat Jenderal (Itjen) Tahun 2024 pada Jumat, 21 Juni 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja lingkup Itjen yang akan dilakukan pengukuran pada Triwulan II Tahun 2024 meliputi 9 Indikator Kinerja pada Level 1, 6 Indikator Kinerja pada Inspektorat I – IV, 8 Indikator Kinerja pada Inspektorat V, dan 11 Indikator Kinerja pada Sekretariat Itjen. Rincian Indikator Kinerja yang akan dilakukan pengukuran pada Triwulan II Tahun 2024 disampaikan pada lampiran.
2. Pengukuran dan Pelaporan Kinerja periode Triwulan II Tahun 2024 dilaksanakan dengan susunan waktu (*Time Line*) sebagai berikut:
 - a. Pengukuran Kinerja: 5 Juli 2024
 - b. Pengisian capaian kinerja pada aplikasi kinerja: selambatnya 12 Juli 2024
 - c. Pengisian realisasi kegiatan dan anggaran pada e-monev Bappenas: selambatnya 12 Juli 2024
 - d. Penyampaian LKj Interim Level II kepada Inspektur Jenderal: selambatnya 19 Juli 2024
 - e. Penyelesaian LKj Interim Level I kepada Menteri KP: selambatnya 29 Juli 2024
3. Data final capaian TLHP masing-masing mitra Inspektorat sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 (30 Juni 2024) disampaikan pada saat Pengukuran Kinerja (tanggal 5 Juli) dan akan disampaikan ke unit Eselon I lain selambatnya pada tanggal 8 Juli 2024. Oleh karena itu, diharapkan agar setiap Inspektorat melakukan pemantauan (*updating data*) TLHP s.d. Triwulan II Tahun 2024 pada akhir Juni 2024 atau sebelum pengukuran kinerja dilaksanakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSR.E, BSSN

4. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Itjen dilaksanakan dengan agenda sebagai berikut:
 - a. Penilaian Mandiri SAKIP level unit Eselon II (Inspektorat dan Sekretariat) dilaksanakan melalui aplikasi pengelolaan kinerja KKP (*kinerjaku.kkp.go.id*) dengan mengacu kepada pedoman Penilaian Mandiri yang telah ditetapkan.
 - b. Penilaian Mandiri SAKIP level unit Eselon II (Inspektorat dan Sekretariat) agar dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja mulai tanggal 24-28 Juni 2024 untuk kemudian dilakukan verifikasi dan finalisasi pada tanggal 2 – 3 Juli 2024 oleh Tim Penilaian Mandiri Level I Itjen beserta Tim Pengawas Internal Itjen.
 - c. Masing-masing pimpinan unit eselon II (Para Inspektur dan Sekretaris Itjen) agar menetapkan pegawai yang melaksanakan Penilaian Mandiri SAKIP dalam Surat Tugas dengan waktu penugasan mulai tanggal 24 – 28 Juni 2024.
 - d. Penyelesaian penyusunan Laporan Hasil Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Itjen beserta tindak lanjutnya dilaksanakan selambatnya pada tanggal 8 Juli 2024.
5. Setiap Inspektorat dan Sekretariat Itjen KKP agar mendokumentasikan dan menyimpan data capaian kinerja dan data SAKIP lainnya pada folder *google drive* yang akan disiapkan oleh Sekretariat Itjen untuk persiapan Evaluasi SAKIP Tahun 2024. Untuk hal ini dapat dilakukan konfirmasi kepada narahubung Sdr. Salsabil Tamsil (HP: 0812-1955-252).

Demikian hasil persiapan pengukuran kinerja dan Penilaian Mandiri SAKIP ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ivy Silfia Irani

Tembusan:
Inspektur Jenderal

Lampiran Memorandum
 Nomor : 1086/ITJ.0/TU.140/VI/2024
 Tanggal : 24 Juni 2024

**Indikator Kinerja Lingkup Itjen yang Dilakukan Pengukuran pada
 Triwulan II Tahun 2024**

Level I

No	IKU	Target Triwulan II
1	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Itjen KKP	78
2	Unit Kerja Itjen yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	94%
3	Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP	88%
4	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	83
5	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP	80%
6	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup KKP	9 Dokumen
7	Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Itjen KKP	89%
8	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Itjen KKP	80%
9	Indeks Persepsi Pegawai KKP Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen	4,16

Level II (Inspektorat I - IV)

No	IKU	Target Triwulan II
1	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat	80%
2	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Inspektorat	2 Dokumen
3	Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Inspektorat	89%
4	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat	80%
5	Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat	100%
6	Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat	100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN

Level II (Inspektorat V)

No	IKU	Target Triwulan II
1	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat V	80%
2	Persentase Jumlah Rekomendasi Pengawasan Tujuan Tertentu yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja KKP	75%
3	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti Lingkup KKP	100%
4	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Inspektorat V	2 Dokumen
5	Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Inspektorat V	89%
6	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat V	80%
7	Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat V	100%
8	Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat V	100%

Level II (Sekretariat Itjen)

No	IKU	Target Triwulan II
1	Indeks Profesionalitas ASN	78
2	Unit Kerja Itjen yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	94
3	Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP	88
4	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal	89
5	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Itjen	80
6	Indeks Persepsi Pegawai KKP Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen	4.16
7	Persentase Pengelolaan Data Hasil Pengawasan Secara Tertib dan Handal	100
8	Persentase Publikasi Informasi dan Kinerja Pengawasan Intern KKP Secara Aktual	100
9	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja Pegawai Itjen secara Tepat Waktu	100
10	Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran lingkup Itjen	100
11	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Persediaan lingkup Itjen	100



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ivy Silfia Irani

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN